



PEMERINTAH
KOTA DUMAI

RPJPD KOTA DUMAI TAHUN 2025-2045

**Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai
Tahun 2025 - 2045**

Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 7 Seri E

**KOTA IDAMAN,
MAJU DAN
BERKELANJUTAN**



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman



WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR II TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pembangunan Kota Dumai dalam kurun waktu 20 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

b. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Pemerintah Daerah menyusun RPJPD sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional;

c. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Fasai 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Dumai.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Riau adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Dumai adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Dumai serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
- (2) RPJPD disusun mempedomani RPJPN, RPJPD Provinsi Riau dan RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.

- (2) Ketentuan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJPD mengacu kepada RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045, RPJPN Tahun 2025-2045 dan RTRW.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat materi visi, misi dan program Walikota.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (4) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup antara lain bencana alam dan non alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan perencanaan Pembangunan Jangka Panjang yang telah ditetapkan menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 September 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 7 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.72.A/2024)

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT dan atas rahmat karunia-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 disusun untuk mengetahui tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan, permasalahan dan isu strategis, visi dan misi daerah serta arah kebijakan dan sasaran pokok perencanaan pembangunan Kota Dumai selama Tahun 2025-2045 atau dalam kurun waktu 20 tahun ke depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD selama periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL,SKM.,MARS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
 BAB I Pendahuluan.....	 I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum.....	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-3
1.3.1 Hubungan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045	I-5
1.3.2 Hubungan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kota Dumai tahun 2019- 2039.	I-5
1.3.3 Hubungan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-7
 BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah	 II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II-1
2.1.1.2 Karakteristik Sumber Daya Alam.....	II-3
2.1.1.3 Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup	II-7
2.1.1.4 Kebencanaan dan Perubahan Iklim	II-9
2.1.2 Aspek Demografi.....	II-12
2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk	II-12
2.1.2.2 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk	II-14
2.1.2.3 Perkembangan Kepadatan Penduduk	II-19
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-21
2.2.1 Aspek Kesejahteraan Ekonomi.....	II-21
2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-21
2.2.1.2 Indeks Gini	II-23
2.2.1.3 Angka Kemiskinan	II-24
2.2.1.4 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	II-30
2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	II-32
2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-33

2.2.1.7	Laju Inflasi.....	II-35
2.2.2	Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya	II-39
2.2.2.1	Cakupan Contraseptive Prevalence Rate (CPR) Per Kecamatan, PUS bukan peserta KB, unmetneed dan PUS yang bukan target Program KB.....	II-39
2.2.2.2	Total Fertility Rate.....	II-41
2.2.2.3	Indeks Pembangunan Gender.....	II-41
2.2.2.4	Indeks Pemberdayaan Gender	II-42
2.2.2.5	Indeks Ketimpangan Gender	II-43
2.2.2.6	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan.....	II-45
2.2.2.7	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Menurut Kota Dumai.....	II-46
2.2.2.8	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Dumai.....	II-46
2.2.2.9	Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau.....	II-47
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-50
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-51
2.3.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	II-51
2.3.1.2	PDRB Per Kapita.....	II-61
2.3.1.3	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB.....	II-65
2.3.1.4	Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB	II-67
2.3.1.5	Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB.....	II-69
2.3.1.6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	II-71
2.3.1.7	Industri Kecil dan Menengah	II-72
2.3.1.8	Rasio Kewirausahaan	II-72
2.3.1.9	Perkembangan Koperasi di Kota Dumai	II-73
2.3.1.10	UMKM di Kota Dumai.....	II-73
2.3.1.11	Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri di Kota Dumai	II-75
2.3.1.12	Keuangan Daerah	II-76
2.3.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM).....	II-78
2.3.2.1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	II-78
2.3.2.2	Angka Harapan Lama Sekolah	II-78
2.3.2.3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	II-78
2.3.2.4	Angka Partisipasi Kasar (APK)	II-79
2.3.2.5	Angka Partisipasi Murni (APM)	II-79
2.3.2.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	II-80
2.3.2.7	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs	II-80
2.3.2.8	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs	II-82
2.3.2.9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	II-83

2.3.2.10	Jumlah Ketersediaan Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-84
2.3.2.11	Persentase Literasi membaca dan Numerasi ...	II-84
2.3.2.12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	II-85
2.3.2.13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki dan Perempuan	II-86
2.3.2.14	Stunting	II-87
2.3.2.15	Prevalensi Balita Gizi Buruk	II-87
2.3.2.16	Prevalensi Balita Gizi Kurang	II-89
2.3.2.17	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran (<i>Infant Mortality Rate</i>)	II-90
2.3.2.18	Angka Kematian Balita	II-91
2.3.2.19	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	II-94
2.3.2.20	Angka Kematian Neo-Natal per 1.000 Kelahiran	II-95
2.3.2.21	Rasio Posyandu per Satuan Balita	II-96
2.3.2.22	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	II-97
2.3.2.23	Rasio Dokter per Satuan Penduduk	II-98
2.3.2.24	Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk	II-99
2.3.2.25	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	II-101
2.3.2.26	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	II-102
2.3.2.27	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	II-103
2.3.2.28	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	II-107
2.3.2.29	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	II-109
2.3.2.30	Cakupan Kunjungan Bayi	II-109
2.3.2.31	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Balita	II-111
2.3.2.32	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	II-112
2.3.2.33	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	II-113
2.3.2.34	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	II-115
2.3.2.35	Cakupan Puskesmas	II-117
2.3.2.36	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	II-119
2.3.2.37	Penyakit Menular dan Tidak Menular	II-121
2.3.2.38	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	II-123
2.3.2.39	Penggunaan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan	II-124
2.3.2.40	Jaminan Kesehatan	II-126
2.3.2.41	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan di Kota Dumai	II-127
2.3.3	Daya Saing Fasilitas /Infrastruktur Wilayah	II-128
2.3.3.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan	II-128
2.3.3.2	Sarana Perhubungan.....	II-130
2.3.3.3	Penggunaan Lahan Sawah Irigasi	II-131
2.3.3.4	Analisis Daya Dukung Air.....	II-131
2.3.3.5	Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum	II-132

	Bersih	
	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan	
2.3.3.6	Rumah Tangga untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll di Kota Dumai.....	II-135
2.3.3.7	Penyediaan Sumber Air Baku	II-135
	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Fasilitas Buang Air Besar	
2.3.3.8	Sendiri atau Bersama dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja.....	II-136
2.3.3.9	Persampahan	II-136
	Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan	
2.3.3.10	Terjangkau	II-138
	Persentase Rumah Dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat	
2.3.3.11	Tinggal	II-139
2.3.3.12	Luas Kawasan Kumuh.....	II-139
2.3.3.13	Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot di Kota Dumai	II-141
2.3.4	Daya Saing Iklim Berinvestasi	II-141
2.3.4.1	Indeks Daya Saing Daerah	II-141
2.3.4.2	Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA	II-142
2.3.4.3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	II-142
2.3.4.4	Lama Proses Perijinan	II-143
2.3.4.5	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	II-144
2.3.4.6	Kontribusi Ekspor Barang Jasa terhadap PDRB	II-146
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-148
2.4.1	Indeks Reformasi Birokrasi	II-148
2.4.2	Indeks Kepuasan Masyarakat.....	II-148
2.4.3	Indeks Inovasi Daerah.....	II-149
2.4.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)....	II-149
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD kota Dumai Tahun 2005-2025	II-150
2.5.1	Capaian Kinerja RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025 Per Periode RPJMD.....	II-151
2.5.2	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Secara Makro	II-153
2.5.3	Kesimpulan	II-154
2.5.4	Rekomendasi.....	II-156
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-156
2.6.1	Tren Demografi	II-157
2.6.1.1	Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk	II-157
2.6.1.2	Distribusi Penduduk	II-158
2.6.1.3	Fertilitas (Kelahiran).....	II-160
2.6.1.4	Mortality (Kematian)	II-160
2.6.1.5	Bonus Demografi	II-161
2.6.1.6	Penduduk Usia Tua (Aging Population).....	II-162
2.6.2	Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana.....	II-163

2.6.2.1	Proyeksi Kebutuhan Rumah-Tempat Tinggal	II-163
2.6.2.2	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih-Air Minum	II-165
2.6.2.3	Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik	II-167
2.6.2.4	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan ...	II-168
2.6.2.5	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan	II-171
2.6.2.6	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	II-174
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-176
2.7.1	Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-177
2.7.2	Arah Kebijakan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau ...	II-182
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	III-1
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
3.2	Isu-isu Strategis	III-13
3.2.1	Isu Strategis Global	III-13
3.2.2	Isu Strategis Nasional	III-13
BAB IV	VISI DAN MISI	IV-1
4.1	Visi Pembangunan	IV-1
4.1.1	Visi Kota Dumai	IV-1
4.1.2	Sasaran Visi	IV-2
4.2	Misi Pembangunan	IV-12
4.2.1	Misi Kota Dumai	IV-12
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
5.1	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	V-1
5.1.1	Transformasi Sosial	V-1
5.1.1.1	Arah Kebijakan Kesehatan	V-2
5.1.1.2	Arah Kebijakan Pendidikan	V-2
5.1.1.3	Arah Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif ..	V-3
5.1.2	Transformasi Ekonomi	V-3
5.1.3	Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan .	V-5
5.1.4	Arah Kebijakan Landasan Transformasi	V-6
5.1.5	Implementasi Transformasi	V-8
5.1.6	Tahapan Arah Kebijakan	V-9
BAB VI	PENUTUP	VI-1
6.1	KAIDAH PELAKSANAAN	VI-1
6.2	PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	VI-2
6.3	MANAJEMEN RISIKO	VI-2

DAFTAR TABEL

BAB. I PENDAHULUAN

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2023	II-1
Tabel 2.2	Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2023	II-2
Tabel 2.3	Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Dumai Tahun 2019-2039	II-3
Tabel 2.4	Produktivitas Agrikultur Beserta Kalori yang Dihasilkan.....	II-5
Tabel 2.5	Jumlah Kalori yang Dihasilkan Sektor Peternakan dan Perikanan.....	II-5
Tabel 2.6	Indeks Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2018 – 2023.....	II-6
Tabel 2.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Dumai.....	II-7
Tabel 2.8	Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-8
Tabel 2.9	Indeks Risiko Bencana Kota Dumai Tahun 2015- 2023.....	II-9
Tabel 2.10	Indikator Kependudukan Kota Dumai Tahun 2014- 2023.....	II-12
Tabel 2.11	Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2014-2023.....	II-14
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Dumai tahun 2020 - 2023	II-18
Tabel 2.13	Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Dumai dan Kecamatan Tahun 2014-2023	II-19
Tabel 2.14	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2011-2023	II-22
Tabel 2.15	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010- 2023.....	II-25
Tabel 2.16	Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-31
Tabel 2.17	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai Tahun 2014-2023.....	II-32
Tabel 2.18	Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai Tahun 2010-2023.....	II-34
Tabel 2.19	Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2014-2023.....	II-35
Tabel 2.20	Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai Tahun 2011- 2023.....	II-37
Tabel 2.21	Cakupan <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR), PUS bukan peserta KB, Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2021-2023.....	II-40
Tabel 2.22	Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2023.....	II-41
Tabel 2.23	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Dumai Tahun 2017- 2023.....	II-46
Tabel 2.24	Skor PPH Konsumsi Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-46
Tabel 2.25	Jumlah Organisasi Pemuda dan Kegiatan Kepemudaan di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-47
Tabel 2.26	Data Objek Pemajuan Kebudayaan.....	II-47
Tabel 2.27	Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Milyar) Kota Dumai Tahun 2010-2023.....	II-52
Tabel 2.28	Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2010-2023.....	II-55
Tabel 2.29	Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar) Kota Dumai Tahun 2010-2023.....	II-57
Tabel 2.30	Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Dumai Tahun 2010-2023.....	II-59
Tabel 2.31	Perkembangan Kontribusi PDRB Kota Dumai Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2010-2023	II-60
Tabel 2.32	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Dumai dan PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2010-2023.....	II-63
Tabel 2.33	Perkembangan Ekonomi Wilayah Menurut Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 20112023.....	II-64
Tabel 2.34	Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2010-2023.....	II-66
Tabel 2.35	Pekembangan Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Terhadap	II-68

	PDRB Kota Dumai Tahun 2010-2023.....	
Tabel 2.36	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2019-2023.....	II-69
Tabel 2.37	Perkembangan Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2010-2023	II-70
Tabel 2.38	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-72
Tabel 2.39	Proporsi Industri Kecil dan Menengah di Kota Dumai Tahun 2018-2021	II-72
Tabel 2.40	Rasio Kewirausahaan Kota Dumai Tahun 2019 - 2023.....	II-73
Tabel 2.41	Perkembangan Koperasi di Kota Dumai Tahun 2019 – 2023.....	II-73
Tabel 2.42	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2023	II-74
Tabel 2.43	Rekapitulasi Data Sektor Pelaku UMKM Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2023	II-74
Tabel 2.44	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-77
Tabel 2.45	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2023	II-78
Tabel 2.46	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Dumai 2010-2023	II-78
Tabel 2.47	Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-79
Tabel 2.48	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Dumai 2016-2023	II-79
Tabel 2.49	Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2016-2023	II-80
Tabel 2.50	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-80
Tabel 2.51	Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2022	II-81
Tabel 2.52	Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-82
Tabel 2.53	Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-83
Tabel 2.54	Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Dumai Tahun 2021 – 2023	II-83
Tabel 2.55	Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2022 – 2023	II-84
Tabel 2.56	Persentase Literasi Membaca dan Numerasi	II-84
Tabel 2.57	Indeks Pembangunan Literasi Kota Dumai Tahun 2022-2023	II-86
Tabel 2.58	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan berdasarkan Kabupaten/Kota di Kota Dumai Tahun 2021-2023.....	II-86
Tabel 2.59	Prevalensi Stunting Kota Dumai Tahun 2018-2023	II-87
Tabel 2.60	Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-88
Tabel 2.61	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Kota Dumai Tahun 2015-2022	II-90
Tabel 2.62	Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-91
Tabel 2.63	Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2015-2023.....	II-91
Tabel 2.64	Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-93
Tabel 2.65	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2015-2023	II-94
Tabel 2.66	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-95
Tabel 2.67	Perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2015-2023.....	II-96
Tabel 2.68	Perkembangan Rasio Posyandu Kota Dumai Tahun 2015-2023.....	II-97
Tabel 2.69	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2014-2023	II-98
Tabel 2.70	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2023	II-98
Tabel 2.71	Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2014 - 2023	II-99
Tabel 2.72	Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015-2023	II-101
Tabel 2.73	Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2023	II-101

Tabel 2.74	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-106
Tabel 2.75	Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-107
Tabel 2.76	Penangan Tuberkulosis Kota Dumai Tahun 2014 – 2023	II-108
Tabel 2.77	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-109
Tabel 2.78	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-110
Tabel 2.79	Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-111
Tabel 2.80	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-113
Tabel 2.81	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017 – 2023	II-115
Tabel 2.82	Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-116
Tabel 2.83	Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2023	II-117
Tabel 2.84	Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-118
Tabel 2.85	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-118
Tabel 2.86	Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2023	II-120
Tabel 2.87	Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2023	II-121
Tabel 2.88	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai 2017-2023	II-128
Tabel 2.89	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-128
Tabel 2.90	Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2021-2023	II-129
Tabel 2.91	Jumlah Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Terminal Bus Tahun 2017-2023	II-130
Tabel 2.92	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-130
Tabel 2.93	Penggunaan Lahan Sawah Irigasi di Kota Dumai	II-131
Tabel 2.94	Daya Dukung Air per Kecamatan di Kota Dumai	II-132
Tabel 2.95	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Kota Dumai Tahun 2021-2023	II-133
Tabel 2.96	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Layak Jaringan Perpipaan di Perkotaan Tahun 2018-2023	II-134
Tabel 2.97	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama di Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-135
Tabel 2.98	Capaian Sasaran Sanitasi Kota Dumai Tahun 2021-2023	II-136
Tabel 2.99	Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2021-2023	II-136
Tabel 2.100	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-137
Tabel 2. 101	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2015-2023	II-138
Tabel 2. 102	Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-138
Tabel 2. 103	Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal	II-139
Tabel 2. 104	Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2015-2023	II-139
Tabel 2. 105	Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai Tahun 2023	II-140
Tabel 2. 106	Data Low Signal and Blank Spot di Kota Dumai Tahun 2022-2023	II-141
Tabel 2. 107	Indeks Daya Saing Daerah di Kota Dumai Tahun 2022-2023	II-141
Tabel 2. 108	Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023	II-142
Tabel 2. 109	Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2017-2023	II-142
Tabel 2. 110	Lama Proses Perijinan di Kota Dumai Tahun 2023	II-143
Tabel 2. 111	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2010-2023	II-145
Tabel 2. 112	Kontribusi Ekspor Barang Jasa terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2010-2023	II-147
Tabel 2. 113	Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2023	II-148
Tabel 2. 114	Perkembangan Index Kepuasan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-149
Tabel 2. 115	Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kota Dumai Tahun 2022-2023	II-149
Tabel 2. 116	Capaian Indeks SPBE di Kota Dumai Tahun 2018-2023	II-150
Tabel 2. 117	Perkembangan Capaian Kinerja Misi 1 Di Kota Dumai Akhir Periode	II-151

Tabel 2. 118	RPJMD tahun 2010, 2015, 2021 dan Periode RPJMD Tahun Berjalan Perkembangan Capaian Kinerja Misi 2 Di Kota Dumai Akhir Periode RPJMD tahun 2010, 2015, 2021 dan Periode RPJMD Tahun Berjalan	II-152
Tabel 2. 119	Perkembangan Capaian Kinerja Misi 3 Di Kota Dumai Akhir Periode RPJMD tahun 2015, 2021 dan Periode RPJMD Tahun Berjalan	II-152
Tabel 2. 120	Perkembangan Capaian Kinerja Misi 4 Di Kota Dumai Akhir Periode RPJMD tahun 2010, 2015, 2021 dan Periode RPJMD Tahun Berjalan 2023	II-153
Tabel 2. 121	Perkembangan Capaian Kinerja Misi 5 Di Kota Dumai Akhir Periode RPJMD tahun 2010, 2015, 2021 dan Periode RPJMD Tahun Berjalan 2023	II-153
Tabel 2. 122	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Dumai Tahun 2005- 2023	II-153
Tabel 2. 123	Proyeksi Kependudukan Kota Dumai Tahun 2025-2045	II-157
Tabel 2. 124	Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai	II-158
Tabel 2. 125	Proyeksi Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur Kota Dumai Tahun 2025-2045	II-159
Tabel 2. 126	Total Fertility Rate (TFR) Kota Dumai	II-160
Tabel 2. 127	<i>Infant Mortality Rate</i> (IMR) Kota Dumai	II-161
Tabel 2. 128	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur Belum Produktif, Umur Produktif dan Tidak Produktif serta Rasio Ketergantungan Kota Dumai Tahun 2025- 2045	II-161
Tabel 2. 129	Proporsi Jumlah Penduduk Usia Tua Terhadap Jumlah Penduduk	II-162
Tabel 2. 130	Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Dumai Tahun 2025-2045	II-165
Tabel 2. 131	Proyeksi Kebutuhan Rumah Per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2025- 2045	II-165
Tabel 2. 132	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Dumai Tahun 2025-2045	II-166
Tabel 2. 133	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2025-2045	II-167
Tabel 2. 134	Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Kota Dumai Tahun 2025-2045	II-168
Tabel 2. 135	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Dumai Tahun 2025- 2045	II-169
Tabel 2. 136	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2025-2045	II-170
Tabel 2. 137	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kota Dumai Tahun 2025-2045	II-173
Tabel 2. 138	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2025-2045	II-173
Tabel 2. 139	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2025-2045	II-175
Tabel 2. 140	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2025-2045	II-175
Tabel 2. 141	Arahan Kebijakan Kawasan Industri Selinsing	II-180

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB. IV VISI DAN MISI

Tabel 4. 1	Indikator 5 Sasaran Visi	IV-2

BAB. V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Tabel 5. 1	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai Tahun 2025- 2045	V-12
Tabel 5. 2	Sasaran Pokok dan Indikator RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045	V-39
Tabel 5. 3	Sasaran Pokok	V-59

BAB. VI PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

BAB. I PENDAHULUAN

Gambar 1.1	Diagram Keterkaitan Antara Dokumen	I-4

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Dumai	II-2
Gambar 2.2	Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai	II-8
Gambar 2.3	Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai	II-10
Gambar 2.4	Peta Rawan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Kota Dumai	II-11
Gambar 2.5	Peta Rawan Bahaya Kegagalan Teknologi	II-12
Gambar 2.6	Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Dumai, 2014-2023 ..	II-15
Gambar 2.7	Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2023	II-16
Gambar 2.8	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai 2011-2023	II-21
Gambar 2.9	Perkembangan Indeks Gini Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2010-2023.....	II-23
Gambar 2.10	Perkembangan Tingkat Kemiskinan (P0) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2010-2023.....	II-26
Gambar 2.11	Perkembangan Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2023.....	II-28
Gambar 2.12	Perkembangan Indek Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2023	II-29
Gambar 2.13	Perkembangan Garis Kemiskinan (P3) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2023.....	II-30
Gambar 2.14	Perkembangan Inflasi Per Sektor dengan Migas Kota Dumai Tahun 2023 ..	II-38
Gambar 2.15	Indeks Pembangunan Gender Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-42
Gambar 2.16	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-43
Gambar 2.17	Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Kota Dumai Tahun 2010 dan 2023	II-54
Gambar 2.18	Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Dumai Tahun 2010 dan 2023.....	II-58
Gambar 2.19	Posisi Kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dan Kabupaten Kota terhadap Provinsi Riau Tahun 2023.	II-60
Gambar 2.20	Trend Perkembangan Pendapatan Per Kapita Menurut PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai Tahun 2010-2023.....	II-64
Gambar 2.21	Perkembangan Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2023	II-99
Gambar 2.22	Perkembangan Rasio Tenaga Medis dan Para Medis Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2023.....	II-100
Gambar 2.23	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di RS Kota Dumai 2014-2023	II-102
Gambar 2.24	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-103
Gambar 2.25	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-104
Gambar 2.26	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-108
Gambar 2.27	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-110
Gambar 2.28	Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-111
Gambar 2.29	Cakupan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-112
Gambar 2.30	Cakupan Pelayanan Usia Lanjut di Kota Dumai Tahun 2014-2023	II-114
Gambar 2.31	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Dari Tahun 2014-2023	II-127
Gambar 2.32	Kawasan Pertanian Kota Dumai	II-178
Gambar 2.33	Kawasan Perkebunan Kota Dumai	II-179
Gambar 2.34	Kawasan Perikanan Kota Dumai	II-179
Gambar 2.35	Kawasan Industri Kota Dumai	II-180
Gambar 2.36	Kawasan Pariwisata Kota Dumai	II-181
Gambar 2.37	Kawasan perdagangan dan jasa	II-182
Gambar 2.38	Proyek Strates Nasional yang Mempengaruhi Perkembangan Kota Dumai..	II-183

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB. IV VISI DAN MISI

BAB. V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

BAB. VI PENUTUP

DAFTAR GRAFIK

BAB. I PENDAHULUAN

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Grafik 2.1	Tren Konsumsi Listrik per Kapita	II-7
Grafik 2.2	Tren Pertumbuhan Jumlah Penduduk	II-13
Grafik 2.3	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2023	II-20
Grafik 2.4	Perkembangan Inflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau, Tahun 2014-2023 ..	II-35
Grafik 2.5	Indeks Ketimpangan Gender Kota Dumai Tahun 2018-2023	II-44
Grafik 2.6	Trend Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Dumai Tahun 2015-2022	II-89
Grafik 2.7	Sebaran Pelayanan Air Minum Layak Jaringan Perpipaan Pada Tahun 2023	II-134

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

BAB. IV VISI DAN MISI

BAB. V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

BAB. VI PENUTUP



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman

BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025-2045

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, didalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia dan Konsep Otonomi daerah, maka Pembangunan didaerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan jangka waktu perencanaan. Dokumen tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pembangunan daerah pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berdasarkan pada tujuan Bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Pada saat ini, permasalahan lingkungan yang terjadi semakin kompleks mengiringi semakin meningkatnya berbagai tuntutan kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik pada aras lokal, nasional, bahkan global. Salah satunya terkait dengan terjadinya perubahan iklim (*climate change*) yang menyebabkan banjir, kekeringan, pencemaran udara dan air serta bencana lainnya. Pada akhirnya kondisi ini mendorong munculnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengutamakan kelestarian lingkungan. Berdasarkan hal di atas, maka diperlukan suatu instrumen bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Oleh sebab itu diperlukan kajian mengenai pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengetahui capaian serta isu strategis pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam pembangunan selanjutnya.

Analisis kajian lingkungan hidup yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan arahan bahwa dalam pembangunan daerah seharusnya memperhatikan kondisi lingkungan hidup sehingga terciptanya keselarasan antara pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan penggunaannya. Selain itu, dalam undang-undang tersebut juga mengamanatkan adanya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah agar pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup dapat direalisasikan dengan baik oleh masing-masing daerah perencanaan.

Penyusunan RPJPD Kota Dumai tahun 2025-2045 memperhatikan RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045. Disamping itu, RPJPD Kota Dumai tahun 2025-2045 ini juga disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai dan Dokumen KLHS.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD kota Dumai Tahun 2025-2045, yaitu: Pendekatan Teknokratik; Pendekatan Partisipatif; Pendekatan Politis; Pendekatan Atas-Bawah Dan Bawah-Atas; Pendekatan Holistik-Tematik; Pendekatan Integratif; Dan Pendekatan Spasial.

1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam penyusunan dokumen RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987.

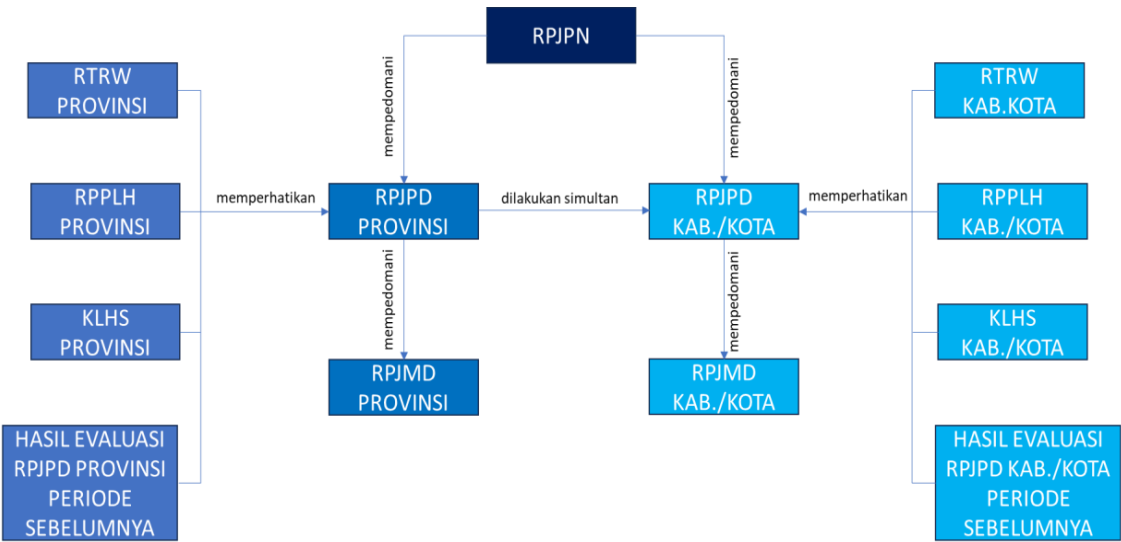
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor...Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2024 Tentang pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor: 000.7.2.1/Bappedalitbang/448 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Penyusunan RPJPD Kota Dumai memperhatikan

pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Penyusunan RPJPD juga memperhatikan RPJPD Provinsi Riau, dan RPJPN dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan untuk mewujudkan hamonisasi pembangunan daerah yang selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 menjadi pedoman penyusunan RPJPD. RPJPD ini akan dijabarkan dalam 4 perodesasi RPJMD Kota Dumai Dimana setiap periode RPJMD dengan rentang waktu selama 5 tahun. Hubungan Selain itu penyusunan dokumen RPJPD juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), KLHS dan Hasil Evaluasi RPJPD 2005-2025. Keterkaitan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Kota Dumai dengan Dokumen lainnya sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1.1 Diagram Keterkaitan Antara Dokumen

Selain dokumen RPJPN, RPJPD dan RTRW, dalam penyusunan RPJPD, Pemerintah Kota Dumai juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, yaitu dokumen Kajian lingkungan hidup strategis dan Rencana penanggulangan kemiskinan daerah.

1.3.1 Hubungan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Sesuai dengan amanat Undang-undang no.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa RPJPD disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Kota Dumai menyusun RPJPD Kota Dumai dengan mempedomani Undang-undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Secara umum RPJPD Kota Dumai akan dituangkan dalam 4 misi dengan 12 arah Pembangunan.

1.3.2 Hubungan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kota Dumai tahun 2019- 2039.

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional dijelaskan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya kedalam dokumen rencana pembangunan. Hal ini menekankan bahwa rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial disetiap sektor, lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat disinergis dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berjangka waktu 20 tahun. Rencana tata ruang adalah hasil suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang wilayah. Sinkronisasi antara RTRW dan RPJPD menjadi krusial karena dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana pembangunan yang bersifat implementatif dan mengakomodir visi dan misi daerah.

1.3.3 Hubungan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian lingkungan hidup strategis di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Rencana pembangunan Daerah Pemerintah Daerah menyusun KLHS RPJPD dalam rangka mewujudkan RPJPD sesuai dengan prinsip berkelanjutan.

Hal ini tentu berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah daerah wajib mewujudkan pencapaian sasaran TPB. Secara umum, maksud pembuatan KLHS RPJPD Kota Dumai adalah untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB termuat dalam Rancangan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045.

1.4 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dokumen RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan selama periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Maksud penyusunan RPJPD adalah untuk memberikan arah dan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Dumai dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah Kebijakan pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis.

Selain itu RPJPD menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Kota Dumai.

Sedangkan tujuan Penyusunan RPJPD Kota Dumai tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data kinerja dan analisis kinerja pembangunan daerah dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Dumai tahun 2025-2045;
2. Memberikan gambaran kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2025-2045;
3. Dasar panduan penyusunan RPJMD Kota Dumai mengikuti tahapan periode RPJMD selama tahun 2025-2045;
4. Sebagai dasar pertimbangan calon Kepala Daerah penyusunan visi, misi dan program unggulan pada tahapan periode RPJMD yang akan dilaksanakan selama RPJPD 2025-2045;
5. Menjaga konsistensi dokumen RPJPD terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 meliputi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, kedudukan RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen RPJPN dan KLHS.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan dokumen RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 dengan dokumen lain, seperti: RPJPN Tahun 2025-2045, RTRW Kota Dumai dan Dokumen KLHS.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Aspek Geografi dan Demografi

- a) Geografi menguraikan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.
- b) Demografi menguraikan karakteristik demografi daerah.

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a) Kesejahteraan Ekonomi menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.
- b) Kesejahteraan Sosial Budaya menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

3. Aspek Daya Saing

- a) Daya Saing Ekonomi Daerah menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.
- b) Daya Saing SDM menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor pegerak perekonomian daerah.
- c) Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah

- d) Daya Saing Iklim Investasi menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.
- 4. Aspek Pelayanan Umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5. Evaluasi Hasil Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005- 2025.
- 6. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
 - a) Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua;
 - b) Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: Rumah/Tempat Tinggal Dan Permukiman; Air Bersih; Energi/Listrik; Persampahan; Kesehatan; Pendidikan; Dan Lainnya (Sesuai Dengan Kondisi Daerah);
- 7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Dan Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN Tahun 2025-2045
 - a) Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah; dan
 - b) Menjelaskan arah kebijakan pembangunan wilayah dan sarana prasarana sesuai wilayah masing-masing berdasarkan Undang- Undang tentang RPJPN 2025-2045.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 1. Permasalahan
- 2. Isu strategis daerah

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

- 1. Visi daerah Tahun 2025-2045

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.
- 2. Misi daerah 2025-2045

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

1. Arah kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

- a) Arah Kebijakan Periode 2025-2029
- b) Arah Kebijakan Periode 2030-2034
- c) Arah Kebijakan Periode 2035-2039
- d) Arah Kebijakan Periode 2040-2045

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025- 2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level impact dan bersifat progresif.

BAB VI PENUTUP



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025-2045

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kota Dumai memuat aspek geografi dan demografi, serta tiga aspek pencapaian kinerja sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah. Ketiga aspek tersebut yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat (ekonomi dan sosial), aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum dan diuraikan sebagai berikut:

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Kota Dumai perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi Karakteristik Lokasi dan Wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografis, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Dumai.

2.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografi, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan di Kota Dumai.

a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Dumai Memiliki wilayah seluas 2.066,72 km² (dua ribu enam puluh enam koma tujuh puluh dua) dengan luas per kecamatan seperti terlihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2023

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (km2)	Presentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan
1	Bukit Kapur	Bukit Nenas	339,26	16,42	7
2	Medang Kampai	Teluk Makmur	163,49	7,91	4
3	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung	1.420,92	68,75	6
4	Dumai Barat	Purnama	36,16	1,75	4
5	Dumai Selatan	Bukit Datuk	66,08	3,2	5
6	Dumai Timur	Teluk Binjai	35,52	1,72	5
7	Dumai Kota	Laksamana	5,29	0,26	5
Total			2.066,72	100	36

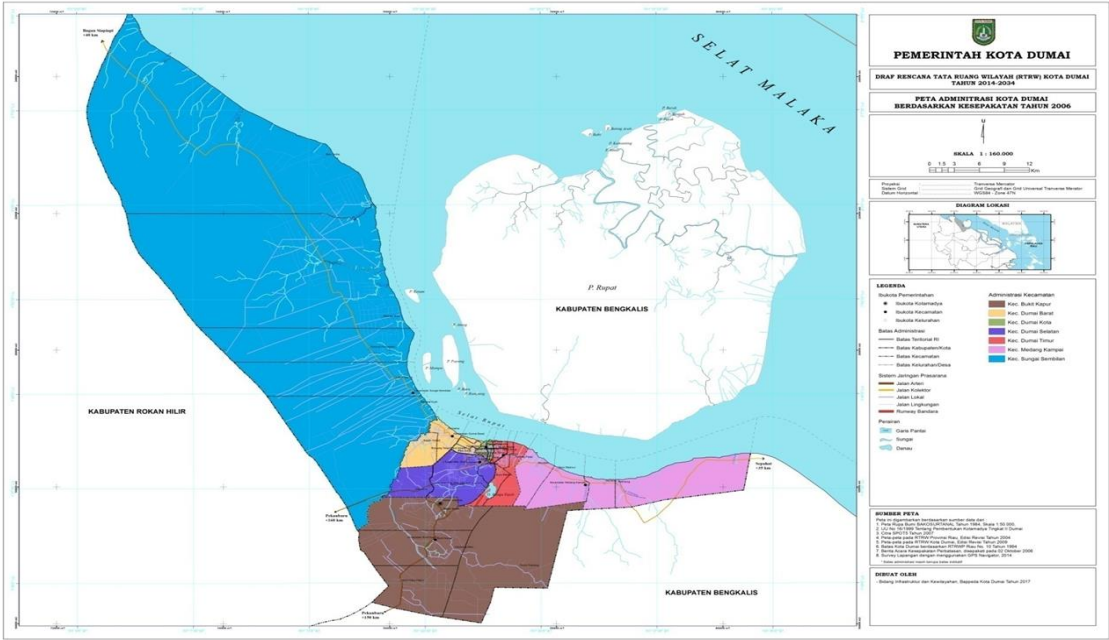
Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, 2024

Secara administratif Kota Dumai seperti yang dapat dilihat pada Tabel di atas berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Selat Rupat
- Sebelah Timur : Kec Bandar Laksmana Kabupaten Bengkalis

Sebelah Selatan : Kec Batin Solapan Kabupaten Bengkalis

Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Bangko, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rimba Melintang dan Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Dumai
Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai No.15 Tahun 2019

Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai sehingga menjadi 5 (lima) Kecamatan. Pada tahun 2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Bukit Kapur dan Kelurahan Sungai Geniot, maka saat ini terdapat 7 (tujuh) Kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) Kelurahan dengan rincian Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2024

No	Wilayah Administrasi		
	Kecamatan	Kelurahan	
1	Bukit Kapur	1	Bukit Nenas
		2	Bagan Besar
		3	Bukit Kayu Kapur
		4	Gurun Panjang
		5	Kampung Baru
		6	Bagan Besar Timur
		7	Bukit Kapur
2	Dumai Barat	1	Bagan Keladi

No	Wilayah Administrasi		
	Kecamatan	Kelurahan	
		2	Pangkalan Sesai
		3	Purnama
		4	Simpang Tetap Darul Ichsan
3	Dumai Kota	1	Bintan
		2	Dumai Kota
		3	Laksamana
		4	Rimba Sekampung
		5	Sukajadi
4	Medang Kampai	1	Guntung
		2	Mundam
		3	Pelintung
		4	Teluk Makmur
5	Dumai Timur	1	Bukit Batrem
		2	Buluh Kasap
		3	Jaya Mukti
		4	Tanjung Palas
		5	Teluk Binjai
6	Dumai Selatan	1	Bukit Datuk
		2	Bukit Timah
		3	Bumi Ayu
		4	Mekar Sari
		5	Ratu Sima
7	Sungai Sembilan	1	Bangsai Aceh
		2	Tanjung Penyembal
		3	Basilam Baru
		4	Batu Teritip
		5	Lubuk Gaung
		6	Sungai Geniot

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Dumai Tahun 2024.

b) Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomis Kota Dumai terletak pada posisi antara 01°26’50” - 02°15’40” Lintang Utara dan 101°0’38” - 101°43’33” Bujur Timur dan memiliki wilayah seluas 2.066,72 km² (dua ribu enam puluh enam koma tujuh puluh dua).

2.1.1.2 Karakteristik Sumber Daya Alam

a) Luas Penggunaan Lahan di Kota Dumai Tahun 2023

Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Kawasan lindung yang terdiri dari kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya dan kawasan perlindungan setempat serta kawasan konservasi. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan industri dan kawasan pemukiman dapat dilihat pada Tabel berikut yang menyajikan Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai tahun 2019-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Dumai Tahun 2019-2039

No	Rencana Peruntukan Kawasan	Luas (ha)	Proporsi (%)
A. Kawasan Lindung			
1	Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya		
	a. Kawasan Hutan Lindung	N/A	N/A
	b. Kawasan Bergambut	N/A	N/A
2	Kawasan Perlindungan Setempat		
	a. Kawasan Taman Wisata Alam	3.567,61	1,73
	b. Sempada Pantai	279,83	0,14
	c. Sempadan Sungai	189,20	0,09

No	Rencana Peruntukan Kawasan	Luas (ha)	Proporsi (%)
	d. Sempadan Danau	32,25	0,02
	e. Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH)	208,95	0,10
3	Kawasan Konservasi		
	a. Suaka Alam	N/A	N/A
	b. Resapan Air	N/A	N/A
B. Kawasan Peruntukan Budidaya			-
1	Kawasan Hutan Produksi		-
	a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	11.851,26	5,74
	b. Kawasan hutan Produksi Tetap	121.234,68	58,72
	c. Kawasan Hutan Produksi dapat di Konversi	18.870,58	9,14
2	Kawasan Pertanian		-
	a. Kawasan Tanaman Pangan	10.368,75	5,02
	b. Kawasan KP2B	155	0,0007
	c. Kawasan Hortikultura		-
	c. Kawasan Perkebunan	3.567,47	1,73
3	Kawasan Perikanan	1.051,04	0,51
4	Kawasan Pertambangan dan Energi		-
	a. Kawasan pertambangan mineral logam	N/A	N/A
	a. Kawasan pertambangan Batubara	N/A	N/A
5	Kawasan Industri	7.602,83	3,68
6	Kawasan Perdagangan Jasa	843,45	0,41
7	kawasan Peruntukan pergudangan	253,32	0,12
8	Kawasan Rencana Bandar Udara	670,28	0,32
9	Kawasan Pelabuhan	419,32	0,20
10	Kawasan Pendidikan	17,06	0,01
11	Kawasan Kesehatan	12,81	0,01
12	Kawasan Olahraga	56,79	0,03
13	Ruang Terbuka Non Hijau	14,78	0,01
14	Kawasan Pariwisata	216,89	0,11
15	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	36,11	0,02
16	Kawasan TPA	10,64	0,01
17	Kawasan Pemukiman	26.045,82	0,13
	a. Kawasan Pemukiman Perkotaan		-
	1. Kawasan Perkantoran	49,93	0,02
	2. Kawasan Perumahan	25.051,00	12,13
	b. Kawasan Pemukiman Perdesaan		-
Total Perntukan Kawasan		206.476,83	100,00
C. Outline			
1	Luas Wilayah	206.673,36	
2	Lainnya	196,53	

Sumber RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039

Dalam pokok bahasan penataan ruang terdapat indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Dari data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif di Kota Dumai adalah seluas 50.844,42 Ha. Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai RTRW adalah 202.199 Ha. Sedangkan luas wilayah banjir adalah 20.653,87. Serta luas wilayah perkotaan Kota Dumai hanya sebesar 44.952,37 Ha atau 23 % dari seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai.

b) Indeks Ketahanan Pangan

Analisis kecukupan pangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kecukupan kebutuhan pangan yang ada di daerah berdasarkan jumlah kalori yang dihasilkan oleh Kota Dumai. Perhitungan jumlah kalori dilakukan dengan menghitung total produksi dikali jumlah kalori terkandung dalam bahan makanan. Jumlah total tersebut lalu dibagi dengan kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh penduduk dalam setahun.

Tabel 2.4
Produktivitas Agrikultur Beserta Kalori yang Dihasilkan

Buah-Buahan	Produksi (kg)	Kalori	Kalori Total
Nangka	245.500	900	220.950.000
Rambutan	2.151.600	690	1.484.604.000
Nenas	45.094.500	503	22.682.533.500
Pepaya	439.200	500	219.600.000
Pisang	1.620.000	887	1.436.940.000
Durian	578.700	1400	810.180.000
Mangga	979.700	589	577.043.300
Melon	4.500	337	1.516.500
Semangka	220.200	304	66.940.800
Jeruk	10.300	470	4.841.000
Salak	320	780	249.600
Alpukat	44.100	800	35.280.000
Belimbing	50.900	306	15.575.400
Jambu Air	153.900	500	76.950.000
Jambu Biji	137.500	600	82.500.000
Manggis	31.800	600	19.080.000
Sawo	138.800	829	115.065.200
Sirsak	185.700	660	122.562.000
Sukun	179.900	1022	183.857.800
Jahe	202.062	796	160.841.352
Petsai	223.500	120	26.820.000
Cabe Merah	478.600	397	190.004.200
Kacang Panjang	289.100	471	136.166.100
Kangkung	297.200	189	56.170.800
Bayam	247.500	231	57.172.500
Beras	152.500	1300	198.250.000
Bawang Merah	61.700	397	24.494.900
CabaiRawi	93.500	170	15.895.000
Timun	118.500	156	18.486.000
Terong	55.800	249	13.894.200
Kentang	118.500	870	103.095.000
Paprika	223.500	300	67.050.000
Kacang Merah	298.100	3000	894.300.000
Jengkol	217.300	210	45.633.000
Melinjo	78.500	3500	274.750.000
Petai	30.600	120	3.672.000
Total			30.442.964.152

Sumber : KLHS RPJPD Kota Dumai

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah kalori yang dihasilkan sektor peternakan dan perikanan.

Tabel 2.5
Jumlah Kalori yang Dihasilkan Sektor Peternakan dan Perikanan

Komoditas	Jumlah (Ekor)	Berat/Kg	Kalori	Kalori Total
Sapi	5.166	130	1760	1.181.980.800
Kerbau	24	140	1460	4.905.600
Kambing	4.336	40	1432	248.366.080
Domba	316	40	2940	37.161.600
Babi	106	45	2421	11.548.170
Ayam Kampung	17.742	1,5	1670	44.443.710
Ayam Pedaging	2.034.000	1,7	1670	5.774.526.000
Itik	3.000	1,7	3370	17.187.000
Total				7.320.118.960
Jenis Perikanan	Produksi (Kg)	Kalori	Kalori Total	
Perikanan Kolam	151.572	500	75.786.000	
Perikanan Tambak	86.410	500	43.205.000	

Jenis Perikanan	Produksi (Kg)	Kalori	Kalori Total
Perikanan Keramba	51.135	500	25.567.500
Perikanan Laut	710.568	700	497.397.600
Total			641.956.100

Sumber : KLHS RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045

Berdasarkan perhitungan tabel di atas, Kota Dumai menghasilkan kalori total sebesar 38.405.039.212 kalori. Sedangkan kebutuhan kalori penduduk Dumai dengan asumsi 1700 kal/hari adalah 205.901.756.000 kalori. Sehingga masih terdapat banyak kekurangan kalori karena ketersediaan kalori lokal hanya mencakup 18,65% dari total kebutuhan penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kota Dumai memperoleh bahan pangan dari daerah lain.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Berikut disajikan Indeks Ketahanan Pangan Kota Dumai tahun 2018-2023.

Tabel 2.6
Indeks Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2018 – 2023

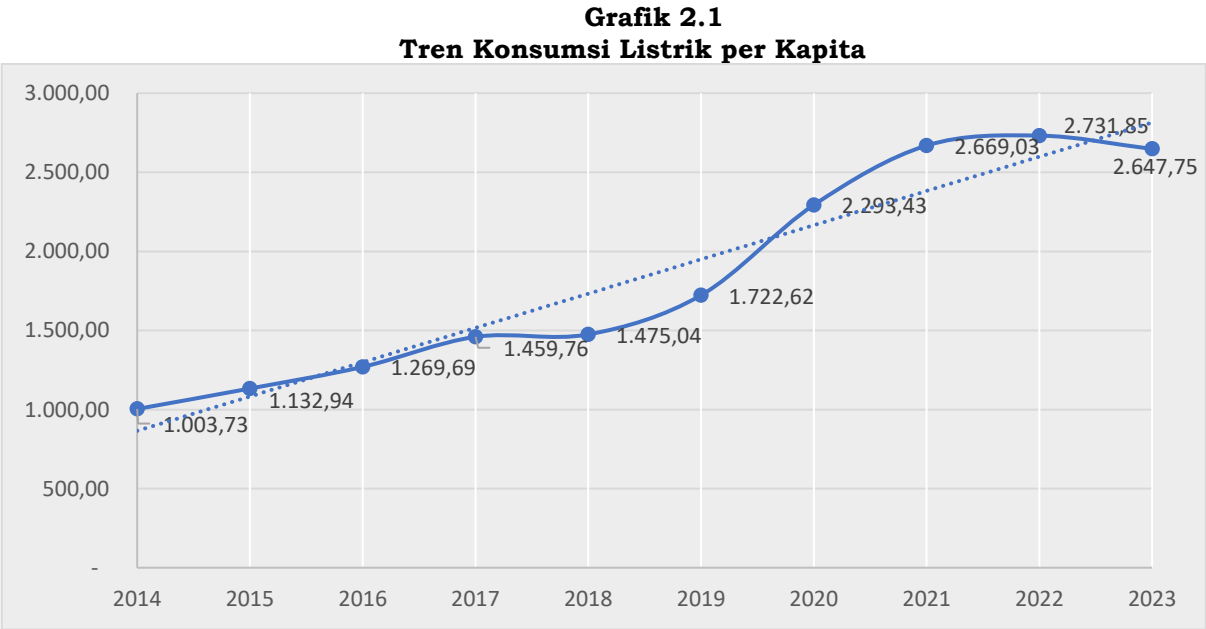
Uraian	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	
Kota Dumai	63,67	69,95	68,15	78,65	72,63	78,61	4,31
Provinsi Riau	-	63,67	64,12	66,84	67,59	68,68	1,91

Sumber : Badan Pangan Nasional 2024
*Angka sementara

Berdasarkan tabel diatas Indeks Ketahanan Pangan Kota Dumai cenderung mengalami peningkatan yaitu sebesar 4,31%. Ketersediaan pangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan menyebabkan ketidakstabilan bagi suatu negara atau daerah, baik secara ekonomi maupun politis, sehingga ketahanan pangan merupakan suatu hal yang wajib menjadi perhatian pemerintah daerah.

c) Konsumsi Listrik Kota Dumai

Selama periode tahun 2014-2023 tren konsumsi listrik di Kota Dumai terus meningkat dengan pertumbuhan rata-rata selama kurun waktu tersebut sebesar 11,38%. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kota Dumai, data diolah

2.1.1.3 Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan jumlah penduduk berdampak kepada peningkatan laju pembangunan di berbagai sektor. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang terjadi di beberapa wilayah. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber daya lingkungan baik secara kuantitas maupun kualitas. Salah satu parameter untuk melihat kondisi kualitas lingkungan hidup di suatu daerah adalah IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup). IKLH merupakan indeks yang diperoleh dari berbagai parameter kualitas lingkungan, yaitu kualitas air, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Sumber data IKLH Kota Dumai diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Dumai masih belum memiliki data IKLH yang lengkap karena keterbatasan pengolahan data, sehingga hanya di tahun 2022 saja yang representatif. Pada tahun 2022 IKLH di Kota Dumai adalah 68,82 dan berada di kategori sedang. Untuk mencapai kategori baik, diperlukan nilai sebesar >70, sehingga diharapkan pada tahun mendatang IKLH tersebut dapat tercapai. Data IKLH di Kota Dumai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Dumai

Kota Dumai	IKA	IKU	IKL	IKLH
2020	-	-	54,25	11,88
2021	-	91,37	54,94	49,04
2022	50	92,66	57,04	68,82

Sumber : KLHS RPJPD Kota Dumai tahun 2025-2045

b) Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

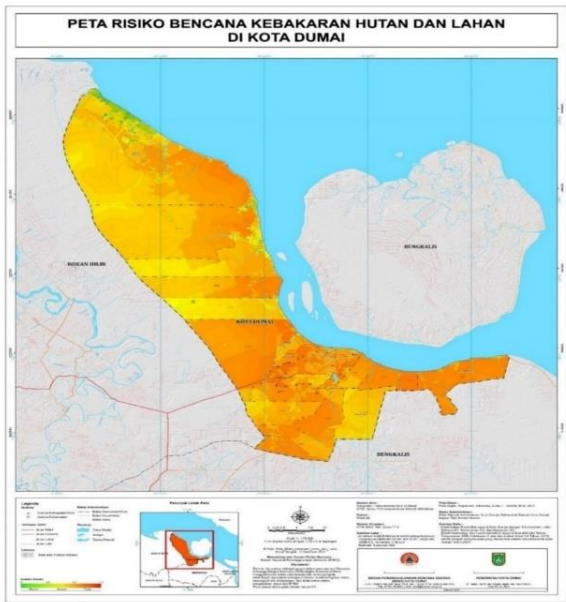
Di Kota Dumai potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya adalah kebakaran hutan dan terutama lahan diwilayah Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Selatan, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai, dan Kecamatan Sungai sembilan. Kebakaran hutan dan lahan tersebut selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian dan perkebunan. Namun kebakaran hutan dan lahan dapat diantisipasi dengan menumbuhkan kewaspadaan pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta masyarakat yang sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan selama periode 2017-2023 terjadi penurunan, dimana bencana kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan dari 49 kejadian tahun 2017 menjadi 40 kejadian pada tahun 2023 seperti yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.8
Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Bulan	TAHUN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Januari	2	-	3	15	2	6	0
2	Februari	2	29	20	23	14	2	1
3	Maret	3	33	24	25	7	5	16
4	April	7	14	8	7	-	5	4
5	Mei	5	-	6	-	1	-	4
6	Juni	3	7	5	2	5	4	4
7	Juli	3	7	9	3	7	6	5
8	Agustus	1	23	14	3	3	1	3
9	September	15	2	14	1	5	-	1
10	Oktober	1	-	-	-	6	2	2
11	November	5	-	3	-	-	-	0
12	Desember	2	-	3	-	-	-	0
Jumlah Kejadian		49	115	109	79	50	31	40

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023



Gambar 2.2 Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai
Sumber: BPBD Kota Dumai, 2024

2.1.1.4 Kebencanaan dan Perubahan Iklim

a) Indeks Risiko Bencana

Resiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Penilaian tingkat resiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan resiko bencana di suatu daerah. Resiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks resiko bencana. Parameter atau komponen yang digunakan dalam Indeks Risiko Bencana, diantaranya - Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. - Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. - Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan. Berdasarkan tabel dibawah ini terlihat bahwa Kota Dumai termasuk pada kategori sedang.

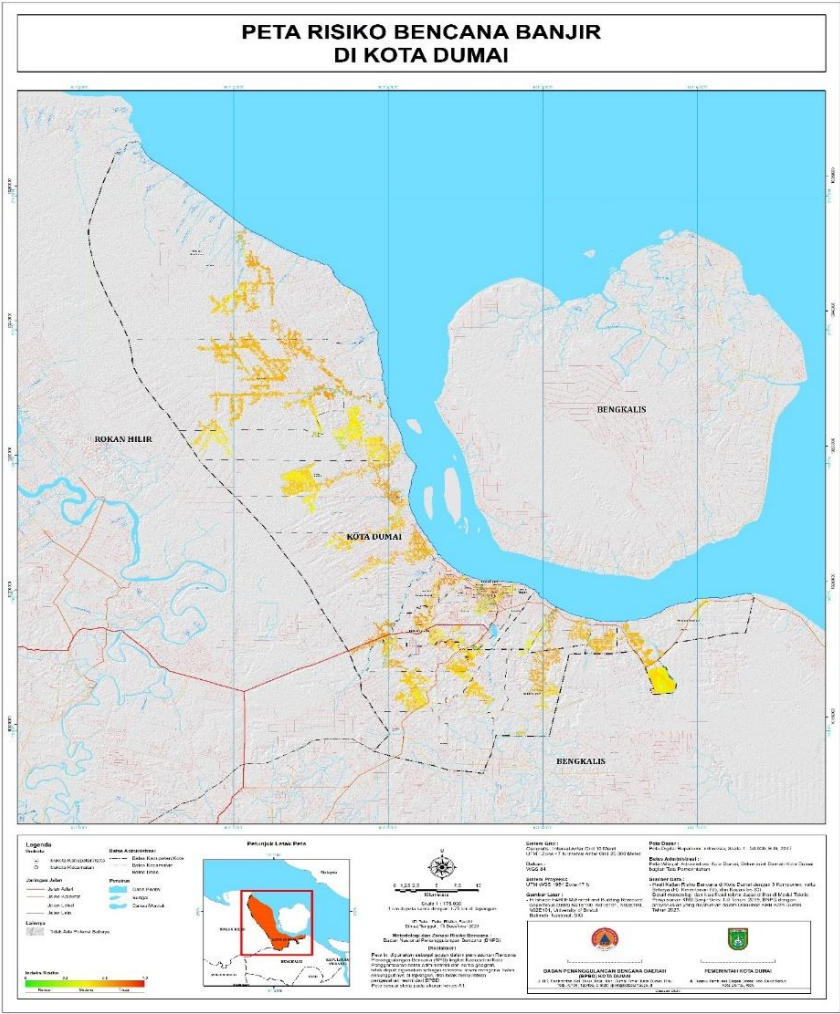
Tabel 2.9
Indeks Risiko Bencana Kota Dumai Tahun 2015-2023

Uraian	Tahun									Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Indeks Risiko Bencana	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	106,60	-0,21

Sumber: BNPB, 2024

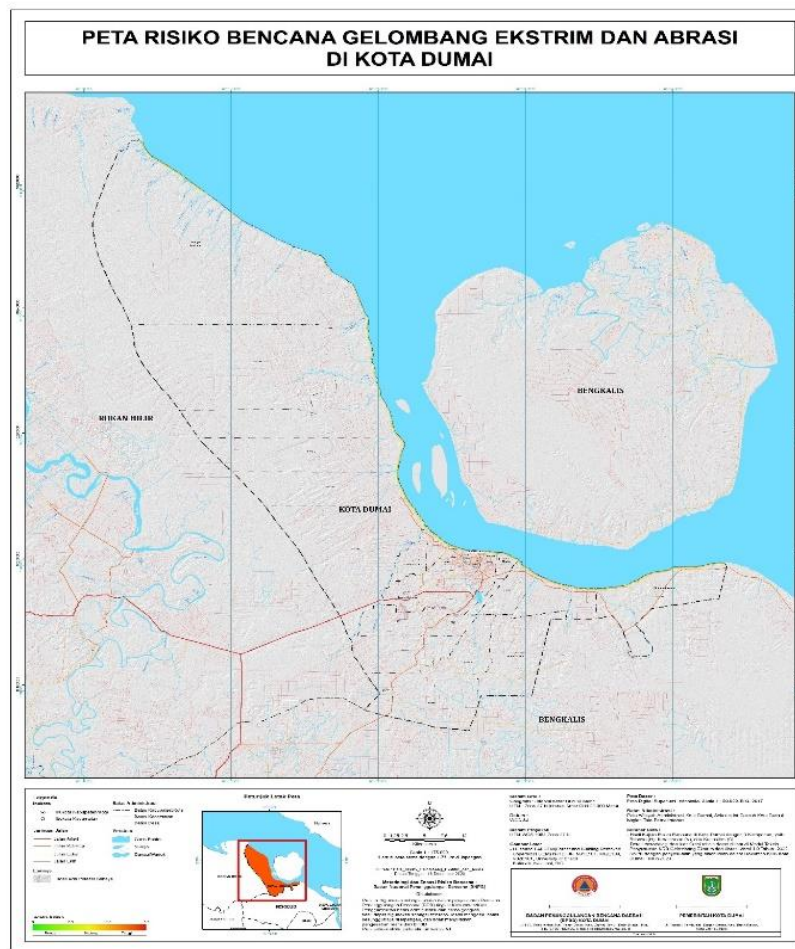
b) Kebencanaan

Banjir masih menjadi persoalan utama sampai saat ini di Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir seperti yang tersaji pada Gambar berikut, maka Kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama.



Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai
Sumber: BPBD Kota Dumai, 2024

Selain banjir, dampak gelombang ekstrim menjadi ancaman tersendiri di Kota Dumai. Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Potensi bahaya gelombang ekstrim dan abrasi dibuat sesuai metode yang ada di dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012. Parameter penyusun bahaya gelombang ekstrim dan abrasi terdiri dari parameter tinggi gelombang, arus laut, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Peta rawan gelombang ekstrim dan abrasi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kota Dumai
 Sumber: BPBD Kota Dumai, 2024

Selain ancaman bencana yang disebabkan oleh alam, kegagalan teknologi merupakan salah satu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam. Kegagalan teknologi dapat diakibatkan karena adanya kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Berdasarkan lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012, parameter penyusun indeks ancaman/potensi bahaya kegagalan teknologi terdiri dari parameter jenis industri dan kapasitas industrinya. Adanya kejadian-kejadian bencana kegagalan teknologi yang pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai melakukan kajian potensi bahaya kegagalan teknologi pada beberapa Kawasan industri yang ada di Kota Dumai, yakni kawasan kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional RU-II. Kegagalan teknologi di Kota Dumai dapat terjadi pada lintasan pipa sepanjang 60 km membelah wilayah kota pada Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Dumai Timur dan kemungkinan terjadi ledakan pada unit *refinery* BBM dengan radius 25 km². Peta rawan Bahaya Kegagalan Teknologi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.5 Peta Rawan Bahaya Kegagalan Teknologi
Sumber: BPBD Kota Dumai, 2024

2.1.2. Aspek Demografi

Secara umum data demografi sangat bermanfaat bagi pemerintah untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan khususnya dalam pemenuhan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penduduk seperti pembangunan rumah, ketersediaan air dan listrik serta kebutuhan lainnya terutama pelayanan umum. Hal ini penting untuk menentukan arah kebijakan sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat. Sedangkan bagi keperluan dunia usaha untuk mengidentifikasikan target pasar barang dan jasa.

2.1.2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Dumai mengalami pertambahan dari 280.109 Jiwa tahun 2014 menjadi 338.064 jiwa pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan penduduk selama periode 2014-2023 sebesar 2,11% per tahun. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki yang tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 2,12% per tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan sebesar 2,11% per tahun selama periode tahun 2014-2023, jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

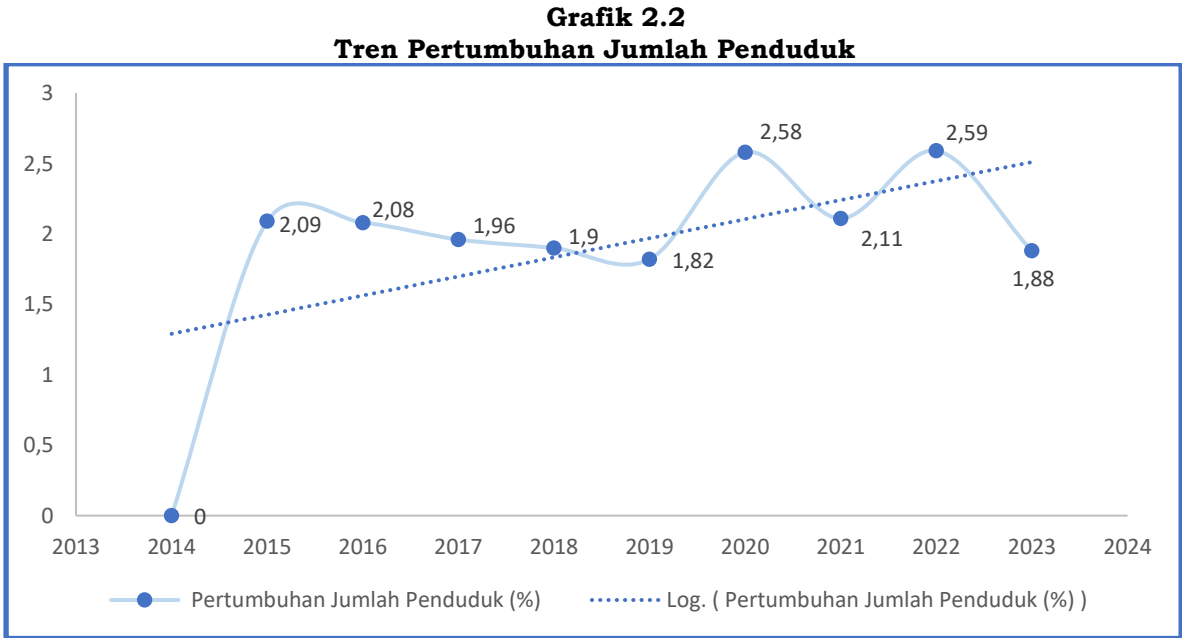
Tabel 2.10
Indikator Kependudukan Kota Dumai Tahun 2014-2023

Indikator Kependudukan	Tahun										Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	2,11

Indikator Kependudukan	Tahun										Rata-Rata Pertumbuhan/Tahun (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Laki-Laki (Jiwa)	143.900	146.792	149.791	152.731	155.638	158.287	162.769	166.049	170.201	173.758	2,12
Perempuan (Jiwa)	136.209	139.175	142.117	144.907	147.654	150.525	154.013	157.403	161.631	164.306	2,11
Sex Rasio	105,65	105,47	105,4	105,4	105,41	105,16	105,69	105,49	105,3	105,75	0,01
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	162,16	165,55	168,99	172,31	175,58	178,77	183,39	187,25	160,56	163,35	0,22
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	-	2,09	2,08	1,96	1,9	1,82	2,58	2,11	2,59	1,88	2,11
Luas Wilayah (Km2)	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.727,38	1.727,38	2.066,72	2.066,72	2.066,72	2.066,72	

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024

Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 2,59% dan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,82% sedangkan pada tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai yaitu sebesar 1,88%.



Sumber: BPS, data diolah

Jika dilihat dari grafik di atas rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Dumai selama kurun waktu 2014-2023 adalah sebesar 2,11% dengan kecenderungan meningkat. Hal ini akan mempengaruhi terhadap ketersediaan hunian layak, ketersediaan layanan Pendidikan dan Kesehatan serta lapangan pekerjaan untuk jangka Panjang. Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten Kota di Provinsi Riau, maka Kota Dumai menempati pertumbuhan penduduk tertinggi kedua setelah Kabupaten Pelalawan selama periode tahun 2014-2023. Selain angka kelahiran penduduk, pertumbuhan penduduk Kota Dumai tersebut disebabkan oleh adanya migrasi dari daerah lain baik antara kabupaten kota juga antar provinsi. Kondisi ini terjadi mengingat Kota Dumai merupakan salah wilayah yang sektor industri pengolahan yang mengalami perkembangan dengan pesat terutama industri pengolahan CPO dan industri lainnya.

2.1.2.2 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk

Dependency Ratio dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau yang sedang berkembang dengan cara membandingkan antara kelompok umur produktif (15-64 tahun) dengan kelompok umur tidak produktif (0-14 dan 64 tahun ke atas). Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Selama periode 2014-2023, perkembangan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami pertumbuhan sebesar 2,48% per tahun dan usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) tumbuh sebesar 8,29% per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio ketergantungan sebesar -1,08% per tahun. Penurunan rasio ketergantungan tersebut yang disebabkan oleh laju pertumbuhan usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan usia tidak produktif. Hal tersebut dapat terjadi karena angka kelahiran atau fertilitas yang terus mengalami penurunan dan angka kematian atau mortalitas menjelang usia tidak produktif yaitu usia 64 tahun ke atas. Nilai *dependency ratio* Kota Dumai masuk kategori sangat tinggi selama periode 2014-2023 sebagaimana terlihat pada Tabel dan Gambar berikut.

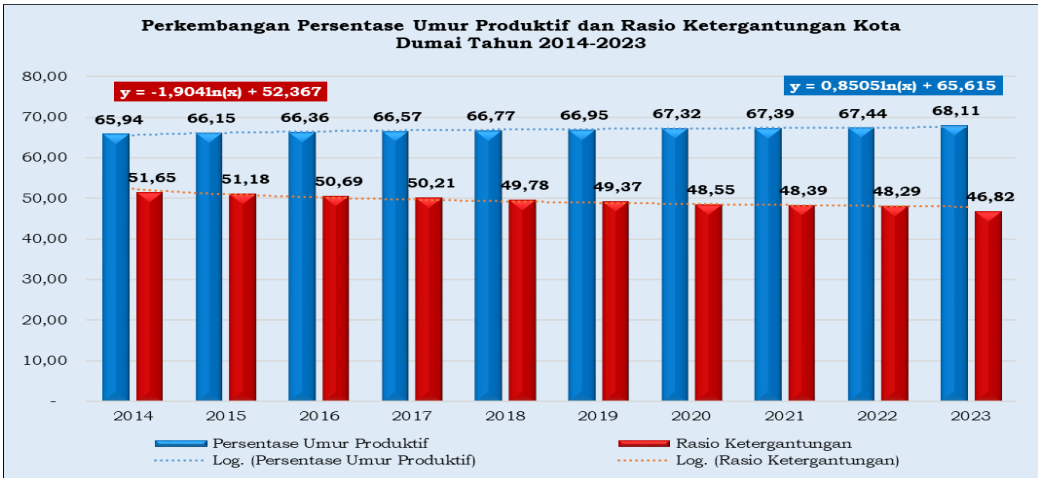
Tabel 2.11
Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2014-2023

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk										Pertumbuhan /Tahun (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	0-4	33.579	33.727	33.893	33.996	34.063	34.085	33.966	34.249	34.761	24.815	-3,30%
2	5 - 9	28.543	29.048	29.533	30.038	30.552	31.037	30.224	30.502	30.872	34.178	2,02%
3	10-14	26.266	26.629	26.932	27.137	27.326	27.494	27.870	28.178	28.682	34.589	3,11%
4	15-19	24.888	24.984	25.221	25.542	25.875	26.231	27.314	27.436	27.716	26.574	0,73%
5	20-24	24.957	24.975	24.894	24.750	24.616	24.554	27.734	28.022	28.376	29.936	2,04%
6	25-29	25.627	26.132	26.646	27.103	27.437	27.614	27.552	27.987	28.588	28.566	1,21%
7	30-34	24.572	24.797	25.136	25.431	25.765	26.157	26.371	26.768	27.265	26.749	0,95%
8	35-39	22.515	22.958	23.228	23.488	23.737	24.017	25.283	25.744	26.377	27.037	2,05%
9	40-44	18.984	19.689	20.415	21.087	21.701	22.183	22.967	23.438	23.975	27.092	4,03%
10	45-49	16.006	16.750	17.521	18.287	19.047	19.786	19.389	20.052	20.799	22.411	3,81%
11	50-54	12.340	13.006	13.662	14.346	15.056	15.779	15.108	15.754	16.507	18.156	4,38%
12	55-59	9.098	9.678	10.299	10.896	11.495	12.108	12.515	13.161	13.851	13.525	4,50%
13	60-64	5.721	6.193	6.687	7.218	7.767	8.315	9.020	9.619	10.318	10.205	6,64%
14	65-69	3.186	3.976	4.213	4.470	4.758	5.078	6.162	6.658	7.145	6.790	8,77%
15	70-74	2.015	1.824	1.933	2.051	2.183	2.330	2.827	3.287	3.841	4.020	7,98%
16	75+	1.812	1.600	1.695	1.799	1.915	2.044	2.480	2.597	2.759	3.421	7,32%
Umur Produktif		184.708	189.162	193.709	198.148	202.496	206.744	213.253	217.981	223.772	230.251	2,48%
Umur Belum Produktif		88.388	89.404	90.358	91.171	91.941	92.616	92.060	92.929	94.315	93.582	0,64%
Umur Tidak Produktif		7.013	7.401	7.841	8.319	8.855	9.452	11.469	12.542	13.745	14.231	8,18%
Persentase Umur Produktif		65,94	66,15	66,36	66,57	66,77	66,95	67,32	67,39	67,44	68,11	0,36%
Rasio Ketergantungan		51,65	51,18	50,69	50,21	49,78	49,37	48,55	48,39	48,29	46,82	-1,08%
Jumlah Penduduk		280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	2,11%

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

Tingginya *dependency ratio* (rasio ketergantungan) tersebut akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan dunia usaha dalam meningkatkan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat terutama kelompok umur produktif. Upaya yang dapat dilakukan dengan mengimbanginya tingginya *dependency ratio* adalah dengan kenaikan UMR/UMK. UMK Kota Dumai tahun 2023 **Rp 3.723.278,98** atau mengalami kenaikan sekitar 9,05 persen dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 3.414.160,86. Ini berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 309.118,12.



Gambar 2.6 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Dumai 2014-2023
Sumber : BPS Dumai Dalam Angka 2024, data diolah

Dampak dari tingginya rasio ketergantungan antara penduduk antara lain:

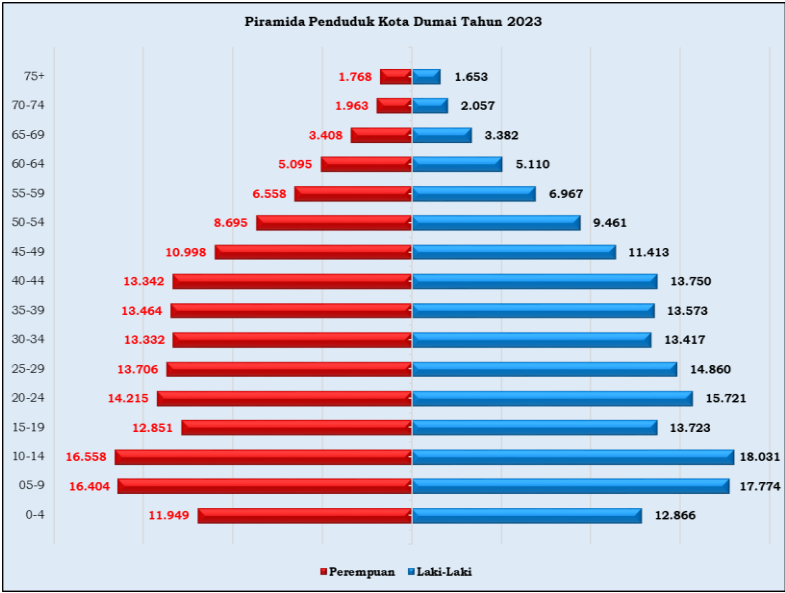
- 1) Penerimaan pajak yang lebih rendah. Pensiunan membayar pajak penghasilan lebih rendah. Oleh karena itu, penduduk usia kerja memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membayar pajak; belanja pemerintah lebih tinggi. Pemerintah berkomitmen untuk membayar pensiun negara dan manfaat terkait seperti jaminan pendapatan minimum. Ada juga tuntutan yang lebih besar untuk pengeluaran tidak langsung untuk pensiunan. Orang di atas 65 tahun lebih mungkin memerlukan perawatan kesehatan. Oleh karena itu, ada tuntutan yang lebih besar ditempatkan pada pengeluaran pemerintah oleh kenaikan rasio ketergantungan;
- 2) Potensi kenaikan pajak yang lebih tinggi. Tekanan pada keuangan pemerintah dapat menyebabkan tarif pajak yang lebih tinggi pada penduduk pekerja atau produktif, yang dapat menciptakan disinsentif untuk bekerja dan mengurangi pendapatan. Pemerintah mungkin terpaksa menggunakan lebih banyak pendapatan dari pajak tidak langsung atau pajak kekayaan.
- 3) Dana pensiun yang lebih rendah. Pertambahan pensiunan juga meningkatnya kebutuhan dana pensiun. Juga dapat menyebabkan krisis kredit dan suku bunga rendah. Tekanan untuk menaikkan usia pensiun. Karena kenaikan biaya pensiun, ada tekanan untuk menaikkan usia pensiun baik di sektor swasta maupun sektor publik.
- 4) Daya saing, jika suatu perekonomian mengalami peningkatan rasio ketergantungan yang lebih cepat dari rata-rata global, hal tersebut dapat memengaruhi daya saing internasional dan menyebabkan produktivitas yang lebih rendah dan ini akan menyebabkan penurunan daya saing daerah.

Struktur umur penduduk Kota Dumai menurut kelompok umur dan jenis kelamin

sangat penting dilakukan analisis karena hal ini berkaitan dengan distribusi terhadap penduduk dalam usia kerja yang berimplikasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi karena jika penduduk usia kerja bertambah maka juga akan mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perekonomian serta akan mengurangi tingkat ketergantungan pada orang tua. Pada tahun 2023 jumlah penduduk yang berumur antara 65 tahun hingga di atas 75 tahun sebanyak 14.231 atau 4,21%. Sedangkan Bila umur dikelompokkan menjadi kelompok umur tidak produktif (0–14 tahun dan 65–75+) dan produktif (15–64 tahun) pada tahun 2023. Maka rasio antara jumlah penduduk produktif sebesar 68,11% atau sebanyak 230.251 jiwa dan sebesar 31,89% atau sebanyak 107.813 jiwa tidak produktif. Kelompok umur tidak produktif (belum produktif) yaitu kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 94.315 jiwa atau 28,42% dan kelompok umur tidak produktif 65-75+ sebanyak 14.231 jiwa atau sebesar 4,21%.

Tingginya proporsi umur penduduk belum produktif atau usia dini dan usia sekolah sangat memerlukan perhatian dari aspek peningkatan akses kesehatan dan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan. Selain itu pada kelompok umur tidak perodukif 65-75+ harus menjadi perhatian terutama terkait dengan peningkatan akses kesehatan melalui penyediaan pangan yang berkualitas dan pelayanan kesehatan untuk berobat. Kurangnya kedua akses tersebut akan mempengaruhi penurunan kondisi kesehatan yang menyebabkan penurunan angka harapan hidup.

Oleh karena itu harus tetap memperhatikan kelompok umur ini karena lebih rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana dan perbaikan pelayanan kesehatan dan penyediaan pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Struktur penduduk menurut kelompok umur Kota Dumai tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.7 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2023
Sumber: BPS, Dumai Dalam Angka, 2024

Adapun lapangan kerja utama penduduk usia produktif dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Dumai tahun 2020 - 2023

Lapangan Pekerjaan Utama	2020			2021			2022			2023		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian	13.852	5.779	19.631	14.349	5.257	19.606	18.182	4.066	22.248	20.872	6.449	27.321
Manufaktur	24.759	4.357	29.116	26.602	4.898	31.500	28.683	7.230	35.913	34.483	7.288	41.771
Jasa	46.533	39.301	85.834	43.162	41.068	84.230	44.659	37.059	81.718	42.159	37.459	79.618
Total	85.144	49.437	134.581	84.113	51.223	135.336	91.524	48.355	139.879	97.514	51.196	148.710

Sumber: BPS, Dumai Dalam Angka, 2024

2.1.2.3 Perkembangan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas lahan. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (*population density*) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas (km²). Perkembangan kepadatan penduduk Kota Dumai selama periode tahun 2014-2022 menunjukkan terjadinya peningkatan dari 136 jiwa/km² tahun 2014 bertambah menjadi 164 jiwa/km² pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 2,11% per tahun.

Pada dasarnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan penduduk di suatu wilayah relatif sama dengan faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk di suatu wilayah. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah: Faktor fisik; Faktor iklim; Faktor tanah; Faktor vegetasi; Faktor suplai air; Faktor kebencanaan & penyakit; Faktor komunikasi; Faktor ekonomi; Faktor politis dan Faktor sumber daya alam. Berikut Tabel yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Dumai menurut Kecamatan selama periode 2014-2023.

Tabel 2.13
Perkembangan Kepadatan Penduduk Kota Dumai dan Kecamatan Tahun 2014-2023

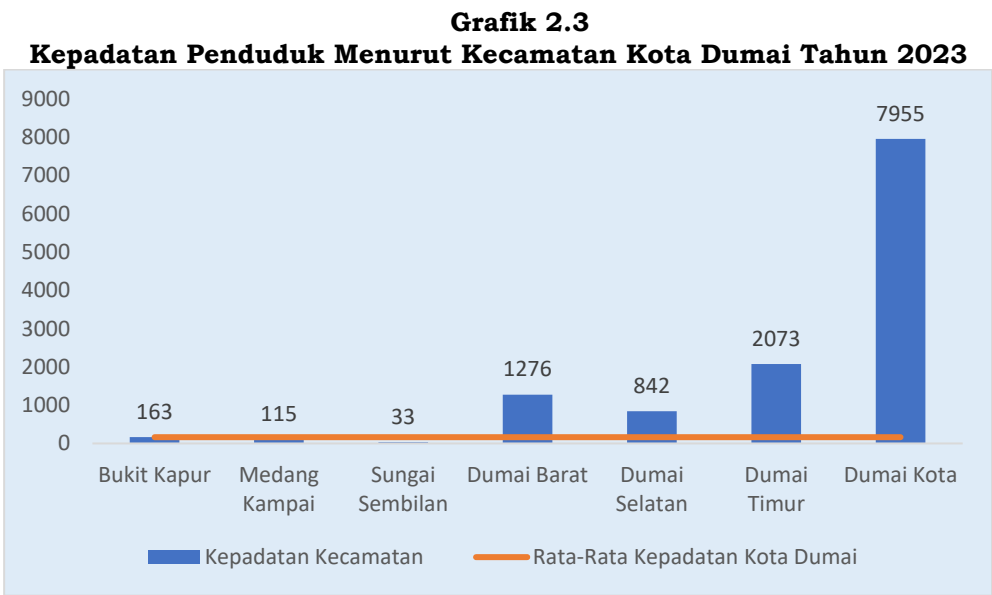
Kecamatan	Luas wilayah (Km)	Perkembangan Kepadatan Penduduk										Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bukit Kapur	339,26	125	128	131	134	137	140	152	156	161	163	2,97%
Medang Kampai	163,49	69	70	72	73	74	76	103	108	113	115	5,91%
Sungai Sembilan	1.420,92	21	22	22	23	23	24	29	31	32	33	4,82%
Dumai Barat	36,16	1098	1122	1147	1172	1196	1220	1225	1248	1278	1276	1,69%
Dumai Selatan	66,08	766	781	797	812	826	840	799	808	821	842	1,06%
Dumai Timur	35,52	1702	1737	1772	1805	1838	1870	1941	1980	2030	2073	2,22%
Dumai Kota	5,29	8557	8708	8855	8992	9123	9246	7689	7674	7695	7955	-0,81%
Kota Dumai	2.066,72	136	138	141	144	147	149	153	157	161	164	2,11%

Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023, data diolah

Pada tahun 2023, kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Dumai Kota sebanyak 7.955 jiwa/km² hal ini dapat dimaklumi jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi pusat pemukiman, kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai). Hal tersebut memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai. Sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 33 jiwa/km².

Dari 7 Kecamatan yang terdapat di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada tiga Kecamatan dimana kepadatannya di bawah rata-rata Kota Dumai sebanyak 164 jiwa/km² yaitu Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 33 jiwa/km², Kecamatan Bukit Kapur 163 jiwa/km² dan Kecamatan Medang Kampai sebanyak 115 jiwa/km²

sementara empat Kecamatan lainnya dengan kepadatan di atas rata-rata Kota Dumai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik berikut.



Sumber: BPS Dumai Dalam Angka 2024, data diolah

Kepadatan penduduk yang terlalu tinggi cenderung menurunkan kualitas hidup orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena kesempatan kerja dan tempat tinggal yang ada, tidak mampu mengakomodasi jumlah penduduk yang semakin banyak. Sehingga, nantinya ada orang-orang yang tidak bisa mengakses tempat tinggal ataupun lapangan pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa dampak dari kepadatan penduduk yang terlalu tinggi terhadap suatu wilayah.

- 1) Munculnya kawasan-kawasan kumuh (*slum*) dengan tempat tinggal informal serta lingkungan hidup yang tidak layak huni
- 2) Tidak cukupnya lapangan pekerjaan sehingga muncul sektor-sektor informal seperti PKL dan buruh ilegal yang tidak terdokumentasikan dengan baik
- 3) Turunnya kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat
- 4) Turunnya *image* estetik dari sebuah perkotaan jika ada permukiman kumuh
- 5) Terganggunya keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat di wilayah tersebut
- 6) Risiko munculnya penyakit dari lingkungan hidup kawasan kumuh yang tidak bersih
- 7) Munculnya kesenjangan sosial yang tinggi antara orang-orang yang sukses dan orang-orang yang tidak mampu mengakses sarana dan prasarana dasar
- 8) Kurangnya sarana dan prasarana dasar untuk menunjang orang-orang yang sangat banyak (kurang lebarnya jalan, kurang banyaknya kereta, kurang baiknya jaringan fiber optik internet, dsb)

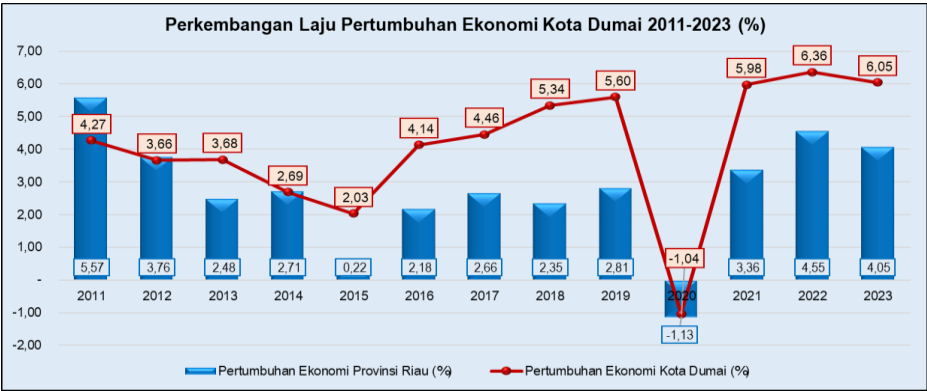
Secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa dampak dari suatu daerah yang penduduknya terlalu padat cenderung negatif. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerataan pembangunan antar wilayah guna untuk mengurangi kepadatan penduduk pada suatu wilayah dan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan *carrying capacity*.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Aspek Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2011-2023 sebagaimana pada Gambar di bawah ini menunjukkan sangat fluktuatif, dimana periode 2011-2015 mengalami trend penurunan, kemudian tahun 2015-2019 trend peningkatan dan tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,04%, namun demikian masih di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan kontraksi sebesar -1,13%. Selanjutnya pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan namun di tahun 2023 kembali mengalami trend penurunan.



Gambar 2.8 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai 2011-2023
Sumber: BPS, 2024

Jika diamati selama periode 2011-2023, hanya pada tahun 2011, 2012 dan 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai yang berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 hingga tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Dumai di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

Selama periode 2011-2023, sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Dumai adalah Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 22,09% per tahun, diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 8,87% per tahun. Sedangkan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terendah dan bahkan cenderung tumbuh negative adalah Pertambangan dan Penggalian. Selanjutnya khusus pada tahun 2020, kontraksi laju pertumbuhan ekonomi sebesar -1,04% disebabkan oleh delapan sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negative. Kedelapan sektor adalah sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh -1,32%; Konstruksi tumbuh -3,02%; Transportasi dan Pergudangan tumbuh -34,64%; Jasa perusahaan tumbuh -21,64%; Jasa lainnya tumbuh -20,03%; Penyediaan Akomodasi dan Makan minum tumbuh -19,49%; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh -10,30%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh -2,16%. Negativenya pertumbuhan delapan sektor tersebut tidak terlepas dari adanya pembatasan mobilitas penduduk yang berdampak pada berkurangnya mobilitas barang dan jasa sehingga mempengaruhi penawaran barang dan jasa oleh produsen dan masyarakat.

Tabel 2.14
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2011-2023

Kategori	Sektoral	Tahun														Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,64	1,93	-0,06	-1,03	1,62	0,1	1,14	3,31	2,77	2,01	4,15	3,97	0,14	1,88	1,69
B	Pertambangan dan Penggalian	2,82	0,49	1,01	0,07	0,9	0,18	-4,04	-4,96	-3,75	2,31	-1,32	0,65	2,06	5,05	-0,10
C	Industri Pengolahan	2,89	5,9	2,7	3,78	6,19	2,92	5,71	5,17	7,51	7,18	3,01	6,56	7,72	5,87	5,40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,21	8,59	6,71	10,37	13,65	9,72	18,16	1,05	3,18	7,29	138,3	26,75	42,88	0,47	22,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,7	1,22	0,96	0,64	1,95	2,65	-0,16	4,55	1,09	6,18	4,05	7,79	8,13	14,71	4,14
F	Konstruksi	9,46	-1,12	3,73	3,02	-4,59	1,85	3,03	5,34	2,58	4,15	-3,02	0,05	4,91	10,15	2,31
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,75	4,45	3,08	2,26	0,95	0,13	2,16	2,84	1,91	2,87	-10,3	9,02	3,33	6,44	2,24
H	Transportasi dan Pergudangan	5,82	5,7	10,94	6,8	9,92	2,02	3,02	4,82	3,85	5,35	-34,64	0,42	9,14	5,97	2,56
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,03	9,04	14,2	8,97	9,2	2,35	2,58	6,3	6,46	3,72	-19,49	19,1	4,57	5,43	5,57
J	Informasi dan Komunikasi	14,64	13,91	17,89	20,87	11,24	7,15	4,13	6,25	5,75	7,21	9,24	4,13	2,83	4,65	8,87
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-5,55	-9,52	36,21	18,44	-39,5	-6,88	0,5	-0,74	2,09	0,11	3,44	4,47	5,03	3,24	1,30
L	Real Estate	5,55	4,66	1,6	4,73	3,75	5,01	1,41	3,43	3,81	5,29	1,63	2,6	5,36	4,07	3,64
M,N	Jasa Perusahaan	8,73	8,45	8,01	6,23	8,5	7,45	3,88	6,54	9,65	7,2	-21,64	0,95	1,89	6,67	4,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,12	3,34	2,6	1,75	0,42	2,02	0,16	0,11	0,29	2,32	-2,16	2,15	9,05	4,45	2,04
P	Jasa Pendidikan	2,41	10,46	4,35	5,51	8,96	5,24	0,55	2,7	3,94	5,62	1,41	2,56	2,18	4,92	4,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,93	3,56	8,6	7,99	2,56	9,96	0,87	5,49	5,56	10,83	14,62	10,33	4,38	7,15	7,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	12,14	10,28	5,54	11,39	11,86	7,81	5,26	7,99	8,61	8,79	-20,03	5,84	13,12	4,96	6,26
Produk Domestik Regional Bruto Dengan Migas		4,52	4,27	3,66	3,68	2,69	2,03	4,14	4,46	5,34	5,6	-1,04	5,98	6,36	6,05	4,09

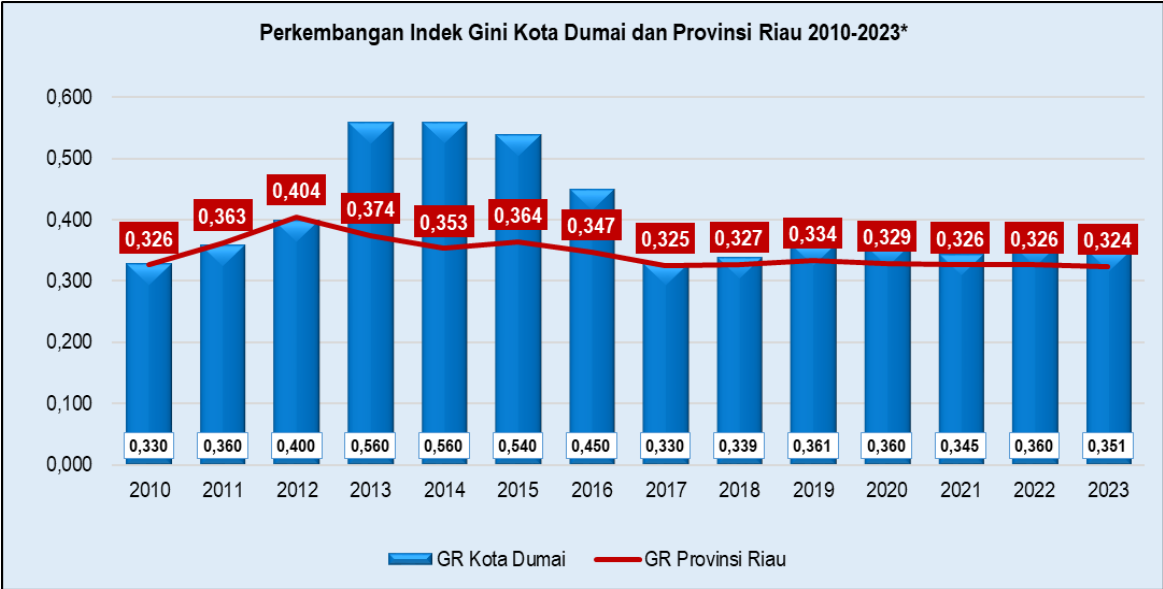
Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2023

2.2.1.2 Indeks Gini

Distribusi Pendapatan adalah ukuran yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya. Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang menunjukkan mengenai penyebaran pembagian pendapatan/kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu.

Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian, penduduk pendapatan riil dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2010-2023, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang: $G > 0,5$ ketimpangan tinggi; $0,35 < G < 0,5$ ketimpangan sedang; $G < 0,35$ ketimpangan ringan.



Gambar 2.9 Perkembangan Indeks Gini Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2010- 2023*
Sumber : BPS, 2024

Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2010-2023, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan sedang. Secara umum selama kurun waktu 2010-2023 tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Dumai semakin kecil seperti yang tersaji pada Gambar diatas.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat adalah kriteria ketimpangan pendapatan versi Bank Dunia, dimana penduduk dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- a) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya < 12% dari keseluruhan pengeluaran
Masuk kategori ketimpangan tinggi.

- b) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya 12%–17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan sedang.
- c) Kelompok 40% termiskin pengeluarannya > 17% dari keseluruhan pengeluaran Masuk kategori ketimpangan tinggi.

Berdasarkan hasil penghitungan ketimpangan distribusi pendapatan Kota Dumai berdasarkan pendapatan kriteria bank dunia, menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Dumai masih termasuk kategori sedang, karena kelompok 40% termiskin pengeluarannya adalah 12,52% dari keseluruhan pengeluaran.

2.2.1.3 Angka Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai karena adanya masih terdapatnya *Gap* pendapatan antara individu masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut.

Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, perkembangan beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan (P0), indek kedalaman kemiskinan (P1), indek keparahan kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan (P4) di Kota Dumai tahun 2010-2023 fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel berikut

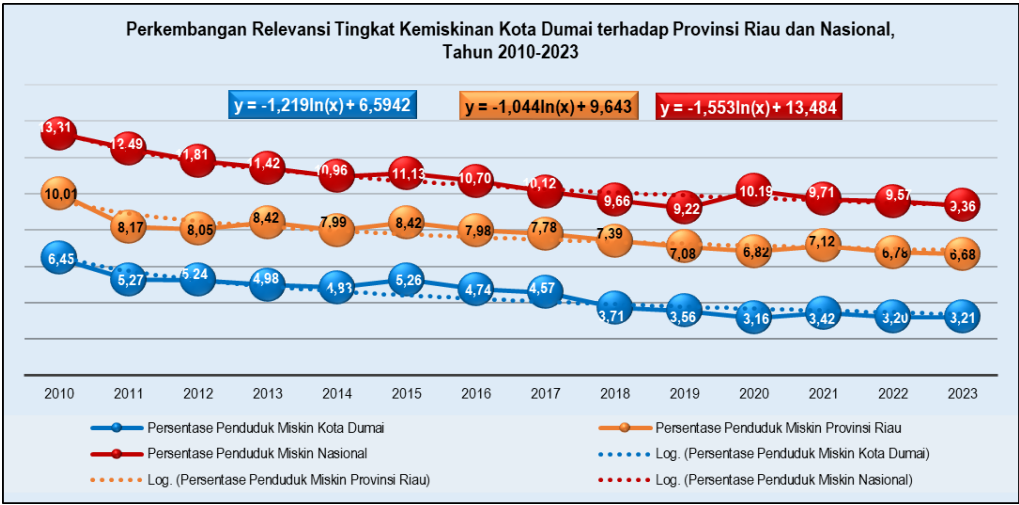
Tabel 2.15
Perkembangan Indikator Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2010-2023

Indikator Kemiskinan	Tahun														Pertumbuhan/Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	16,50	13,97	14,3	13,7	13,62	14,97	13,76	13,53	11,19	10,95	9,88	10,57	10	10,15	-3,67%
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	6,45	5,27	5,23	4,98	4,83	5,26	4,74	4,57	3,71	3,56	3,16	3,42	3,2	3,21	-5,23%
Indikator Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,07	0,57	0,99	0,76	0,38	0,59	0,62	0,84	0,46	0,28	0,31	0,4	0,36	0,36	-8,04%
Indikator Kedalaman Kemiskinan (P2)	0,26	0,13	0,29	0,16	0,06	0,11	0,13	0,25	0,07	0,05	0,05	0,07	0,27	0,06	-10,67%
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	287.975	298.127	311.891	328.158	341.525	353.079	369.624	403.244	418.597	439.152	484.609	509.002	543.182	601.348	5,83%

Sumber: BPS Data Kemiskinan 2010-2023

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Dumai secara signifikan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 tingkat kemiskinan sebesar 6,45%, menurun menjadi 3,21% pada tahun 2023 dengan rata-rata penurunan sebesar -5,23% per tahun. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Riau sebesar 6,68% (BPS 2024).

Jika dilihat dari trend penurunan tingkat kemiskinan Kota Dumai selama periode tersebut lebih cepat dibandingkan penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi Kota Dumai sebesar -1,219% sementara koefisien persamaan regresi Provinsi Riau sebesar -1,044%, dan koefisien persamaan regresi nasional sebesar -1,553%, artinya penurunan tingkat kemiskinan Kota Dumai lebih cepat pengurangannya sebanyak berbanding Provinsi Riau, namun lebih lambat dari nasional, jelasnya lihat pada Gambar di bawah ini.



Gambar 2.10 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (PO) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2010-2023
Sumber: BPS, 2024

Namun jika diperhatikan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi di tahun 2015. Hal ini disebabkan karena belum adanya Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) di Kota Dumai, sehingga program pengentasan kemiskinan di Kota Dumai masih bersifat parsial atau dapat dikatakan belum terpadu antar perangkat daerah yang ada di Kota Dumai. Namun setelah tahun 2015 sudah dilakukan penyusunan SPKD sehingga program penanggulangan kemiskinan lebih terarah. Namun demikian harus lebih focus dan terintegrasi dengan OPD terkait agar upaya penanggulangan kemiskinan lebih optimal untuk mengurangi fluktuasi perkembangan indikator kemiskinan.

Upaya yang lebih kuat itu ialah dengan mengusahakan penajaman penanggulangan kemiskinan melalui penargetan pengurangan angka kemiskinan di wilayah Kecamatan prioritas atau kantong kemiskinan di Kota Dumai. Ini penting untuk memastikan basis wilayah prioritas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan harus berjalan efektif dan efisien melalui kordinasi sektoral terutama pengembangan perekonomian masyarakat pada semua sektor dan sub sektor yang banyak digeluti atau sebagai penopang ekonomi masyarakat. Oleh karena itu tiga

strategi utama yang harus diperhatikan dalam penanggulangan kemiskinan antara lain strategi peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

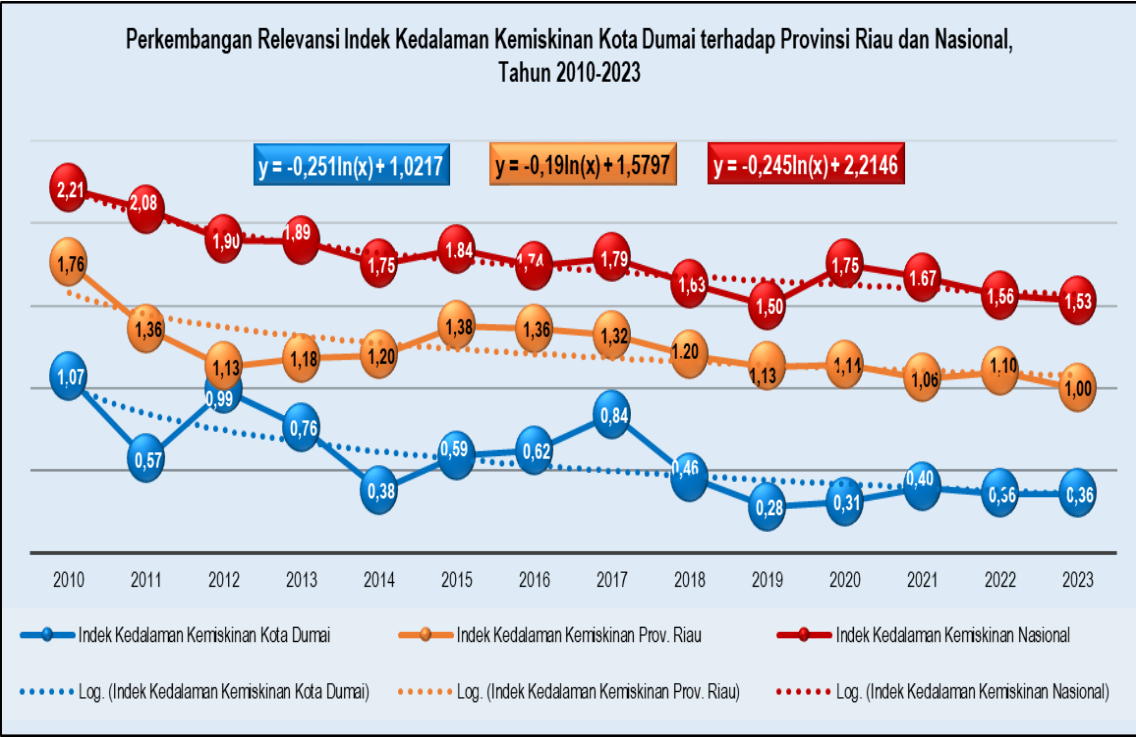
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Alat analisis kemiskinan dapat digunakan untuk mengukur jarak antara rata-rata pendapatan kelompok miskin secara agregat dengan garis kemiskinan (defisit pendapatan). Dengan kata lain, *poverty gap* merupakan selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan bagi rumah tangga yang memiliki pendapatan di atas garis kemiskinan maka dianggap memiliki nilai indeks *poverty gap* sama dengan nol. Ukuran ini telah memenuhi prinsip anonimitas dan monotonisitas, tetapi belum memenuhi prinsip transfer atau sensitivitas distribusional.

Nilai P1 sangat berguna untuk menentukan target sasaran bantuan dan program karena menunjukkan biaya yang dibutuhkan dalam mengentaskan kemiskinan per RTM. Ukuran ini memperlihatkan seberapa banyak dana yang harus dimiliki untuk ditransfer kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) sehingga pendapatan mereka naik di atas garis kemiskinan. Keadaan ini dapat terjadi jika tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat (transfer sempurna). Semakin kecil nilai *poverty gap*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan bagi RTM.

Perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index-P1*), Indeks P1 Kota Dumai pada tahun 2010-2023 mengalami perkembangan pengurangan gap antara pendapatan dengan garis kemiskinan. Misalnya nilai indeks P1 pada tahun 2010 sebesar 1,07%, artinya RTM yang terdapat di Kota Dumai masih kekurangan pendapatan sebanyak 1,07% untuk memenuhi pengeluaran minimal garis kemiskinan. Namun pada tahun 2023 sudah mengalami pengurangan gap antara pendapatan RTM dengan pengeluaran minimal garis kemiskinan menjadi 0,36%. Jika dilihat indeks tersebut menunjukkan bahwa terjadinya perbaikan dalam kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin kecil P1 maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin juga untuk target sasaran bantuan dan program. Artinya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin rendah.

Pada Gambar di bawah ini terlihat bahwa posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau. Artinya wilayah kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih lebih rendah di wilayah ini dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Riau. Namun Kota Dumai memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) penurunan yang lebih cepat dari Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi Kota Dumai sebesar -0,251% sementara koefisien persamaan regresi Provinsi Riau

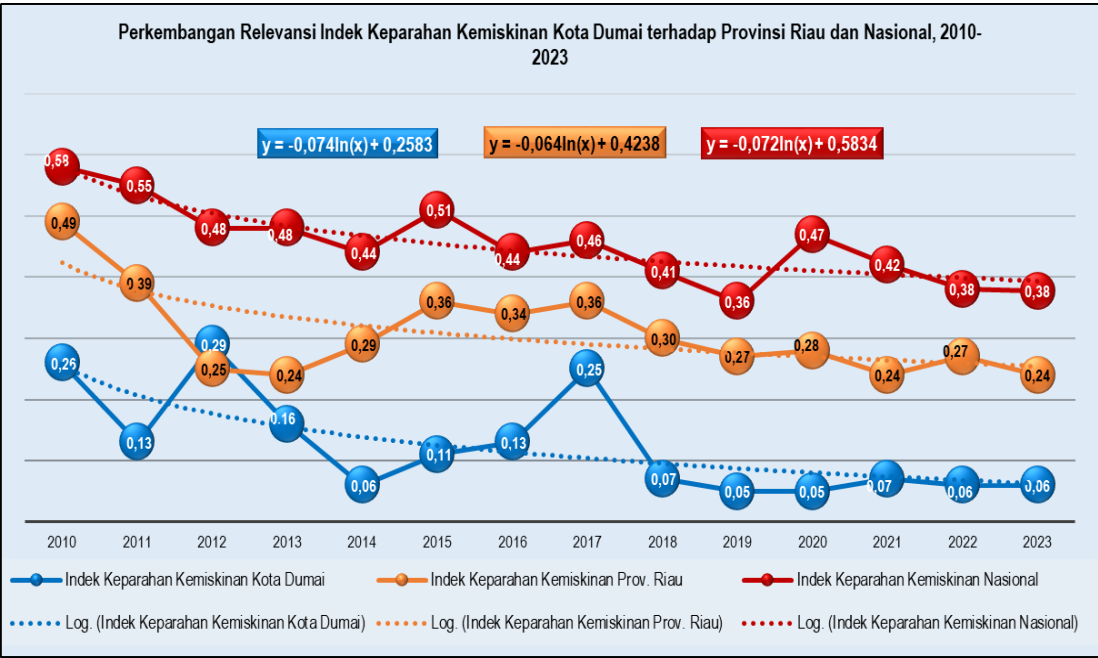
hanya sebesar -0,190%, dan koefisien persamaan regresi nasional sebesar -0,245%, jelasnya lihat pada Gambar berikut



Gambar 2.11 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2023
Sumber: BPS, 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan *Poverty Gap Index* (P2) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan ketimpangan pendapatan antar penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks keparahan kemiskinan, maka distribusi pendapatan diantara masyarakat miskin semakin merata. Pada Gambar 2.17 terlihat bahwa Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai yaitu berada di bawah rata-rata Provinsi Riau dan Nasional.

Namun Kota Dumai memiliki percepatan penurunan Keparahan Kemiskinan (P2) yang lebih baik dari Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi Kota Dumai sebesar -0,074% sementara koefisien persamaan regresi Provinsi Riau hanya sebesar -0,064% dan koefisien persamaan regresi nasional sebesar -0,072%. Namun demikian Kota Dumai harus mendapatkan perhatian secara serius dalam mengurangi keparahan kemiskinan karena perkembangannya mengalami fluktuasi atau variasi antara tahun cukup tinggi dibandingkan wilayah Provinsi Riau dan Nasional, jelasnya lihat Gambar berikut.



Gambar 2.12 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2023
Sumber: BPS, 2024

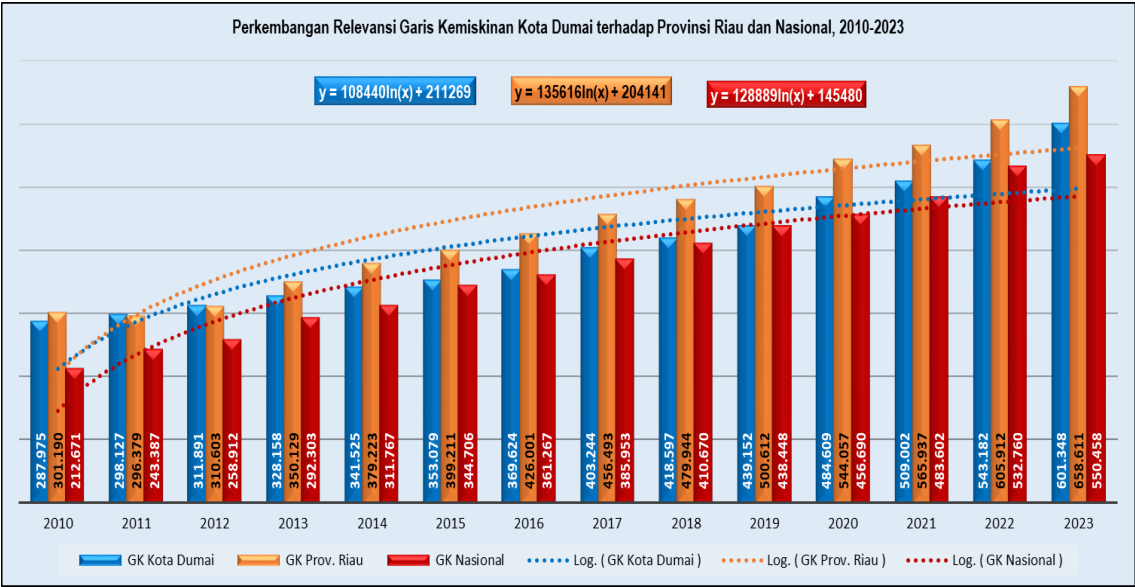
Garis kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Menurut BPS, garis kemiskinan dihitung dari hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/kapita/bulan di bawah garis kemiskinan maka akan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Ukuran garis kemiskinan yang paling sering digunakan adalah garis kemiskinan yang dibuat oleh *World Bank* yaitu US\$ 2/kapita/hari untuk negara yang masuk kategori *developing countries*. Garis kemiskinan digunakan sebagai dasar untuk mengukur beberapa indikator kemiskinan lainnya jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*, P2).

Perkembangan garis kemiskinan Kota Dumai dari tahun 2010-2023 menunjukkan trend atau kecenderungan perlambatan dalam peningkatan, dimana pada tahun 2010 garis kemiskinan Kota Dumai sebesar Rp. 287.975 per bulan per kapita dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 601.348 per bulan per kapita dengan peningkatan sebesar 5,86% per tahun lebih rendah dari rata-rata inflasi makro Kota Dumai yaitu sebesar 2,62% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa peningkatan angka garis kemiskinan tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh peningkatan harga pangan dan non pangan tetapi juga dipengaruhi peningkatan jumlah dan jenis kebutuhan RTM.

Oleh karena itu upaya peningkatan pendapatan RT miskin atau upaya mengurangi beban pengeluaran RT akan mempercepat pengurangan angka kemiskinan di wilayah ini dengan strategi peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, peningkatan aktifitas pembangunan ekonomi terutama pada lapangan usaha yang banyak digeluti penduduk miskin seperti industri, sektor pertanian melalui

peningkatan produktivitas hasil pertanian dan jasa lainnya yang memberikan kontribusi tertinggi pada sektor ekonomi Kota Dumai.

Trend peningkatan garis kemiskinan diwilayah ini terus mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari koefisien persamaan regresi garis kemiskinan Kota Dumai sebesar Rp.108.440 sementara koefisien persamaan regresi Provinsi Riau garis kemiskinan sebesar Rp. 135.616 dan koefisien persamaan regresi garis kemiskinan Nasional sebesar Rp. 128.889. Jelasnya lihat Gambar berikut.



Gambar 2.13 Perkembangan Garis Kemiskinan (P3) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2010-2023

Sumber: BPS, 2024

Kondisi penduduk miskin dalam beberapa tahun terakhir ini yang sudah mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis kemiskinan yang berarti tidak diperlukan dukungan yang kuat dalam pembangunan untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah garis kemiskinanlah yang sekarang harus didukung dalam pembangunan untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan seperti membantu mengurangi pengeluaran secara individu dan rumah tangga miskin melalui pemberian beasiswa atau gratis biaya pendidikan dan kesehatan serta bantuan pangan. Karena kelompok ini lebih rumit dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lamban dari sebelumnya. Berkenaan dengan kebijakan penanganan Covid 19 seperti pembatasan yang ketat terhadap aktifitas sosial dan fisik akan berdampak pada kelompok masyarakat dengan pendapatan yang rendah dan rentan miskin. Kondisi ini akan berdampak pada sektor ketenagakerjaan seperti Pemutusan hubungan kerja dan pengurangan jam kerja semua daerah. Hal ini akan memicu penambahan jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.

2.2.1.4 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan

fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Berdasarkan Tabel di bawah menunjukkan bahwa persentase PPKS yang tertangani pada tahun 2014 sebesar 33,23% kemudian pada tahun 2023 sebesar 100,00%.

Tabel 2.16
Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2014-2023

Uraian	Tahun										Satuan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial											
Penduduk rawan Sosial dan Sarana											
1). Anak Jalanan	35	8	8	4	4	0	0	0	0	0	Jiwa
2). Gepeng (Gembel dan Pengemis)	106	27	27	12	12	12	10	0	48	93	Jiwa
3). Fakir Miskin	9,423	9,423	9,423	15.882	17.998	18.794	21008	41419	47.346	44.779	KK
4). Bayi Terlantar	18	32	32	334	307	307	307	307	0	0	Jiwa
5). Anak Terlantar	87	151	151	2292	2132	2132	25	5	7	16	Jiwa
6). Lanjut Usia Terlantar	191	760	760	595	571	571	423	303	1.210	1.714	Jiwa
7). Penyandang Cacat Jiwa	392	122	122	423	424	425	347	186	595	460	Jiwa
8). Penyandang Cacat Ganda	0	0	0	0	0	0	0	0	34	112	Jiwa
9). Tuna Susila	96	356	356	0	0	0	0	0	0	0	Jiwa
10). Bekas Narapidana	61	38	38	0	0	0	0	0	4	0	Jiwa
11). Pengidap HIV/AIDS	159	159	0	0	0	0	0	0	15	0	Jiwa
12). Korban Penyalahgunaan NAPZA	23	30	30	196	196	196	196	0	0	0	Jiwa
Jumlah Panti Asuhan	0	0	0	12	12	13	13	12	12	0	
1). Panti Sosial Asuhan Anak	12	12	11	11	11	12	12	11	11	11	Buah
2). Panti Sosial Bina Remaja	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Buah
3). Panti Sosial Tresna Wirda	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Buah
Rumah singgah	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Buah
Jumlah PPKS	183.963	0	182.009	19.738	21.644	83012	80299	43247	49206	47.174	Orang
1). PPKS Yang Tertangani	61.124	0	60.453	127	87	131	250	106	132	141	Orang
2). PPKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	61.715	0	61.103	19.738	21.644	79016	78.862	41.419	47.346	44.779	Orang
3). PPKS Yang Diberikan Bantuan	61.124	0	60.453	12.389	14.430	14.016	18.214	31.019	24.702	26.567	KK
4). Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	99,04	0	98,99	62,77	66,67	73,81	94,07	70,75	52,17	59%	%
5) Persentase PPKS yang tertangani	33,23	0	33,21	64,34	40,19	24,56	27,04	46,9	100	100%	%
1). Karang Taruna	33	33	33	33	33	33	33	33	33	36	KT
2). Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Orang
3). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	66	66	66	66	66	66	66	66	72	74	Orang
4). Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	30	30	34	32	52	52	51	48	48	46	Orang
5). Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	12	12	12	11	11	11	11	11	11	11	LKS
6). Pekerja Sosial dan Pendamping PKH	5	6	14	30	31	30	30	30	25	24	Orang
7). Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Lembaga
8). Keluarga Pioner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Buah
9). Wahana Kesejahteran Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	Buah
10). Penyuluh Sosial	8	8	11	11	11	11	11	11	11	11	Orang
11). Wanita Pemimpin Kesjahteraan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang
12). Dunia Usaha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Buah

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2024

Penerima bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari 26 Kategori yang ada hanya 24 Kategori yang termasuk dalam data PPKS antara lain anak balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kestabilan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, panyadang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban penyalahgunaan napza, korban bencana alam, perempuan rawan sosial, keluarga fakir miskin, dan keluarga bermasalah sosial psikologis. Adapun saat ini kategori yang memperoleh bantuan sosial yaitu keluarga fakir miskin yang berjumlah sebanyak 44.779 KK tahun 2023. Pelaksanaan PPKS masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel di atas.

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan penduduk yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. TPT adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Dumai mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 6,56% pada tahun 2014 menurun menjadi 5,15% pada tahun 2023 dengan penurunan pertumbuhan sebesar - 0,13% per tahun.

Upaya yang harus dilakukan dalam rangka terus mengurangi tingkat pengangguran antara lain membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, meningkatkan peredaran modal usaha, sehingga jumlah tenaga kerja bertambah, menempatkan pencari kerja ke tempat yang sesuai kemampuan, melatih para pencari kerja untuk memiliki jiwa entrepreneur atau membuka usaha sendiri. Berikut disajikan Tabel yang menggambarkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Angkatan Kerja Kota Dumai dari Tahun 2014-2023.

Tabel 2.17
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai Tahun 2014-2023

Kota Dumai	Tahun										Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	2,11%
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun (Jiwa)	184.708	189.162	193.709	198.148	202.496	206.744	213.253	217.981	223.772	230.251	2,48%
Jumlah Angkatan Kerja (Orang)	120.250	125.545	132.113	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506	156.790	2,99%
Jumlah Bekerja	112.362	114.066	117.280	123.550	127.897	140.600	134.581	135.381	140.509	148.710	3,16%
Jumlah Menganggur (Orang)	7.888	11.479	14.833	12.134	8.215	9.723	12.005	9.084	7.997	8.080	0,27%
TPT (%)	6,56	9,14	11,23	8,94	6,04	6,47	8,19	6,29	5,38	5,15	-2,65%
Kesempatan Kerja (%)	93,44	90,86	88,77	91,06	93,96	93,53	91,81	93,71	94,62	94,85	0,17%
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26,82	29,65	27,60	36,81	41,46	11,50

Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka 2018-2023 dan Data diolah

Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang belum bekerja dikarenakan belum mendapat pekerjaan atau tidak bekerja. Dalam beberapa tahun terakhir terdapat hal paradoks di Kota Dumai bahwa pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, namun tingkat pengangguran terbuka masih relatif tinggi, agar kedepan arah kebijakan fokus menangani tingkat pengangguran terbuka ini dengan menyediakan lapangan kerja yang seluas luasnya terutama pada sektor pertanian dan industri.

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choices*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia dalam jangka panjang.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kota Dumai, 2010-2023 lihat Tabel berikut.

Tabel 2.18
Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Dumai Tahun 2010-2023

Indikator	Satuan	Tahun														Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Indek Pembangunan Manusiian (IPM)	Indek	69,55	70,43	71,07	71,59	71,86	72,20	72,96	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75	75,26	75,66	0,65
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,67	11,87	12,07	12,27	12,40	12,46	12,75	12,97	12,98	13,10	13,12	13,31	13,32	13,33	1,03
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,36	9,42	9,48	9,54	9,56	9,57	9,58	9,67	9,84	9,85	10,07	10,14	10,15	10,16	0,63
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,93	69,95	70,02	70,04	70,05	70,25	70,31	70,37	70,55	70,82	70,93	70,98	71,25	71,67	0,19
Pengeluaran Rill Per Kapita	(Rp Juta/ kapita)	9.593	10.162	10.499	10.735	10.870	11.058	11.531	11.699	12.063	12.453	11.751	11.818	12.249	12.457	2,03

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka, 2011-2023

2.2.1.7 Laju Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi merupakan indikator ekonomi makro yang mengindikasikan baik buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi yang tinggi menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, meskipun perekonomian secara menyeluruh semakin baik tidak berarti bahwa inflasi tidak terjadi. Terjadinya deflasi juga tidak selalu menunjukkan hal yang positif bagi perekonomian suatu daerah. Dengan kata lain, bahwa yang menjadi indikator perekonomian semakin baik jika angka inflasi suatu daerah stabil dan relatif rendah. Berikut Tabel yang menunjukkan perbandingan Perkembangan inflasi tahunan Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2014-2023.

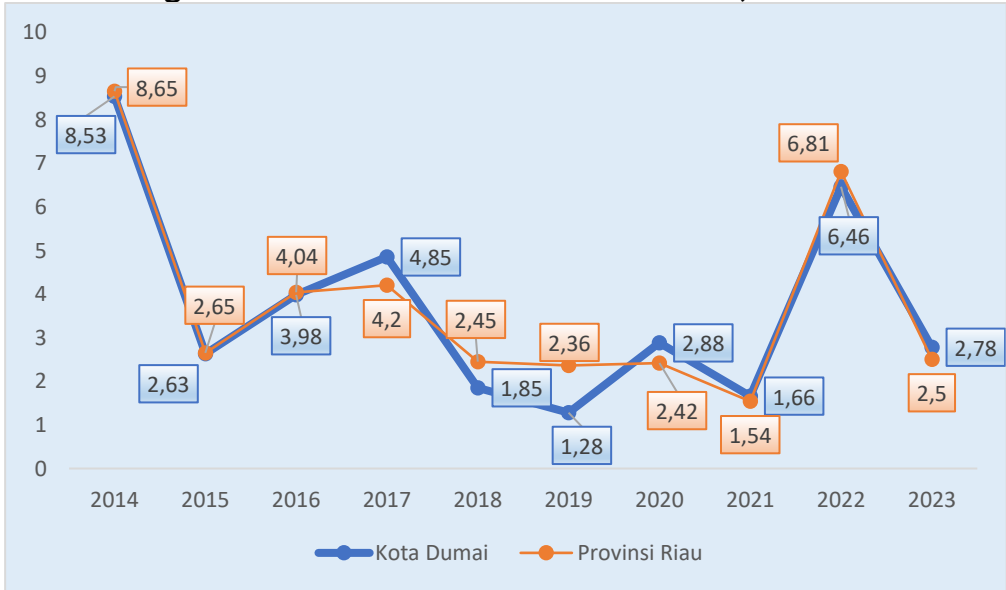
Tabel 2.19
Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2014-2023

Inflasi	Tahun										Pertumbuhan / Tahun (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kota Dumai	8,53	2,63	3,98	4,85	1,85	1,28	2,88	1,66	6,46	2,78	-11,71
Provinsi Riau	8,65	2,65	4,04	4,2	2,45	2,36	2,42	1,54	6,81	2,5	-12,88

Sumber: BPS, Perkembangan Inflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau, 2010-2023

Perkembangan inflasi tahunan Kota Dumai tahun 2014-2023 menunjukkan kondisi yang fluktuatif terlihat dari tabel di atas inflasi tertinggi di Kota Dumai terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,53% namun masih lebih rendah dari pada inflasi provinsi Riau pada tahun yang sama sebesar 8,65%. Sedangkan inflasi terendah di Kota Dumai terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,28% sementara itu inflasi terendah di Provinsi Riau terjadi pada tahun 2021 sebesar 1,54%. Tahun 2023 inflasi Kota Dumai sebesar 2,78% hal ini menunjukkan bahwa daya beli Masyarakat masih terjangkau dan sesuai dengan saran Bank Indonesia (2024) untuk inflasi ideal berkisar antara 1,5% - 3,5%. Berikut disajikan grafik yang menggambarkan perkembangan inflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau tahun 2014-2023

Grafik 2.4
Perkembangan Inflasi Kota Dumai dan Provinsi Riau, Tahun 2014-2023



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

Perkembangan inflasi tersebut menggambarkan suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu tertentu dan umumnya 1 tahun, berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) Inflasi ringan: di bawah 10% setahun, (ii) inflasi sedang: antara 10-30% setahun, (iii) inflasi berat: antara 30-100% setahun, dan (iv) hiperinflasi: di atas 100% setahun. Berdasarkan laju inflasi Kota Dumai tahun 2014-2023 dalam kategori inflasi ringan karena tingkat inflasi tahunan dibawah 10%.

Sementara itu Perkembangan inflasi sektoral tahun 2011-2023 menunjukkan bahwa rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas mencapai 5,80% per tahun dan kondisi ini menggambarkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan listrik dan gas sangat berkontribusi terhadap tingginya inflasi pada sektor tersebut dan sektor lainnya. Selanjutnya, sektor kontruksi menempati urutan kedua yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 5,26% per tahun. Sedangkan rata-rata inflasi terendah selama tahun 2011-2023 adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminana Sosial Wajib hanya sebesar 2,61% per tahun.

Secara teori, inflasi akan mengalami peningkatan jika meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta, harga bahan bakar naik, upah buruh naik dan bertambahnya uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat dua kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Namun berdasarkan data Tabel di bawah ini rata-rata inflasi tahun 2010-2023 menunjukkan bahwa inflasi sektoral, dimana semua sektor masuk dalam kategori inflasi ringan atau dibawah 10% dengan rata-rata sebesar 4,04% per tahun.

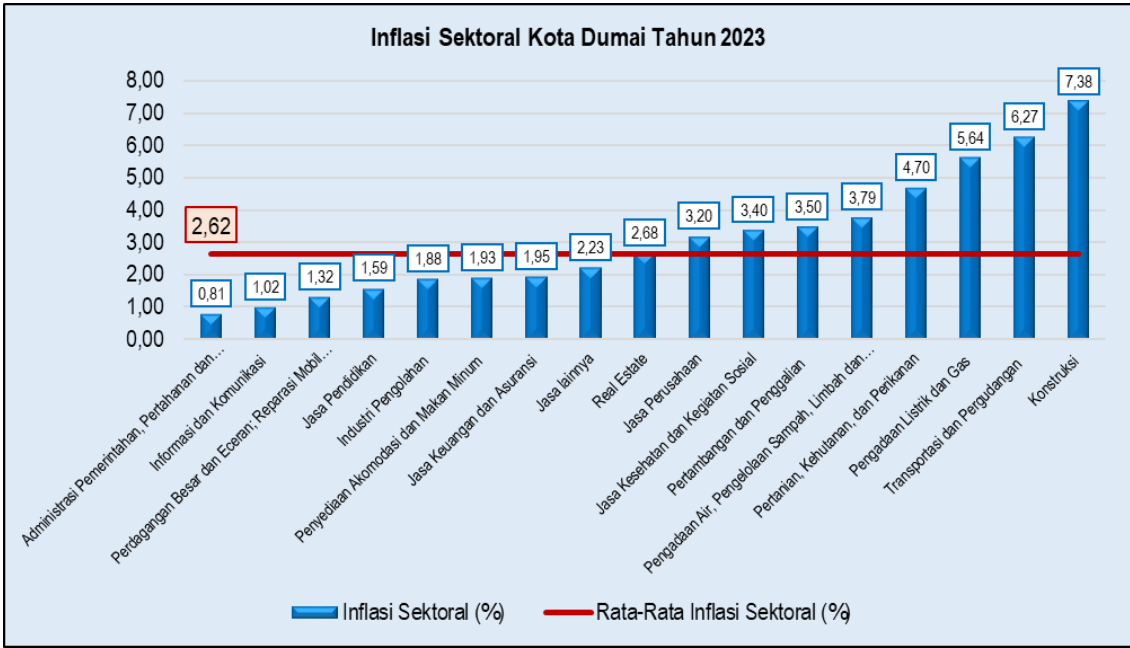
Tabel 2.20
Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai Tahun 2011-2023

No	Sektor	Tahun													Rata-Rata Inflasi/ Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,58	4,41	4,54	9,61	7,80	7,57	3,62	1,00	0,56	3,77	6,55	6,34	4,70	5,08
B	Pertambangan dan Penggalian	2,84	2,08	2,68	15,78	10,42	5,41	0,84	6,79	4,37	2,43	2,00	2,66	3,50	4,75
C	Industri Pengolahan	-3,11	-3,89	12,49	7,89	5,28	5,38	4,68	4,49	4,34	1,29	4,71	6,40	1,88	3,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-12,78	-16,37	-10,80	36,19	40,52	15,09	9,37	0,49	5,38	-2,62	-0,49	5,79	5,64	5,80
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,81	3,46	-2,50	3,75	7,71	6,19	5,69	1,85	2,86	0,98	0,07	1,06	3,79	2,82
F	Konstruksi	9,29	1,00	6,18	5,04	9,98	8,72	4,33	4,49	2,67	0,38	1,32	7,61	7,38	5,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,89	1,76	1,67	13,22	2,10	4,33	2,11	1,18	2,99	2,20	2,46	4,62	1,32	3,37
H	Transportasi dan Pergudangan	5,27	4,05	4,46	7,55	8,89	3,61	1,64	2,09	2,89	5,30	3,83	7,63	6,27	4,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,77	-2,23	17,75	13,21	14,62	8,04	1,41	1,59	1,39	1,23	1,60	1,88	1,93	5,17
J	Informasi dan Komunikasi	0,43	1,01	-5,06	6,41	7,51	4,38	6,73	7,76	2,63	0,04	0,41	1,85	1,02	2,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,63	10,01	5,60	4,63	4,13	2,93	2,99	1,76	1,70	-0,39	5,09	9,64	1,95	4,28
L	Real Estate	7,56	3,78	2,99	9,02	7,10	4,41	2,83	2,90	0,38	-0,19	0,03	2,60	2,68	3,55
M,N	Jasa Perusahaan	5,19	10,31	4,41	5,36	7,99	5,07	0,52	1,09	4,44	0,98	0,27	4,10	3,20	4,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,28	8,57	2,82	3,77	3,99	3,08	2,03	2,50	1,01	2,64	0,40	1,05	0,81	2,61
P	Jasa Pendidikan	12,68	1,78	2,32	16,49	10,53	3,88	1,09	0,48	3,56	3,18	1,15	1,39	1,59	4,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,36	6,79	3,45	10,44	12,87	5,29	1,80	0,67	4,55	2,54	1,07	4,02	3,40	4,79
R,S,T, U	Jasa lainnya	10,44	-1,03	3,47	9,98	12,30	6,45	2,59	2,35	2,85	2,89	1,02	3,01	2,23	4,50
Inflasi Kota Dumai		0,90	-0,65	8,03	8,38	5,58	5,49	3,88	3,48	3,49	1,52	3,80	6,05	2,62	4,04

Sumber: BPS, Data Dasar PDRB Kota Dumai Dalam Angka, 2012-2023

Sementara sektor yang mengalami inflasi dibawah rata-rata inflasi Kota Dumai tahun 2022 adalah sector Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Real Estate; Informasi dan Komunikasi; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Perusahaan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Sedangkan sektor dengan inflasi diatas rata-rata inflasi Kota Dumai adalah sector Industri Pengolahan; Konstruksi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Transportasi dan Pergudangan.

Inflasi tahun 2022 masih termasuk dalam kategori inflasi rendah karena masih kurang dari 10%. Namun demikian ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian terutama terkait dengan sektor yang inflasinya mendekati 10% seperti sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Untuk menjaga gejolak inflasi (*volatile food*) melalui penguatan empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K); Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat, dan; Memperkuat koordinasi Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui pemantauan harga sehingga empat strategi tersebut dapat dijalankan terutama sinergi meningkatkan ketersediaan pangan melalui korporatisasi dan digitalisasi sumber-sumber pengembangan dan peningkatan produksi barang dan jasa. Inflasi sektoral 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.14 Perkembangan Inflasi Per Sektor dengan Migas Kota Dumai Tahun 2023
Sumber: BPS, 2024

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Cakupan Contraseptive Prevalence Rate (CPR) Per Kecamatan, PUS

bukan peserta KB, unmetneed dan PUS yang bukan target Program KB

Cakupan pemakaian kontrasepsi di Kota Dumai pada tahun 2020 adalah 35.923 orang peserta aktif dengan capaian tertinggi di kecamatan Dumai Timur yaitu 7.852

PUS. Pada tahun 2021 adalah 36.132 orang peserta aktif dengan capaian tertinggi di kecamatan Dumai Timur yaitu 7.810 PUS selanjutnya pada tahun 2022 adalah 23.490 orang peserta aktif dengan capaian tertinggi di kecamatan Bukit Kapur yaitu 4.414 PUS, sedangkan pada tahun 2023 adalah 30.301 orang peserta aktif dengan capaian tertinggi di kecamatan Dumai Timur 6.083 PUS. Berikut disajikan tabel Cakupan Contraseptive Prevalence Rate (CPR), PUS bukan peserta KB, Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2021-2023. Bila dilihat angka unmetneed yang disajikan pada tabel dibawah ini, maka dapat dilihat bahwa dari tahun sebelumnya terjadi penurunan, ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah banyak mengetahui dan peduli untuk terus memakai kontrasepsi dan kebutuhan ber-KB sudah terpenuhi.

Tabel 2.21

Cakupan *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR), PUS bukan peserta KB, Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2021-2023

KECA MATA N	PUS				CPR								PUS BUKAN PESERTA KB								PUS YANG BUKAN TARGET PROGRAM KB															
					PESERTA AKTIF				%				JUMLAH				%				JUMLAH				%				HAMIL dan IAS				%			
									PA / PUS / x 100								PUS BUKAN PESERTA KB / PUS x 100								UNMET NEED / PUS x 100								HAMIL dan IAS / PUS x 100			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Dumai Kota	6.680	6.680	4.290	5.218	5.117	5.267	2601	4023	76,6	79	60,6	77,1	1.563	1.413	1794	1515	23	21,2	41,8	29,0	1.212	1.069	1053	368	18,1	16	24,5	7,1	851	844	919	107	5,3	5,1	21,4	2,1
Dumai Timur	9.984	10.008	9.364	9.881	7.852	7.810	4088	6083	78,6	78	43,7	61,6	2.132	2.198	4901	4201	21	22	52,3	42,5	1.015	1.208	3141	1268	10,2	12,1	33,5	12,8	1.117	990	2138	294	11,2	9,9	22,8	3
Dumai Barat	8.441	8.761	6.255	6.217	5.897	5.973	3152	4288	69,9	78	50,4	69	2.544	2.788	2908	2942	30	31,8	46,5	47,3	1.383	1.336	2098	942	16,4	15,2	33,5	15,2	1.161	1.452	1085	236	13,8	16,6	17,3	3,8
Dumai Selatan	6.027	6.104	6.277	6.448	4.831	5.032	3602	4049	80,2	82	57,4	62,8	1.196	1.072	2401	4330	19,8	17,6	38,3	67,2	625	507	1381	899	10,4	8,3	22	13,9	571	565	1314	269	9,5	19,3	20,9	4,2
Bukit Kapur	3.493	3.797	8.245	8.669	2.705	3.024	4414	5356	77,4	79,6	53,5	61,8	788	773	3452	3874	22,6	20	41,9	44,7	547	581	2384	1451	15,7	14	28,9	16,7	241	242	1598	388	6,9	6,4	19,4	4,5
Medan g kampai	6.272	6.079	2.741	2.691	4.886	4.242	1643	1802	77,9	70	59,9	67	1.386	1.837	969	1318	22,1	30,2	35,4	49,0	623	912	456	249	9,9	15	16,6	9,3	763	925	720	96	12,2	15,2	26,3	3,6
Sungai Sembilan	6.678	6.825	6.468	6.775	4.635	4.784	3990	4700	69,4	70	61,7	69,4	2.043	2.041	2267	2248	30,6	29,9	35	33,2	893	789	1360	800	13,4	11,6	21	11,8	1.150	1.252	1424	216	17,2	18,3	22	3,2
Kota Dumai	47.575	48.254	43.640	45.899	35.923	36.132	23490	30301	75,5	75	53,8	66	11.652	12.122	18692	20428	25	25	42,8	44,5	6.298	6.352	11873	5977	13,2	13,2	27,2	13	5.354	5.770	9198	1606	11,3	12	21,1	3,5

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kota Dumai, 2024

2.2.2.2 Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Sedangkan ASFR adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umur nya. Angka kelahiran terjadi penurunan di mana TFR merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam demografi untuk mengukur jumlah rata-rata anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita selama usia produktif dan juga sesuai dengan kelompok umur. Berikut disajikan tabel TFR di Kota Dumai.

Tabel 2.22
Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2023

Uraian	Tahun				Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2020	2021	2022	2023	
TFR	4,9	3,33	2,22	2,22	-0,039%

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai, 2024

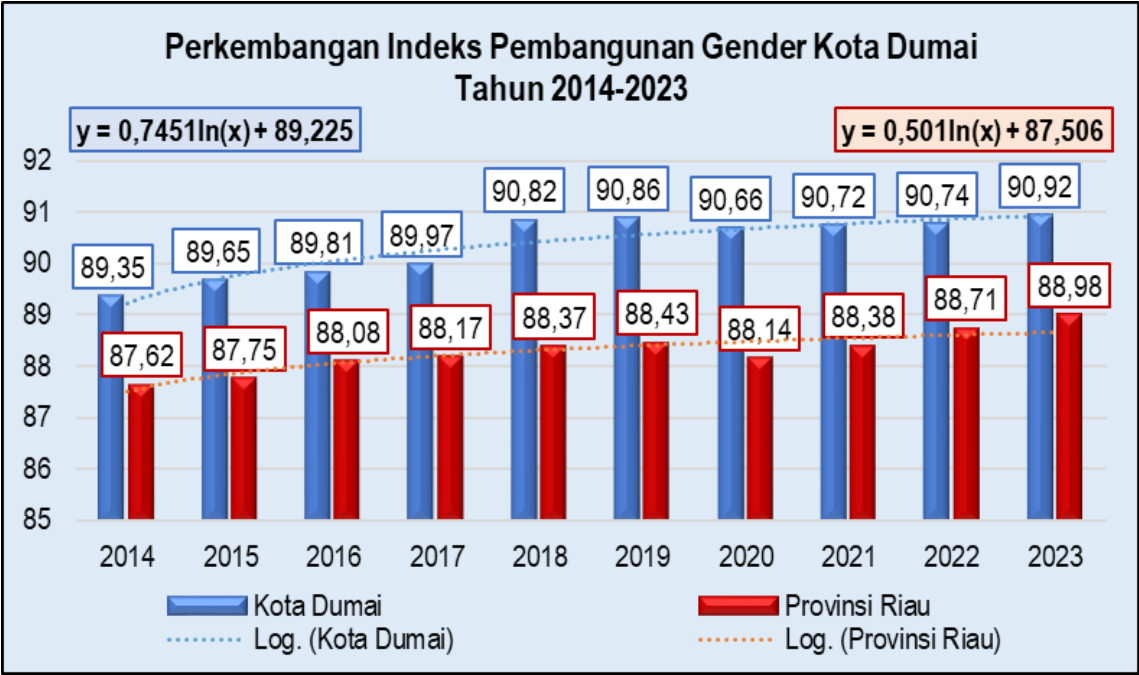
2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mampu mengukur tingkat capaian kemampuan dasar pembangunan manusia, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender. Pengukuran tersebut diukur dengan semakin kecil jarak angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan nilai 100 artinya pembangunan antara laki-laki dan perempuan menjadi lebih setara atau seimbang. Begitu pula sebaliknya, dimana semakin jauh dari angka 100 maka semakin besar pula perbedaan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 menjelaskan standar angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dikarenakan angka 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG memiliki komponen pembentuk yang menentukan nilai dari IPG. Komponen pembentuk tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM, yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran laki-laki dan perempuan. Keberhasilan pembangunan perempuan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM. namun lebih diarahkan untuk

mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar berikut.

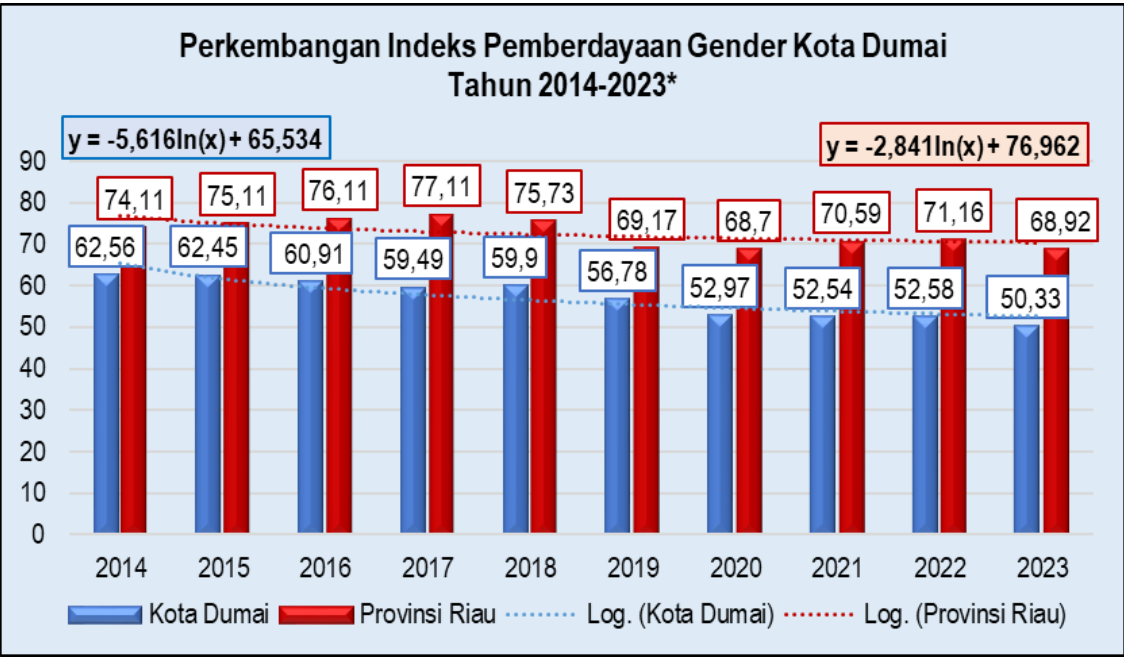


Gambar 2.15 Indeks Pembangunan Gender Kota Dumai Tahun 2014-2023
Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

Mencermati data di atas, IPG Kota Dumai dalam kurun tahun 2014-2023 terus mengalami peningkatan dari 89,35 pada tahun 2014 menjadi 90,92 pada tahun 2023 atau meningkat rata-rata 0,19% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kota Dumai selama kurun tahun tersebut menunjukkan arah yang semakin membaik. Jika dibandingkan dengan IPG provinsi Riau capaian IPG Kota Dumai pada tahun 2023 lebih tinggi dari capaian Provinsi Riau yaitu 88,98 dengan rata-rata pertumbuhan 0,17% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kota Dumai berada di atas Provinsi Riau.

2.2.2.4 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Menurut ukuran ini semakin tinggi tingkat keterlibatan perempuan dalam ekonomi dan politik semakin berdaya perempuan dalam kehidupan masyarakat. Keberhasilan pembangunan perempuan dapat dilihat dari Indeks pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan serta lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.16 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Dumai Tahun 2014-2023*
Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

Capaian IDG Kota Dumai selama kurun tahun 2014-2023 menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun dari 62,56 pada tahun 2014 menjadi 50,33 pada tahun 2023 dengan pertumbuhan -2,36% per tahun. Sedangkan Provinsi Riau menurun sebesar -0,75% per tahun. Artinya pemberdayaan gender di Kota Dumai lebih lambat perkembangannya dari pada Provinsi Riau walaupun masih belum optimal. Untuk tahun 2023 terlihat bahwa IDG Kota Dumai masih di bawah IDG Provinsi Riau.

Peningkatan jumlah perempuan yang bekerja akan terus terjadi seiring dengan peningkatan tingkat pendidikan dan kapasitas perempuan. Potensi perempuan sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan cukup besar mengingat populasinya hampir sama dengan laki-laki. Berdasarkan BPS Provinsi Riau, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan pada tahun 2018 – 2023 berturut-turut adalah sebesar 46,89%, 51,86%, 51,09%, 49,55%, 45,64%, dan 46,19% dengan rata-rata penurunan sebesar 0,30%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat potensi sumber daya manusia yang cukup besar yang belum termanfaatkan. Oleh sebab itu, partisipasi perempuan dalam proses pembangunan harus ditingkatkan karena selain akan meningkatkan produktivitas, juga akan memberi pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Pujiwati, 1983).

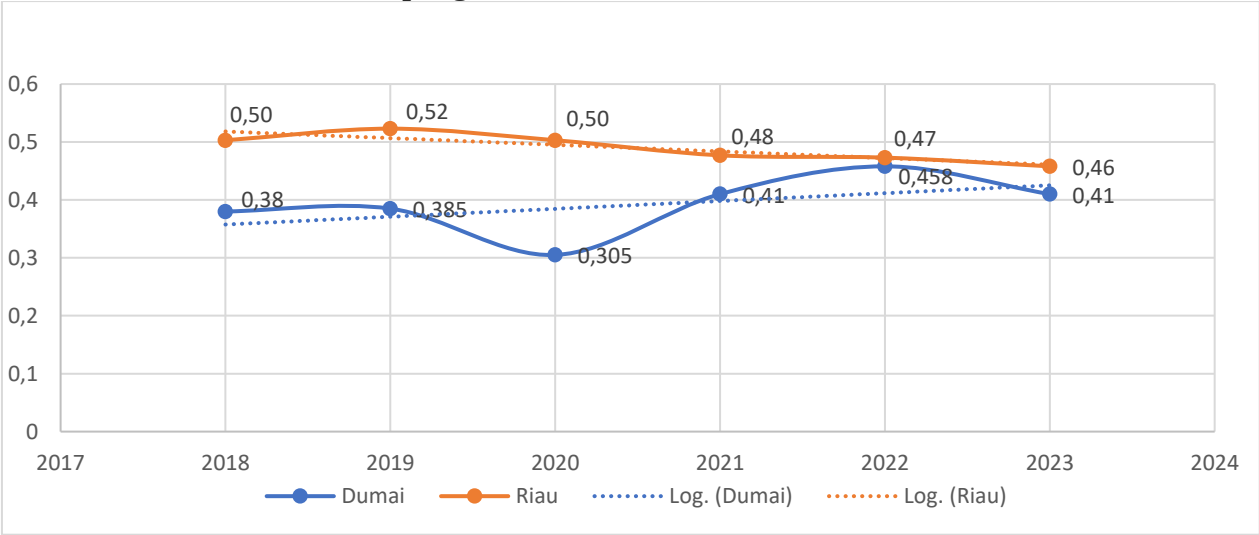
2.2.2.5 Indeks Ketimpangan Gender

Gagasan mengenai konsep gender yang merupakan hasil dari suatu budaya, bukan biologis, pertama kali dikemukakan oleh Mead (1935). Mead menyimpulkan bahwa ekspektasi peran antara laki-laki dengan perempuan tidak berlaku universal, melainkan sangat bervariasi di lingkungan yang berbeda. Istilah gender, sebagai suatu kata yang berbeda dengan “sex”, pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller. Menurut Stoller (1968), “sex” terkategori secara biologis sedangkan “gender” terbentuk berdasarkan faktor sosial budaya, bukan fisik biologis. Oakley (1985) juga menyebut

“sex” sebagai suatu yang merujuk pada perbedaan biologis antara laki laki dan perempuan yang didapati secara natural, sedangkan “gender” merujuk pada klasifikasi sosial antara maskulin dan feminim yang bervariasi antarkomunitas. Delphy (1993) mendefinisikan “gender” sebagai produk yang dibentuk oleh faktor budaya, historis, dan sosial dari hirarki patriarki. Gender dipahami sebagai hirarki yang muncul di masyarakat, satu kelompok (laki-laki) lebih memiliki kuasa dan hak istimewa dibanding kelompok yang lain (perempuan). Sementara itu, Lopez-Carlos & Zahidi (2005) menyebut gender merujuk pada laki-laki dan perempuan, status keduanya dan posisi relatif antar keduanya.

Kesetaraan gender dipandang bukan hanya sekedar pemenuhan hak dasar bagi setiap manusia. Namun lebih daripada itu, kesetaraan gender merupakan suatu pilar penting untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Kesetaraan gender menggambarkan suatu kondisi perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan partisipasi yang sama dalam hal ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi ini menjamin bahwa tidak ada potensi sumber daya yang ada yang tidak termanfaatkan seoptimal mungkin. Dengan kata lain, kesetaraan gender mendorong suatu negara mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada ke titik optimalnya, tidak ada satupun potensi yang ada dilemahkan.

Grafik 2.5
Indeks Ketimpangan Gender Kota Dumai Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Data ketimpangan gender memberikan informasi kepada pembuat kebijakan terkait domain atau dimensi mana saja yang masih mengalami ketimpangan dan membutuhkan intervensi kebijakan.

Capaian IKG Kota Dumai selama kurun tahun 2018-2023 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat dari 0,38 pada tahun 2018 menjadi 0,41 pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 1,53% per tahun. Sedangkan Provinsi Riau menurun sebesar 1,86% per tahun. Meskipun ketimpangan gender kota Dumai cenderung

meningkat, namun masih dibawah provinsi riau. Tentunya peningkatan ketimpangan gender ini berpotensi menjadi permasalahan pembangunan jangka Panjang di Kota Dumai. Oleh sebab itu hal ini akan menjadi dasar perumusan kebijakan pembangunan jangka Panjang daerah.

2.2.2.6 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan Kesehatan masyarakat. Terdapat dua jenis kondisi rawan pangan, yaitu yang bersifat kronis dan yang bersifat sementara. Salah satu penyebab permasalahan kerawanan pangan dan gizi karena lokasi geografis di wilayah tertentu yang berpotensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Permasalahan tersebut dapat dicegah dengan menerapkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang merupakan deteksi dini terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah dan memberikan informasi alternatif tindakan pencegahan dan penanggulangan yang diperlukan.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, di mana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidacukupan konsumsi pangan). *PoU* mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Adapun dalam kurun waktu 2017-2023 rata-rata pertumbuhan *PoU* cenderung meningkat sebesar 3,03%. Hal ini mengindikasikan semakin banyak penduduk yang mengonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

Tabel 2.23
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2023

Uraian	Tahun							Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	8,17	8,25	8,32	8,35	9,59	12,58	12,42	3,03

Sumber: BPS Kota Dumai, 2024

2.2.2.7 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Menurut Kota Dumai

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Berdasarkan data 2017-2023 dapat dilihat bahwa rata-rata skor PPH Kota Dumai dari tahun 2017 yang hanya 80,48 meningkat menjadi 87,9 pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 1,48%. Dalam rangka mengantisipasi kejadian rawan pangan dan gizi Kota Dumai yang diaplikasikan dalam bentuk Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), melalui peningkatan ketersediaan, peningkatan akses pangan dan pemanfaatan pangan. Berikut disajikan skor PPH konsumsi pangan Kota Dumai 2017-2023.

Tabel 2.24
Skor PPH Konsumsi Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2023

Uraian	Tahun							Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Skor PPH	80,48	81,7	82,1	82,85	83	82,9	87,9	1,48

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2023

2.2.2.8 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Dumai

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental).

Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2017 adalah 2 kegiatan dan pada tahun 2023 berjumlah 4 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam Pembangunan. Berikut disajikan tabel yang menggambarkan jumlah organisasi dan kegiatan kepemudaan di Kota Dumai selama kurun waktu 2017-2023.

Tabel 2.25
Jumlah Organisasi Pemuda dan Kegiatan Kepemudaan di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah organisasi pemuda	55	47	47	47	47	55	55
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	3	3	2	4	4

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, 2024

2.2.2.9 Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau

Dalam kaitannya dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, keberadaan kebudayaan daerah kembali mendapat perhatian dari pemerintah. Berdasarkan regulasi tersebut, secara eksplisit terlihat bahwa kebudayaan daerah yang ada di kota dan kabupaten menjadi dasar bagi perumusan kebudayaan daerah di tingkat provinsi dan selanjutnya menjadi dasar penting bagi perumusan strategi kebudayaan di tingkat nasional.

Berkenaan hal tersebut, kebudayaan daerah di Kota Dumai perlu diformulasikan sedemikian rupa ke dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD). PPKD Kota Dumai merupakan dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan kebudayaan daerah yang dihadapi Kota Dumai dalam Upaya Pemajuan Kebudayaan beserta rekomendasinya. Adapun Data Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilihat dari table di bawah ini.

Tabel 2.26
Data Objek Pemajuan Kebudayaan

No	Uraian	Kondisi Faktual		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
I	Manuskrip		✓	
II	Tradisi Lisan			
1	Putri Tujuh	✓		
2	Misteri Goa Pelintung	✓		
3	Panglima Hitam	✓		
4	Bujang Manjo	✓		
5	Buah Bakau Belukap Jin	✓		
6	Asal Mula Lubuk Gaung	✓		
III	Adat Istiadat			
1	Meminang	✓		
2	Mengantar Tanda	✓		
3	Mengantar Belanja	✓		
4	Menegakan Bangsal	✓		
5	Menggantung	✓		
6	Berandam	✓		
7	Berinai Curi	✓		
8	Akad Nikah	✓		
9	Tepuk Tepung Tawar Bearak Pengantin	✓		
11	Silat Pengantin	✓		
12	Pantun Pembuka	✓		
13	Duduk Bersanding	✓		
14	Makan Adab	✓		
15	Mandi Taman	✓		
16	Perkawinan Melayu	✓		
17	Perkawinan	✓		

No	Uraian	Kondisi Faktual		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
18	Petang Megang	✓		
19	Semah Kampung		✓	
IV	Ritus			
1	Cukur rambut anak	✓		
2	Mengantar talam	✓		
3	Menujuh hari (Tahlilan)	✓		
4	Penanggalan Pusat	✓		
5	Perayaan	✓		
6	Semah Laut	✓		
V	Pengetahuan Tradisional			
A. Pengobatan Tradisional				
1	Tidak Napsu Makan		✓	
2	Mimisan		✓	
3	Masuk Angin		✓	
4	Sakit Kepala		✓	
5	Panas Dalam		✓	
6	Sariawan		✓	
7	Migren		✓	
8	Radang Tenggorokan		✓	
9	Tekanan Darah Rendah		✓	
10	Tekanan Darah Tinggi		✓	
13	Kencing Kurang Lancar		✓	
14	Asma (Sesak Napas)		✓	
15	Ambeyen		✓	
16	Sakit Pinggang		✓	
17	Asam Urat		✓	
18	Susah Buang Air Besar		✓	
19	Keputihan		✓	
20	Masuk Angin pada Anak		✓	
21	Muntah, Mual, Perut		✓	
22	Diare		✓	
23	Mata Merah		✓	
24	Cacingan		✓	
25	Cacar Air		✓	
26	Keseleo		✓	
27	Typus		✓	
28	Rematik		✓	
29	Rambut Rontok		✓	
30	Kolesterol		✓	
31	Bintik-bintik Hitam pada		✓	
32	Jerawat		✓	
33	Batuk		✓	
34	Batuk Seratus Hari		✓	
35	Batuk Berlendir		✓	
36	Pilek pada Anak		✓	
37	Luka Tergores		✓	
38	Luka Berdarah		✓	
39	Penurun Panas		✓	
40	Obat Bengkak		✓	
41	Menghentikan Perdarahan		✓	
42	Tergores Pisau		✓	
43	Obat Bau Badan		✓	
44	Agar Tumbuh Rambut.		✓	
45	Agar Warna Rambut lebih		✓	
46	Sakit Perut		✓	
B. Busana Tradisional				
47	Teluk balango	✓		
48	Cekak musang	✓		

No	Uraian	Kondisi Faktual		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
49	Kebaya labuh	✓		
50	Gunting Cino	✓		
51	Baju Kurung	✓		
C. Jemput Semangat				
52	Membangkitkan semangat			
53	Cekak musang	✓		
54	Kebaya labuh	✓		
55	Gunting Cino	✓		
56	Baju Kurung	✓		
C. Makanan dan Minuman				
56	Kurma	✓		
57	Kepurun	✓		
58	Hasidah	✓		
59	Bolu Kemojo	✓		
60	Kue Bingko	✓		
61	Laksamana Mengamuk	✓		
62	Air Mata Pengantin	✓		
63	Kue Bangkit	✓		
VI	Teknologi Tradisional	✓		
VII	Seni			
	Seni Musik Tradisional			
	Akordion	✓		
	Rebana	✓		
	Bebano	✓		
	Kompang	✓		
	Gambus	✓		
	Marwas	✓		
	Gendang Panjang	✓		
	Karya Musik Tradisional			
	Budak	✓		
	Tanjung Palas			
	Musik Lagu Putri Tujuh	✓		
	Musik Pesisir	✓		
	Musik Lagu Laila Canggung	✓		
	Seni Tari			
	Putri Tujuh	✓		
	Zapin Senarak	✓		
	Joget	✓		
	Mak Inang	✓		
	Tari Langgam	✓		
	Tari Olang- olang	✓		
	Tari Kreasi Daerah (Parit Hukum)	✓		
	Zapin Api	✓		
	Zapin Semarak		✓	
	Seni Teater			
	Syair	✓		
	Puisi	✓		
	Monolog	✓		
	Teater Bangsawan	✓		
	Pertunjukan Teater	✓		
VIII	Bahasa			
	Bahasa melayu	✓		
	Bahasa Indonesia	✓		
	Bahasa Inggris	✓		
	Bahasa minang	✓		
	Bahasa batak		✓	
	Bahasa bugis	✓		

No	Uraian	Kondisi Faktual		
		Berkembang	Kurang Berkembang	Tidak Berkembang
IX	Permainan Rakyat			
	Lulu cina buta	✓		
	Bakiak/terompa	✓		
	Congklak	✓		
	Gasing	✓		
	Estatak	✓		
	Layang-layang	✓		
	Tarik tambang	✓		
	Tongkat Dingin	✓		
	Guli	✓		
	Patok Lele	✓		
	Gala Panjang	✓		
	Ban Senebu	✓		
	Senangkup	✓		
X	Olah Raga Tradisional			
	Pencak Silat	✓		
XI	Cagar Budaya			
	Struktur			
	Makam Putri Tujuh	✓		
	Situs			
	Bekas Benteng			✓
	Makam Simpan (Komplek Chevron 1)	✓		
	Makam Datuk Tabrani			✓
	Makam H. Jalal			✓
	Komplek Makam Kerabat Tujuh	✓		
	Makam Pawang Lion	✓		
	Makam Syaikh Sayyid Aziz Ibrahim	✓		
	Makam Panglima Delau dan Panglima Pandak			✓
	Makam Tuk Kedondong	✓		
	Makam Syech Umar	✓		
	Batu Beranak	✓		
	Telapak Hrimau Sakti			✓
	Bangunan			
	Pesanggrahan Putri Tujuh	✓		
	Makam Siti Laut	✓		
	Benda			
	Keris 1	✓		
	Keris 2	✓		
	Keris 3	✓		
	Keris 4	✓		
	Keris Kecil	✓		
	Mangkok 1	✓		
	Mangkok 2	✓		
	Kendi 1	✓		
	Kendi 2	✓		
	Meriam	✓		
	Tepak Sirih	✓		
	Cepu	✓		
	Payung Kecil	✓		
	Pedang Panjang	✓		
	Keris Tikam Bayang	✓		
	Keris Tahta Naga Siak	✓		

Sumber: Dokumen PPKD Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk melihat tingkat percepatan perkembangan pembangunan perekonomian suatu daerah, karena PDRB adalah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah dengan dukungan faktor-faktor produksi dalam wilayah tersebut mengikuti perkembangan harga berlaku dan harga konstan. Nilai PDRB yang dihasilkan dalam suatu wilayah terdiri dari PDRB ADHB dan ADHK terhadap 17 lapangan usaha.

Perkembangan nilai PDRB ADHB Kota Dumai dapat digunakan untuk menganalisis pergerakan kegiatan ekonomi masyarakat baik yang disebabkan oleh penambahan jumlah produksi dan kenaikan harga barang dan jasa, struktur perekonomian sektoral dan struktur perekonomian regional yaitu mengetahui kontribusi Kota Dumai terhadap perekonomian wilayah.

Tabel berikut menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB Kota Dumai dengan migas pada tahun 2010 adalah Rp. 17,49 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 49,03 triliun tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,30% per tahun. Peningkatan nilai PDRB ADHB ini menunjukkan adanya perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat berupa terjadinya peningkatan jumlah produksi dan harga barang/jasa di Kota Dumai.

Sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHB tertinggi adalah industri pengolahan, dimana pada tahun 2010 senilai Rp. 9,23 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 30,03 triliun pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 9,62% per tahun. Sedangkan sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHB terendah adalah jasa perusahaan, pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 710 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 1,926 milyar tahun 2023. Selanjutnya jika diamati perkembangan pertumbuhan secara relative, maka sektor dengan pertumbuhan tertinggi selama tahun 2010-2023 adalah pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 28,47% per tahun dengan nilai PDRB ADHB meningkat dari Rp. 9,08 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 149,18 milyar tahun 2023. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah adalah pertambangan dan penggalan yaitu hanya tumbuh sebesar 4,65% per tahun atau dengan nilai PDRB ADHB Rp. 85,13 milyar pada tahun 2010 kemudian meningkat menjadi Rp. 151,51 milyar tahun 2023.

Tabel 2.27
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp. Milyar) Kota Dumai Tahun 2010-2023

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.110.864	1.195.515	1.247.514	1.290.663	1.437.575	1.551.170	1.687.641	1.807.094	1.875.180	1.923.180	2.079.210	2.303.167	2.452.757	2.616.278	6,81
B	Pertambangan dan Penggalian	85.133	87.981	90.719	93.219	108.905	120.472	121.860	116.791	120.040	128.170	129.580	132.990	139.353	151.508	4,53
C	Industri Pengolahan	9.227.341	9.468.326	9.345.365	10.909.916	12.499.495	13.521.271	15.058.108	16.565.051	18.660.480	20.865.620	21.783.300	24.294.167	27.839.955	30.032.693	9,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.077	8.604	7.674	7.556	11.694	18.026	24.522	27.095	28.100	31.770	73.720	92.976	140.550	149.175	24,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.274	3.374	3.520	3.455	3.654	4.045	4.293	4.741	4.880	5.330	5.600	6.038	6.600	7.857	6,97
F	Konstruksi	2.064.270	2.230.761	2.337.085	2.556.625	2.562.176	2.869.884	3.214.658	3.533.022	3.786.760	4.049.170	3.941.630	3.995.661	4.510.776	5.335.392	7,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.392.882	3.681.731	3.861.649	4.014.813	4.589.146	4.691.523	5.000.295	5.250.799	5.413.960	5.736.850	5.257.960	5.873.683	6.349.996	6.847.746	5,55
H	Transportasi dan Pergudangan	429.143	477.524	551.241	615.012	727.107	807.764	877.797	918.538	973.790	1.055.630	726.940	757.618	889.950	1.002.207	6,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99.042	113.142	126.322	162.082	200.382	235.071	260.521	280.817	303.730	319.620	258.810	314.995	335.596	360.638	10,45
J	Informasi dan Komunikasi	127.002	145.290	173.010	198.535	234.989	270.710	294.247	336.154	380.260	418.390	457.240	478.073	500.688	529.335	11,61
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	322.902	308.614	462.455	578.398	366.129	355.025	365.887	375.459	390.060	397.140	409.210	449.224	517.340	544.489	4,10
L	Real Estate	78.110	87.926	92.715	100.012	113.120	127.215	134.709	143.279	153.050	161.680	164.040	168.399	182.025	194.516	7,27
M,N	Jasa Perusahaan	710	809	965	1.071	1.224	1.419	1.555	1.663	1.840	2.060	1.630	1.651	1.738	1.926	7,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	389.026	407.170	453.574	474.552	494.473	524.616	541.616	553.239	568.680	587.760	590.240	605.347	667.051	702.392	4,65
P	Jasa Pendidikan	67.854	84.449	89.696	96.838	122.921	142.979	149.543	155.051	161.940	177.130	185.340	192.270	199.182	212.307	9,17
Q	Jasa Kesehatan	23.593	25.736	29.853	33.350	37.775	46.880	49.787	53.468	56.820	65.840	77.380	86.278	93.681	103.792	12,07

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	dan Kegiatan Sosial															
R,S,T,U	Jasa lainnya	65.249	79.470	83.006	95.672	117.702	142.499	158.356	176.899	196.640	220.030	181.040	193.572	225.572	242.032	10,61
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		17.495.472	18.406.421	18.956.363	21.231.766	23.628.467	25.430.570	27.945.396	30.299.161	33.076.210	36.145.360	36.322.880	39.946.108	45.052.810	49.034.286	8,25

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022

Tabel 2.28
Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2010-2023

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Kontribusi 2010-2023 (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,35	6,50	6,58	6,08	6,08	6,10	6,04	5,96	5,67	5,32	5,72	5,77	5,44	5,34	-1,33%
B	Pertambangan dan Penggalan	0,49	0,48	0,48	0,44	0,46	0,47	0,44	0,39	0,36	0,35	0,36	0,33	0,31	0,31	-3,43%
C	Industri Pengolahan	52,74	51,44	49,30	51,38	52,90	53,17	53,88	54,67	56,42	57,73	59,97	60,82	61,79	61,25	1,16%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,07	0,09	0,09	0,08	0,09	0,20	0,23	0,31	0,30	14,58%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	-1,19%
F	Konstruksi	11,80	12,12	12,33	12,04	10,84	11,29	11,50	11,66	11,45	11,20	10,85	10,00	10,01	10,88	-0,62%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,39	20,00	20,37	18,91	19,42	18,45	17,89	17,33	16,37	15,87	14,48	14,70	14,09	13,97	-2,49%
H	Transportasi dan Pergudangan	2,45	2,59	2,91	2,90	3,08	3,18	3,14	3,03	2,94	2,92	2,00	1,90	1,98	2,04	-1,39%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,61	0,67	0,76	0,85	0,92	0,93	0,93	0,92	0,88	0,71	0,79	0,74	0,74	2,03%
J	Informasi dan Komunikasi	0,73	0,79	0,91	0,94	0,99	1,06	1,05	1,11	1,15	1,16	1,26	1,20	1,11	1,08	3,10%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,85	1,68	2,44	2,72	1,55	1,40	1,31	1,24	1,18	1,10	1,13	1,12	1,15	1,11	-3,83%
L	Real Estate	0,45	0,48	0,49	0,47	0,48	0,50	0,48	0,47	0,46	0,45	0,45	0,42	0,40	0,40	-0,90%
M,N	Jasa Perusahaan	0,0041	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0057	0,0045	0,0041	0,0039	0,0039	-0,25%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,21	2,39	2,24	2,09	2,06	1,94	1,83	1,72	1,63	1,62	1,52	1,48	1,43	-3,33%
P	Jasa Pendidikan	0,39	0,46	0,47	0,46	0,52	0,56	0,54	0,51	0,49	0,49	0,51	0,48	0,44	0,43	0,85%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,13	0,14	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,17	0,18	0,21	0,22	0,21	0,21	3,53%
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,37	0,43	0,44	0,45	0,50	0,56	0,57	0,58	0,59	0,61	0,50	0,48	0,50	0,49	2,18%
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2023

Perkembangan nilai PDRB ADHK Kota Dumai dengan migas selama tahun 2010-2023 menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 4,07% per tahun atau naik dari Rp. 17,49 triliun pada tahun 2010 kemudian meningkat menjadi Rp. 29,40 triliun tahun 2023. Peningkatan nilai PDRB ADHK ini menunjukkan adanya perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan jumlah produksi barang/jasa di Kota Dumai. Sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHK tertinggi adalah industri pengolahan, dimana pada tahun 2010 senilai Rp. 9,23 triliun kemudian meningkat menjadi Rp. 18,25 triliun pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 5,39% per tahun. Sedangkan sektor dengan perkembangan nilai PDRB ADHK terendah adalah jasa perusahaan, pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 710 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 1,152 milyar tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 3,79% per tahun.

Selanjutnya secara relatif sektor dengan pertumbuhan tertinggi selama tahun 2010-2023 adalah pengadaan listrik dan gas yaitu sebesar 18,56% per tahun dengan nilai PDRB ADHK meningkat dari Rp. 9,08 milyar pada tahun 2010 menjadi Rp. 83,00 milyar tahun 2023. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah dan bahkan mengalami kontraksi adalah pertambangan dan penggalian yaitu tumbuh sebesar -0,14% per tahun atau dengan nilai PDRB ADHK pada tahun 2010 yaitu Rp. 85,13 milyar kemudian menjadi Rp. 83,60 milyar tahun 2023. Penurunan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh penurunan jumlah produksi barang dan jasa pada sektor tersebut, sehingga menyebabkan pengurangan jumlah aktifitas ekonomi termasuk investasi. Pengurangan investasi akibat terjadinya penurunan harga komoditas migas selama periode tahun 2010-2023. Harga migas khususnya harga minyak bumi dunia mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2010 ke 2023 sebesar -4,99% atau turun dari 79,48 USD per barrel pada tahun 2010 menjadi 75,51 USD per barrel pada tahun 2023. Perkembangan nilai dan rata-rata pertumbuhan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel berikut.

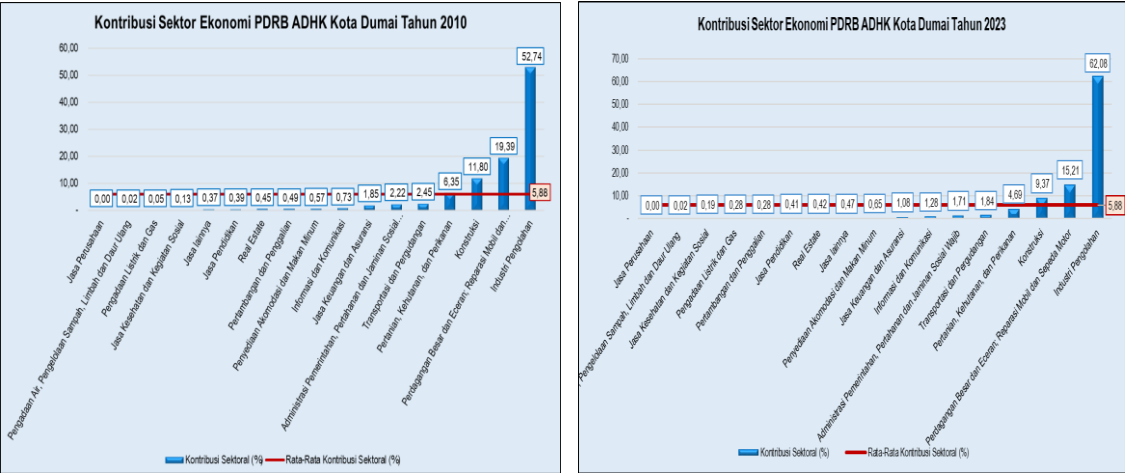
Tabel 2.29
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Rp. Milyar) Kota Dumai Tahun 2010-2023

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan %/Tahun)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.110.864	1.132.320	1.131.620	1.119.970	1.138.071	1.139.159	1.152.199	1.190.685	1.223.320	1.247.700	1.299.830	1.351.367	1.353.308	1.378.765	1,68
B	Pertambangan dan Penggalian	85.133	85.550	86.416	86.480	87.259	87.421	83.885	79.732	76.740	78.510	77.490	77.974	79.578	83.596	-0,14
C	Industri Pengolahan	9.227.341	9.771.772	10.035.477	10.414.551	11.059.234	11.357.156	12.069.823	12.657.132	13.605.100	14.580.040	15.018.790	16.006.044	17.241.069	18.253.330	5,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.077	9.862	10.521	11.612	13.197	14.484	17.108	17.285	17.840	19.140	45.610	57.810	82.599	82.991	18,56
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.274	3.313	3.342	3.363	3.429	3.524	3.518	3.680	3.720	3.950	4.110	4.427	4.787	5.495	4,06
F	Konstruksi	2.064.270	2.041.231	2.117.407	2.181.412	2.081.314	2.119.777	2.184.087	2.300.697	2.360.060	2.458.030	2.383.800	2.384.994	2.502.104	2.756.163	2,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.392.882	3.543.891	3.652.938	3.735.617	3.771.270	3.776.044	3.887.613	3.967.113	4.042.840	4.159.510	3.730.220	4.066.732	4.202.234	4.472.739	2,15
H	Transportasi dan Pergudangan	429.143	453.614	503.239	537.461	590.801	602.752	632.138	650.890	675.940	712.130	465.480	467.440	510.168	540.637	1,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99.042	107.987	123.319	134.379	146.745	150.191	154.067	163.773	174.350	180.950	144.750	173.379	181.306	191.157	5,19
J	Informasi dan Komunikasi	127.002	144.675	170.547	206.134	229.295	245.697	255.850	271.847	287.480	308.200	336.680	350.586	360.505	377.263	8,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	322.902	292.164	397.959	471.333	285.154	265.537	265.884	264.908	270.440	270.750	280.070	292.582	307.308	317.259	-0,14
L	Real Estate	78.110	81.754	83.056	86.988	90.249	94.773	96.114	99.410	103.200	108.600	110.400	113.298	119.365	124.233	3,63
M,N	Jasa Perusahaan	710	772	832	884	959	1.032	1.069	1.143	1.250	1.340	1.050	1.064	1.079	1.152	3,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	389.026	402.020	412.484	419.717	421.466	429.989	430.683	431.150	432.380	442.430	432.880	442.185	482.175	503.634	2,01
P	Jasa Pendidikan	67.854	74.950	78.211	82.520	89.918	94.631	95.278	97.723	101.570	107.280	108.790	111.567	114.003	119.608	4,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23.593	24.430	26.531	28.650	29.385	32.306	32.586	34.376	36.290	40.220	46.100	50.857	53.090	56.887	7,00
R,S,T,U	Jasa lainnya	65.249	71.958	75.947	84.597	94.630	102.020	106.502	115.967	125.950	137.020	109.570	115.972	131.188	137.697	5,91
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		17.495.472	18.242.262	18.909.846	19.605.668	20.132.376	20.516.494	21.468.404	22.347.512	23.538.470	24.855.800	24.595.620	26.068.280	27.725.867	29.402.605	4,07

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022

Jika diamati dari aspek perkembangan kontribusi sektoral dari selama tahun 2010-2023 menunjukkan adanya perubahan yang sangat signifikan dimana terdapat sembilan sektor yang mengalami penurunan kontribusi antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

Sebaliknya terdapat sembilan sektor yang mengalami peningkatan kontribusi dan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi adalah industri pengolahan dimana pada tahun 2010 berkontribusi sebesar 52,74% dan meningkat menjadi 62,08% pada tahun 2023. Kondisi ini wajar karena Kota Dumai merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Riau dengan jumlah kawasan industri terbanyak terutama yang berskala besar dengan perusahaan multinasional baik yang bergerak dibidang pengolahan migas dan non migas seperti industri pengolahan turunan CPO dan sekaligus menjadikan Kota Dumai sebagai salah satu *hub port* terhadap ekspor CPO dan turunannya di Provinsi Riau dan bahkan terbesar di Sumatera. Jelasnya lihat Gambar berikut.



Gambar 2.18 Kontribusi Sektoral PDRB ADHK Kota Dumai Tahun 2010 dan 2023
Sumber: BPS, 2024

Tabel 2.30
Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Dumai Tahun 2010-2023

Kategori	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan Kontribusi 2010-2023 (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,35	6,21	5,98	5,71	5,65	5,55	5,39	5,33	5,20	5,02	5,28	5,18	4,88	4,69	-2,30
B	Pertambangan dan Penggalian	0,49	0,47	0,46	0,44	0,43	0,43	0,39	0,36	0,33	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	-4,21
C	Industri Pengolahan	52,74	53,57	53,07	53,12	54,93	55,41	56,25	56,63	57,80	58,66	61,06	61,40	62,18	62,08	1,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,19	0,22	0,30	0,28	14,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
F	Konstruksi	11,80	11,19	11,20	11,13	10,34	10,32	10,21	10,30	10,03	9,89	9,69	9,15	9,02	9,37	-1,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,39	19,43	19,32	19,05	18,73	18,38	18,03	17,75	17,18	16,73	15,17	15,60	15,16	15,21	-1,85
H	Transportasi dan Pergudangan	2,45	2,49	2,66	2,74	2,93	2,93	2,90	2,91	2,87	2,86	1,89	1,79	1,84	1,84	-2,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,57	0,59	0,65	0,69	0,73	0,73	0,72	0,73	0,74	0,73	0,59	0,67	0,65	0,65	1,02
J	Informasi dan Komunikasi	0,73	0,79	0,90	1,05	1,14	1,20	1,20	1,22	1,22	1,24	1,37	1,34	1,30	1,28	4,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,85	1,60	2,10	2,40	1,42	1,29	1,25	1,19	1,15	1,09	1,14	1,12	1,11	1,08	-4,06
L	Real Estate	0,45	0,45	0,44	0,44	0,45	0,46	0,45	0,44	0,44	0,44	0,45	0,43	0,43	0,42	-0,53
M,N	Jasa Perusahaan	0,0041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0054	0,00	0,00	0,00	0,0039	-0,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,22	2,20	2,18	2,14	2,09	2,09	2,01	1,93	1,84	1,78	1,76	1,70	1,74	1,71	-1,99
P	Jasa Pendidikan	0,39	0,41	0,41	0,42	0,45	0,46	0,44	0,44	0,43	0,43	0,44	0,43	0,41	0,41	0,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15	0,15	0,16	0,19	0,20	0,19	0,19	2,96
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,37	0,39	0,40	0,43	0,47	0,50	0,50	0,52	0,54	0,55	0,45	0,44	0,47	0,47	1,86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MIGAS		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2023

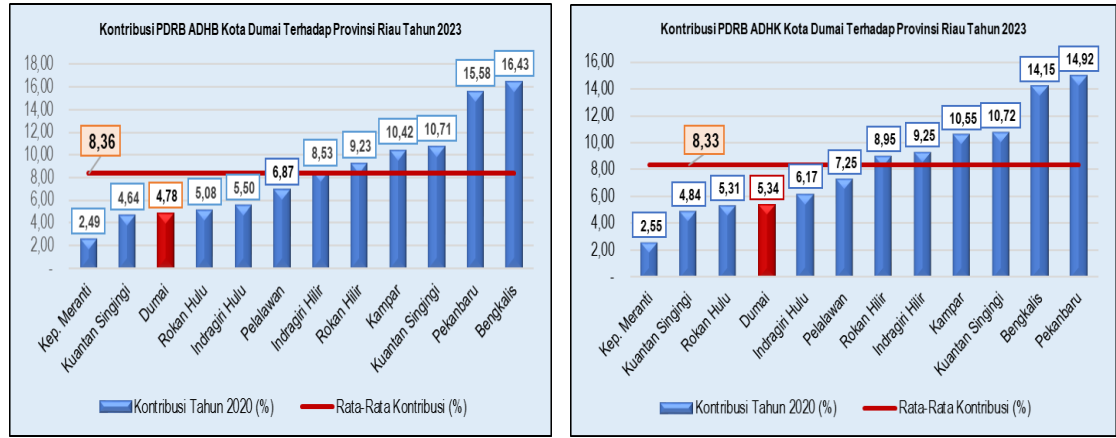
Sementara itu jika dilihat perkembangan kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai terhadap perekonomian Provinsi Riau selama tahun 2010-2023 menunjukkan terjadinya peningkatan sebesar 0,68% per tahun atau dengan rata-rata kontribusi sebesar 4,22% per tahun menurut PDRB ADHB. Selanjutnya menurut PDRB ADHK terjadi peningkatan sebesar 1,25% per tahun dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 4,72% per tahun. Perkembangan kontribusi dan pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.31
Perkembangan Kontribusi PDRB Kota Dumai Terhadap PDRB Provinsi Riau
Tahun 2010-2023

No	Perkembangan Kontribusi	Tahun														Rata-Rata Pertumbuhan / Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Kontribusi PDRB HB Kota Dumai terhadap PDRB HB Provinsi Riau	4,50	3,79	3,39	3,49	3,48	3,90	4,10	4,31	4,40	4,75	4,99	4,76	4,54	4,78	4,22
2	Kontribusi PDRB HK Kota Dumai terhadap PDRB HK Provinsi Riau	4,50	4,45	4,44	4,49	4,49	4,58	4,66	4,74	4,88	5,02	5,02	5,15	5,24	5,34	4,72
3	Pertumbuhan Kontribusi PDRB HB Kota Dumai terhadap PDRB HB Provinsi Riau	0,00	15,82	10,44	2,97	-0,49	12,12	5,19	4,97	2,12	8,14	4,97	-4,60	-4,56	5,14	0,68
4	Pertumbuhan Kontribusi PDRB HK Kota Dumai terhadap PDRB HK Provinsi Riau	0,00	-1,23	-0,09	1,17	-0,02	1,80	1,92	1,75	2,92	2,72	0,09	2,53	1,73	1,82	1,25

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2022

Selanjutnya dapat dijelaskan tentang perkembangan posisi kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dibandingkan dengan kabupaten kota terhadap Provinsi Riau tahun 2023. Kontribusi PDRB ADHB Kota Dumai berada di posisi ke tiga terendah dengan kontribusi sebesar 4,78% dan berada dibawah rata-rata Provinsi Riau sebesar 8,36%. Sedangkan pada PDRB ADHK di urutan ke empat hanya berkontribusi sebesar 5,34% dan berada dibawah rata-rata Provinsi Riau sebesar 8,33%. Lihat Gambar berikut.



Gambar 2.19 Posisi Kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dan Kabupaten Kota terhadap Provinsi Riau Tahun 2023.
Sumber: BPS, 2024

Rendahnya posisi kontribusi PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai dibandingkan dengan 11 kabupaten kota lainnya pada tahun 2023, tidak terlepas dari jumlah penduduk yang sedikit atau hanya 5,02% dari jumlah penduduk Provinsi Riau.

Melihat kondisi ini maka untuk meningkatkan kontribusi Kota Dumai pada perekonomian Provinsi Riau adalah dengan peningkatan investasi pada sektor ekonomi terutama sektor industri pengolahan dan sektor jasa perdagangan yang memiliki nilai tambah tinggi atau dengan kata lain industri berbasis teknologi inovasi dan kreasi sehingga menghasilkan produk dan jasa yang bernilai tinggi.

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita merupakan indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan regional, bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai determinasi kemajuan wilayah. Satu hal yang perlu diperhatikan bersama bahwa kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besaran pendapatan regional, tapi juga tergantung dari banyaknya jumlah penduduk.

Oleh karena itu, salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.

Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang, pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang, pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab, Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi agar menjadi nyata, sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang, pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan.

Perkembangan PDRB per kapita harga berlaku dan harga konstan Kota Dumai Tahun 2010-2023 ditunjukkan pada Tabel di bawah ini, selama periode tersebut PDRB per kapita Harga Berlaku dengan migas menunjukkan tren peningkatan dari Rp. 69,10 Juta per kapita pada tahun 2010 menjadi Rp. 145,04 juta per kapita pada tahun 2023 atau naik dengan pertumbuhan 5,87% per tahun. Sedangkan PDRB per kapita Harga Konstan mengalami peningkatan dari Rp. 69,10 juta per kapita pada tahun 2010 menjadi Rp. 86,97 juta per kapita pada tahun 2023 atau dengan pertumbuhan 1,79% per tahun.

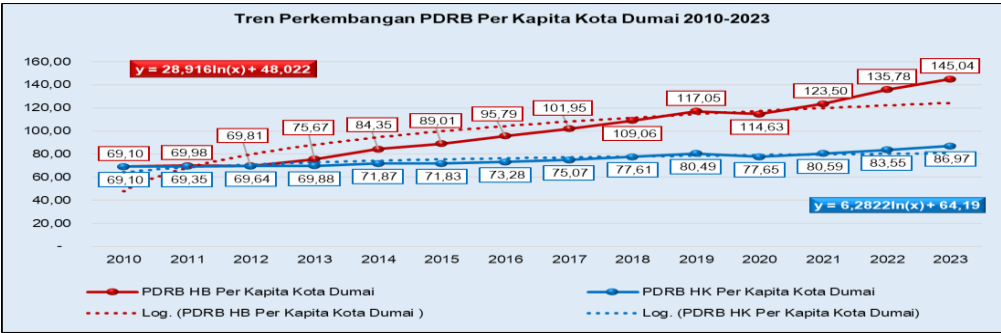
Berdasarkan Tabel dibawah dapat dilihat bahwa percepatan peningkatan pendapatan per kapita PDRB Harga Berlaku masyarakat Kota Dumai lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Hal tersebut tergambar dari rata-rata per kapita provinsi pada tahun 2010 sebesar Rp. 69,70 juta pada PDRB Harga Berlaku atau lebih tinggi dari per kapita PDRB Harga Berlaku Kota Dumai hanya Rp. 69,10 juta atau PDRB harga berlaku Provinsi Riau lebih tinggi sebesar 0,33%. Pada tahun 2023 pendapatan per kapita Kota Dumai menurut PDRB harga berlaku sebesar Rp. 145,04 juta lebih rendah sebesar 0,33% dari rata-rata pendapatan per kapita Provinsi Riau sebesar Rp. 152,40 juta. Kondisi menunjukkan bahwa adanya kebijakan pemerintah yang mendorong keberhasilan pengembangan ekonomi masyarakat, walaupun jumlah penduduk Kota Dumai bertambah dari 253.178 jiwa pada tahun 2010 menjadi 338.064 jiwa pada tahun 2023 atau sebanyak 1,88% dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,25% per tahun.

Tabel 2.32
Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Dumai dan PDRB Per Kapita Provinsi Riau Tahun 2010-2023

No	PDRB Per Kapita	Tahun														Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	PDRB HB Per Kapita Kota Dumai	69,1	69,98	69,81	75,67	84,35	89,01	95,79	101,95	109,06	117,05	114,63	123,5	135,78	145,04	5,87
2	PDRB HB Per Kapita Provinsi Riau	69,7	84,81	95	100,69	109,78	102,89	104,86	105,84	110,38	109,05	113,79	129,21	149,91	152,4	6,20
3	PDRB HK Per Kapita Kota Dumai	69,1	69,35	69,64	69,88	71,87	71,83	73,28	75,07	77,61	80,49	77,65	80,59	83,55	86,97	1,79
4	PDRB HK Per Kapita Provinsi Riau	69,7	71,64	72,4	72,3	72,39	70,77	70,57	70,74	70,74	71,09	76,63	78	80,06	81,81	1,24

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2023

Trend Perkembangan pendapatan per kapita penduduk Kota Dumai tahun 2010-2023 menurut PDRB harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.20 Trend Perkembangan Pendapatan Per Kapita Menurut PDRB ADHB dan ADHK Kota Dumai Tahun 2010-2023

Sumber: BPS, 2024

Selanjutnya data Perkembangan PDRB per kapita juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat Perkembangan perekonomian wilayah dengan pendekatan Analisis Tipologi Klassen. Basis data yang digunakan adalah besaran pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Kota dengan pertumbuhan ekonomi wilayah acuannya Provinsi dan membandingkan PDRB perkapita wilayah Kabupaten Kota dengan PDRB perkapita wilayah Provinsi. Hasil Tipologi Klassen berupa klasifikasi wilayah yang dapat digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan.

Berdasarkan Tabel di bawah ini, dihasilkan pengklasifikasian perkembangan perekonomian wilayah Kota Dumai berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen dengan membandingkan antara perkembangan ekonomi wilayah dengan Provinsi Riau tahun 2010-2023.

Hasil analisis Tipologi Klassen untuk Kota Dumai pada tahun 2011, 2012 dan 2014 masuk dalam kategori **wilayah relative tertinggal**, sedangkan pada tahun 2013 masuk dalam kategori **wilayah berkembang cepat**, selanjutnya sejak tahun 2015-2023 Kota Dumai mengalami perkembangan perekonomian wilayah yang sangat pesat sehingga masuk dalam kategori **wilayah berkembang cepat maju dan cepat tumbuh**. Hal ini terjadi karena Kota Dumai memiliki pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode tahun 2011-2023, jelasnya sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.33
Perkembangan Ekonomi Wilayah Menurut Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2011-2023

No	Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB HK I	PDRB Perkapita (Y)	
		Yi > Y	Yi < Y
1	ri > r	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
2	ri < r	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

Tahun	Indikator				Kategori
	ri: Laju Pertumbuhan PDRB HK Kota Dumai	r: Laju Pertumbuhan PDRB HK Provinsi Riau	Yi: PDRB ADHK per kapita Kota Dumai	Y: PDRB ADHK per kapita Provinsi Riau	
2011	4,27	5,57	69,35	71,64	Wilayah relatif tertinggal
2012	3,66	3,76	69,64	72,40	Wilayah relatif tertinggal
2013	3,68	2,48	69,88	72,30	Wilayah Berkembang Cepat
2014	2,69	2,71	71,87	72,39	Wilayah relatif tertinggal
2015	2,03	0,22	71,83	70,77	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2016	4,14	2,18	73,28	70,57	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2017	4,46	2,66	75,07	70,74	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2018	5,34	2,35	77,61	70,74	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2019	5,60	2,81	80,49	71,09	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2020	-1,04	-1,13	77,65	76,63	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2021	5,98	3,36	80,59	78,00	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2022	6,36	4,55	83,55	80,06	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2023	6,05	4,05	86,97	81,81	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai dan Provinsi Riau 2011-2023

Pengembangan ekonomi regional tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kemajuan ekonomi tetapi juga untuk peningkatan kemakmuran penduduknya. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan (BPS, 2020). Akan tetapi data pendapatan yang akurat sulit diperoleh. Pendapatan perkapita masyarakat Kota Dumai diperkirakan akan mengalami perubahan seiring terjadinya perubahan nilai PDRB pada sektor-sektor dominan yang ada di Kota Dumai.

2.3.1.3 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

Industri pengolahan menjadi sektor tertinggi pertama dari tiga sektor yang mendominasi struktur produk domestik domestik bruto (PDRB) Kota Dumai. Perkembangan kontribusi PDRB harga berlaku sektor Industri pengolahan terhadap PDRB keseluruhan selama periode 2010-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,16% atau naik dari 52,74% pada tahun 2010 menjadi 61,25% pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa pada sektor industri. Peningkatan produksi barang dan jasa juga berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan penurunan pengangguran dan kemiskinan. Selain tumbuh positif, peran sektor industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi regional juga semakin penting dan strategis.

Tabel 2.34
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2010-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun														Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	PDRB ADHB Kota Dumai	Rp. Milyar	17.495,47	18.406,42	18.956,36	21.231,77	23.628,47	25.453,57	27.962,26	30.342,84	33.076,21	36.147,14	36.313,70	39.946,11	45.052,81	49.034,29	8,25
2	PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	Rp. Milyar	9.227,34	9.468,33	9.345,37	10.909,92	12.499,50	13.521,27	15.058,11	16.611,66	18.660,48	20.867,98	1.772,85	24.294,17	27.843,51	30.032,33	9,50
3	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Industri Pengolahan	%	52,74	51,44	49,30	51,38	52,90	53,12	53,85	54,75	56,42	57,73	4,88	60,82	61,80	61,25	1,16

Sumber: BPS, 2010-2023

2.3.1.4 Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB

Dengan tingginya kontribusi sektor industri pengolahan sebagai pembentuk PDRB di Kota Dumai, maka salah satu sector yang mendapat externalitas positif dari aktivitas sektor industri pengolahan tersebut adalah meningkatnya aktivitas pada lapangan usaha Transportasi dan pergudangan di kota Dumai. Lapangan usaha ini dimaksud untuk menjamin logistic seperti bahan mentah ataupun peralatan dari aktivitas industri pengolahan tetap tersedia sehingga sektor dimaksud dapat terus beraktivitas. Adapun dalam kurun waktu 2010-2023 rata-rata pertumbuhan kontribusi sektor transportasi dan pergudangan berdasarkan harga berlaku cenderung menurun sebesar -1,39%. Hal ini diakibatkan masih terbatasnya akses ke pusat-pusat industri pengolahan di Kota Dumai dimana akses jalan tersebut masih menyatu dengan akses jalan yang di peruntukkan untuk aktivitas masyarakat.

Tabel 2.35
Pekembangan Kontribusi Sektor Transportasi dan Pergudangan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2010-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun														Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	PDRB ADHB Kota Dumai	Rp. Milyar	17.495,47	18.406,42	18.956,36	21.231,77	23.628,47	25.453,57	27.962,26	30.342,84	33.076,21	36.147,14	36.313,70	39.946,11	45.052,81	49.034,29	8,25
2	PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp. Milyar	429,14	477,52	551,24	615,01	727,11	807,76	877,80	918,54	973,79	1.055,63	726,94	757,62	889,95	1.002,21	6,74
3	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Transportasi dan Pergudangan	%	2,45	2,59	2,91	2,90	3,08	3,17	3,14	3,03	2,94	2,92	2,00	1,90	1,98	2,04	-1,39

Sumber: BPS, 2010-2023

2.3.1.5 Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB

Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Dumai masih belum terdata secara spesifik dalam laporan PDRB yang dipublikasikan secara umum. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai, sektor-sektor utama yang menyumbang pada PDRB Dumai antara lain adalah industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar serta eceran. Namun, potensi ekonomi kreatif di Dumai tetap signifikan mengingat perkembangan sektor-sektor seperti informasi dan komunikasi, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, yang merupakan bagian dari ekonomi kreatif, menunjukkan kecenderungan rata-rata pertumbuhan yang meningkat sebesar 2,65%. Jumlah kunjungan wisatawan domestik dari tahun 2019-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 23,65% per tahun. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dampak pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 12.908 jiwa sedangkan pada tahun 2023 hanya 6.031 jiwa. Berikut disajikan tabel kunjungan wisatawan Kota Dumai.

Tabel 2.36
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2019	2020	2021	2022	2023	
Wisatawan Domestik	33.572	81.202	39.325	46.258	78.481	23,65
Wisatawan Mancanegara	12.908	12.908	3.834	5.040	6.031	-17,32
Jumlah	46.480	94.110	43.159	51.298	84.512	16,12

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2023

Pada tahun 2023, sektor informasi dan komunikasi berkontribusi sekitar 529 Miliar Rupiah, sementara sektor akomodasi dan makanan minuman menyumbang sekitar 361 Miliar Rupiah. Secara keseluruhan, meskipun belum ada data spesifik mengenai kontribusi ekonomi kreatif secara keseluruhan, sektor-sektor terkait menunjukkan potensi yang signifikan untuk pengembangan lebih lanjut di Kota Dumai.

Tabel 2.37
Perkembangan Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2010-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun														Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	PDRB ADHB Kota Dumai	Rp. Milyar	17.495,47	18.406,42	18.956,36	21.231,77	23.628,47	25.453,57	27.962,26	30.342,84	33.076,21	36.147,14	36.313,70	39.946,11	45.052,81	49.034,29	8,25
2	PDRB ADHB Sektor Akomodasi Makan dan Minum	Rp. Milyar	99,04	113,14	126,32	162,08	200,38	235,07	260,52	280,82	303,73	319,62	258,81	315,00	335,60	360,64	10,45
3	PDRB ADHB Sektor Informasi dan Komunikasi	Rp. Milyar	127,00	145,29	173,01	198,54	234,99	270,71	294,25	336,15	380,26	418,39	457,24	478,07	500,69	529,34	11,61
4	Kontribusi PDRB ADHB Sektor Ekonomi Kreatif	%	1,29	1,40	1,58	1,70	1,84	1,99	1,98	2,03	2,07	2,04	1,97	1,99	1,86	1,82	2,65

Sumber: BPS, 2010-2023

2.3.1.6 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Perbandingan pajak terhadap pendapatan suatu perekonomian (economy), selanjutnya dalam analisis ini disebut rasio pajak (tax ratio), merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan pendapatan suatu perekonomian. Dalam konteks keuangan negara, rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak suatu negara dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), sedangkan di tingkat daerah rasio pajak merupakan rasio antara pajak daerah wilayah perekonomian daerah tersebut dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka rasio pajak suatu daerah dipengaruhi oleh PDRB. PDRB dapat dilihat dari tiga sisi: produksi, pengeluaran, serta pendapatan. Di sisi produksi, PDRB mengindikasikan kegiatan ekonomi suatu daerah yang secara umum dapat digambarkan melalui kemampuan daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan hidup masyarakat pada periode tertentu. Dari sisi pengeluaran, PDRB menggambarkan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah pada periode tertentu yaitu sektor rumah tangga (berupa konsumsi rumah tangga), sektor swasta (pembentukan barang modal/investasi), sektor pemerintah (konsumsi pemerintah di luar pembayaran non jasa /*transfer non payment*), serta sektor luar negeri (ekspor dan impor). Sementara itu, di sisi pendapatan, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan yang diterima penduduk wilayah tersebut pada suatu periode berupa gaji dan sejenisnya, sewa modal, bunga dan sejenisnya, serta laba yang dihasilkan oleh pengusaha. Dari sisi mana pun PDRB diukur akan dihasilkan angka yang sama (setelah dilakukan penyesuaian dan koreksi). Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mengetahui angka-angka rasio pajak di berbagai wilayah di Indonesia akan membantu kita dalam menganalisis secara sederhana hubungan antara pajak daerah wilayah tersebut dengan PDRB-nya, mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang potensial serta sektor ekonomi yang terkait, dan menilai kondisi suatu daerah dengan membandingkannya dengan daerah lain. Selama kurun waktu 2014-2023, Kontribusi pajak daerah terhadap PDRB Kota Dumai cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan 12,51%. Adapun pada tahun 2014 kontribusi pajak daerah adalah sebesar 0,25% naik menjadi sebesar 0,73% pada tahun 2023.

Tabel 2.38
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2014-2023

Uraian	Tahun										Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Pajak Daerah (Rp Milyar)	59,82	64,44	77,26	94,99	127,96	141,15	165,26	185,98	226,33	358,51	22,01
PDRB HB (Rp Milyar)	23.628,47	25.453,57	27.962,26	30.342,84	33.076,21	36.147,14	36.313,70	39.946,11	45.052,81	49.034,29	8,45
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,25	0,25	0,28	0,31	0,39	0,39	0,46	0,47	0,50	0,73	12,51

Sumber: Bapenda Kota Dumai, 2024 data diolah

2.3.1.7 Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta industri sedang dan besar di Kota Dumai selama periode 2018–2021 mengalami penurunan signifikan, dari 6.845 unit pada tahun 2018 menjadi 1.938 unit pada tahun 2020, sebelum kembali meningkat menjadi 3.120 unit pada tahun 2021. Rata-rata pertumbuhan per tahun untuk sektor IKM tercatat sebesar -23,04%, mengindikasikan adanya tekanan besar terhadap keberlangsungan usaha kecil, terutama selama periode pandemi.

Proporsi IKM terhadap jumlah unit industri tetap dominan, dengan angka di atas 98% setiap tahunnya. Namun, proporsi ini sedikit menurun dari 99,58% pada tahun 2018 menjadi 99,02% pada tahun 2021, dengan rata-rata penurunan sebesar -0,19% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun IKM mendominasi struktur industri di Kota Dumai, sektor ini lebih rentan terhadap perubahan ekonomi dibandingkan sektor industri sedang dan besar.

Tabel 2.39
Proporsi Industri Kecil dan Menengah di Kota Dumai Tahun 2018-2021

Uraian	Tahun				Pertumbuhan/ Tahun
	2018	2019	2020	2021	
IKM	6.845	3.354	1.938	3.120	-23,04
Industri sedang dan besar	29	27	26	31	2,25
Jumlah Unit Industri	6.874	3.381	1.964	3.151	-22,90
Proporsi IKM	99,58	99,20	98,68	99,02	-0,19

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024

2.3.1.8 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan mencerminkan persentase individu dalam angkatan kerja yang mampu menciptakan usaha. Rasio Kewirausahaan Kota Dumai mengalami tren menurun dari 4,85% pada tahun 2019 menjadi 2,74% pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengembangan kewirausahaan selama periode tersebut. Meskipun demikian, rasio ini meningkat kembali menjadi 4,55% pada tahun 2023, mengindikasikan adanya pemulihan atau perbaikan kondisi ekonomi yang mendukung wirausaha. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan tantangan yang dihadapi sektor usaha kecil dan kewirausahaan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun tren positif di tahun 2023 menunjukkan adanya potensi pemulihan yang

menjanjikan. Berikut disajikan tabel rasio kewirausahaan Kota Dumai Tahun 2019-2023.

Tabel 2.40
Rasio Kewirausahaan Kota Dumai Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ tahun
	2019	2020	2021	2022	2023	
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	7.290	6.525	4.939	4.071	7.141	-0,51
Angkatan kerja	150.323	146.586	144.465	148.506	156.790	1,06
Rasio Kewirausahaan (%)	4,85	4,45	3,42	2,74	4,55	-1,56

Sumber: BPS Kota Dumai

2.3.1.9 Perkembangan Koperasi di Kota Dumai

Selama kurun waktu 2019-2023 pertumbuhan jumlah koperasi di Kota Dumai adalah sebesar 8,43% dengan pertumbuhan Koperasi aktif sebesar 1,54%. Namun selama kurun waktu tersebut jumlah anggota koperasi mengalami penurunan rata-rata 0,42% per tahun. Dari sisi permodalan koperasi, terjadi kenaikan atas modal sendiri sebesar 7,56% pertahun Dimana pada tahun 2019 modal sendiri sebesar 64,074 milyar menjadi 85,761 milyar pada tahun 2023. Kenaikan juga terjadi pada modal luar Dimana terjadi kenaikan rata-rats pertahun sebesar 8,12% Dimana pada tahun 2019 sebesar 38,654 milyar menjadi 52,827 milyar pada tahun 2023. Kenaikan yang signifikan terjadi pada Volume usaha koperasi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 37,32% pertahun dengan pertumbuhan rata-rata sisa hasil usaha koperasi sebesar 11,85% pertahunnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.41
Perkembangan Koperasi di Kota Dumai Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Koperasi (Unit)	225	245	271	288	310	8,34
2	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	190	163	163	180	202	1,54
3	Anggota	18.976	19.342	19.273	17.925	18.659	-0,42
4	Modal Sendiri (Rp. Juta)	64.074	68.799	76.347	81.366	85.761	7,56
5	Modal Luar (Rp. Juta)	38.654	40.601	52.247	35.340	52.827	8,12
6	Volume Usaha (Rp. Juta)	62.986	64.575	146.432	140.209	223.955	37,32
7	SHU (Rp. Juta)	10.602	11.044	14.536	15.053	16.594	11,85

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai, 2024

2.3.1.10 UMKM di Kota Dumai

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan memberikan kontribusi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok UMKM tahan terhadap tekanan krisis ekonomi. Kota Dumai memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kecil dari tahun ke tahun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak bergerak di bidang industri kecil, perdagangan kecil dan kerajinan. Perkembangan UMKM tahun

2017-2023 mengalami penurunan sebesar 1,93% per tahun. Berikut disajikan tabel jumlah usaha mikro dan kecil tahun 2017-2023

Tabel 2.42
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	Tahun							Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Usaha Mikro dan Kecil	Unit	12.672	14.874	16.324	4.613	6.515	8.779	11.274	-1,93

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai, 2024

Data sektor usaha di Kota Dumai menunjukkan berbagai potensi ekonomi yang tersebar di tujuh kecamatan, yakni Dumai Barat, Dumai Timur, Medang Kampai, Dumai Selatan, Dumai Kota, Bukit Kapur, dan Sungai Sembilan. Secara keseluruhan, terdapat total 11.274 unit usaha dari berbagai sektor di wilayah ini.

Sektor perdagangan menjadi kontributor terbesar dengan 4.944 unit usaha, tersebar merata di semua kecamatan. Kecamatan Sungai Sembilan mencatat jumlah tertinggi, yaitu 951 unit, menunjukkan dominasi aktivitas perdagangan di wilayah ini. Sektor perikanan dan inovasi/kreativitas mencatat jumlah usaha yang lebih kecil, masing-masing dengan 55 unit usaha dan 34 unit usaha. Hal ini mengindikasikan peluang pengembangan di sektor-sektor tersebut. Kecamatan Bukit Kapur mencatat jumlah usaha terbesar untuk sektor inovatif dan kreatif, sedangkan sektor perikanan didominasi oleh Dumai Barat.

Secara umum, setiap kecamatan di Kota Dumai memiliki karakteristik dan potensi unggulan yang beragam, mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Berikut disajikan tabel Rekapitulasi Data Sektor Pelaku UMKM Kota Dumai.

Tabel 2.43
Rekapitulasi Data Sektor Pelaku UMKM Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2023

NO	SEKTOR USAHA	KECAMATAN							TOTAL SEKTOR
		DUMAI BARAT	DUMAI TIMUR	MEDANG KAMPAI	DUMAI SELATAN	DUMAI KOTA	BUKIT KAPUR	SUNGAI SEMBILAN	
1	Kerajinan	26	20	39	15	14	19	24	157
2	Konveksi dan busana	19	30	30	43	27	8	39	196
3	Olahan makanan/ minuman	634	536	504	680	645	542	250	3791
4	Perikanan	16	6	11	7	4	9	2	55
5	Pertanian, perkebunan dan kehutanan	18	5	169	14	1	45	57	309
6	Peternakan	28	75	100	15	6	39	34	297
7	Perdagangan	561	740	598	646	771	677	951	4944
8	Jasa	248	212	183	202	204	223	219	9749
9	Inovatif dan kreatif	6	5	2	6	2	12	1	34
JUMLAH		1556	1629	1636	1628	1674	1574	1577	11274

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai, 2024

2.3.1.11 Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri di Kota Dumai

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Sebagian atau seluruh bagian kawasan peruntukan industri dapat dikelola oleh satu pengelola tertentu. Dalam hal ini, kawasan yang dikelola oleh satu pengelola tertentu tersebut disebut kawasan industri.

Kawasan industri Kota Dumai berada di Kelurahan Pelintung, Kelurahan Guntung Dan Kelurahan Teluk Makmur (Kecamatan Medang Kampai), Kelurahan Lubuk Gaung, Kelurahan Tanjung Penyembal, Dan Kelurahan Bangsal Aceh (Kecamatan Sungai Sembilan), Kelurahan Bumi Ayu (Kecamatan Dumai Selatan), Dan Kelurahan Buluh Kasap, Jaya Mukti Dan Tanjung Palas (Kecamatan Dumai Timur) dengan luas total ± 7602,83 Ha. Kawasan industri di Kota Dumai meliputi industri migas, dan non migas, industri pertanian, industri kehutanan, industri pupuk, industri perikanan dan hasil laut, industri perkebunan, industri kelapa sawit, industri logam, industri galangan kapal, industri manufaktur, industri kimia, industri pengolahan limbah, industri bio diesel, dan industri yang sesuai dengan peraturan perundangan berlaku.

Pembangunan Kawasan Industri di kota Dumai, bertujuan untuk :

- a. Mempercepat pertumbuhan industri di kota Dumai;
- b. Memberikan kemudahan bagi kegiatan industri yang melakukan kegiatan di kota Dumai;
- c. Mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Industri yang telah disediakan di kota Dumai;
- d. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Sedangkan Fungsi utama dari pengembangan Kawasan industri di kota Dumai antara lain :

- a. Memfasilitasi kegiatan industri di kota Dumai agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
- b. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja di wilayah kota Dumai;
- c. Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kota Dumai;
- d. Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan pada kegiatan industri.

Adapun Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri adalah sebagai berikut:

- a. **Kawasan Industri Pelintung**, dengan total Luas 3.917,2 Ha dimana juga terdapat lahan milik Pemerintah Kota Dumai seluas 210,4 Ha;
- b. **Kawasan Industri Pengolahan Migas** (PT. KPI RU II dan PT. PHR) dengan total luas kawasan 490,15 Ha;
- c. **Kawasan Pelabuhan** (PELINDO I) dengan total luas kawasan 243,96 Ha;

- d. **Kawasan Pengembangan Pelabuhan Terpadu** (Pertamina Patra Niaga) dengan total luas kawasan 243,96 Ha;
- e. **Kawasan Peruntukan Industri Lubuk Gaung** dengan luas 1.570,65 Ha.

2.3.1.12 Keuangan Daerah

Dalam Pembangunan daerah tentunya dibutuhkan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli dan pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi yang nantinya digunakan untuk membiayai Pembangunan dalam bentuk belanja daerah. Adapun indikator pada aspek keuangan antara lain: (1) persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi; (2) peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan; (3) Persentase belanja pendidikan; dan (4) Persentase belanja kesehatan. Perkembangan keempat indikator ini dari tahun 2014-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Belanja Pendidikan, dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun										Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
PAD	Rp. Milyar	153,17	163,6	192,76	265,47	279,65	291,62	378,8	366,69	464	566,03	13,96
Pajak Daerah	Rp. Milyar	59,82	64,44	77,26	94,99	127,96	141,15	165,26	185,98	226,33	358,51	19,61
Persentase Peningkatan Pajak Daerah	%	N/A	7,72	19,89	22,95	34,71	10,31	17,08	12,54	21,70	58,40	22,81
Retribusi Daerah	Rp. Milyar	25,67	15,23	25,27	35,86	30,68	31,1	32,67	23,78	32,21	43,13	5,33
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah	%	N/A	-40,67	65,92	41,91	-14,45	1,37	5,05	-27,21	35,45	33,90	11,25
Penerimaan PBB	Rp. Milyar	29,34	29,23	34,67	50,42	74,44	82,25	91,4	97,36	134,83	161,19	18,57
Persentase Peningkatan PBB	%	N/A	-0,37	18,61	45,43	47,64	10,49	11,12	6,52	38,49	19,55	21,94
Belanja Daerah Kota Dumai	Rp. Milyar	1291,02	1044,12	1114,97	1203,26	1110,15	1309,37	1423,23	1314,29	1507,04	1947,92	4,20
Belanja Pendidikan	Rp. Milyar	N/A	N/A	381,51	370,73	311,97	313,53	340,67	340,01	326,08	409,93	1,03
Persentase Belanja Pendidikan	%	N/A	N/A	34,22	30,81	28,1	23,95	23,94	25,87	21,64	21,04	-6,71
Belanja Kesehatan	Rp. Milyar	N/A	N/A	241,66	270,31	259,77	286,76	350,71	375,28	447,62	425,51	8,42
Persentase Belanja Kesehatan	%	N/A	N/A	21,67	22,46	23,4	21,9	24,64	28,55	29,7	21,84	0,11

Sumber: Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai, 2024

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.2.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2010-2023 Kota Dumai memiliki trend meningkat. Adapun peningkatan angka rata-rata lama sekolah Kota Dumai selama kurun waktu tersebut yaitu 0,63% per tahun. Jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di Provinsi Riau dan nasional maka rata-rata lama sekolah Kota Dumai masih di atas keduanya. Hal ini mengindikasikan peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai salah satu upaya prioritas pembangunan sumberdaya manusia di Kota Dumai ke depannya akan terus ditingkatkan.

Tabel 2.45
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Dumai Tahun 2010-2023

Wilayah	RLS Tahun														Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kota Dumai	9,36	9,42	9,48	9,54	9,56	9,57	9,58	9,67	9,84	9,85	10,07	10,14	10,15	10,16	0,63
Provinsi Riau	8,25	8,29	8,34	8,38	8,47	8,49	8,59	8,76	8,92	9,03	9,14	9,19	9,22	9,32	0,94
Indonesia	7,46	7,52	7,59	7,61	7,73	7,84	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77	1,25

Sumber: BPS, 2024

2.3.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2010-2023 Kota Dumai memiliki trend meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,03% per tahun. Jika dibandingkan terhadap angka harapan lama sekolah Provinsi Riau selama kurun waktu 2010-2020 HLS Kota Dumai berada di bawah HLS Provinsi Riau namun lebih tinggi dari HLS nasional. Kemudian mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 HLS Kota Dumai lebih tinggi dari Provinsi Riau dan Nasional. Hal ini mengindikasikan Pembangunan system Pendidikan di Kota Dumai semakin membaik.

Tabel 2.46
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Dumai 2010-2023

Wilayah	Tahun														Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kota Dumai	11,67	11,87	12,07	12,27	12,40	12,46	12,75	12,97	12,98	13,10	13,12	13,31	13,32	13,33	1,03
Provinsi Riau	11,76	11,78	11,79	12,27	12,45	12,74	12,86	13,03	13,11	13,14	13,3	13,28	13,29	13,30	0,95
Indonesia	11,29	11,44	11,68	12,1	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15	1,18

Sumber: BPS, 2024

2.3.2.3 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nilai PAUD ini mencerminkan rasio pendidikan bagi anak-anak. Semakin tinggi nilai, maka berarti semakin banyak pula jumlah siswa pada rentang usia PAUD yang bersekolah, baik di PAUD maupun TK, dengan jenjang usia antara 4-6 tahun. Berdasarkan data dari Pendidikan, tren perkembangan jumlah PAUD dan sederajat justru mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, jumlah TK dan sederajat berjumlah

128 sekolah kemudian menjadi 115 sekolah pada tahun 2023 dengan jumlah siswa dan guru yang mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 5,81% dan 0,16% dari tahun 2014-2023, jelasnya lihat Tabel berikut.

Tabel 2.47
Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2014-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun										Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK/Sederajat	Unit	128	89	79	79	101	134	96	94	115	115	-1,18
2	Jumlah Murid PAUD/TK sederajat	Orang	3191	4.555	5022	4737	5234	4150	4221	3801	4135	5307	5,81
3	Jumlah Guru PAUD/TK sederajat	Orang	473	474	581	413	426	433	428	458	492	480	0,16

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun, 2024

2.3.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar menggambarkan partisipasi penduduk yang sedang menempuh Pendidikan tanpa mempertibangkan usia jika dicermati pada tabel di bawah, APK SD/MI dan APK SMP/MTS di Kota Dumai selama kurun waktu 2016-2023 nilainya berfluktuatif dengan kecenderungan menurun 0,04% per tahun untuk APK SD/MI dan 1,14% per tahun untuk APK SMK/MTS. Kecenderungan penurunan ini menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah Kota Dumai dalam Menyusun kebijakan terkait akses Pendidikan dasar.

Tabel 2.48
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kota Dumai 2016-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun								Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
APK SD/MI	%	107,79	111,92	100,00	108,33	108,86	107,05	107,04	106,41	-0,04
APK SMP/MTs	%	100,18	95,60	78,89	89,16	88,66	92,32	88,69	89,93	-1,14

Sumber: BPS, 2024

2.3.2.5 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah. Adapun selama kurun waktu 2016-2023 APM SD/MI Kota Dumai cenderung meningkat dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 0,34%. Sedangkan untuk APM SMP/Mts selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami penurunan sebesar 0,86%. Penurunan ini menjadi tantangan Kota Dumai dalam meningkatkan aksesibilitas dan sarana prasarana Pendidikan Dasara bagi Masyarakat Kota Dumai.

Tabel 2.49
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai
Tahun 2016-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun								Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
APM SD/MI	%	96,5	99,46	98,77	98,93	99,00	98,95	98,86	98,84	0,34
APM SMP/MTs	%	88,5	87,66	84,73	84,19	83,24	83,96	84,45	83,31	-0,86

Sumber: BPS, 2024

2.3.2.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin banyak jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Selain itu APS tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Dengan demikian naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Paket A maupun SMP/MTs/Paket B. APS SD/MI/Paket A semula sebesar 99,46% pada tahun 2017 naik menjadi 99,85% pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 0,07% per tahun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan APS SMP/MTs/Paket B, dimana pada tahun 2017 APS nya sebesar 95,23% turun menjadi 83,14% pada tahun 2023 atau terjadi penurunan sebesar 2,24% per tahun. Berikut data APS Kota Dumai.

Tabel 2.50
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai
Tahun 2017-2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun							Pertumbuhan /Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	APS SD/MI/Paket A (%)	99,46	100	99,85	99,61	99,53	98,86	99,85	0,07
2	APS SMP/MTs/Paket B (%)	95,23	95,88	97,05	97,15	97,26	93,99	83,14	-2,24

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun, 2024

2.3.2.7 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab mengapa angka putus sekolah naik dan turun. Pada jenjang

Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2017 sebesar 0,013%, namun pada tahun 2022 angka putus sekolah justru naik menjadi 2,18%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2017 angka putus sekolah adalah sebesar 0,025%, namun pada tahun 2022 angka putus sekolah mengalami kenaikan menjadi 4,17%.

Kecenderungan naiknya dan turunnya angka putus sekolah dalam beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun. Mulai tahun 2017, data yang disajikan Badan Pusat Statistik adalah angka putus sekolah, yaitu proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan sebagai berikut.

Tabel 2.51

Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,013	0,09	0,052	0,096	0,422	2,18
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	%	0,025	0,025	0,098	0,086	0,393	4,17

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun, 2024

Beberapa kajian menunjukkan bahwa angka putus sekolah dapat setidaknya ada enam faktor penyebab terjadinya putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan dasar yaitu faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendukung, faktor budaya dan lokasi atau letak sekolah (Burhannudin dalam Prihatin, 2011). Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut.

- Faktor ekonomi merupakan faktor pertama penyebab anak putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga si anak untuk membiayai segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu, walaupun pemerintah telah mencanangkan Program Pendidikan Gratis dua belas tahun, namun belum berimplikasi secara maksimal terhadap penurunan jumlah anak putus sekolah.
- Kurang perhatian orang tua merupakan faktor kedua. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua si anak sehingga perhatian orang tua lebih banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Persentase anak yang tidak dan putus sekolah karena rendahnya kurangnya perhatian orang tua.
- Fasilitas pembelajaran yang kurang memadai merupakan faktor ketiga. Fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat (alat, bahan, dan media) pembelajaran yang kurang memadai, buku pelajaran kurang memadai, dan sebagainya. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi siswa dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah.

- d. Minat anak untuk sekolah merupakan faktor keempat. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Minat yang kurang dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan misalnya tingkat pendidikan masyarakat rendah yang diikuti oleh rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah peranan lingkungan.
- e. Budaya merupakan faktor kelima yang terkait dengan kebiasaan masyarakat di sekitarnya. Rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi faktor lingkungan. Mereka beranggapan tanpa bersekolahpun anakanak mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah, oleh karena di desa jumlah anak yang bersekolah lebih banyak dan mereka dapat hidup layak maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan masa depan anaknya. Masyarakat di pedesaan lebih banyak mengarahkan anaknya yang masih usia sekolah untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah.
- f. Lokasi atau letak sekolah merupakan faktor keenam yang mampu menyebabkan anak putus sekolah. Jarak yang jauh dengan akses yang sulit merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Alat transportasi yang kurang serta jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh.

2.3.2.8 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs

Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2017-2023, angka kelulusan untuk jenjang sekolah dasar di Kota Dumai selalu mencapai 100% selama kurun waktu tersebut. Sedangkan untuk jenjang SMP, angka kelulusan mengalami penurunan dari tahun 2017 tahun 2018 dimana pada tahun 2017 angka kelulusan mencapai 100% turun menjadi 99,98% dan pada tahun 2019-2023 kembali mencapai 100%.

Tabel 2.52
Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Angka Kelulusan Sekolah SMP/MTS	%	100	99,98	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun, 2024

2.3.2.9 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs dalam rentang waktu 2017-2023 di Kota Dumai menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Angka melanjutkan tertinggi ada pada tahun 2017 dengan nilai 99,86%. Pada tahun 2023 angka melanjutkan adalah sebesar 74,69%.

Angka melanjutkan ini menunjukkan kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurunnya tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Berikut disajikan table perkembangan angka melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai.

Tabel 2.53
Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai Tahun 2014-2023

No	Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun							Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTS	%	99,86	97,38	87,73	94,52	94,52	94,52	74,69	-4,73

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2023

Jumlah penduduk berkualifikasi pendidikan tinggi menunjukkan fluktuasi selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, jumlah penduduk yang memiliki pendidikan tinggi tercatat sebanyak 28.316 orang. Namun, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2022, dengan jumlah penduduk berkualifikasi pendidikan tinggi hanya mencapai 19.882 orang. Pada tahun 2023, angka ini kembali meningkat menjadi 25.842 orang, meskipun belum mencapai tingkat yang sama seperti tahun 2021.

Sementara itu, total penduduk berusia 15 tahun ke atas menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlahnya mencapai 144.465 orang, kemudian bertambah menjadi 148.506 orang pada tahun 2022, dan terus naik hingga mencapai 156.790 orang pada tahun 2023. Meskipun jumlah penduduk dengan pendidikan tinggi mengalami peningkatan di tahun 2023, proporsinya terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas masih fluktuatif. Pada tahun 2021, proporsi penduduk berkualifikasi pendidikan tinggi sebesar 20%, menurun drastis menjadi 13% pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 16,48% pada tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perbaikan di tahun 2023, proporsi penduduk yang memiliki pendidikan tinggi masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat menjadi perhatian dalam merumuskan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pendidikan tinggi, terutama bagi penduduk usia produktif. Berikut disajikan tabel jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi tahun 2021-2023

Tabel 2.54
Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kota Dumai Tahun 2021 - 2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	28.316	19.882	25.842
Penduduk berusia 15 tahun ke atas	144.465	148.506	156.790

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	20	13	16,48

Sumber: BPS Kota Dumai, 2024

2.3.2.10 Jumlah Ketersediaan Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sosial, bisa disebut juga sebagai satu organisasi yaitu terikat kepada tata aturan formal, berprogram dan bertarget atau bersasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan dalam penyelenggaraan yang resmi. Pada akhirnya, fungsi sekolah terikat kepada sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Di kota Dumai jumlah sekolah pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada jenjang pendidikan PAUD/TK sebanyak 1 unit, jenjang SD/MI berkurang 1unit pada jenjang SMP/MTs berkurang 1unit. Sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK jumlah sekolah tidak mengalami penambahan.

Tabel 2.55
Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai
Tahun 2022 - 2023

No	Kecamatan	Satuan	Jenjang Pendidikan							
			PAUD/TK		SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA/SMK	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	Bukit Kapur	Unit	15	16	19	18	12	11	7	7
2	Medang Kampai	Unit	5	6	8	8	4	4	3	3
3	Sungai Sembilan	Unit	13	15	22	26	8	9	3	3
4	Dumai Barat	Unit	9	12	11	11	5	7	5	5
5	Dumai Selatan	Unit	14	22	17	17	13	14	13	13
6	Dumai Timur	Unit	27	28	28	28	8	8	7	7
7	Dumai Kota	Unit	11	16	10	10	7	6	4	4
8	Kota Dumai	Unit	94	115	115	118	57	59	42	42

Sumber : BPS, Kota Dumai Dalam Angka, Tahun 2024.

2.3.2.11 Persentase Literasi Membaca dan Numerasi

Untuk menilai kualitas pendidikan secara keseluruhan di Kota Dumai telah mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi membaca dan untuk menilai efektivitas pengajaran matematika dan kemampuan berhitung di sekolah-sekolah Kota Dumai telah mencapai standar kompetensi minimum dalam numerasi tabel di bawah ini menyajikan data-data pencapaian persentase literasi membaca dan numerasi pada tahun 2021-2023.

Tabel 2.56
Persentase Literasi Membaca dan Numerasi

Indikator	Tahun			Pertumbuhan/ Tahun(%)
	2021	2022	2023	
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	18,02	35,71	55,95	76,21
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	1,8	13,39	32,16	322,69

Indikator	Tahun			Pertumbuhan/ Tahun(%)
	2021	2022	2023	
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	32,8	49,2	65,45	41,26
Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	60,41	69,15	75,45	11,76

Sumber: Kemendikbudristek, 2024

Dari tabel di atas Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dari 18,02% pada 2021 menjadi 55,95% pada 2023. Ini mengindikasikan bahwa lebih banyak sekolah di Kota Dumai telah berhasil meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa mereka. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, mengingat hampir setengah dari satuan pendidikan belum mencapai standar minimum. Sedangkan persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca menunjukkan peningkatan dari 60,41% pada 2021 menjadi 75,45% pada 2023. Ini merupakan capaian yang baik, dengan lebih dari tiga perempat siswa mencapai standar kompetensi minimum. Namun, masih ada ruang untuk peningkatan agar semua siswa dapat mencapai standar literasi membaca yang diharapkan.

Jika dilihat dari peserta didik, terjadi peningkatan drastis persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dari 1,80% pada 2021 menjadi 32,16% pada 2023. Meskipun peningkatannya signifikan, angka ini masih relatif rendah, menunjukkan bahwa mayoritas sekolah di Kota Dumai masih perlu meningkatkan kualitas pengajaran matematika mereka. Kemudian Persentase peserta didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi menunjukkan peningkatan dari 32,80% pada 2021 menjadi 65,45% pada 2023. Peningkatan ini cukup baik, menandakan bahwa lebih banyak siswa telah mencapai kompetensi minimum dalam numerasi. Namun, masih ada sekitar sepertiga siswa yang belum mencapai standar, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam pengajaran matematika.

Secara keseluruhan, data menunjukkan tren positif dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kota Dumai, baik di tingkat satuan pendidikan maupun peserta didik. Namun, masih ada kesenjangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal numerasi di tingkat satuan pendidikan. Pemerintah Kota Dumai perlu terus meningkatkan upaya untuk mencapai target yang lebih tinggi, terutama dalam pengajaran matematika dan peningkatan fasilitas pendidikan yang mendukung literasi dan numerasi.

2.3.2.12 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber

dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 menegaskan bahwa IPLM menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan.

Tabel 2.57
Indeks Pembangunan Literasi Kota Dumai Tahun 2022-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun		Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2022	2023	
1	IPLM Kota Dumai	Indeks	61,87	68,42	10,59
2	IPLM Provinsi Riau	Indeks	70,98	66,88	-5,78
3	IPLM Nasional	Indeks	64,48	69,42	7,66

Sumber : Perpustakaan Nasional RI, Tahun 2024

2.3.2.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki-Laki dan Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/provinsi/kabupaten/kota. Interpretasinya, semakin tinggi TPAK kota, menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa suatu perekonomian di kota tersebut. Di Kota Dumai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki lebih besar bila dibanding Perempuan dengan perbandingan mendekati 2 : 1. Adapun perkembangan Tingkat partisipasi Angkatan kerja laki-laki meningkat setiap tahunnya, kondisi ini berbanding terbalik dengan Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan. Secara rinci perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Laki – Laki dan Perempuan dari Tahun 2021 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.58
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan berdasarkan Kabupaten/Kota di Kota Dumai Tahun 2021-2023

No	Uraian	Jenis Kelamin					
		Laki-Laki			Perempuan		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Kota Dumai	79,60	84,42	84,99	49,55	45,64	46,19
2	Provinsi Riau	82,15	83,59	83,77	47,14	43,28	44,27

Sumber: BPS, 2024

2.3.2.14 Stunting

Stunting merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian utama, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan kognitif dan produktivitas

mereka di kemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah bersama berbagai pihak terkait terus berupaya untuk menurunkan angka prevalensi stunting melalui berbagai program intervensi gizi, perbaikan sanitasi, serta peningkatan edukasi masyarakat. Untuk memahami efektivitas upaya yang telah dilakukan, berikut disajikan tren prevalensi stunting Kota Dumai

Tabel 2.59
Prevalensi Stunting Kota Dumai Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun						Pertumbuhan/Tahun
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prevalensi Stunting	17,3	11,59	0	23,00	12,80	14,9	-2,94

Sumber: Survey Kesehatan Indonesia, 2024

Prevalensi stunting di Kota Dumai menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2018 hingga 2023. Pada tahun 2018, prevalensi stunting tercatat sebesar 17,3%. Angka ini kemudian mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 11,59% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, prevalensi tercatat 0%, yang menunjukkan tidak adanya pencatatan data dikarenakan terjadinya Covid-19 pada tahun tersebut. Pada tahun 2021, prevalensi stunting kembali meningkat secara signifikan menjadi 23%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Meskipun demikian, di tahun 2022, angka prevalensi menurun drastis menjadi 12,8%, menunjukkan adanya intervensi yang mungkin berhasil dalam mengurangi kasus stunting. Namun, pada tahun 2023, angka prevalensi kembali mengalami kenaikan menjadi 14,9%, meskipun secara rata-rata tahunan, terjadi penurunan sebesar 2,94% selama enam tahun terakhir.

2.3.2.15 Prevalensi Balita Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu.

Dari hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) pada balita di Kota Dumai pada tahun 2023 diperoleh status gizi balita sebagai berikut: persentase balita dengan gizi buruk sebesar 0,15% (13 penderita), prevalensi balita dengan gizi kurang sebesar 0,89% (178 penderita). Bila dibandingkan dengan target sasaran tahun 2023 dimana persentase balita dengan gizi buruk sebesar < 2% dan persentase balita dengan gizi kurang sebesar <5%, maka pencapaian status gizi balita sudah lebih dari target.

Tabel 2.60
Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	Tahun							Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Bayi Baru lahir ditimbang	Bayi	7.382	7.674	7.929	8.119	8.102	8.064	8.351	2,08
Jumlah Bayi BBLR	Bayi	167	166	151	121	71	102	89	-9,96
Persentase Bayi BBLR	%	2,26	2,16	1,9	1,49	0,88	1,26	1,07	-11,72
Jumlah Balita ditimbang	Balita	34.278	35.145	36.069	26.005	22.187	19.381	19.267	-9,16
Jumlah Balita Gizi Buruk	Balita	5	6	7	3	6	23	13	17,26
Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,01	0,02	0,02	0,01	0,03	0,12	0,07	38,31

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024

Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain, kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

Permasalahan kesehatan gizi masyarakat yang juga menjadi perhatian Pemerintah adalah *stunting*. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). *Stunting* mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Anak *stunting* juga memiliki risiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Permasalahan *stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru akan terlihat ketika anak sudah menginjak usia dua tahun. *UNICEF* mendefinisikan *stunting* sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi badan di bawah minus (*stunting* sedang dan berat) dan minus tiga (*stunting* kronis). Hal ini diukur dengan menggunakan standar pertumbuhan anak yang dikeluarkan oleh *WHO*. Selain mengalami pertumbuhan terhambat, *stunting* juga seringkali dikaitkan dengan penyebab perkembangan otak yang tidak maksimal.

Kementrian kesehatan telah menyusun strategi nasional dalam menurunkan *stunting*. Strateginya antara lain dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak yakni untuk anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Upaya yang dilakukan di antaranya pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi

berusia 0-23 bulan. Juga intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan, antara lain, penyediaan air bersih atau sanitasi, pendidikan gizi, dan ketahanan pangan dan gizi.

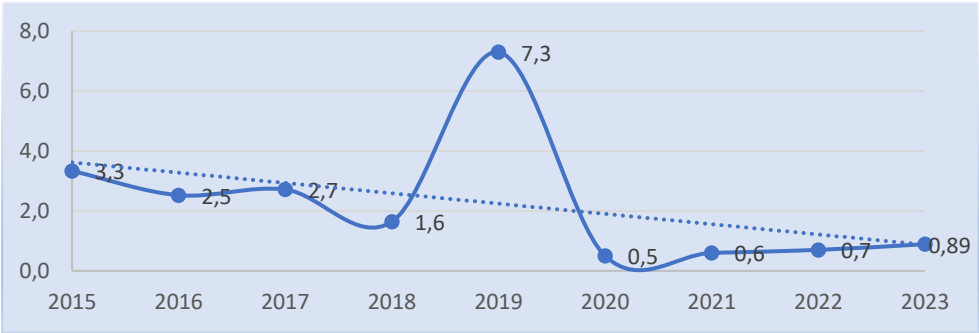
Dalam RPJMN 2020-2024 penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19% pada 2024 dari yang saat ini 30,8% (Risikesdas 2018). Upaya ini harus dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif. Pengukuran stunting dengan menggunakan pengukuran TB/U, anak stunting akan masuk kategori kurang dari -2 standar deviasi (SD), artinya, di dalam grafik pertumbuhan balita akan berada di bawah garis merah. Prevalensi balita pendek (*stunting*) Kota Dumai sebesar 0,2% (79 penderita), balita kurus sebanyak 93 penderita (0,2%).

Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

2.3.2.16 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Anak bergizi kurang biasanya disebabkan karena kekurangan gizi mikro seperti zat besi, vitamin, atau yodium. Penambahan gizi dalam asupan makanan sangat diperlukan untuk memperbaiki status gizi anak. Penyebab gizi kurang pada anak balita adalah karena tidak mendapatkan asupan gizi yang sesuai usiannya. Prevalensi status gizi kurang selama periode 2015-2022 mengalami kecenderungan penurunan dari 3,3 pada tahun 2015 menjadi 0,7 pada tahun 2022. Berikut disajikan perkembangan balita gizi kurang di Kota Dumai dari tahun 2015-2022 pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2.6
Trend Prevalensi Balita Gizi Kurang di Kota Dumai Tahun 2015-2022



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Riau, data diolah

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan status gizi balita kurang adalah konsumsi makanan yang tidak mencukupi kebutuhan sehingga tubuh kekurangan zat gizi, keadaan kesehatan, pengetahuan orang tua tentang kesehatan, tingkat pendidikan, pemberian ASI, kondisi sosial ekonomi, pada konsumsi keluarga, faktor sosial keadaan penduduk, paritas, umur, jenis kelamin, dan pelayanan kesehatan.

2.3.2.17 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran (*Infant Mortality Rate*)

Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Selama tahun 2015-2023 realisasi capaian Angka Kematian Bayi sebanyak 14,09 bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2015 kemudian menurun menjadi 11,36 bayi per 1.000 kelahiran hidup tahun 2023. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Perkembangan Angka Kematian Bayi 1.000 kelahiran hidup di Kota Dumai dari tahun 2014-2023 pada Tabel berikut.

Tabel 2.61
Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Kota Dumai Tahun 2015-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun									Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Kelahiran Hidup	Kelahiran Hidup	8.233	8.233	7.738	7.886	8.029	8.168	8.352	8.538	8.718	0,72
2	Kematian Absolut Bayi	Bayi	116	113	90,000	56,000	58,000	60,000	69,000	85,000	99,00	-1,96
3	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	14,09	13,73	11,630	7,100	7,220	7,350	8,260	9,960	11,36	-2,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

Perkembangan tren Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup di Kota Dumai menunjukkan perbaikan dengan penurunan sebesar 2,66% per tahun, walaupun jumlah kelahiran bayi meningkat dengan pertumbuhan sebesar 0,72% per tahun atau bertambah dari 8.233 bayi tahun 2015 menjadi 8.718 bayi tahun 2023.

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Penyebab kematian pada bayi umumnya didominasi oleh kasus Asfiksia, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Kelainan bawaan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang.

Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi waktu lahir.

Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian bayi antara lain adalah meningkatkan kebersihan (*hygiene*) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan bayi. Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan

dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Angka kematian bayi tahun 2017-2023 per Kecamatan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Perkembangan Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Kecamatan	Angka Kematian Bayi (/1000 Kelahiran Hidup)													
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Absol ut	/1000 KH	Absol ut	/1000 KH	Absol ut	/1000 KH	Absol ut	/1000 KH	Absol ut	/1000 KH	Absol ut	/1000 KH	Absol ut	/1000 KH
1	Dumai Kota	11,00		7		7,00		8,00		5,00		8,00		12	
2	Dumai Timur	14,00		11		11,00		8,00		12,00		13,00		21	
3	Dumai Selatan	17,00		7		7,00		10,00		15,00		22,00		14	
4	Dumai Barat	16,00		7		7,00		10,00		9,00		16,00		12	
5	Bukit Kapur	16,00		13		13,00		10,00		13,00		15,00		21	
6	Sungai Sembilan	12,00		9		9,00		11,00		9,00		8,00		16	
7	Medang Kampai	3,00		4		4,00		3,00		6,00		3,00		3	
8	Kota Dumai	90,00	11,63	56,00	7,10	58,00	7,22	60,00	7,35	69,00	8,26	85,00	9,96	99	11,36

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

2.3.2.18 Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2015-2023 sebagai berikut.

Tabel 2.63
Perkembangan Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2015-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun									Pertumbuhan / Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Kelahiran Hidup	Kelahiran Hidup	8.233	8.233	7.738	7.886	8.029	8.168	8.352	8.538	8.718	0,72
2	Kematian Absolut Balita	Balita	137	139	104	71	74	72	82	95	117,00	-1,95
3	Angka Kematian Balita	per 1.000 Kelahiran Hidup	16,64	16,88	13,44	9	9,22	8,81	9,82	11	13,42	-2,65

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai dari tahun 2015-2023 menunjukkan kecenderungan penurunan, dari 16,64/1000 kelahiran hidup tahun 2015 menjadi 13,42/1000 kelahiran hidup bayi di tahun 2023. Perkembangan tren Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup Kota Dumai menunjukkan penurunan sebesar 2,65% per tahun, seiring dengan jumlah balita bertambah dengan pertumbuhan sebesar 0,72% per tahun atau dari 8.233 balita tahun 2015 menjadi 8.718 balita tahun 2023. Usaha untuk mendukung upaya penurunan kematian balita antara lain adalah meningkatkan kebersihan (hygiene) dan sanitasi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat melalui penyediaan air bersih, meningkatkan perilaku hidup sehat, serta kepedulian terhadap kelangsungan dan perkembangan dini anak; pemberantasan penyakit menular, meningkatkan cakupan imunisasi dan, meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi termasuk pelayanan kontrasepsi dan

ibu, menanggulangi gizi buruk, kurang energi kronik dan anemi, serta promosi pemberian ASI eksklusif dan pemantauan pertumbuhan balita. Perkembangan Angka kematian balita tahun 2017-2023 per Kecamatan Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.64
Perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Kecamatan	Angka Kematian Balita (/1000 Kelahiran Hidup)													
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH	Absolut	/1000 KH
1	Dumai Kota	12		7		7		9		7		8		17	
2	Dumai Timur	15		18		13		10		13		15		24	
3	Dumai Selatan	19		4		7		12		18		22		16	
4	Dumai Barat	16		6		14		12		10		20		17	
5	Bukit Kapur	20		15		17		13		16		17		23	
6	Sungai Sembilan	18		9		11		13		12		9		16	
7	Medang Kampai	4		12		5		3		6		4		4	
	Kota Dumai	104	13,44	71	9	74	9,22	72	8,81	82	9,82	95	11,13	117	13,42

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024

2.3.2.19 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: *eklamsi*, pendarahan, *partus macet*, infeksi, *abortus* dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, *thypoid* serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Meningkatnya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tingginya mobilitas warga pendatang dari luar Kota Dumai. Warga pendatang ini pada umumnya masih kurang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan jarang mau datang ke sarana kesehatan (posyandu, poskeskel dan puskesmas) untuk memeriksakan kesehatannya. Penyebab kematian ibu pada umumnya karena perdarahan dan eklamsi atau pre eklamsi. Perkembangan Angka Kematian Ibu dari tahun 2015-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.65
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai
Tahun 2015-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun									Pertumbuhan / Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Kelahiran Hidup	Kelahiran Hidup	8.233	8.233	7.738	7.886	8.029	8.168	8.352	8.538	8.718	0,72
2	Kematian Absolut Ibu	Ibu	12	9	11	5	10	3	22	5	9	-3,53
3	Angka Kematian Ibu	per 100.000	145,75	109,32	142,16	63,4	124,55	36,73	263,41	58,56	103,23	-4,22

No	Indikator	Satuan	Tahun									Pertumbuhan / Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Kelahiran Hidup										

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan ibu dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Perkembangan Angka Kematian ibu di Kota Dumai dari tahun 2015-2023 menunjukkan kecenderungan penurunan dari 145,75/100.000 kelahiran hidup tahun 2015 menjadi 103,23/100.000 kelahiran hidup bayi di tahun 2023.

Dari data angka kematian ibu menurut Kecamatan dari tujuh Kecamatan terdapat lima Kecamatan pada tahun 2023 yaitu Dumai Timur, Dumai Selatan, Dumai Barat dan Sungai Sembilan, dengan rata-rata angka kematian ibu terbanyak terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Timur sebesar 3,00/100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.66
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Kecamatan	Angka Kematian Ibu (/100.000 Kelahiran Hidup)													
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH	Absolut	/100.000 KH
1	Dumai Kota	2,00		-		1,00		1,00		2,00		-		-	
2	Dumai Timur	1,00		1,00		4,00		-		5,00		1,00		3,00	
3	Dumai Selatan	2,00		-		1,00		-		2,00		1,00		2,00	
4	Dumai Barat	3,00		1,00		1,00		-		3,00		1,00		1,00	
5	Bukit Kapur	2,00		2,00		-		1,00		6,00		-		-	
6	Sungai Sembilan	1,00		-		2,00		-		-		1,00		3,00	
7	Medang Kampai	-		1,00		1,00		1,00		4,00		1,00		-	
	Kota Dumai	11,00	142,16	5,00	63,40	10,00	124,55	3,00	36,73	22,00	263,41	5,00	58,56	9,00	103,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024

Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi tenaga bidan dan perilaku ibu hamil dalam pemeriksaan kehamilan. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi salah satu penyumbang angka kematian di Kota Dumai.

2.3.2.20 Angka Kematian Neo-Natal per 1.000 Kelahiran

Kematian neonatal merupakan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam 7 hari setelah kelahiran, di kenal juga dengan istilah kematian neonatal dini/perinatal, dan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup lebih dari 7 hari sampai kurang 29 hari dikenal dengan kematian neonatal lanjut. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi, sedangkan kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal. Keberhasilan Kota Dumai

mengurangi Angka Kematian Neonatal karena adanya program alarm persalinan. Berikut data Angka Kematian Neonatal di Kota Dumai dalam Tabel di bawah ini

Tabel 2.67
Perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai
Tahun 2015-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun									Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Kelahiran Hidup	Kelahiran Hidup	8.233	8.233	7.738	7.886	8.029	8.168	8.352	8.538	8.718	0,72
2	Kematian Absolut Neonatal	Neonatal	92	81	71	48	37	39	44	52	67	-3,89
3	Angka Kematian Neonatal	per 1.000 Kelahiran Hidup	11,17	9,84	9,18	6,09	4,61	4,77	5,27	6,09	7,69	-4,56

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

AKN Kota Dumai pada tahun 2015-2023 mengalami perkembangan fluktuatif yang cenderung menurun sejak tahun 2015 sebanyak 11,17% per 1.000 kelahiran kemudian berkurang menjadi 7,69% bayi per 1.000 kelahiran pada pada tahun 2023 dengan penurunan sebesar 4,56% per tahun. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka menghindari kematian neo-natal adalah setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar, setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dan setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

2.3.2.21 Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, membudayakan NKBS, meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera dan berfungsi sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera, gerakan ketahanan keluarga dan gerakan ekonomi keluarga sejahtera. Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

- a. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka kematian ibu (Ibu Hamil, melahirkan dan nifas);
- b. Membudayakan NKKBS;
- c. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
- d. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman

empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk Masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan yang bersumber daya Masyarakat. Penimbangan secara rutin di Posyandu dapat untuk pemantauan pertumbuhan dan mendeteksi sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan bayi dan balita. Peningkatan gizi bayi dan balita di posyandu yang dilakukan oleh kader dapat berupa Penyuluhan tentang ASI, Status Gizi, MPASI, Imunisasi, pemberian Vit.A, serta stimulasi tumbuh kembang anak, diare pada balita. Selain itu diharapkan ada strategi operasional yang dapat dilakukan di setiap Posyandu dengan melakukan analisa rasio jumlah posyandu terhadap jumlah bayi dan balita dalam upaya peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan tumbuh kembang sejak dalam kandungan umur 2 tahun (*Golden Period*).

Jumlah posyandu dari tahun 2015-2023 mengalami peningkatan sebesar 0,26% per tahun, dari 194 posyandu pada tahun 2015 meningkat menjadi 198 pada tahun 2022. Sementara jumlah balita mengalami peningkatan dari 42.433 orang tahun 2015 menjadi 44.931 orang tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 0,72% per tahun. Berikut disajikan data rasio posyandu per satuan balita pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.68
Perkembangan Rasio Posyandu Kota Dumai Tahun 2015-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun									Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Posyandu	Unit	194	196	196	196	196	197	197	198	198	0,26
2	Jumlah Balita	balita	42.433	42.433	39.883	40.639	41.381	42.098	43.046	44.003	44.931	0,72
3	Rasio posyandu per satuan balita	per 1.000 balita	4,57	4,62	4,91	4,82	4,74	4,68	4,58	4,5	4,41	-0,44

Sumber: Profil kesehatan Provinsi Riau, 2023

Hal ini terjadi karena kemampuan penyediaan fasilitas posyandu yang terbatas walaupun jumlah balita berkurang setiap tahunnya. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dari, oleh dan untuk bersama memberdayakan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

2.3.2.22 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Pada tahun 2014-2023 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 4 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe B yakni RSUD Kota Dumai, 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina dan 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007 (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi dan berubah status menjadi Balai Pengobatan). Rasio cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2014-2023 tersaji pada Tabel 2.103

Dapat dilihat bahwa rasio cakupan pelayanan rumah sakit tahun 2014 adalah sebesar 0,011 naik menjadi 0,015 pada tahun 2023. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi penurunan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari tahun 2014-2023. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani tapi tidak diiringi oleh penambahan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 2023, per 1.000 jumlah penduduk Kota Dumai hanya sebanyak 0,015 yang dapat dilayani oleh rumah sakit.

Tabel 2.69
Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun										Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Rumah Sakit	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	4	5	6,48
Jumlah penduduk	Jiwa	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	2,11
Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	Indek	0,011	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009	0,009	0,012	0,015	4,27

Sumber: Dinas Kesehatan dan Kota Dumai Dalam Angka, 2020 diolah

2.3.2.23 Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Dumai tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Jumlah dokter di Kota Dumai selama periode tahun 2011-2023 mengalami perkembangan fluktuasi, dari 121 dokter pada tahun 2011 menjadi 186 dokter pada tahun 2023.

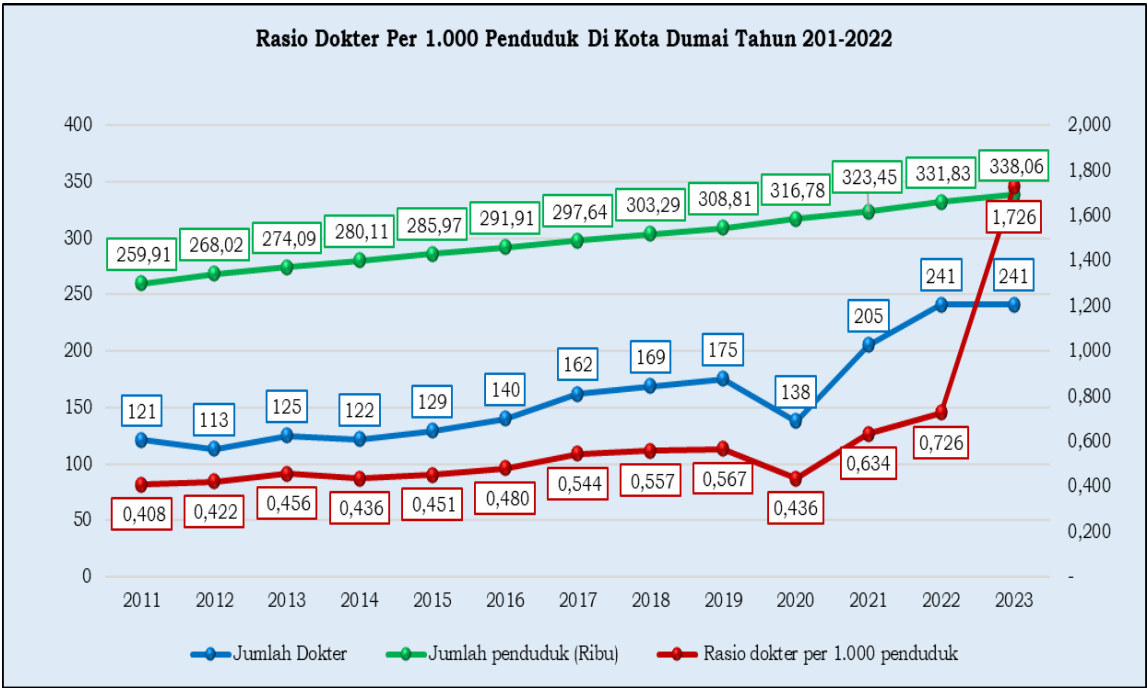
Tabel 2.70
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2023

Indikator	Satuan	Tahun													Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Dokter	Unit	121	113	125	122	129	140	162	169	175	138	205	241	186	5,13
Jumlah penduduk	Jiwa	259.913	268.022	274.089	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	2,22
Rasio dokter per 1.000 penduduk	Indek	0,466	0,422	0,456	0,436	0,451	0,480	0,544	0,557	0,567	0,436	0,634	0,726	0,550	2,87

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2023 adalah sebesar 0,550 yang artinya bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh 0,550 dokter. Dengan kata lain 1 orang dokter melayani 1.181 penduduk. Jumlah dokter di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuasi, ini disebabkan antara lain karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan.

Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya kriteria pendataan dokter praktek di rumah maupun di pusat pelayanan kesehatan, baik meliputi nama maupun alamatnya, sehingga dapat terjadi perhitungan ganda pada saat pendataan. Selain itu adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat menyebabkan data jumlah dokter mengalami penurunan. Selain itu pertambahan jumlah dokter lebih lambat dibandingkan dengan pertambahan jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk Kota Dumai, tidak dimbangiu dengan pertambahan jumlah dokter sehingga yang melayani tidak seimbang dengan pertambahan jumlah penduduk. Namun demikian masuk masuk kategori yang ditetapkan WHO bahwa seorang dokter maksimal melayani 2.500 penduduk per dokter.



Gambar 2.21 Perkembangan Rasio Dokter Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2011-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

2.3.2.24 Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis dan para medis di Kota Dumai meliputi para dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan bidan. Peran tenaga medis di mata masyarakat dan dunia sangatlah penting. Tenaga medis memiliki peran sebagai garda terdepan dalam penanganan Kesehatan masyarakat. Hasil pendataan rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk Kota Dumai tahun 2014-2023, menunjukkan peningkatan dari 3,726 tahun 2014 menjadi 6,617 tahun 2023, lihat Tabel berikut.

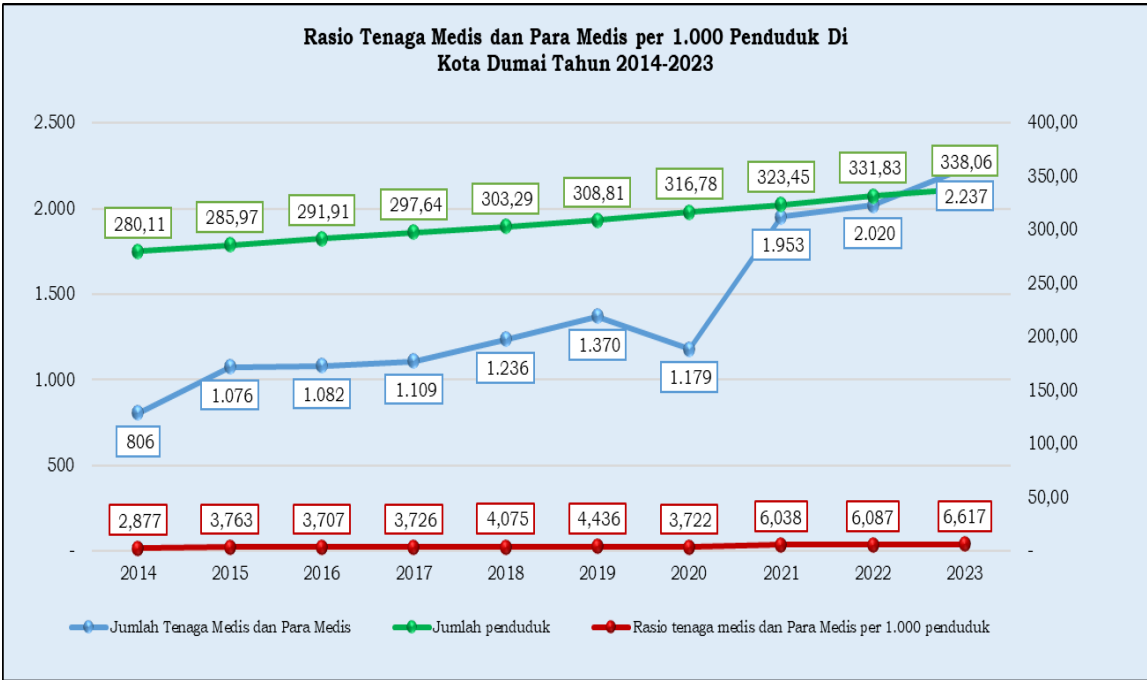
Tabel 2.71 Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun										Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Tenaga Kesehatan	Unit	806	1.076	1.082	1.109	1.236	1.370	1.179	1.953	2.020	2.237	13,86
Jumlah Tenaga Medis	Jiwa	122	129	140	162	169	175	191	205	241	186	4,47
Jumlah Tenaga Para Medis	Jiwa	684	947	942	947	1.067	1.195	1.041	1.748	1.779	1.996	13,63
Jumlah penduduk	Jiwa	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	2,11

Indikator	Satuan	Tahun										Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk	Indek	2,877	3,763	3,707	3,726	4,075	4,436	3,722	6,038	6,087	6,617	10,07

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2012-2023

Jika dilihat trend ketersediaan tenaga medis dan para medis menunjukkan terjadinya peningkatan kapasitas dimana pada tahun 2014 seorang tenaga medis dan para medis melayani sebanyak 121 jiwa penduduk kemudian mengalami perbaikan menjadi 164 jiwa penduduk per seorang tenaga medis dan para medis tahun 2023. Perkembangan rasio layanan tenaga Kesehatan pada penduduk Kota Dumai tahun 2014-2023 lihat Gambar di bawah ini.



Gambar 2.22 Perkembangan Rasio Tenaga Medis dan Para Medis Per 1.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2014-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Salah satu penyebab meningkatnya Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita dan Angka Kematian Ibu adalah terbatasnya tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai khususnya tenaga medis yakni tenaga dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis baik di puskesmas maupun di RSUD Kota Dumai. Pada umumnya kasus kematian bayi, kematian balita dan kematian ibu merupakan kasus kematian dengan rujukan ke rumah sakit.

Dengan ditetapkan RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat, maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien dari Kota Dumai namun juga pasien dari Kabupaten lain seperti dari Bengkalis dan Rokan Hilir. Pada tahun 2015 total tenaga medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 948 namun pada tahun 2023 jumlah tenaga medis ini bertambah menjadi 2.044 tenaga medis. Berikut disajikan tabel jumlah tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah kota dumai tahun 2015-2023

Tabel 2.72
Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai Tahun 2015-2023

Uraian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis									Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Dokter Spesialis	25	30	36	32	39	49	46	53	46	7,92
Dokter Umum	84	87	72	80	100	89	138	166	119	4,45
Dokter Gigi	20	23	23	21	22	26	21	22	21	0,61
Perawat	445	425	435	485	565	532	681	642	834	8,17
Bidan	301	314	331	336	536	415	592	651	665	10,42
Apoteker	7	41	38	21	65	63	178	205	194	51,47
Asisten Apoteker		17	19	37	-	-	-	-	-	
Gizi	16	25	25	25	29	31	35	41	48	14,72
Sanitasi	10	10	10	9	-	-	-	-	-	
Kesehatan Masyarakat	16	44	52	67	38	-	48	52	69	20,04
Teknisi Medis	24	81	68	67	-	-	50	53	48	9,05

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2019 dan Kota Dumai Angka 2023

Jika dilihat rasio tenaga medis (dokter) dan paramedis menurut Kecamatan menunjukkan bahwa seluruh Kecamatan di Kota Dumai tidak melebihi standar WHO yaitu 2.500 penduduk per seorang dokter, jelasnya lihat Tabel berikut.

Tabel 2.73
Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2023

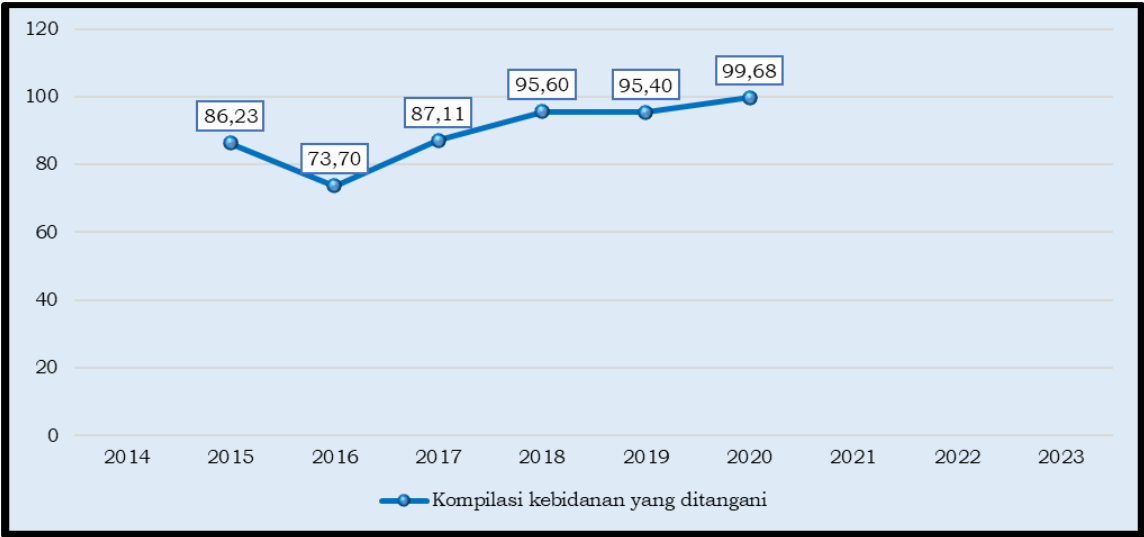
No	Kecamatan	Rasio Dokter dan Para Medis Terhadap Penduduk Tahun 2023							
		Jumlah Penduduk	Dokter	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Rasio Dokter/ Jumlah Penduduk	Rasio Para Media/ Jumlah Penduduk
1	Bukit Kapur	55.163	36	47	87	12	6	1.532	363
2	Medang Kampai	18.838	15	24	33	8	2	1.256	281
3	Sungai Sembilan	46.564	21	41	67	5	2	2.217	405
4	Dumai Barat	46.141	33	39	82	6	5	1.398	350
5	Dumai Selatan	55.642	66	157	92	29	3	843	198
6	Dumai Timur	73.634	90	444	192	96	30	818	97
7	Dumai Kota	42.082	103	91	112	38	2	409	173
	Kota Dumai	338.064	362	843	665	194	48	934	193

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai dan Kota Dumai Dalam Angka, 2023

2.3.2.25 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif). Kasus komplikasi kebidanan yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2015-2020 sebagaimana Gambar berikut.



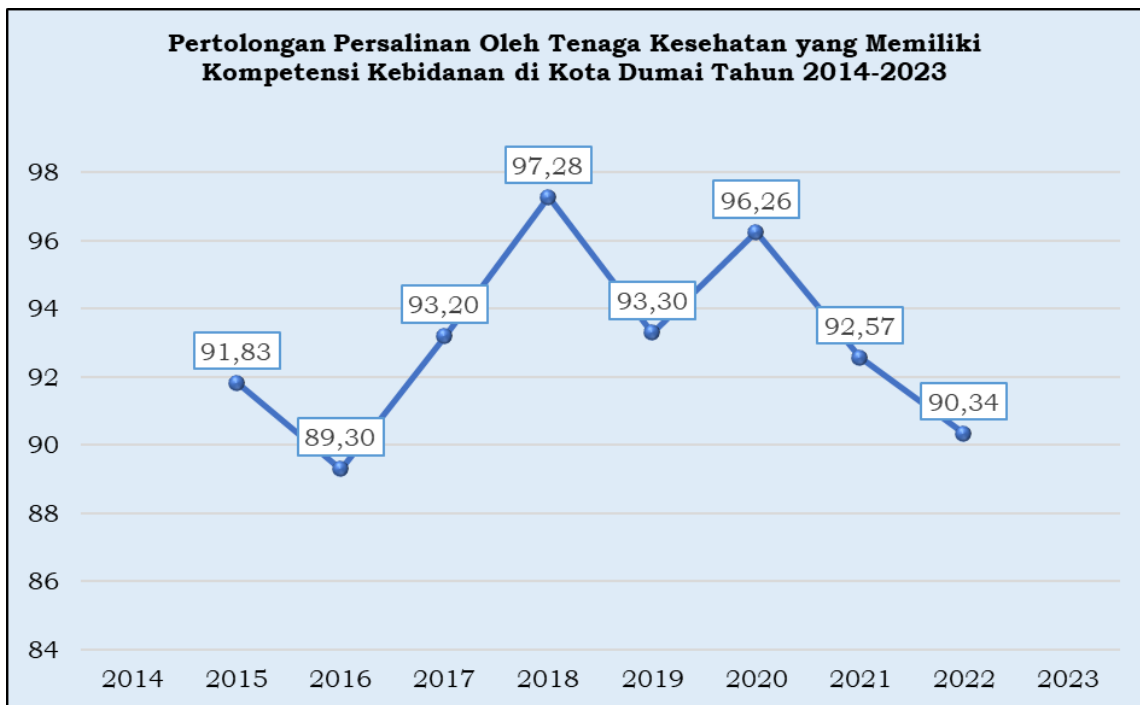
Gambar 2.23 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di RS Kota Dumai 2015-2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

2.3.2.26 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain, diantaranya adalah proses kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran.

Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2015-2022 cenderung menurun dengan pertumbuhan sebesar -0,15% per tahun. Berikut ini perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai.



Gambar 2.24 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2015-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai cenderung menurun dari tahun 2015-2022. Pada tahun 2022 angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sebesar 90,34%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyaknya penduduk yang belum memilih tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran utama karena rendahnya kemampuan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan.

2.3.2.27 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

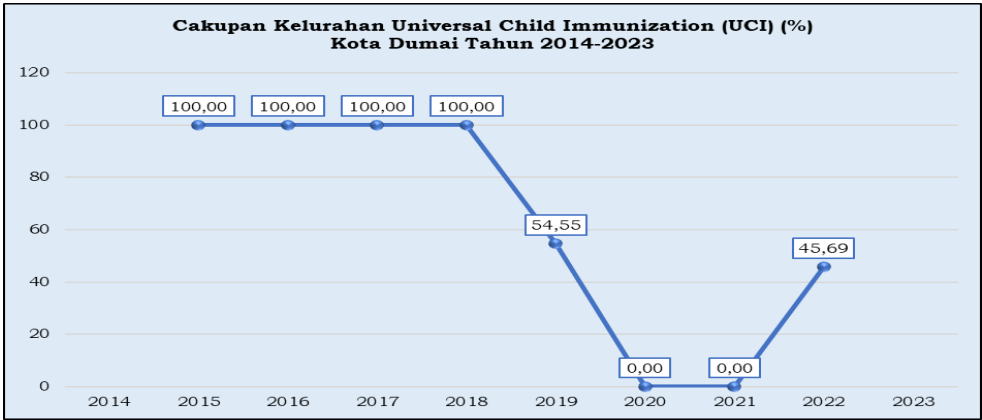
Untuk cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Dumai menunjukkan bahwa masyarakat Kota Dumai telah mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui Posyandu, Puskesmas maupun Rumah Sakit. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT/HB/Hib, 4 dosis , 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak rubella. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi kelas 1 SD sederajat diberikan vaksinasi 1 DT dan campak ruibella (MR), kelas 2 dan 5 Sd sederajat diberikan diberikan vaksinasi Td.

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur

meliputi 2 dosis Td.Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis Td.

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2019 seluruh desa/ kelurahan mencapai 100% UCI (*Universal Child Immunization*) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-Hib, Polio dan campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang. Berikut ini perkembangan cakupan kelurahan UCI di Kota Dumai. Berikut ini gambar cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai tahun 2015-2022.



Gambar 2.25 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai Tahun 2015-2022

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Selama tahun 2015-2022, cakupan kelurahan UCI mengalami penurunan yang sangat signifikan terutama pada tahun 2020-2021.Target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid 19 tahun 2020, dimana Posyandu balita tidak berjalan, sehingga cakupan kelurahan UCI tidak tercapai. Namun demikian, cakupan kelurahan UCI kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 45,69%. Angka ini masih jauh dari target UCI yang diharapkan sesuai dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai adalah 100% kelurahan mencapai UCI.

Kementerian Kesehatan menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian UCI desa/kelurahan, yaitu minimal 80% bayi didesa/kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap.Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0 – 11 bulan) untuk memberikan kekebalan dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tanpa imunisasi anak-anak mudah terserang berbagai penyakit, kecacatan dan kematian. GAIN UCI akan dilaksanakan secara bertahap mulai, dengan sasaran seluruh bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, Hepatitis B, DPT-HB Hib, Polio dan campak/MR.

Tabel 2.74
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Kecamatan	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)													
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
1	Dumai Kota	5	100	5	100	5	100	0	0	0	0	5	100	5	100
2	Dumai Timur	5	100	5	100	5	100	0	0	0	0	3	60	1	20
3	Dumai selatan	5	100	5	100	1	20	0	0	0	0	0	0	3	60
4	Dumai Barat	4	100	4	100	0	0	0	0	0	0	2	50	2	50
5	Bukit Kapur	5	100	5	100	3	60	0	0	0	0	3	42,86	4	57,14
6	Sungai Sembilan	5	100	5	100	0	0	0	0	0	0	4	66,67	5	83,33
7	Medang Kampai	4	100	4	100	4	100	0	0	0	0	1	25	2	50
Kota Dumai		33	100	33	100	18	54,55	0	0	0	0	18	50	22	61,11

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024

Imunisasi BCG (*Bacillus Celmette-Guerin*) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis.Imunisasi BCG diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu.Imunisasi hepatitis-B sebanyak 1 (satu) kali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan dan dapat menyebabkan pengerutan hati (*sirosis*) dan kanker hati. Imunisasi terhadap Balita merupakan bagian dari pelayanan kepada Balita, dimana persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi diKota Dumai.

Imunisasi Hepatitis B ini diberikan segera setelah lahir di sarana pelayanan kesehatan. Imunisasi DPT-HB sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kekebalan pada penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus dan Hepatitis B. Imunisasi ini pertama kali diberikan pada usia bayi 2 (dua) bulan. Kemudian imunisasi berikutnya selisihnya 4 minggu.Pada saat ini pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis B dalam program imunisasi dilakukan bersamaan dengan menggunakan vaksin DPT-HB. Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan dari penyakit polio dan diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan jelang waktu (jarak) 4 minggu. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak, diberikan pada bayi umur 9 bulan sebagaimana tersaji pada Tabel berikut:

Tabel 2.75
Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai Tahun 2015–2023

No	Jenis Imunisasi	Tahun									Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	BCG	102,2	97,32	100,28	101,8	100,61	59,81	68,51	90,04	83,9	-2,44
2	Campak	95,79	97,38	98,42	95,85	97,27	34,54	44,73	87,51	87,88	-1,07
3	DPT 1, DPT 2 dan DPT 3	103,7	99	98,82	99,1	97,76	50,02	49,62	90,98	86,17	-2,29
4	Polio 1, 2, 3 dan Polio 4	103,8	93,55	98,67	99	97,72	49,93	52,6	90,9	86,56	-2,24
5	Hepatitis B1, B2 dan B3	103,7	99	98,82	99,1	97,76	50,02	49,62	90,98	88,7	-1,93

Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2018-2023

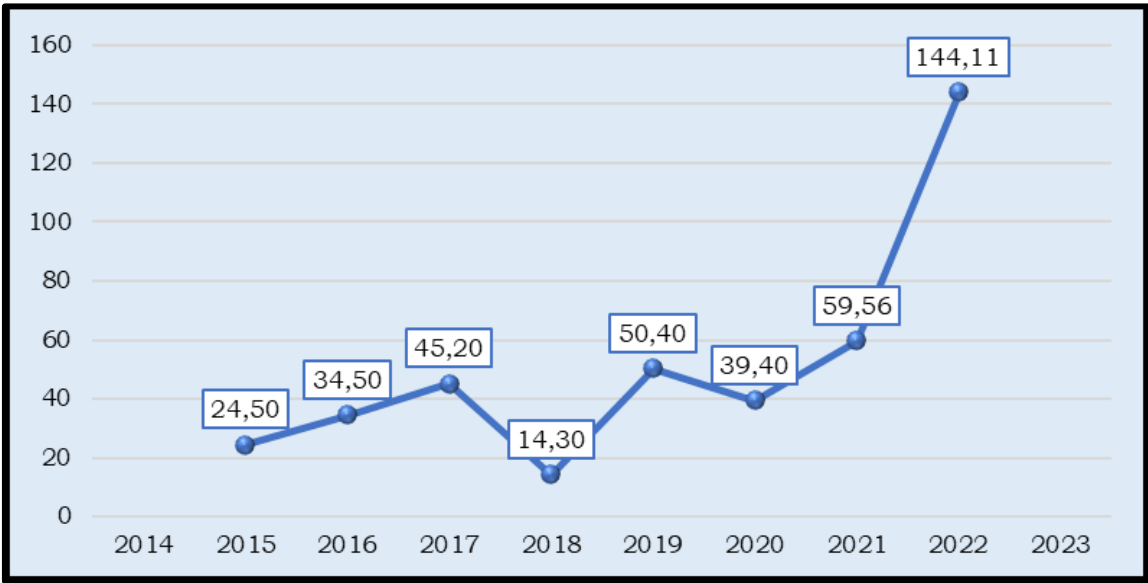
2.3.2.28 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Untuk penanggulangan Tuberkukosis Pemerintah memberikan otoritas terhadap kabupaten/kota. Dalam penanggulangan tuberculosis, *WHO* telah menetapkan strategi, yang merupakan strategi cost-efektif yaitu strategi *DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse)* yang artinya pengobatan jangka pendek dengan pengawasan minum obat langsung yang memberikan angka kesembuhan yang tinggi.

Setiap orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai stándar. Pelayanan orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis dilakukan minimal 1 kali dalam setahun berupa pemeriksaan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan dahak secara bakteriologis dan/ atau radiologis, edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan, melakukan rujukan jika diperlukan.

Cakupan pelayanan orang terduga Tuberkulosis di Kota Dumai per Kecamatan tahun 2015-2022 sudah mulai membaik, karena sudah mencapai 100% pada tahun

2023. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosos di Kota Dumai dari tahun 2015-2022.



Gambar 2.26 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Dumai Tahun 2014-2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Tabel 2.76
Penangan Tuberkulosis Kota Dumai Tahun 2014 - 2023

No.	Uraian Indikator	Tahun										Pertumbuhan/ tahun
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	55,29	38,76	39,45	72,58	29,39	12,34	35,28	21,54	48,61	59,47	0,81
2	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	112,84	95,99	129,58	88,22	65,73	92,19	92,84	90,96	91,24	90,83	-2,38

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2024

Pada tahun 2023 belum semua Kecamatan belum mencapai target, rata- rata pertahunnya hanya berkisar 144,11%. Cakupan terendah berada di Kecamatan Dumai Timur, rata – rata pertahunnya hanya 69,69 % dari target 100%. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjdi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.77
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017–2023

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan OrangTerduga Tuberkulosis (%)													
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
1	Dumai Kota	216	53,3	156	5,14	575	55,1	686	58,4	731	59,14	1.826	142,21	1.535	121,25
2	Dumai Timur	205	36,9	379	8,7	346	23,5	320	17	667	31,46	1.446	69,69	1.734	86,1
3	Dumai selatan	324	47,8	351	10,3	568	69,7	392	36,9	1.348	113,18	3.284	226,64	3.369	207,06
4	Dumai Barat	410	47,8	671	24	562	59	491	43,1	644	48,68	2.472	199,84	4.052	342,23
5	Bukit Kapur	226	31,1	348	11,2	340	55,5	473	62,3	596	59,42	1.272	124,1	1.620	151,4
6	Sungai Sembilan	309	162	335	14,3	312	63	202	41,7	339	85,1	699	104,64	1.375	201,61
7	Medang Kampai	94	18	166	17,8	149	56,4	101	36,7	226	61,08	606	192,38	659	180,55
Kota Dumai		2.148,00	45,1	2.862,00	14,3	2.852,00	50,4	2.665,00	39,4	4.551	59,59	11.605	144,11	14.344	174,76

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024

2.3.2.29 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan pelayanan keehatan estándar kepada ibu bersalin di eilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ibu bersalin meliputi persalinan normal, persalinan komplikasi. Stándar persalinan normal yang dilakukan dengan Acuan Persalinan Normal (APN) yang dilakukan, sedangkan persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2014-2023 fluktuatif, belum mencapai target 100%.

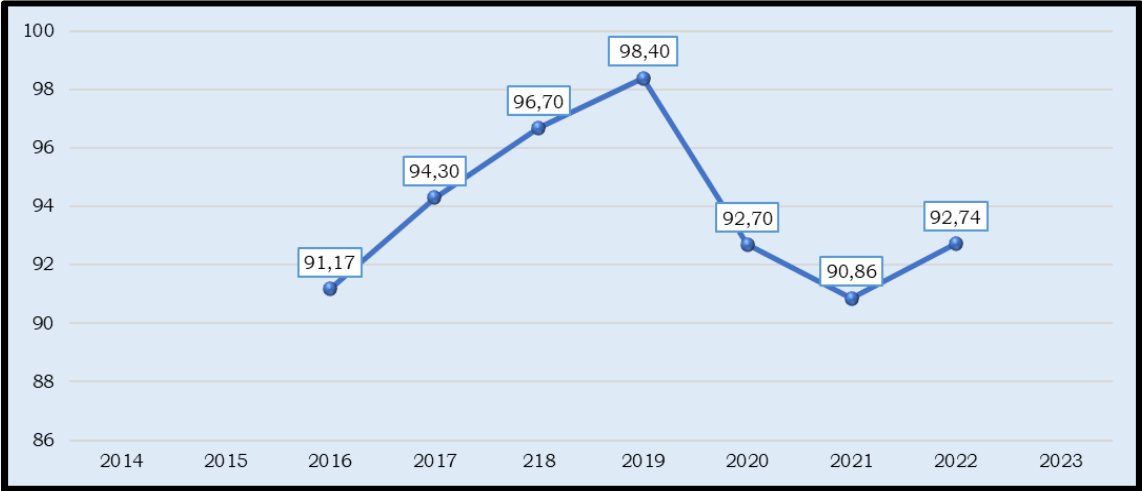
2.3.2.30 Cakupan Kunjungan Bayi

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari–3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai diukur dari jumlah kedatangan ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dengan syarat:

- a. Sampai dengan umur 1 tahun (12 bulan kurang 1 hari) sudah mendapat vitamin A sebanyak 1 kali.
- b. Penimbangan berat badan dilakukan minimal sebanyak 8 kali dalam 1 tahun.
- c. Melakukan pemeriksaan SDIDTK, yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi (tercatat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA).

Pada tahun 2014 cakupan kunjungan bayi sebesar 94,30% dan pada tahun 2023 sebesar 92,74%. Bila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4

tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yakni sebesar 90%, maka angka tersebut telah melebihi target.



Gambar 2.27 Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2016-2022
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

Pelayanan berdasarkan Kecamatan maka capaian pelayanan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Timur dan Dumai Kota. Jika dilihat kedua Kecamatan tersebut menunjukkan angka yang melebihi seratus persen karena perkiraan jumlah absolut melebihi dari angka atau target. Bila dibandingkan dengan target sasaran tahun 2023 yakni sebesar 100%, maka angka tersebut belum mencapai target secara keseluruhan.

Perkembangan cakupan kunjungan bayi ke pusat pelayanan kesehatan di Kota Dumai dari tahun 2017-2023 hanya sedikit mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022, dimana sebelumnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid 19, dimana kegiatan posyandu tidak berjalan. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar di atas dan per kecamatan Tabel berikut.

Tabel 2.78
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017–2023

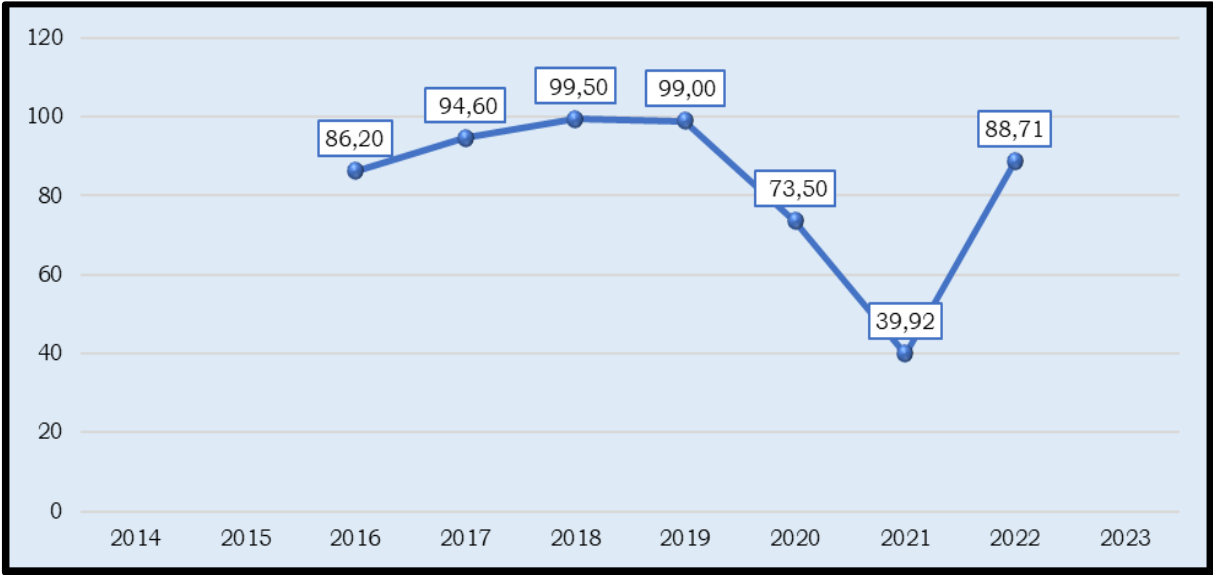
No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (%)													
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
1	Dumai Kota	1.225	99,1	1.188	99,2	1.220	100	1.050	84,5	1.276	100,47	1.146	101,96	1.139	103,08
2	Dumai Timur	1.647	98,8	1.709	99	1.756	99,9	1.805	101	1.779	97,37	1.920	104,07	1.579	83,24
3	Dumai selatan	1.377	98,7	1.339	99,7	1.348	98,6	1.341	96,4	1.377	96,84	1.363	96,74	1.438	100,63
4	Dumai Barat	1.076	97,7	1.086	98,6	1.111	99,1	1.145	100,4	992	85,15	1.129	96,74	1.114	93,3
5	Bukit Kapur	978	82,7	1.040	84,7	1.155	92,4	1.021	80,3	1.048	80,55	1.162	82,41	1.360	95,57
6	Sungai Sembilan	727	85,9	908	98,2	940	99,9	814	85	755	77,04	744	65,96	1.065	89,57
7	Medang Kampai	309	99,7	357	97,8	370	99,5	397	105	362	93,54	454	99,78	471	97,92
Kota Dumai		7.339	94,8	7.627	96,7	7.900	98,4	7.573	92,7	7.589	90,86	7.918	92,74	8.166	93,67

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024

2.3.2.31 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Balita

Pelayanan kesehatan balita adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).Setiap balita (0-59 bulan) memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan

skrining tumbuh kembang meliputi pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul Vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap, penimbangan minimal 8 kali dalam setahun yang dilaksanakan melalui pelayanan SDIDTK oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, penyuluh kesehatan masyarakat dan petugas sektor lain yang dalam menjalankan tugasnya melakukan stimulasi dan deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang anak. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kota Dumai dari tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.28 Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2016-2022.
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024

Pada tahun 2023, dari pemantauan deteksi dini tumbuh kembang anak balita melalui pemantauan pertumbuhan balita di posyandu, diperoleh cakupan pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) sebesar 88,71% (19.831 anak balita) dari 42.098 perkiraan jumlah anak balita. Pelayanan berdasarkan Kecamatan pada tahun 2023, capaian pelayanan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Selatan sebesar 99,59% dan terendah Kecamatan Sungai Sembilan hanya mencapai 61,85%. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan balita. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.79
Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)													
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
1	Dumai Kota	4.921	95,8	6.130	99,3	5.026	99,2	4.766	74,5	3.178	48,57	3.930	84,19	5.360	94,12
2	Dumai Timur	6.737	97,3	8.788	98,8	7.247	99,3	7.638	82,9	2.081	22,1	6.629	86,51	8.368	85,6
3	Dumai selatan	5.785	99,9	6.916	99,9	5.608	98,7	5.686	74,6	2.460	33,56	5.830	99,59	6.334	85,95
4	Dumai Barat	4.163	91	5.651	99,6	4.587	98,5	4.648	79,1	2.397	39,9	4.666	96,25	5.474	89,01
5	Bukit Kapur	4.676	95,2	6.310	99,8	5.111	98,5	3.465	52,9	3.401	50,74	5.654	96,53	7.092	96,66
6	Sungai Sembilan	2.959	84,2	4.761	99,9	3.910	99,9	3.004	60,8	2.798	55,42	2.897	61,85	4.268	69,66
7	Medang Kampai	1.174	91,2	1.882	100	1.529	99,2	1.720	88,3	868	43,55	1.854	98,04	1.276	51,51

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)													
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
	Kota Dumai	30.415	94,6	40.438	99,5	33.018	99	30.927	73,5	17.183	39,92	31.460	88,71	38.172	84,96

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

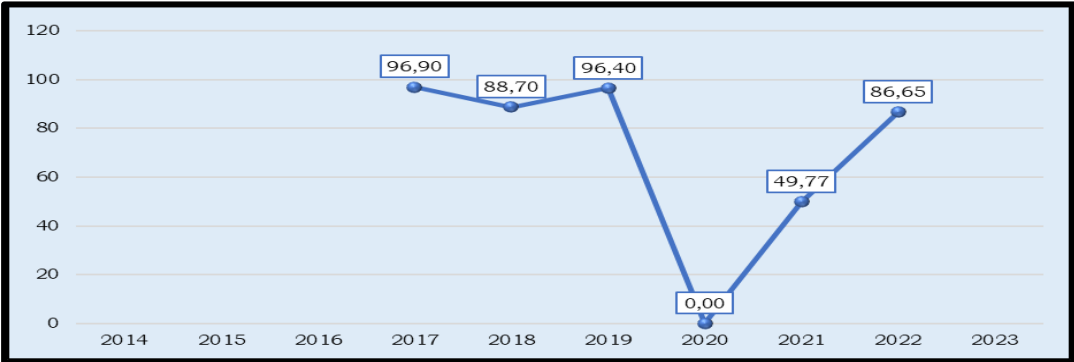
2.3.2.32 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Anak-anak merupakan kelompok besar masyarakat yang mempunyai tingkatan kesehatan lebih baik dibandingkan dengan kelompok lainnya berdasarkan tingkat kesakitan. Meskipun demikian merupakan kelompok yang rawan terhadap penyakit dan merupakan dasar bagi pendidikan kesehatan selanjutnya. Usaha untuk meningkatkan derajat kesehatan anak melalui pengelolaan di sekolah dengan program Trias UKS, yaitu menanamkan pengetahuan kesehatan pandangan dan kebiasaan hidup sehat untuk diri sendiri dan lingkungannya. Pelayanan kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan dan pemulihan. Menciptakan lingkungan sekolah sehat dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Setiap anak pada usia pendidikan dasar usia 7 tahun – 15 tahun. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan luar satuan pendidikan dasar (pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LKPA) dan lainnya meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera. Tindak lanjut hasil skring kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan bila diperlukan, memberikan penyuluhan kesehatan.

Cakupan pelayanan usia pendidikan dasar di Kota Dumai tahun 2014-2023 cenderung mengalami penurunan, khususnya tahun 2020 disebabkan karena Pandemi Covid 19, dimana kegiatan sekolah dilakukan secara daring (dalam jaringan) atau pembelajaran jarak jauh sehingga berakibat pada tidak dilaksanakannya pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar, namun kembali meningkat menjadi 86,65% pada tahun 2023. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar di Kota Dumai 2017-2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.29 Cakupan Pelayanan Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai Tahun 2017-2022.

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar per Kecamatan di Kota Dumai cukup baik, namun pada tahun 2020 di 7 Kecamatan Kota Dumai cakupan 0% karena terjadinya pandemic COVID 19. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.80
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017–2023

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar (%)													
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
1	Dumai Kota	708	96,6	1.368	91,4	947	89,3	0	0	2.868	65,78	6.493	82,55	3.980	56,1
2	Dumai Timur	1.734	100	2.116	92,6	2.080	97,7	0	0	5.047	55,88	10.721	83,02	10.867	93,57
3	Dumai selatan	962	93,8	2.481	95,3	2.461	98,1	0	0	4.320	64,12	8.885	90,07	2.479	28,36
4	Dumai Barat	660	95,5	1.325	96,1	1.388	97,1	0	0	2.639	39,65	7.561	92,53	3.122	38,26
5	Bukit Kapur	1.133	95,8	2.108	96,3	2.100	96,9	0	0	4.136	54,9	9.121	92,41	10.920	114,9
6	Sungai Sembilan	885	97,5	1.078	56,9	1.277	97,6	0	0	3.044	28,24	6.085	77,08	7.895	120,35
7	Medang Kampai	334	95,7	614	94,5	602	91,9	0	0	1.218	39,8	2.919	91,62	2.134	62,56
Kota Dumai		6.416	96,9	11.090	88,7	10.855	96,4	0	0	23.272	48,32	51.785	86,65	41.397	75,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

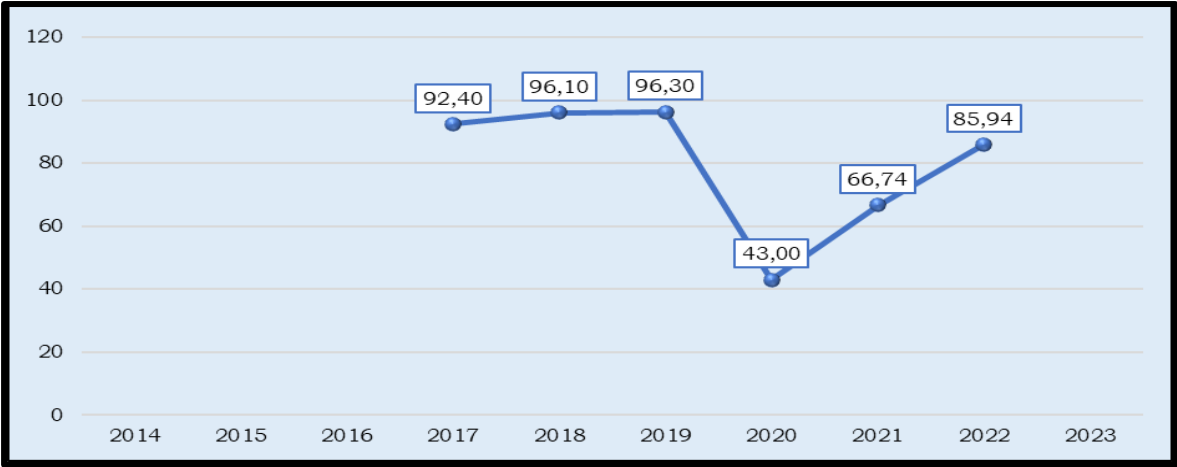
2.3.2.33 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelaksanaan pelayanan kesehatan usia lanjut dibagi ke dalam 3 kategori yaitu Pelayanan kesehatan geriatri di masyarakat, Pelayanan kesehatan geriatri di masyarakat berbasis rumah sakit, dan Pelayanan kesehatan geriatri berbasis rumah sakit. Masalah kesehatan pada lanjut usia disebabkan oleh kemunduran sel-sel tubuh, sehingga fungsi dan daya tahan tubuh menurun serta faktor resiko terhadap penyakitpun meningkat. Kondisi ini disebabkan oleh malnutrisi, gangguan keseimbangan, kebingungan mendadak. Selain itu, beberapa penyakit yang sering terjadi pada lanjut usia antara lain hipertensi, gangguan pendengaran dan penglihatan, demensia, osteoporosis, dan sebagainya.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial maupun ekonomis. Selain itu, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk dapat tetap hidup mandiri dan produktif. Pelayanan kesehatan lanjut usia bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia yang berkualitas melalui penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia untuk mencapai lanjut usia yang berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat. Upaya yang dikembangkan untuk mendukung kebijakan tersebut antara lain meningkatkan upaya kesehatan bagi lanjut usia di pelayanan kesehatan dasar dengan pendekatan Pelayanan Santun lanjut usia, meningkatkan upaya rujukan kesehatan bagi lanjut usia melalui pengembangan Poliklinik Geriatri Terpadu di Rumah Sakit, dan menyediakan sarana dan prasarana

yang ramah bagi lanjut usia.

Hal tersebut dapat dilakukan melalui pelayanan kesehatan standar pada usia lanjut dilakukan pada penduduk usia 60 tahun ke atas. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dalam bentuk edukasi, dan skrining kesehatan pelayanan kesehatan usia lanjut. Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal sekali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesa perilaku beresiko. Tindak lanjut skrining yaitu membuat rujukan dan melakukan penyuluhan kesehatan. Berikut disajikan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2017-2022. Cakupan layanan kesehatan pada usia lanjut di Kota mengalami penurunan akibat pandemic Covid 2019 terutama pada tahun 2020 hanya mencapai 43,00% dan kembali meningkat menjadi 85,94% pada tahun 2023. Perkembangan cakupan layanan Kesehatan usia lanjut dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.30 Cakupan Pelayanan Usia Lanjut di Kota Dumai Tahun 2017-2022.
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Pada kondisi lansia yang tidak mampu merawat dirinya secara penuh dibutuhkan bantuan pelaku rawat/pendamping/pramusila atau lazim disebut *care giver*. Oleh karenanya, peran *care giver* menjadi sangat penting dan perlu dikembangkan aturan, standar dan norma oleh pemerintah yang mengatur pemenuhan kebutuhan *care giver* termasuk pembinaan dan pemenuhan hak para *care giver* itu sendiri. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut menurut Kecamatan di Kota Dumai tahun 2017-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.81
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017 – 2023

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (%)													
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
1	Dumai Kota	2.085	95,7	2.012	95,3	2.114	98,4	973	44,5	1.608	71,91	1.874	94,69	1.871	96,1
2	Dumai Timur	2.530	86,1	2.961	97,4	3.067	99,1	1.586	50,4	1.734	53,87	2.784	85,66	2.828	84,65
3	Dumai selatan	2.294	93,4	2.279	96,3	2.332	96,8	864	35,3	1.512	60,36	2.062	83,04	2.237	88,84
4	Dumai Barat	1.852	95,5	1.837	94,7	1.869	94,7	878	43,7	1.265	61,59	1.827	88,86	2.251	107,09

No	Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (%)													
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
5	Bukit Kapur	1.935	92,9	2.053	95	2.067	93,9	974	43,5	1.865	81,37	2.081	83,81	2.467	98,37
6	Sungai Sembilan	1.400	93,9	1.563	96	1.571	94,7	614	36,4	1.255	72,71	1.650	83,08	1.894	90,45
7	Medang Kampai	494	90,6	640	99,5	595	90,8	302	45,3	580	85,17	646	80,55	834	98,58
Kota Dumai		12.590	92,4	13.345	96,1	13.615	96,3	6.191	43	9.819	66,74	12.924	85,94	14.382	93,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut per Kecamatan di Kota Dumai cukup baik selama tahun 2014-2023, pada tahun 2023 di tujuh Kecamatan Kota Dumai cakupannya mencapai 93,66% dan capaian tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Barat sebesar 107,09% dan terendah terdapat di Kecamatan Dumai Timur sebesar 84,65%. Rendahnya capaian secara umum disebabkan karena terjadinya pandemic COVID 19 pada tahun 2020. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjdi prioritas utama dalam pelayanan Kesehatan pada usia lanjut.

2.3.2.34 Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kemiskinan dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan menderita gizi buruk, pengetahuan kesehatan kurang, perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman buruk, biaya kesehatan tidak tersedia.Sebaliknya kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Derajat kesehatan dapat menekan kemiskinan karena dengan masyarakat yang sehat produktivitas kerja meningkat, pengeluaran berobat rendah, investasi dan tabungan memadai, tingkat pendidikan maju, tingkat fertilitas dan kematian rendah, stabilitas ekonomi mantap.

Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan milik pemerintah adalah BPJS kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS kesehatan terdiri dari dua kelompok peserta yaitu Penerima Bantuan Iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Menurut undang-undang Penerima bantuan iuran (PBI) ditujukan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu. Pemerintah akan menanggung iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat dalam kelompok PBI tersebut. Dengan adanya program BPJS kesehatan, masyarakat miskin peserta BPJS kesehatan penerima bantuan iuran diharapkan akan lebih mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu dan derajat kesehatan masyarakat akan meningkat.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai fokus pada penurunan tingkat kematian ibu dan bayi serta peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai

memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai, data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Selama tahun 2014-2023 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan dari APBD Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 12,24% per tahun dan dari APBN naik sebesar 9,93% per tahun. Dengan kata lain penerima PBI dari APBD dan APBN naik dari 93.082 pada tahun 2014 menjadi 213.513 pada tahun 2023 dari jumlah penduduk Kota Dumai dan telah menikmati layanan kesehatan gratis dari Pemerintah Kota Dumai.

Tabel 2.82
Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai
Tahun 2014-2023

Sumber Dana	Tahun										Pertumbuhan/Tahun (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
APBD Kota Dumai	36624	43581	71.401	64.949	66.200	89.298	84.057	89.238	108.456	103.498	12,24
APBN	46932	51401	56225	61.414	61.166	62.249	74.766	75.857	85.175	110.015	9,93
Jumlah	93082	103243	114325	126.363	127.366	151.547	158.823	165.095	196.631	213.513	9,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Program Jaminan Kesehatan (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak tahun 2009 dan terus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di Kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi penduduk Kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan WaliKota Dumai Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III selanjutnya diperbaharui Peraturan WaliKota Dumai Nomor 42 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Dumai bagi masyarakat Kota Dumai tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan jaminan kesehatan (JKN) di puskesmas, pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ke puskesmas dan pembayaran belanja premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

Kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan iuran (PBI) dari APBN maupun APBD tidak diperuntukkan seluruh masyarakat. Kartu Indonesia Sehat dari APBN dan APBD diperuntukkan untuk warga miskin kurang mampu yang memiliki NIK bagi yang mampu dianjurkan untuk mengurus sesuai ketentuan, yakni bayar premi. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan verifikasi dan validasi data PBI JKN yang bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan data agar terwujudnya ketepatan sasaran pemakai PBI-JKN di Kota Dumai. Perubahan data dimaksud seperti meninggal, pindah keluar kota atau telah menjadi mampu sehingga kuota yang kosong dapat dialihkan ke masyarakat lain yang tidak mampu.

2.3.2.35 Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat
- c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
- d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Sarana bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada yang merupakan bangunan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya pemekaran Kota Dumai, pada umumnya sudah berumur tua dan kondisinya sudah mulai rusak. Seluruh kelurahan di Kota Dumai telah memiliki poskeskel, namun masih ada sebanyak 9 poskeskel lagi yang belum memiliki bangunan sendiri (masih menumpang/menyewa). Karena minimnya anggaran di Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya termasuk poskeskel mengakibatkan tidak semua puskesmas dan jaringannya bisa dilakukan rehabilitasi secara maksimal. Dari 10 puskesmas, 12 puskesmas pembantu dan 24 poskeskel yang ada pada umumnya kondisinya rusak ringan (di wilayah kerja puskesmas perkotaan seperti wilayah kerja puskesmas Dumai Kota, Dumai Barat, Jaya Mukti, Bumi Ayu, Purnama dan Bukit Kapur), sedang maupun berat (di wilayah kerja puskesmas pedesaan seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kayu Kapur dan Bukit Timah).

Tabel 2.83
Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2023

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1. Jaya Mukti	1	0	0
Dumai Barat	2. Dumai Barat	1	0	0
	3. Purnama	1	0	0
Bukit Kapur	4. Bukit Kapur	0	1	11
	5. Bukit kayu Kapur	1	0	0
Sungai Sembilan	6. Sungai Sembilan	0	1	10
Medang Kampai	7. Medang Kampai	0	1	10
Dumai Kota	8. Dumai Kota	1	0	0
Dumai Selatan	9. Bumi Ayu	1	0	0
	10. Bukiit Timah	1	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2023 telah menjangkau seluruh Kecamatan di Kota Dumai dengan rasio 142,86 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.104. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 tersaji pada Tabel di bawah ini.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2023 telah menjangkau seluruh Kecamatan di Kota Dumai dengan rasio 2,96 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.110. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2023 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.84
Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2014-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2014	280.109	10	3,57
2015	285.967	10	3,50
2016	291.908	10	3,43
2017	297.638	10	3,36
2018	303.292	10	3,30
2019	308.812	10	3,24
2020	316.782	10	3,16
2021	323.452	10	3,09
2022	331.832	10	3,01
2023	338.064	10	2,96

Sumber: Dinas Kesehatan, Kota Dumai Dalam Angka, Tahun 2023

Cakupan efektif adalah sebagian dari manfaat kesehatan potensial, yang lebih kepada sistem kesehatan yang sesungguhnya diterima dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas puskesmas yang tersedia. Pelayanan yang berkualitas harus mempertimbangkan beberapa aspek dimensi jumlah kualitas sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya safety/keamanan, patient focus (Pelayanan yang berfokus pada pasien), Technical competence (Kompetens teknis yang di miliki oleh pemberi layanan kesehatan). Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun 2014 sebanyak 27 pustu menjadi 12 pustu pada tahun 2023. Cakupan Puskesmas Pembantu seperti yang terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.85
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2014-2023

Indikator	Tahun										Pertumbuhan/Tahun (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Puskesmas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0,00
Jumlah Puskesmas Pembantu	27	27	27	13	13	13	13	12	12	12	-6,62
Jumlah Seluruh Kecamatan	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0,00
Rasio Puskesmas Pembantu	3,86	3,86	3,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,71	1,71	1,71	-6,62

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

2.3.2.36 Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat,

- a. Semua puskesmas harus memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24 jam, kondisi saat ini baru 4 puskesmas di 4 Kecamatan yang memiliki fasilitas persalinan dan UGD 24

- jam yaitu: puskesmas Medang Kampai, Sungai sembilan, Bukit kapur dan Dumai barat.
- b. Puskesmas wajib memiliki kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana, kondisi saat ini di Kota Dumai rata-rata puskesmas baru memiliki $\pm$ 45% dari 100% kecukupan jumlah dan jenis alat kesehatan, sarana dan prasarana.

Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakatpun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.

Dengan kondisi wilayah kerja Puskesmas Sungai Sembilan yang luas dan juga memiliki daerah sulit dijangkau, serta kondisi jalan dan infrastruktur lainnya yang belum memadai mempengaruhi akses masyarakat yang perlu mendapatkan pelayanan rujukan ke RSUD Kota Dumai khususnya pasien gawat darurat atau rujukan kasus maternal neonatal resti dan komplikasi. Meskipun ada tersedia puskesmas keliling air (speedboat), namun karena jumlahnya hanya 1 unit dan muatannya juga terbatas, maka belum bisa melayani seluruh pasien rujukan khususnya yang berada di daerah sulit. Tidak jarang kasus kematian pasien rujukan terjadi di perjalanan sebelum tiba di rumah sakit karena medan yang sulit sehingga jarak tempuh menjadi lama.

Disamping itu, masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Misalnya, masih ada puskesmas yang belum memiliki IPAL, generator set (Genset), sarana air bersih (SAB) seperti sumur bor dalam. Masih ada puskesmas yang tidak memiliki ambulans padahal seluruh puskesmas telah mempunyai pelayanan kegawatdaruratan (UGD), sedangkan puskesmas yang memiliki ambulans kondisinya sudah mulai rusak.

Tabel 2.86
Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2023

No	Lokasi	Jenis	Pengadaan Tahun
A	Pengadaan IPL		
1	Laboratorium Dinas Kesehatan	IPAL	2015
2	Puskesmas Bukit Kapur	IPAL MRC 10	2016
3	Puskesmas Medang Kampai	IPAL MRC 10	2016
4	Puskesmas Sungai Sembilan	IPAL MRC 10	2016
5	Puskesmas Dumai Kota	IPAL BARTEC	2017
6	Puskesmas Jayamukti	IPAL BARTEC	2017
7	Puskesmas Dumai Barat	IPAL BARTEC	2017
8	Puskesmas Bukit Timah	IPAL Bio Wash 5m3	2020
9	Puskesmas Bukit Kayu Kapur	IPAL FLASH TIPE ECO 1 5M3	2021
10	Puskesmas Purnama	IPAL FLASH TIPE ECO 3 5M3	2021

No	Lokasi	Jenis	Pengadaan Tahun
B	Pengadaan IPL SW 100		
1	Puskesmas Medang Kampai	Steril Wave 100	2019
2	Puskesmas Purnama	Steril Wave 100	2019
C	Pengadaan IPL		
1	Laboratorium	IPAL FLASH TIPE ECO 3 3-10M3	2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Ketersediaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) dan instalasi pengolahan sampah medis (SW 100) Kota Dumai statis pada tahun 2022. Seluruh puskesmas sudah memiliki IPAL termasuk laboratorium Kesehatan dan pemeriksaan kualitas air kelas A.

Meskipun 2 dari 10 puskesmas se Kota Dumai telah memiliki alat pengolah sampah medis yakni SW 100, permasalahan pengelolaan sampah medis baik di puskesmas, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan mandiri di Kota Dumai masih menjadi kendala utama karena belum tersedia di Kota Dumai. Padahal permasalahan pengelolaan sampah medis merupakan salah satu prioritas Nasional.

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin dan hampir miskin tahun 2023 sebesar 151.547 orang khusus jaminan untuk masyarakat miskin berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Jamkesmas dan Jamkesda ini merupakan jaminan kesehatan yang sama-sama diperuntukkan bagi warga miskin.namun, ruang lingkup berbeda. JAMKESMAS adalah program yang ruang lingkupnya lebih luas yang diperuntukan untuk warga miskin di seluruh indonesia. Sesuai namanya, Jamkesda ini diberikan kepada warga miskin oleh pemerintah daerah suatu kabupaten atau provinsi.

Dari 10 puskesmas hanya puskesmas Dumai Barat yang belum memiliki genset. Ada 4 puskesmas yang sudah memiliki genset tapi belum memiliki rumah genset yakni puskesmas Bumi Ayu, puskesmas Bukit Timah, puskesmas Purnama dan puskesmas Bukit Kayu Kapur. Selain itu ada 2 puskesmas yang belum memiliki sumur bor dalam yakni puskesmas Bumi Ayu dan puskesmas Bukit Kayu Kapur.

Tabel 2.87
Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2023

No	Nama Puskesmas	Jenis Sarana		Keterangan
		Genset + Rumah	Sumur Bor Dalam	
1.	Dumai Kota	2017/2018	2017	
2.	Dumai Barat	-	2017	Sumur bor tidak berfungsi
3.	Sungai Sembilan	2017/2019	2017	Sumur bor tidak berfungsi
	Sungai Sembilan		2021	
4.	Bukit Kapur	2017/2019	2017	Sumur bor tidak
	Bukit Kapur		2022	
5.	Medang Kampai	2017/2019	2017	Sumur bor tidak berfungsi
	Medang Kampai		2021	
6.	Jaya Mukti	2017/2019	2017	
7.	Bumi Ayu	2021	-	Tanpa rumah genset
8.	Bukit Timah	2021	2019	Sumur bor sudah dipernaiki tahun 2022. Tanpa rumah genset
9.	Purnama	2021	2019	Tanpa rumah genset
10.	Bukit Kayu Kapur	2021	-	Tanpa rumah genset

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

2.3.2.37 Penyakit Menular dan Tidak Menular

Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri, daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi akan meningkatkan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko. Adanya peningkatan prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko dari Tahun 2021 (0,011%). Tahun 2022 (0,093%) dan pada tahun 2023 jumlah kasus HIV di Kota Dumai secara kumulatif ada 74 kasus dengan prevalensi rate 0,022% terhadap penduduk beresiko HIV di Kota Dumai. Jumlah remaja usia 15-24 tahun yg telah mendapatkan penyuluhan HIV/AIDS di Kota Dumai sejak tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023 secara berurutan berjumlah 587 jiwa, 1.162 jiwa dan 1.118 jiwa . pada tahun 2023 prevalensi HIV di Kota Dumai 0,02% dengan jumlah kasus HIV 74 penderita dari estimasi 7.400 penduduk yang beresiko.

Kota Dumai merupakan daerah beresiko malaria, merupakan ciri khas daerah tropis dengan hutan bakau, dan letak geografis Kota Dumai yang berbatasan dengan daerah endemis malaria yaitu kabupaten rohil dan Kabupaten bengkalis. Walaupun Kota Dumai sudah eliminasi malaria namun tetap dilakukan penguatan surveilans agar tidak terjadi KLB. Angka kesakitan malaria Kota Dumai Tahun 2023 0,015 per 1000 penduduk dari target 1/1000 penduduk, dengan jumlah kasus 5 penderita malaria.

Permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai yang menjadi perhatian setiap tahunnya adalah penyakit DBD, yang merupakan penyakit potensial terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Penyakit DBD sering menyerang anak – anak dan sering menyebabkan kematian. Angka kesakitan demam berdarah dengue pada tahun 2023 mengalami peningkatan kasus yang sangat signifikan ada 664 kasus dengan insidens rate (angka kesakitan sebesar 196,41/100.000) dari 186 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan PE DBD & lavarsidasi selektif untuk 664 kasus dengan melakukan Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk.

Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai, namun kasus DBD belum bisa ditekan secara maksimal. Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti seperti perubahan cuaca yang ekstrim yang berakibat adanya banjir, tingkat mobilitas penduduk masih tinggi, belum tersedianya sarana pembuangan air limbah (SPAL) dan sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar dan ± 80% penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa

yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD. Kondisi ini menjadikan Kota Dumai sebagai daerah endemis penyakit Demam Berdarah dan bila tidak dilakukan upaya-upaya secara intensif dapat terjadi peningkatan kasus dan potensial menimbulkan KLB.

Upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus. Selain itu perlu juga didukung oleh ketersediaan peralatan fogging yang cukup dan layak. Saat ini peralatan fogging yang tersedia jumlahnya terbatas dan kondisinya sudah banyak yang rusak karena terlalu sering digunakan.

Penyakit TB paru merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat. Menurut data WHO pada 2015, Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua tertinggi di dunia terkait masalah tuberculosis Dengan kasus terbanyak di negara India, kemudian diikuti oleh Indonesia, Tiongkok, Filipina, Pakistan, Nigeria dan Afrika Selatan.

Permasalahan penyakit TB di Kota Dumai makin kompleks, karena masih banyak penyakit TB yang belum terdeteksi di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami gejala TB dan juga relevansi terhadap risiko terkena TB dan semakin meningkatnya kasus TB yang resisten (MDR Multy drug Resistan). Pada tahun 2023 Kasus penemuan TB di Kota Dumai yaitu ada 904 kasus yang ditemukan di Kota Dumai, untuk diobati sehingga dapat memutuskan rantai penularan di Kota Dumai. Pada tahun 2023 angka kesembuhan TB Paru sebesar 90,83% dari 904 kasus TB BTA (+) yg mengalami kesembuhan ada 812 kasus

Penyebab Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan, yang merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai. Diare dapat terjadi karena keracunan makanan, infeksi kuman, dan stres. Angka kesakitan diare semua umur di Kota Dumai selama tahun 2023 sebanyak 3.180 penderita atau IR IR 9,41/1000.

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular. Hipertensi dan Diabetes malitus. Pada tahun 2023 Hipertensi tercatat 2.280 Penderita (0,67%) dan Diabetes Melitus tercatat 758 Penderita (0,22%) perlu menjadi perhatian karena jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi komplikasi lebih berat yang menyebabkan kematian dan beban biaya pengobatan yang sangat besar. Berdasarkan penyebab kematian di Kota Dumai tahun 2023, pada umumnya penyebab kematian didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes Militus, Asma, Kecelakaan, Stroke, Hipertensi dan kanker. Penyakit tidak menular (PTM) umumnya dipengaruhi oleh keadaan demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya seperti meningkatnya umur harapan hidup, adanya kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan seperti pencemaran udara dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta makin tingginya paparan faktor resiko seperti merokok, pola aktifitas fisik (kurang olah raga), pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat. Sebagian besar penderita tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Orang

dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk saat ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, perlu mendapatkan layanan cepat. Pada tahun 2023 Kota Dumai melakukan pelayanan kesehatan jiwa 481 (97,60%). *Screening*, pemeriksaan leher rahim pada tahun 2023 dilaksanakan pada 402 (0,85%) dari sasaran 47.244 wanita kelompok usia reproduktif 30 – 50 tahun dengan IVA positif sebanyak 21 kasus (5,2%) dan terdapat tumor 1 kasus (0,3%).

Selama satu dekade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologis yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Kota Dumai sedang mengalami *triple burden* penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Penyakit-penyakit tidak menular (PTM) mulai mendominasi pola penyakit rawat jalan terbesar baik di rumah sakit maupun puskesmas seperti penyakit Hipertensi, Diabetes Mellitus, Gastritis, dan penyakit jantung. Sedangkan penyakit menular baik itu penyakit menular berbasis lingkungan seperti DBD, Malaria, TB Paru dan penyakit menular seksual seperti HIV AIDS masih tetap merupakan permasalahan kesehatan utama di Kota Dumai. Disamping itu penyakit *neglected diseases* seperti kusta dan filariasis masih terus dilakukan pengendalian dan pencegahan. Angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti polio, campak, difteri, pertusis, hepatitis B dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah tidak ditemukan lagi kecuali campak.

2.3.2.38 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Persentase rumah tangga yang mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat, namun pencapaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang pencapaiannya rendah adalah perilaku merokok. Konsumsi rokok meningkat secara pesat dari tahun ke tahun dan saat ini Indonesia merupakan negara nomor 3 (tiga) dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Triwulan III (bulan September) tahun 2015 Propinsi Riau, pada kelompok makanan, pengeluaran untuk tembakau dan sirih menempati urutan ke tiga tertinggi setelah pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi termasuk minuman beralkohol, dan pengeluaran untuk padi-padian. Ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok telah sampai pada situasi yang mengkhawatirkan dan merupakan epidemi yang mengancam terutama di bidang kesehatan karena menyebabkan penyakit jantung dan kanker yang dapat berujung pada kematian. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan kesehatan perokok dan orang lain yang terpapar asap rokok, tetapi mengancam ekonomi keluarga masyarakat miskin. Ironisnya, pelaku konsumsi rokok tidak hanya pada orang dewasa, namun juga pada remaja dan anak sekolah. Hal ini sebagai dampak dari maraknya iklan di media penyiaran dan media luar ruang serta pemberian sponsor oleh industri tembakau. Berbagai upaya untuk pengendalian dampak konsumsi rokok bagi kesehatan di Kota Dumai telah dilakukan salah satunya

melalui penetapan Peraturan WaliKota Dumai Nomor 11 tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Dumai, namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Meskipun Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 tentang Nomor 7 Tahun 2011.

Pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok telah ditetapkan, namun masih banyak dijumpai orang yang merokok di angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lainnya yang lainnya yang notabene telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini menunjukkan kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok belum didukung oleh semua pihak. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak konsumsi rokok harus dilaksanakan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) lainnya yang pencapaiannya juga rendah adalah perilaku memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Salah satu penyebab masih tingginya angka kesakitan malaria dan DBD adalah karena masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Padahal upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD dan Malaria adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus.

2.3.2.39 Penggunaan Obat dan Pengawasan Obat dan Makanan

Walaupun ketersediaan obat dan vaksin cukup baik, tetapi pelayanan kefarmasian di fasilitas pelayanan kesehatan pada umumnya masih belum sesuai standar. Penggunaan obat generik sudah cukup tinggi, tetapi penggunaan obat rasional di fasilitas pelayanan kesehatan belum optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh masih rendahnya penerapan formularium dan pedoman penggunaan obat secara rasional. Di lain pihak, penduduk yang mengetahui tentang seluk-beluk dan manfaat obat generik, masih sangat sedikit. Pengetahuan masyarakat tentang obat secara umum juga masih belum baik.

Berdasarkan Laporan Indikator Peresepan di Puskesmas Tahun 2022 ditemukan beberapa puskesmas belum menggunakan obat secara rasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus ISPA Non Pneumoni masih di bawah angka batas rasional (20%). Demikian juga penggunaan obat-obatan antibiotik yang tinggi pada kasus Diare Non Spesifik di puskesmas Jaya Mukti (15,39%) sudah melebihi angka batas rasional (8%). Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada kegiatan pengawasan obat dan makanan:

a. Apotik

Ditemukannya tidak tertibnya pengadministrasian kartu stok obat, ditemuannya penyimpanan obat yang bercampur dengan produk bukan obat di dalam lemari pendingin, ditemukannya penyimpanan obat tidak dengan wadah asli, dan ditemukannya penjualan produk jamu tanpa izin edar POM. Masih ada ditemukan yang tidak memiliki apoteker penanggung jawab yakni 1 apotik dari 41 apotik yang ada.

b. Toko Obat

Penemuan paling banyak adalah toko obat tidak memiliki izin atau izin toko obat yang sudah mati dan belum diperpanjang, tidak tertibnya pengadministrasian surat pesanan dan faktur pembelian obat, ditemukannya produk obat yang sudah kadaluarsa, ditemukannya penjualan obat keras (obat daftar G), dan ditemukannya penjualan produk jamu dan kosmetik tanpa izin edar POM. Masih banyak ditemukan toko obat yang tidak memiliki Asisten Apoteker penanggung jawab yakni sebanyak 22 toko obat dari 30 toko obat yang ada

c. Toko Makanan dan Minuman

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah kurangnya kebersihan toko dan kerapian penataan/penyusunan barang sehingga terlihat berantakan yang bisa mempengaruhi mutu produk, ditemukannya produk pangan luar negeri tanpa izin edar POM, ditemukannya produk pangan rumah tangga tanpa izin edar IRTP, ditemukannya produk berbahan kimia berdekatan dengan produk makanan, ditemukannya penjualan obat berlogo biru, ditemukannya produk pangan yang rusak dan kadaluarsa, ditemukannya produk pangan frozen menggunakan izin IRTP dan ditemukannya penjualan kosmetik tanpa izin edar POM. Pada tahun 2019, jumlah toko makanan minuman yang ada di Kota Dumai sebanyak 198 sarana.

d. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah IRTP tidak memiliki kelengkapan dokumen produksi seperti tidak mencatat jumlah bahan yang digunakan, jumlah yang produksi, jumlah yang diedarkan sehingga tidak bisa menelusuri bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan; ruang produksi yang sempit dan kebanyakan bergabung dengan dapur untuk memasak kebutuhan dibersihkan; tidak tersedianya sarana pembersihan/pencucian sesuai standar.

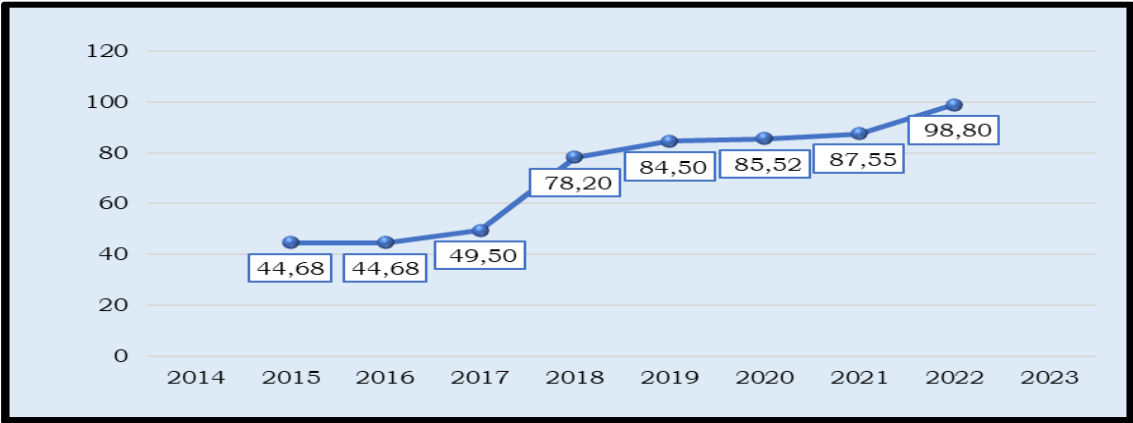
Selain itu, mutu sarana produksi makanan umumnya masih belum baik, akibat kurang efektifnya pengawasan dan pembinaan. Masih ada ditemukan IRTP dan jajanan anak sekolah yang masih menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam proses pengolahan makanan dan minumannya seperti formalin, boraks dan bahan pewarna berbahaya. Pada tahun 2019, jumlah IRTP yang ada di Kota Dumai sebanyak 401 sarana.

2.3.2.40 Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 193.631 orang yang terdiri dari Peserta PBI APBN sebanyak 85.175 orang dan peserta PBI APBD sebanyak 108.456 orang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai pada tahun 2023 yakni sebanyak 188.000 orang, maka telah terealisasi sebesar 103% yang artinya telah melebihi target dan tingkat pencapaiannya baik.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu. Pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Kota Dumai telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rujukan di puskesmas-puskesmas se Kota Dumai yakni sebanyak 117.860 pasien rawat jalan, sebanyak 611 pasien rawat inap dan sebanyak 5.728 pasien rujukan.

Pertumbuhan penduduk Kota Dumai ditandai dengan adanya *window opportunity* di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif. Jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2023 adalah 338.064 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 2,11% pertahun berdasarkan hasil dari Badan Pusat Statistik Kota Dumai 2024, maka jumlah penduduk Kota Dumai diperkirakan akan meningkat pada tahun selanjutnya. Demikian juga masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin dan mendekati miskin bertambah, dan ini menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Tahun 2023 pemerintah baik Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat harus memberikan uang premium jaminan kesehatan sebanyak 151.547 orang miskin dan mendekati miskin.



Gambar 2.31 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai Dari Tahun 2015-2022.

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

Sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS baik itu sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN dan PBI APBD) ada sebanyak 193.631 orang, dan Non PBI (pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah/mandiri dan bukan pekerja) ada sebanyak 123.888 orang, sehingga total peserta Jaminan Kesehatan Kota Dumai ada sebanyak 317.519 orang. Dengan demikian pencapaian cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Dumai sebesar 95,80%. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 95%, maka angka

tersebut belum mencapai target yang artinya Kota Dumai belum mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Menurut peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2023 semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (*Universal Health Coverage-UHC*). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu kinerja dan penampilan puskesmas perlu terus ditingkatkan yang salah satunya melalui peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.

2.3.2.41 Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan di Kota Dumai

Pada tahun 2017-2019 Jumlah pengunjung mengalami peningkatan yang konsisten dari 28.242 pada tahun 2017 menjadi 37.710 pada tahun 2019. Tahun 2020 Terjadi penurunan drastis menjadi 9.100. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membatasi akses dan kegiatan di perpustakaan. Pada tahun 2021 Angka pengunjung mulai meningkat lagi menjadi 11.630 seiring dengan pelonggaran pembatasan. Pada tahun 2022-2023 Jumlah pengunjung meningkat tajam hingga mencapai 33.301 pada tahun 2022 dan stabil pada 33.418 di tahun 2023.

Peningkatan jumlah pengunjung dari 2017 hingga 2019 menunjukkan minat yang semakin besar terhadap perpustakaan sebelum pandemi. Penurunan drastis pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi, namun tren pemulihan yang kuat terlihat pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2.88
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai 2017-2023

No	Indikator	Tahun							Pertumbuhan/Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	28242	29370	37710	9100	11630	33301	33418	2,84
2	Jumlah Anggota Perpustakaan	205	178	132	90	97	253	6716	78,88

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai, 2024

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik didapatkan dari formula panjang jalan kondisi baik (km) dibagi dengan panjang jalan seluruhnya (km). Perhitungan proporsi panjang jaringan jalan mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Panjang jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2017 sepanjang 961,56 km kemudian berkurang menjadi 636,13 km tahun 2023, jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.89
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Uraian	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan kondisi baik	Km	825,14	620,95	420,31	401,15	401,15	530,84	549,48
Panjang Jalan kondisi sedang	Km	136,42	242,86	161,8	172,8	172,8	145,04	86,65
Kondisi Jalan Mantap	Km	961,56	863,81	582,11	573,95	573,95	675,88	636,13
Panjang jalan kondisi rusak ringan	Km	236,68	180,34	35,78	42,78	42,78	172,27	158,79
Panjang jalan kondisi rusak berat	Km	0	154,09	580,35	581,51	581,51	350,09	403,31
Kondisi Jalan Tidak Mantap	Km	236,68	334,43	616,13	624,29	624,29	522,36	562,1
Panjang jalan seluruhnya	Km	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2024

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 namun cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga 2023. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas. Pada Tabel tersaji kondisi jalan di Kota Dumai per kecamatan pada tahun 2022-2023. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ruas jalan di Kota Dumai ada pada kondisi baik.

Tabel 2.90
Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2021-2023

NO	Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Panjang Ruas Jalan (KM) Tiap Kondisi																	
			Baik			Sedang			Mantap			Rusak Ringan			Rusak Berat			Tidak Mantap		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Bukit Kapur	171,67	77,8	66,87	76,28	50,92	42,74	7	128,72	109,61	83,28	26,06	20,32	44,62	16,9	41,75	43,78	42,96	62,07	88,4
2	Dumai Barat	180,58	95,91	99,57	93,41	21,49	24,99	19,37	117,4	124,56	112,78	29,35	9,16	19,25	33,83	46,86	48,55	63,18	56,02	67,8
3	Dumai Kota	61,26	51,18	52,55	56,17	5,04	5,71	3,6	56,22	58,26	59,77	2,87	2,92	1,42	2,18	0,08	0,08	5,05	3	1,5
4	Dumai Selatan	132,42	100,02	102,01	101,54	11,43	11,24	8,25	111,45	113,25	109,79	9,71	8,06	11,07	11,27	11,12	11,57	20,98	19,18	22,64
5	Dumai Timur	142,32	96,28	107,42	110,9	26,36	19,49	14,27	122,64	126,91	125,17	9,77	9,44	7,94	10,08	5,96	9,22	19,85	15,4	17,16
6	Medang Kampai	291,86	142,86	56,2	58,69	88,11	12,54	26,36	230,97	68,74	85,05	39,83	40,64	23,26	21,07	182,48	183,55	60,9	223,12	206,81
7	Sungai Sembilan	218,14	63,43	46,23	52,51	39,14	28,33	7,81	102,57	74,56	60,32	58,6	81,73	51,24	56,83	61,85	106,57	115,43	143,58	157,81

Sumber: BPS, Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023

2.3.3.2 Sarana Perhubungan

Untuk mendukung pergerakan orang, distribusi barang dan komoditi yang akan masuk ataupun keluar Kota Dumai dibutuhkan sarana berupa Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Terminal Bus. Berikut disajikan tabel Jumlah Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Terminal Bus Tahun 2017-2023.

Tabel 2.91
Jumlah Pelabuhan Laut, Bandar Udara dan Terminal Bus Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pelabuhan Penumpang	2	2	2	2	2	2	2
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2024

Dari Tabel di atas diketahui bahwa terdapat dua buah pelabuhan penumpang yakni Pelabuhan Pelindo dan Bandar Sri Junjungan, satu buah Pelabuhan Ro-Ro, satu buah bandara yakni Bandara Pinang Kampai, serta satu buah terminal penumpang yakni Terminal Penumpang Tipe A yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping itu masih terdapat beberapa pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Pertamina yang dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK.

Berikut disajikan jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Tabel 2.92
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Terminal	Berangkat	102,67	109,091	131,685	61,39	5,68	7,474	120,848
	Datang	105,532	130,976	156	66,793	4,906	5,925	106,649
Pelabuhan	Berangkat	129,135	119,796	134,526	24,587	46,886	48,75	210,296
	Datang	102,586	103,876	115,611	24,691	4,693	24,49	164,873
Bandara	Berangkat	11,856	60,09	53,547	14,082	292	223	0
	Datang	10,354	58,47	54,748	14,957	260	22	0
Jumlah keberangkatan (Orang)		243,661	288,977	319,758	100,059	52,858	56,447	331,144
Jumlah Kedatangan (Orang)		218,472	293,322	326,359	106,441	9,859	30,437	271,522
Jumlah keberangkatan (%)		52.73%	49.63%	49.49%	48.45%	84.28%	64.97%	54.95%
Jumlah Kedatangan (%)		47.27%	50.37%	50.51%	51.55%	15.72%	35.03%	45.05%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017-2023 mengalami fluktuasi. Apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak Tahun 2017-2023 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan kapal lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal dan bandar udara. Dan pada tahun 2023 Bandara secara resmi tidak melayani untuk komersil sehingga tidak ada arus penumpang yang melalui Bandar Udara.

2.3.3.3 Penggunaan Lahan Sawah Irigasi

Lahan sawah sangat membutuhkan jaringan irigasi untuk kebutuhan tanaman baik padi maupun komoditi lainnya, sawah dapat diartikan sebagai usaha pertanian yang dilaksanakan pada tanah basah dan memerlukan air irigasi. Sedangkan irigasi adalah usaha penyediaan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi rawa. Luas lahan sawah yang teraliri irigasi di Provinsi Riau, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.93
Penggunaan Lahan Sawah Irigasi di Kota Dumai

Uraian	Realisasi dalam Datu Tahun (Ha)					Jumlah	Luas Lahan SK. BPN/ATR 2019
	Ditanami Padi			Tidak ditanami padi			
	Satu Kali	Dua Kali	≥ Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun		
Kota Dumai	178	55	0	15	0	248	217,36
Provinsi Riau	45.975,40	17.275,30	374	2.459,00	6.069,20	75.152,90	62.689,40

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, 2020

2.3.3.4 Analisis Daya Dukung Air

Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan.

Adapun Kota Dumai memiliki nilai Daya Dukung Air > 1 yang artinya masih mencukupi kebutuhan penduduk dan belum terlampaui. Apabila dilakukan perhitungan secara satu persatu tiap kecamatan, perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air Kota Dumai dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.94
Daya Dukung Air per Kecamatan di Kota Dumai

Kecamatan	Cadangan	Kebutuhan	DDA	Status
Kec. Bukit Kapur	555.272.044	74.435.200	7,46	Belum Terlampaui
Kec. Dumai Barat	48.867.930	69.195.200	0,71	Terlampaui
Kec. Dumai Kota	3.641.143	77.217.600	0,05	Terlampaui
Kec. Dumai Selatan	97.166.390	87.347.200	1,11	Belum Terlampaui
Kec. Dumai Timur	50.420.987	104.478.400	0,48	Terlampaui
Kec. Medang Kampai	208.611.277	19.424.000	10,74	Belum Terlampaui
Kec. Sungai Sembilan	2.766.917.209	53.169.600	52,04	Belum Terlampaui

Sumber : KLHS RPJPD Kota Dumai

Berdasarkan perhitungan status daya dukung air di Kota Dumai, terdapat 3 kecamatan yang memiliki kategori daya dukung terlampaui, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Kota, dan Kecamatan Dumai Timur.

2.3.3.5 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Pemenuhan Sumber Air Minum Bersih

Indikator rumah tangga pengguna air bersih didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Air minum/air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber-sumber air yang digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber air minum/air bersih antara lain: air kemasan/isi ulang, sumur bor/pompa/leding, sumur terlindung, air hujan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber utama air minum semakin mudah. Disisi lain juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih untuk kesehatan juga semakin meningkat. Berikut disajikan tabel Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Layak di Kota Dumai.

Tabel 2.95
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Kota Dumai Tahun 2021-2023

Tahun	Bukan Jaringan Perpipaan																				Perpipaan (PDAM,BPSPAM)				Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak					
	Sumur Gali Terlindung				Sumur Gali Dengan Pompa				Sumur Bor Dengan Pompa				Terminal Air				Mata Air Terlindung				Penampungan Air Hujan									
	Jumlah Sarana	Jumlah Rumah Tangga Pengguna	Memenuhi Syarat		Jumlah Sarana	Jumlah Rumah Tangga Pengguna	Memenuh i Syarat		Jumlah Sarana	Jumlah Rumah Tangga Pengguna	Memenuh i Syarat		Jumlah Sarana	Jumlah Rumah Tangga Pengguna	Memenuhi Syarat		Jumlah Sarana	Jumlah Rumah Tangga Pengguna	Memenuh i Syarat		Jumlah Sarana	Jumlah Rumah Tangga Pengguna	Memenuhi Syarat		Jumlah	%				
			Jumlah Sarana	Jumlah Rumah Tangga Pengguna			Jumlah Sarana	Jumlah Rumah Tangga Pengguna			Jumlah Sarana	Jumlah Rumah Tangga Pengguna			Jumlah Sarana	Jumlah Rumah Tangga Pengguna			Jumlah Sarana	Jumlah Rumah Tangga Pengguna			Jumlah Sarana	Jumlah Rumah Tangga Pengguna						
2021	5.715	5.873	4.477	4.759	3.517	4.139	2.654	2.681	6.737	7.271	5.452	5.848	-	-	-	-	-	-	-	-	10.372	10.442	6.145	7.390	1.603	4.402	1.017	3.576	24.254	35
2022	5.764	5.914	4.490	4.769	3.566	4.188	2.654	2.681	7.303	7.837	6.144	6.497	-	-	-	-	-	-	-	-	8.960	9.269	5.969	6.836	2.067	6.191	1.637	5.462	26.245	33,04
2023	5.764	5.914	4.490	4.787	3.566	4.188	2.654	2.681	7.303	7.837	6.144	6.568	-	-	-	-	-	-	-	-	8.960	9.269	5.969	6.836	2.458	5.679	2.511	6.931	27.803	35

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2023

Tabel dibawah ini menggambarkan jumlah rumah tangga pengguna air minum layak jaringan perpipaan di perkotaan tahun 2018-2023 cenderung meningkat sebesar 54,37%. Hal ini mengindikasikan jumlah rumah tangga pengguna air minum layak jaringan perpipaan di perkotaan yang terus meningkat. Berikut disajikan tabel Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Layak Jaringan Perpipaan di Perkotaan Tahun 2018-2023.

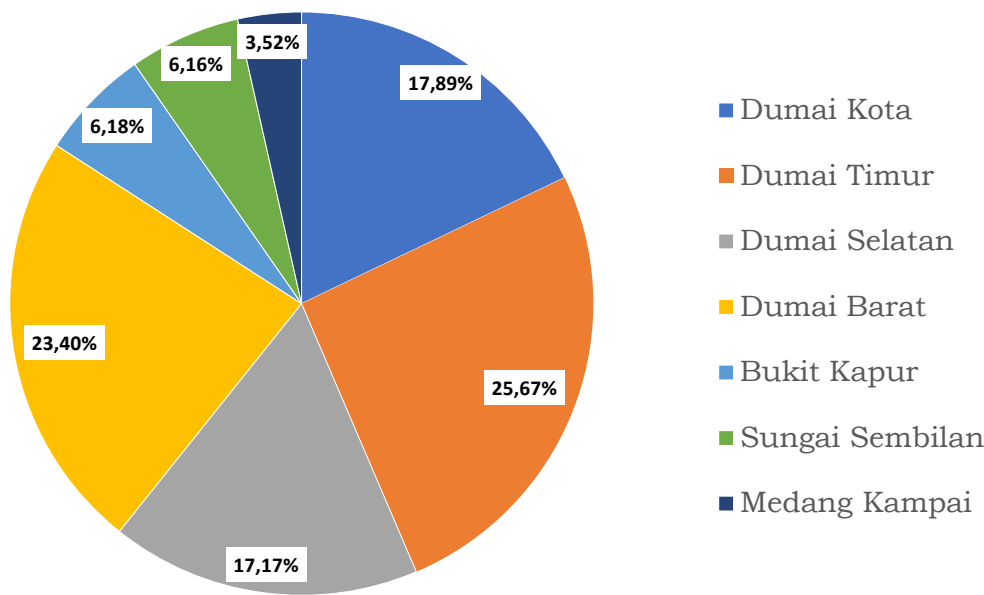
Tabel 2.96
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Minum Layak Jaringan Perpipaan di Perkotaan Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun(%)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah rumah tangga pengguna air Siap Minum Jaringan Perpipaan di Perkotaan	893	886	1.277	3.472	5.574	8.781	57,96
Jumlah rumah tangga	70.556	71.840	73.305	75.234	77.181	79.151	2,33
Persentase Rumah tangga pengguna air Siap Minum Jaringan Perpipaan di Perkotaan (%)	1,27	1,23	1,74	4,61	7,22	11,09	54,37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2024

Selanjutnya untuk menggambarkan sebaran pelayanan air minum jaringan perpipaan pada tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2.7
Sebaran Pelayanan Air Minum Layak Jaringan Perpipaan Pada Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2024 diolah

Dari grafik di atas dapat dilihat secara spasial seluruh kecamatan sudah mendapat pelayanan air minum jaringan perpipaan dengan cakupan pelayanan yang berbeda-beda. Kecamatan Dumai Timur merupakan kecamatan dengan cakupan pelayanan jaringan perpipaan paling besar (25,67%) sedangkan Kecamatan Medang Kampai merupakan kecamatan dengan cakupan pelayanan jaringan perpipaan paling kecil (3,52%)

2.3.3.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Memasak/Mandi/Cuci/dll di Kota Dumai

Adapun sumber air utama yang digunakan rumah tangga di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.97
Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik dan Sumber Air Utama di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Air Kemasan/Isi Ulang	%	1,63	-	-	0,13	-	1,41	78,13
Leding	%	0,49	2,49	1,22	5,09	5,76	0,55	9,01
Sumur Bor/Pompa	%	46,69	51,99	55,75	57,54	52,4	57,2	5,69
Sumur/Mata Air Terlindung	%	34,41	29,58	27,68	26,65	32,15	26,53	5,86
Sumur/Mata Air Tak Terlindung	%	7,68	8,2	9,23	4,71	4,6	5,17	1,32
Lainnya	%	9,1	7,74	6,12	5,88	5,1	9,14	0,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2023

2.3.3.7 Penyediaan Sumber Air Baku

Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai, PDAM memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Mesjid. Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jend. Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PDAM Kota Dumai tahun 2017, kapasitas total air baku (Sungai Mesjid) yang tersedia tahun 2017 adalah sebesar 5.321 liter/detik. Namun sampai dengan saat ini PDAM Kota Dumai belum mampu melayani kebutuhan air seluruh penduduk perkotaan di Kota Dumai. Berdasarkan informasi yang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, pada tahun 2017 PDAM Kota Dumai hanya melayani 400 sambungan rumah, padahal tahun 2016 sudah melayani 1.300 sambungan rumah.

Untuk mencukupi kebutuhan air minum penduduk di Kecamatan Medang Kampai, Dinas PU Kota Dumai telah membangun SPAM IKK Medang Kampai dengan memanfaatkan sumber air baku berupa air permukaan dari Sungai Kemili. Sistem pengambilan menggunakan sistem sumuran/intake yang dibangun tahun 2011 kemudian di transmisikan ke unit produksi secara pompa. Air baku dari Sungai Kemili diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan sistem pengolahan koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Sejak dibangun tahun 2010 sampai dengan saat ini SPAM IKK Medang Kampai belum melayani kebutuhan air penduduk di Kecamatan Medang Kampai.

2.3.3.8 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Fasilitas Buang Air Besar Sendiri atau Bersama dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan produksi air limbah. Perhitungan air limbah menggunakan asumsi *degradable organic component* (BOD) sebesar 14,6 kg BOD/cap.year (default IPCC, 2006). BOD adalah salah satu parameter yang digunakan untuk menggambarkan komponen organik yang dapat didegradasi dalam air limbah. Semakin besar nilai BOD, maka kualitas air akan semakin buruk dan sebaliknya. Air limbah domestic berpotensi menjadi persoalan di Kota Dumai seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang cenderung meningkat setiap tahunnya hal ini disebabkan belum optimalnya pengolahan air limbah diperkotaan, seperti IPAL komunal dan IPAL kawasan yang dilengkapi dengan biodigester, dan lain sebagainya. Ke depannya, mitigasi yang dilakukan harus mempertimbangkan derajat penggunaan pengelolaan air limbah rumah tangga seperti *septic tank*, *latrine*, dan *sewer*. Mitigasi ini sangat penting untuk mengurangi tingkat pencemaran air sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca di Kota Dumai.

Tabel 2.98
Capaian Sasaran Sanitasi Kota Dumai Tahun 2021-2023

Indikator	Capaian 2021 (%)	Capaian 2022 (%)	Capaian 2023* (%)
Akses layak	79,1	95,38	82,3
Akses aman	1,08	3,18	0,99
Belum layak	16,5	1,43	15,3
BABS	3,3	3,19	1,83

Sumber : Strategi Sanitasi Kota, 2023
*adanya pemutakhiran dari dokumen EHRA dan SSK serta penambahan jumlah penduduk

2.3.3.9 Persampahan

Cakupan pelayanan persampahan merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kualitas Kesehatan dan amenity sebuah kota. Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secara terperinci yang tertulis dalam mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakah memiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volume sampah yang diolah. Data yang tertulis dalam tabel dibawah ini merupakan data jadi mengenai persentase penanganan sampah yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.

Tabel 2.99
Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun			Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2021	2022	2023	
Persentase penanganan sampah (%)	60	64	65	4,08
Timbunan Sampah Tahunan (ton/ tahun)	59.029,99	60.559,34	62.106,58	2,57
Sampah Terkelola	49.051,99	40.880,00	41.562,55	-7,95
Persentase Sampah Terkelola	83,1	67,5	66,92	-10,26

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024 data diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan indikator persentase penanganan sampah di Kota Dumai menunjukkan kecenderungan semakin menurun dari kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2023, yakni dari 83,1% di tahun 2021 menurun menjadi 66,92% di tahun 2023. Namun persentase sampah terkelola di fasilitas pengelolaan cenderung mengalami penurunan sebesar 10,26% selama 3 (tiga) tahun terakhir, dikarenakan belum optimalnya sarana prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki Kota Dumai.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai. Berikut adalah Tabel data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.100
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2014-2023

Indikator	Satuan	Tahun										Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	TPS	12	12	15	18	19	20	20	20	22	22	6,97

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Selama periode 2014-2023 perkembangan indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai memiliki kecenderungan meningkat, yakni 12 TPS persatuan penduduk di tahun 2014 meningkat menjadi 22 TPS di tahun 2023

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

2.3.3.10 Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi kriteria: kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita, memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak dan ketahanan bangunan. Berdasarkan data dari Dumai dalam angka tahun 2024, pada tahun 2023 persentase akses terhadap sanitasi layak Kota Dumai yaitu 89,8%, dengan pertumbuhan rata-rata yang cenderung mengalami peningkatan 5,53%. Berikut disajikan tabel Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2015-2023.

Tabel 2.101
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2015-2023

Indikator	Tahun									Pertumbuhan/ Tahun(%)
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	58,36	77,56	76,6	74,2	78,61	82,31	90	87,42	89,8	5,53

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Pada tahun 2023, jumlah rumah tangga Kota Dumai yaitu 103.964, jika diasumsikan satu rumah tangga sama dengan satu rumah. Namun data dimana jumlah Rumah layak huni dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2022 yaitu 19.855 unit, sehingga angka rasio rumah layak huni Kota Dumai tahun 2023 yaitu 19,37%. Berikut tabel perkembangan tingkat kepemilikan rumah layak huni penduduk dan bagi rumah tangga miskin kota dumai.

Tabel 2.102
Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2014-2023

Indikator	Tahun										Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Rumah Tangga	65.171	66.526	67.908	69.241	70.556	71.480	73.670	96.000	100.336	103.964	5,33
Jumlah Penduduk	280.109	285.967	291.908	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	2,11
Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga termasuk Miskin	N/A	N/A	17.726	17.559	16.918	18.945	19.349	19.469	19.855	20.133	1,84
Rasio Rumah Layak Huni	N/A	N/A	26,10	25,36	23,98	26,50	26,26	20,28	19,79	19,37	- 4,18

Sumber: BKKBN dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2019, Tahun 2020
Ekstrapolasi Tim

2.3.3.11 Persentase Rumah Dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Karena dengan

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat. Adapun berdasarkan penguasaan bangunan tempat tinggal, maka selama kurun waktu 2019-2023 persentase masyarakat yang memiliki rumah sendiri terus meningkat, dimana pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri sebesar 56,52% meningkat menjadi 71,12% pada tahun 2023. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Milik Sendiri					Kontrak/Sewa					Lainnya				
2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
56,52	58,56	65,31	67,52	71,12	28,32	28,52	22,75	18,75	14,84	15,16	12,92	11,94	13,73	14,04

Sumber : BPS, 2023

2.3.3.12 Luas Kawasan Kumuh

Aspek lain yang tak kalah penting dalam pembangunan perkotaan adalah Kawasan kumuh. Kekumuhan suatu kawasan ditandai pada 7 aspek diantaranya yaitu : Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan Proteksi Kebakaran. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2023 seluas 191,88 Ha kawasan kumuh perkotaan dan Rumah tidak layak huni sebanyak 7.773 pada tahun yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.104
Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2015-2023

Indikator	Tahun									Sumber Data
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Kawasan Kumuh (Ha)	127,6	127,6	121,23	66,7	38,45	33,75	Tahap I : 0	191,88	191,88	Tahap I (tuntas) SK Walikota Dumai Nomor 922 tahun 2021
							Tahap II : 216,73			Tahap II (sedang ditangani) : SK Walikota Dumai Nomor 663/1011/2022
Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	n/a	n/a	2.432	1.884	1.412	1.068	948	562	284	Olah data LKj-IP Dinas Perkimtan Tahun 2022
						9.724	9.739	9.353	7.773	Update data e-rtlh

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023

Formula yang didapatkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2019 berdasarkan luas kawasan kumuh Kota Dumai yang telah tertata dari luas kawasan kumuh 127,6 Ha yaitu seluas 60,83 Ha. Berdasarkan Rancangan Perda Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 luas permukiman Kota Dumai yaitu 27.687,63 Ha sehingga dengan menggunakan variabel terkait dapat

disampaikan rasio permukiman layak huni Kota Dumai yaitu 0,99. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, pada tahun 2015 terdapat 127,60 hektar kawasan kumuh perkotaan yang tertuang di dalam Surat Keputusan WaliKota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan WaliKota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018.

Surat Keputusan WaliKota Dumai Nomor 448/Bappeda/2015 berikut Surat Keputusan Perubahan Atas Keputusan WaliKota Dumai Nomor 448/BAPPEDA/2015 Tentang Lokasi Lingkungan dan Perumahan Kumuh Perkotaan Kota Dumai Nomor 831/BAPPEDA/2018 dapat dihitung persentase lingkungan permukiman kumuh Kota Dumai tahun 2018 yaitu 0,03%. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Kota Dumai tahun 2022 yaitu 191,88%. Adapun lokasi lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan yang dimaksud tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.105
Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai Tahun 2023

Kawasan	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kawasan (Ha)
Bintan	Dumai Kota	Bintan	7,41
Kota Jadi	Dumai Kota	Dumai Kota, Sukajadi	22,19
Rimbis	Dumai Kota	Rimba Sekampung	12,98
Palas	Dumai Timur	Tanjung Palas	9,88
STDI Sesai	Dumai Barat	Pangkalan Sesai, Simpang Tetap	34,59
		Darul Ihsan	
Bagan Nama	Dumai Barat	Bagan Keladi, Purnama	21,18
Ratu Sima	Dumai Selatan	Ratu Sima	0
Bukit Sari	Dumai Selatan	Mekar Sari, Bukit Timah	19,5
Lubuk	Sungai	Lubuk Gaung, Tanjung Penyembal	21,72
Penyembal	Sembilan		
Guntung Mundam		Guntung, Teluk Makmur, Mundam	
Makmur	Medang Kampai		42,43
Total			191,88

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 Keterangan:Lokasi Lingkungan dan Pemukiman Kumuh Perkotaan Tahap II Berdasarkan SK Wali Kota Dumai Nomor: 922 Tahun 2021.

2.3.3.13 Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot di Kota Dumai

Kebutuhan jaringan komunikasi di Kota Dumai berdasarkan pada kebutuhan internet yang dilakukan oleh provider dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2023 dari 4 Kelurahan yang masih masih terdapat Low Signal dan blankspot wilayahnya. Data kelurahan yang belum sepenuhnya mempunyai akses terhadap internet dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.106 Data Low Signal and Blank Spot di Kota Dumai Tahun 2022-2023				
Jumlah Kelurahan	Data low signal and blank Spot			
	2022		2023	
	Kelurahan	%	Kelurahan	%
36	17	47,22	4	11,11

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Prov. Riau, Tahun 2024

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa kelurahan yang masih belum terjangkau oleh signal provider komunikasi selama kurun waktu tahun 2022-2023 terus berkurang dari tahun 2022 sebesar 47,22% menjadi 11,11% pada Tahun 2023.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah Posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan semua faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor tersebut. Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai daya saing daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta faktor-faktor pendorongnya.

Tabel 2.107 Indeks Daya Saing Daerah di Kota Dumai Tahun 2022-2023					
No	Uraian	Satuan	Tahun		Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2022	2023	
1	Kota Dumai	Indeks	3,02	3,04	0,66
2	Provinsi Riau	Indeks	3,16	3,25	2,85
3	Nasional	Indeks	3,15	3,44	9,21

Sumber: BRIN, 2024

2.3.4.2 Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.108
Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023

Indikator	Tahun							Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Perusahaan PMDN	64	24	91	110	235	246	302	29,51
Jumlah Perusahaan PMA	84	4	44	44	44	44	54	-7,10

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, 2024

Berdasarkan tabel diatas Jumlah Perusahaan PMDN terus mengalami pertumbuhan selam akurun waktu 2017 – 2018 sebesar 29,52% per tahun. Pada tahun 2017 jumlah Perusahaan PMA yang ada di Kota Dumai yaitu sebanyak 84 perusahaan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 4 perusahaan. Pada tahun 2019-2022 Perusahaan PMA yang di Kota Dumai berjumlah 44 perusahaan kemudian meningkat pada tahun 2023 menjadi 54 perusahan.

2.3.4.3 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

PMA (Penanaman Modal Asing) merupakan pembentukan modal bisnis di Indonesia yang ditujukan untuk investor asing, dengan sepenuhnya menggunakan modal asing atau sebagian dengan investor domestik. PMDN merupakan bentuk entitas bisnis terpopuler dan paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang yang fluktuatif selama periode 2017-2023. Nilai investasi PMA dan PMDN tahun 2017 sebesar Rp. 4.39 triliun kemudian meningkat menjadi 4,53 triliun tahun 2023.Berikut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, nilai investasi PMDN dan PMA tahun 2023

Tabel 2.109
Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PMA (Rp. Ribu)	2.390.904.980	1.635.027.800	3.699.939.000	5.844.192.480	8.709.022.640	6.411.175.100	2.740.817.920
PMDN (Rp)	2.007.203.000	371.285.600	2.237.451.800	7.117.105.500	1.444.720.200	6.647.653.285	1.789.228.800
Jumlah	4.398.108.780	2.006.313.400	5.937.390.800	12.961.297.980	10.153.742.840	13,058,828.385	4.530.046.720

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, 2024

2.3.4.4 Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Berdasarkan Peraturan WaliKota Dumai Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, terdapat 45 jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan lama proses perijinan 3 hari kerja seperti yang tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.110
Lama Proses Perijinan di Kota Dumai Tahun 2023

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
1	Pelayanan Izin Praktek Dokter Spesialis	3 Hari
2	Pelayanan Izin Praktek Dokter Umum	3 Hari
3	Pelayanan Izin Praktek Dokter Gigi	3 Hari
4	Pelayanan Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	3 Hari
5	Pelayanan Izin Praktek Apoteker	3 Hari
6	Pelayanan Izin Praktek Perawat/Perawat Mandiri	3 Hari
7	Pelayanan Izin Praktek Sanitarian	3 Hari
8	Pelayanan Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Analisis Kesehatan	3 Hari
9	Pelayanan Izin Praktek Bidan/Bidan Mandiri	3 Hari
10	Pelayanan Izin Praktek Fisioterapis	3 Hari
11	Pelayanan Izin Praktek Fisikiawan Medis	3 Hari
12	Pelayanan Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian	3 Hari
13	Pelayanan Izin Praktek Radiografer	3 Hari
14	Pelayanan Izin Praktek Nutritions/Tenaga Gizi	3 Hari
15	Pelayanan Izin Praktek Penata Anestesi	3 Hari
16	Pelayanan Izin Praktek Perekam Medis	3 Hari
17	Pelayanan Izin Praktek Psikologis Medis	3 Hari
18	Pelayanan Izin Praktek Terapis Wicara	3 Hari
19	Pelayanan Izin Praktek Teknisi Transfusi Darah	3 Hari
20	Pelayanan Izin Praktek Okupasi Terapis	3 Hari
21	Pelayanan Izin Praktek Ortotis Prostetis	3 Hari
22	Pelayanan Izin Praktek Refraksionis Optisien	3 Hari
23	Pelayanan Izin Praktek Teknisi Gigi	3 Hari
24	Pelayanan Izin Praktek Asisten Penata Anestesi	3 Hari
25	Pelayanan Izin Tukang Gigi	3 Hari
26	Pelayanan Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut	3 Hari
27	Pelayanan Izin Praktek Pengobatan Tradisional	3 Hari
28	Pelayanan Izin Praktek Elektromedis	3 Hari
29	Pelayanan Izin Klinik Pemerintah	3 Hari
30	Pelayanan Izin Praktek Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku (TPKIP)	3 Hari
31	Pelayanan Izin Praktek Tenaga Pembimbing Kesehatan Kerja	3 Hari
32	Pelayanan Izin Praktek Tenaga Epidemiologi Kesehatan	3 Hari
33	Pelayanan Izin Praktek Tenaga Entomolog Kesehatan	3 Hari
34	Pelayanan Persetujuan Penggunaan Racun Api	3 Hari
35	Pelayanan Surat Keterangan Penelitian (SKP)	3 Hari
36	Pelayanan Surat Keterangan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat Bersubsidi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	3 Hari
37	Pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah	3 Hari
38	Pelayanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (IPSPDM)	3 Hari
39	Pelayanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (IPSPNF)	3 Hari
40	Pelayanan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	3 Hari

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
41	Pelayanan Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Asing dengan Lembaga Pendidikan Indonesia	3 Hari
42	Pelayanan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial	3 Hari
43	Pelayanan Izin Dokter Hewan	3 Hari
44	Pelayanan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) IMB	3 Hari
45	Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame	3 Hari

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, 2024

2.3.4.5 Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer/barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Selama kurun Waktu 2010-2023, Kontribusi PMTB terhadap PDRB Kota Dumai cenderung turun dengan rata-rata pertumbuhan - 0,51%. Adapun pada tahun 2010 kontribusi PMTB adalah sebesar 43,52% turun menjadi sebesar 40,72% pada tahun 2023.

Tabel 2.111 Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2010-2023															
Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)														Pertumbuhan/Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.613.594,64	8.943.115,91	9.965.099,40	10.828.356,46	11.225.919,14	12.393.856,75	13.643.256,20	14.547.023,31	15.515.244,49	16.317.085,42	16.210.568,19	17.019.727,70	18.785.813,34	19.967.222,54	7,70
Produk Domestik Regional Bruto	17.495.472,47	18.406.420,81	18.956.363,45	21.231.766,16	23.628.466,86	25.453.569,61	27.962.260,29	30.342.836,58	33.076.213,75	36.147.146,52	36.313.730,07	39.946.107,96	45.052.809,86	49.034.285,88	8,25
Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	43,52	48,59	52,57	51,00	47,51	48,69	48,79	47,94	46,91	45,14	44,64	42,61	41,70	40,72	-0,51

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran 2011-2024, data diolah

2.3.4.6 Kontribusi Ekspor Barang Jasa terhadap PDRB

Ekspor-impor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor impor menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Selama kurun Waktu 2010-2023, Kontribusi eksport barang jasa terhadap PDRB Kota Dumai cenderung naik dengan rata-rata pertumbuhan 2,37%. Adapun pada tahun 2010 kontribusi ekspor barang jasa adalah sebesar 15,62% naik menjadi sebesar 21,18% pada tahun 2023.

Tabel 2.112
Kontribusi Ekspor Barang Jasa terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2010-2023

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)														Pertumbuhan/Tahun (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Net Ekspor Barang dan Jasa	2.733.237,26	1.179.812,32	332.047,68	40.613,80	1.017.196,27	1.118.031,37	877.519,75	2.008.641,32	3.009.422,81	4.409.782,03	3.961.573,16	7.480.153,43	9.161.790,59	10.387.078,24	10,82
Produk Domestik Regional Bruto	17.495.472,47	18.406.420,81	18.956.363,45	21.231.766,16	23.628.466,86	25.453.569,61	27.962.260,29	30.342.836,58	33.076.213,75	36.147.146,52	36.313.730,07	39.946.107,96	45.052.809,86	49.034.285,88	8,25
Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	15,62	6,41	-1,75	0,19	4,30	4,39	3,14	6,62	9,10	12,20	10,91	18,73	20,34	21,18	2,37

Sumber: BPS, PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran 2011-2024, data diolah

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil evaluasi kinerja Kota Dumai tahun 2021-2023 tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.113
Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2023

No	Jenis Evaluasi	Hasil Evaluasi		
		2021	2022	2023
1	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,081	3,000	3,24
2	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2,706	2,706	2,874
3	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	50,66	52,74	66,59
4	Indeks Integritas (Hasil SPI)	N/A	N/A	75,00
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	63,77	64,2	64,99

Sumber: Inspektorat Kota Dumai, 2024

2.4.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 – 100 Index kepuasan layanan masyarakat telah menjadi survey kepuasan masyarakat oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Pengukuran secara konprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan layanan publik.

Dalam mengukur peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tersebut dilakukan dengan survey kepuasan masyarakat yang wajib dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun.

Survei kepuasan masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan survei kepuasan masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. IKM Kota Dumai sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.114
Perkembangan Index Kepuasan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2014-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76	84,53	83	81,11	85,03	88,75
	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Dumai 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan data dari tahun 2018-2023 dapat dilihat bahwa indeks kepuasan layanan masyarakat pada tahun 2023 dengan memperoleh nilai 88,75 dengan kategori Baik dan naik dari 76,00 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Dumai dalam kategori baik dengan kecenderungan meningkat. Namun jika dibandingkan dengan pencapaian IKM Provinsi Riau berdasarkan laporan tahun 2023 maka IKM Kota Dumai masih dibawah IKM Provinsi Riau.

2.4.3 Indeks Inovasi Daerah

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, baik dalam struktur, perilaku dan kinerja dibutuhkan ekosistem penelitian inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung percepatan tumbuh kembang dunia usaha dan dunia industry yang berdaya saing. Adapun Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kota Dumai tahun 2022-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.115
Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kota Dumai Tahun 2022-2023

Uraian	2022			2023		
	Peringkat	Nilai	Kategori	Peringkat	Nilai	Kategori
DUMAI	76	41,03	Inovatif	72	42,38	Inovatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No.400.10.11-6287 Tahun 2023

2.4.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target dari indikator kinerja sasaran adalah memperoleh nilai indeks e-government sebesar 2,85 dengan realisasi 3,43 atau capaian sebesar 83%. Pencapaian terget tersebut melebihi target yang ditelah ditetapkan pada tahun 2023, indeks 3,43 tersebut mendapatkan predikat baik. Nilai indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, dilakukan evaluasi

system pemerintah berbasis elektronik tahun 2023 untuk memperoleh nilai indeks dan prediket system pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah.

Target SPBE dapat tercapai karena dukungan Kegiatan Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan beberapa sub kegiatan antara lain: Penatalaksanaan dan Pengawasan *e-government* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Tabel 2.116
Capaian Indeks SPBE di Kota Dumai Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Capaian Indeks SPBE	Indeks	2,29	2,54	2,25	2,56	2,63	3,34	7,84

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan Perwako Dumai Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 dimana Kementerian PAN-RB mengamanatkan Pemerintah Daerah agar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE menjadi lebih terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, Aparatur Sipil Negara, dan instansi pemerintah. Proses Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan melalui Aplikasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (<https://tauval.spbe.go.id>).

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025

Visi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan pernyataan visi pembangunan daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang Kota Dumai. Visi RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Kokoh, Dengan Masyarakat Yang Bertumpu Pada Budaya Melayu, Menuju Dumai Madani Yang Hijau.

Dalam mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan 5 misi, 5 sasaran pokok dan 9 arah kebijakan secara lengkap diuraikan sebagai berikut

- 1) Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
- 2) Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjiwa Melayu;
- 3) Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
- 4) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik;
- 5) Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau

2.5.1 Capaian Kinerja RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025 Per Periode RPJMD

1. Capaian Kinerja Misi 1

Capaian Kinerja Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri. Sasaran Pokok misi 1 yaitu mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industry. Indikator yang digunakan dalam penilaian capaian kinerja terhadap sasaran pokok tersebut adalah

1. Berkembangnya Kawasan Industri.
2. Terwujudnya sektor industri dan perdagangan, serta jasa yang kokoh.
3. Terwujudnya investasi yang mendorong berkembangnya perekonomian daerah.
4. Terciptanya kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas.

Perkembangan Capaian Kinerja RPJPD menurut indicator pada akhir periode RPJMD tahun 2010, 2015, 2021, dan Periode RPJMD Tahun Berjalan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.117
Perkembangan Capaian Kinerja Misi 1 Di Kota Dumai Akhir Periode RPJMD tahun 2010, 2015, 2021 dan Periode RPJMD Tahun Berjalan

No	Indikator	Kondisi Awal Periode 2005	Capaian Kinerja Akhir Periode RPJMD				Peningkatan/ Penurunan	Pertumbuhan (%)
			2010	2015	2021	2022		
1	Berkembangnya Kawasan Industri (Unit)	2,00	2,00	3,00	5,00	5,00	3,00	29,17
2	Terwujudnya sektor industri dan perdagangan, serta jasa yang kokoh (%)	5.471	7.325	7.218	7.601	7.639	2.168	956
3	Terwujudnya investasi yang mendorong berkembangnya perekonomian daerah (Rp. Triliun)	0,16	252,00	13,35	9,09	12,55	12,39	(29,52)
4	Terciptanya kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas (Orang)	1.029	15.019	1.542	3.998	2.418	1.389	347

2. Capaian Kinerja Misi 2

Capaian kinerja Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjiwa Melayu. Sasaran pokok misi 2 yaitu terwujudnya investasi dalam rangka menumbuhkan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan

memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam penilaian capaian kinerja terhadap sasaran pokok tersebut

1. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas.
2. Terwujudnya masyarakat Dumai Sehat.
3. Terwujudnya jati diri masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur.
4. Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu.

Tabel 2.118
Perkembangan Capaian Kinerja Misi 2 Di Kota Dumai Akhir Periode RPJMD tahun 2010, 2015, 2021 dan Periode RPJMD Tahun Berjalan

No	Indikator	Kondisi Awal Periode 2005	Capaian Kinerja Akhir Periode RPJMD					Peningkatan /Penurunan	Pertumbuhan (%)
			2010	2015	2021	2022	2023		
1	RLS	9,7	9,36	9,57	10,14	10,15	10,16	0,45	1,2
2	AHH	70,25	69,93	70,25	70,98	71,25	71,67	1,32	0,47
3	Rumah Ibadah	-	-	216	235	235	252	363	3,21
4	Penerapan Budaya (IPM)	75,32	69,55	72,2	74,75	75,26	76,45	5,71	2,67

3. Capaian Kinerja Misi 3

Capaian kinerja Misi 3: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang. Sasaran pokok misi 3 yaitu:

1. Terwujudnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah.
2. Terpenuhinya ketersediaan sumber air baku untuk air bersih.
3. Terpenuhinya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.
4. Terwujudnya dukungan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi
5. Terwujudnya pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman
6. Terpenuhinya kualitas dan kuantitas fasilitas sosial dan ekonomi

Tabel 2.119
Perkembangan Capaian Kinerja Misi 3 Di Kota Dumai Akhir Periode RPJMD tahun 2015, 2021 dan Periode RPJMD Tahun Berjalan

No	Indikator (%)	Kondisi Awal Periode 2005	Capaian Kinerja Akhir Periode RPJPD					Peningkatan / Penurunan	Pertumbuhan (%)
			2010	2015	2021	2022	2023		
1	Kondisi Jalan Baik	47,96	56,83	55,60	52,37	44,30	45,86	-2,1	-0,27
2	Akses Air Minum Bersih (PDAM)	0,83	1,14	1,47	1,28	5,18	9,23	8,4	87,25
3	Akses telepon/internet	0,00	0,00	0,00	66,40	67,96	76,86	76,86	3,09
4	Akses Rumah (Milik Sendiri)	43,66	50,42	57,19	65,31	66,66	71,12	27,46	10,37
5	Tingkat Kemiskinan	8,44	6,45	5,26	3,42	3,20	3,21	-5,23	-16,63

4. Capaian Kinerja Misi 4

Capaian Kinerja Misi 4: Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Sasaran pokok misi 4 yaitu:

1. Meningkatnya sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya.
2. Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima.

Tabel 2.120 Perkembangan Capaian Kinerja Misi 4 Di Kota Dumai Akhir Periode RPJMD tahun 2010, 2015, 2021 dan Periode RPJMD Tahun Berjalan 2023									
No	Indikator	Kondisi Awal Periode 2005	Capaian Kinerja Akhir Periode RPJMD					Peningkatan/ Penurunan	Pertumbuhan (%)
			2010	2015	2021	2022	2023		
1	Indeks Layanan SPBE	0	1,79	2,14	2,56	2,63	3,43	0,84	10,48
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	82,46	83,31	84,33	84,50	88,75	2,04	0,86

Note: Angka Tahun 2010 dan 2015, angka estimasi.

5. Capaian Kinerja Misi 5

Capaian Kinerja Misi 5: Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau.
Sasaran pokok misi 5 yaitu

1. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.
2. Meningkatnya perangkat pengelolaan/kelembagaan daerah yang tangguh untuk menjaga lingkungan pembangunan berkelanjutan.
3. Terwujudnya tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Tabel 2.121 Perkembangan Capaian Kinerja Misi 5 Di Kota Dumai Akhir Periode RPJMD tahun 2010, 2015, 2021 dan Periode RPJMD Tahun Berjalan 2023									
No	Indikator	Kondisi Awal Periode 2005	Capaian Kinerja Akhir Periode RPJMD					Peningkatan/ Penurunan	Pertumbuhan (%)
			2010	2015	2021	2022	2023		
1	Kota Dumai yang bersih dan teduk serta perolehan adipura Kota Dumai		-	100	-	-	100		
2	Terbentuknya tim satgas dan Masyarakat Peduli Api (MPA)		-	-	121	121	121		
3	Sekolah-sekolah yang berwawasan lingkungan		-	100	-	-	-		

2.5.2 Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Secara Makro

Capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah tahun 2005-2023 diukur melalui beberapa indikator antara lain Indek Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Perkapita, Tingkat Ketimpangan dan PDRB Per Kapita. Tingkat capaian terhadap 7 indikator makro pembangunan hanya indictor pertumbuhan ekonomi dengan tingkat capaian sebesar 82,17% dengan predikat capaian tinggi. Sementara 6 indikator lainnya dengan tingkat capaian diatas 100% atau dengan predikat sangat tinggi. Capaian kinerja pembangunan Kota Dumai secara makro dari periode perencanaan tahun 2005-2023 disajikan sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2.122 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Dumai Tahun 2005-2023						
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2023)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)	Tingkat Capaian Kinerja	Prediket Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,32	75,66	0,45	100,83	Sangat Tinggi
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,44	3,21	-61,97	91,98	Sangat Tinggi
3	Angka Pengangguran (TPT) (%)	14,68*	5,15	-64,92	68,30	Sedang

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Capaian pada Tahun Berjalan (2023)	Pertumbuhan/ Penurunan (%)	Tingkat Capaian Kinerja	Prediket Kinerja
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,74	6,05	-21,83	138,76	Sangat Tinggi
5	Pendapatan Perkapita (Juta Rp)	10,87	12,46	14,63	114,63	Sangat Tinggi
6	Ketimpangan Pendapatan*	0,31	0,32	3,23	88,89	Tinggi
7	PDRB Perkapita (Juta Rp)					
	1. Harga Berlaku	10,57	145,04	1.272,19	114,84	Sangat Tinggi
	2. Harga Konstan	6,34	86,97	1.271,77	104,18	Sangat Tinggi

Ket: * Capaian Kinerja Awal Periode Tahun 2011

Capaian kinerja pembangunan Kota Dumai yang tercakup dalam indicator makro pembangunan sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.7 dibawah. Selanjutnya capaian makro pembangunan juga disajikan menurut capaian kinerja akhir periodesasi RPJMD 2005-2010, 2011-2015 dan 2016-2021 serta 2021-2026.

1. Periode RPJMD Tahun 2005-2010 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% dengan prediket Sangat Tinggi, namun angka ini hanya angka estimasi karena tidak terdapat data target kinerja tahun 2010.
2. Periode RPJMD Tahun 2011-2015 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 169,04% dengan prediket Sangat Tinggi;
3. Periode RPJMD Tahun 2016-2021 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,12% dengan prediket Sangat Tinggi,
4. Periode RPJMD Tahun 2021-2023 dengan tingkat capaian kinerja periode tahun 2022 sebesar 113,75% dengan prediket Sangat Tinggi.

2.5.3 Kesimpulan

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tingkat capaian terhadap empat periodesasi RPJMD Kota Dumai dari tahun 2005-2023 menunjukkan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja diatas 100% dengan predikat kinerja sangat tinggi. Sementara itu berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kota Dumai 2005-2025, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Capaian kinerja pembangunan Kota Dumai yang tercakup dalam indicator makro pembangunan sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.46 dibawah. Selanjutnya capaian makro pembangunan juga disajikan menurut capaian kinerja akhir periodesasi RPJMD 2005-2010, 2011-2015 dan 2016-2021 serta 2021-2026.

1. Capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah tahun 2005-2022 diukur melalui beberapa indikator antara lain Indek Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Pendapatan Perkapita, Tingkat Ketimpangan dan PDRB Per Kapita. Tingkat capaian terhadap 7 indicator makro pembangunan hanya indictor pertumbuhan ekonomi dengan tingkat capaian sebesar 82,17% dengan

predikat capaian tinggi. Sementara 6 indikator lainnya dengan tingkat capaian diatas 100% atau dengan predikat sangat tinggi

2. Periode RPJMD Tahun 2005-2010 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,00% dengan prediket Sangat Tinggi, namun angka ini hanya angka estimasi karena tidak terdapat data target kinerja tahun 2010.
3. Periode RPJMD Tahun 2011-2015 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 169,04% dengan prediket Sangat Tinggi;
4. Periode RPJMD Tahun 2016-2021 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,12% dengan prediket Sangat Tinggi,
5. Periode RPJMD Tahun 2021-2026 dengan tingkat capaian kinerja periode tahun 2023 sebesar 113,75% dengan prediket Sangat Tinggi.
6. Percepatan pembangunan jalan lingkar untuk mengatasi kendala pembangunan infrastruktur jalan yang digunakan truk industri yang memasuki wilayah perkampungan penduduk. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang, metode konstruksi yang aplikatif, pengawasan yang baik, dan pendanaan yang lebih intensif. Keberhasilan menangani pembangunan infrastruktur di wilayah terisolir akan berdampak besar untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan dan pengembangan di wilayah.
7. Pengelolaan lahan gambut memerlukan perencanaan, pengawasan dan pertimbangan lingkungan yang benar untuk mengatasi dampak lingkungan kebakaran hutan/lahan, banjir, maupun kekeringan yang akan semakin masif di masa depan terutama untuk pengembangan kawasan industri.
8. Terbukanya ruas jalan tol Sumatera yang melintasi Pekanbaru Dumai akan memerlukan jalan feeder untuk menghubungkannya dengan jalan-jalan yang telah ada sehingga jalan tol ini akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap pembangunan daerah.
9. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar air bersih dalam jaringan pipa yang masih sangat minim, terutama di wilayah pesisir dan pulau sangat penting karena mempengaruhi kualitas kehidupan dan kesehatan masyarakat. Ketersediaan air bersih juga mendukung kegiatan industri dan menarik investasi lebih cepat.
10. Ketergantungan aktifitas perekonomian kota Dumai yang mengandalkan pengangkutan sumber daya alam TBS, CPO, serta angkutan barang lintas kabupaten Kota memerlukan kondisi jalan raya yang baik. Karena itu pemeliharaan jalan dan pengaturan pembatasan angkutan ODOL harus menjadi prioritas.
11. Penerapan budaya Melayu di masyarakat dan pemerintahan sangat tinggi, tetapi memerlukan dukungan dana yang cukup dan program yang baik untuk pemajuan kebudayaan berupa perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan budaya Melayu Riau.

12. Kontribusi sektor non migas di bidang pertanian/perkebunan, dan industri pengolahan kelapa sawit perlu ditingkatkan ke arah industri hilirnya, sehingga pemanfaatan lahan bisa semakin efisien dan efektif sehingga lahan konservasi lingkungan menjadi lebih banyak untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

2.5.4 Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk penyusunan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indikator makro pembangunan terutama sektor pelayanan khusus akses ketenagakerjaan perlu mendapatkan prioritas karena capaian kinerja masih lebih rendah dari capaian kinerja Kota Dumai;
2. Review terhadap peruntukan penggunaan kawasan yang belum terlaksana terutama untuk pengembangan sektor industri sebagai sektor andalan kedepan;
3. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dengan pembangunan jalan lingkar Dumai, jembatan, dan terutama wilayah menuju ke kawasan industri terutama ke arah Lubuk Gaung dan Pelintung;
4. Meningkatkan dan memanfaatkan ketersediaan jaringan air bersih untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan sektor industri;
5. Pengembangan industri hilir kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah; intensifikasi pertanian dan efektifitas penggunaan lahan; peningkatan konservasi lingkungan dan mitigasi bencana akibat kerusakan lingkungan;
6. Pembangunan infrastruktur dasar (air bersih, jalan, jembatan, penyeberangan) kawasan terpencil;
7. Peningkatan aktifitas pemajuan kebudayaan Melayu sebagai payung negeri bagi kebudayaan yang ada Kota Dumai.

2.6. Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Publik

Demografi Paradigma pembangunan Kota Dumai menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, pengetahuan akan tren dan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan nasional. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah.

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Perencanaan pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Hasil sensus, survei, dan data administratif menyediakan informasi penduduk untuk kondisi saat pendataan tersebut dilakukan. Namun, penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamika waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu pembuat kebijakan untuk memonitor dan

mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan selanjutnya.

2.6.1 Tren Demografi

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun dari tahun 2025-2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua. Penyusunan proyeksi penduduk 2025-2045 menggunakan asumsi dengan dua skenario utama, yaitu skenario tren dan skenario kebijakan. Proyeksi penduduk dengan skenario tren berdasarkan kepada asumsi IMR sesuai dengan tren dan asimtot bawah TFR sebesar 2,07 anak per wanita. Dengan skenario tersebut, dihasilkan IMR sebesar 9,30 bayi per 1.000 kelahiran pada 2045 provinsi Riau.

2.6.1.1 Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk. Gangguan dalam populasi manusia dapat menyebabkan masalah seperti polusi dan kemacetan lalu lintas, meskipun dapat ditutupi perubahan teknologi dan ekonomi.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Dumai berdasarkan data sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 253.178 Jiwa kemudian bertambah menjadi 316.782 jiwa pada tahun 2020 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,27% per tahun selama periode 2010-2020. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk Kota Dumai selama tahun 2010-2020 adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan dengan pertumbuhan lebih tinggi yaitu sebesar 2,20% per tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki hanya sebesar 2,02% per tahun. Berdasarkan perkembangan data hasil sensus kependudukan tersebut, oleh BPS dijadikan dasar untuk proyeksi pertambahan jumlah penduduk tahun 2025-2045. Proyeksi jumlah penduduk tahun 2025 sebanyak 344.847 jiwa dan proyeksi bertambah menjadi sebanyak 410.163 jiwa tahun 2045. Proyeksi pertambahan penduduk disumbangkan oleh pertambahan jumlah penduduk laki-laki dari 176.492 jiwa tahun 2025 bertambah menjadi 209.509 jiwa tahun 2045 dan proyeksi jumlah penduduk perempuan tahun 2025 sebanyak 168.355 dan diproyeksi bertambah menjadi 200.654 jiwa tahun 2045. Proyeksi pertambahan jumlah dari tahun 2025 ke tahun 2045, jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.123
Proyeksi Kependudukan Kota Dumai Tahun 2025-2045

No	Indikator Kependudukan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	344.847	362.743	377.171	394.763	410.163	0,87
2	Laki-Laki (Jiwa)	176.492	184.959	191.553	201.985	209.509	0,86
3	Perempuan (Jiwa)	168.355	177.784	185.618	192.779	200.654	0,88
4	Sex Rasio	104,83	104,04	103,20	104,78	104,41	-0,02

No	Indikator Kependudukan	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
5	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	166,86	175,52	182,50	191,01	198,46	0,87

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kota Dumai data diolah, 2023

Dalam kurun waktu 2025-2045 tersebut laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sekitar 0,87% per tahun, dimana pertumbuhan laki-laki sebesar 0,86% dan Perempuan sebesar 0,88% per tahun. Sementara sex ratio diproyeksi mengalami penurunan dari 104,83 tahun 2025 dan menurun menjadi 104,41 tahun 2045.

Selain angka kelahiran penduduk, pertumbuhan penduduk Kota Dumai tersebut disebabkan oleh adanya migrasi dari daerah lain baik antara kabupaten kota juga antar provinsi. Migrasi tersebut terjadi karena mengingat Kota Dumai merupakan salah wilayah yang sektor industri pengolahan yang mengalami perkembangan dengan pesat terutama industri pengolahan berbasis CPO dan industri lainnya.

Selanjutnya proyeksi penduduk Kota Dumai menurut kecamatan tahun 2025-2045 menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tahun tersebut ada di Kecamatan Medang Kampai sebesar 1,26% per tahun dan persentase pertumbuhan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Dumai Kota sebesar 0,58% per tahun selama periode 2025-2045.

Tabel 2.124
Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai
Tahun 2025-2045

Penduduk	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2025	2030	2035	2040	2045	
Bukit Kapur	59.689	62.472	65.054	68.512	70.598	0,84
Medang Kampai	20.996	22.526	24.359	26.671	28.548	1,55
Sungai Sembilan	48.603	51.803	54.966	58.866	62.393	1,26
Dumai Barat	47.099	49.509	51.282	53.388	55.227	0,80
Dumai Selatan	54.569	56.858	58.109	59.632	61.264	0,58
Dumai Timur	74.149	78.081	80.936	84.369	87.490	0,83
Dumai Kota	39.742	41.494	42.464	43.326	44.641	0,58
Jumlah Penduduk	344.847	362.743	377.171	394.763	410.163	0,87

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kota Dumai data diolah, 2023

Sementara itu proyeksi jumlah penduduk dengan distribusi terbanyak ada di kecamatan Dumai Timur dimana pada tahun 2025 proyeksi jumlah penduduk sebanyak 74.149 jiwa bertambah menjadi 87.490 jiwa di tahun 2045. Sedangkan distribusi jumlah penduduk terkecil berdasarkan hasil proyeksi terdapat di kecamatan Medang Kampai dengan proyeksi sebanyak 20.996 jiwa di tahun 2025 bertambah menjadi 28.548 jiwa pada tahun 2045.

2.6.1.2 Distribusi Penduduk

Struktur umur penduduk menurut kelompok umur berdasarkan awal tahun perencanaan 2025 hingga 2045. Berdasarkan data proyeksi penduduk menurut kemlompok umur menunjukkan bahwa kelompok umur belum produktif dari tahun 2025-2045 mengalami penurunan secara relative. Jumlah penduduk kelompok umur 0–4 tahun diproyeksi akan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -5,11% per

tahun dari tahun 2025-2045 dan jumlah penduduk kelompok umur 5–9 tahun juga diproyeksi akan mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -12,03% per tahun selama tahun 2025-2045 dan jumlah penduduk kelompok umur 10-14 tahun diproyeksi akan mengalami peningkatan pertumbuhan hanya sebesar 0,29% per tahun.

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa beban ketergantungan terhadap kelompok umur 0-14 tahun di Kota Dumai secara umum akan mengalami penurunan walaupun masih cukup tinggi. Beban ketergantungan kelompok umur 0-14 tahun harus mendapat perhatian khusus karena dimasa yang akan datang akan menjadi kelompok umur produktif. Namun pada saat masuk dalam kategori kelompok umur produktif harus memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu dalam rangka menyiapkan penduduk kelompok umur produktif yang memiliki kompetensi di masa mendatang, maka dibutuhkan penyediaan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang memadai menjelang masuk dalam kelompok umur produktif. Namun demikian akan menjadi persoalan, jika jumlah penduduk masuk dalam kelompok umur belum produktif yang tidak dibarengi dengan tingkat pendidikan yang memadai, tingkat keterampilan yang rendah, lapangan pekerjaan yang terbatas, maka akan menjadi beban bagi daerah. Oleh karena itu diperlukan upaya dengan memanfaatkan jumlah penduduk umur yang belum produktif tersebut dapat menggerakkan Pembangunan terutama bidang ekonomi dimasa yang akan datang.

Proyeksi jumlah penduduk kelompok umur tidak produktif 65 tahun ke atas menunjukkan kecenderungan akan mengalami peningkatan pertumbuhan dari tahun 2025-2045. Jumlah penduduk kelompok umur 65-69 tahun tumbuh sebesar 19,74% per tahun dan jumlah penduduk kelompok umur 70-74 tumbuh sebesar 25,88% per tahun. Jumlah penduduk kelompok umur di atas 75 tahun mengalami pertumbuhan sekitar 42,50% per tahun selama tahun 2025-2045. Data proyeksi tersebut menunjukkan bahwa adanya kesenderungan bahwa beban ketergantungan kelompok umur 65 tahun ke atas semakin bertambah. Oleh karena itu kedepan pemerintah Kota Dumai harus menyediakan fasilitas Kesehatan dan makanan sehat dalam rangka menjamin kehidupan penduduk yang masuk dalam kategori tidak produktif, untuk jelasnya lihat Tabel di bawah ini.

Tabel 2.125
Proyeksi Distribusi Penduduk Berdasarkan Umur Kota Dumai Tahun 2025-2045

No	Kelompok Umur Penduduk L+P	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
1	0–4	28.186	27.440	26.954	24.424	22.800	-1,05
2	5–9	34.917	27.990	27.156	23.110	20.706	-2,58
3	10–14	30.753	34.687	27.723	31.418	29.887	-0,14
4	15–19	28.206	30.386	34.183	35.878	38.527	1,57
5	20–24	27.592	27.817	29.890	29.674	30.577	0,51
6	25–29	28.216	27.409	27.551	26.673	26.328	-0,35
7	30–34	28.237	28.225	27.318	27.523	27.168	-0,19
8	35–39	26.856	28.062	27.976	29.177	29.674	0,50
9	40–44	25.454	26.400	27.521	28.640	29.736	0,78
10	45–49	23.060	24.963	25.810	27.855	29.266	1,20
11	50–54	19.377	22.517	24.331	27.715	30.232	2,25
12	55–59	14.773	18.633	21.628	25.099	28.205	3,29
13	60–64	11.919	13.883	17.527	19.567	22.372	3,20
14	65–69	8.307	10.897	12.718	14.988	16.970	3,64
15	70–74	5.371	7.145	9.407	11.345	13.414	4,68

No	Kelompok Umur Penduduk L+P	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
16	75>	3.622	6.289	9.478	11.676	14.300	7,11
	Jumlah	344.847	362.743	377.171	394.763	410.163	0,87

Sumber: BPS, Proyeksi Penduduk Kota Dumai data diolah, 2023

2.6.1.3 Fertilitas (Kelahiran)

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Diharapkan jumlah bayi yang dilahirkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi *stationer*. Indikator pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), adalah angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*) sama dengan 2,1 per wanita subur dan angka reproduksi bersih (*Net Reproduction Rate*) sebesar 1 per wanita subur.

Salah satu proyeksi penduduk dengan menggunakan asumsi indikator *Total Fertility Rate* (TFR) adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, Tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan Tingkat urbanisasi. Tingginya angka TFR memberikan tantangan pemerintah dalam mengintervensi dan lebih menggiatkan pelaksanaan program pengendalian kelahiran penduduk. Berikut disajikan tabel *Total Fertility Rate* (TFR) Kota Dumai.

Tabel 2.126
Total Fertility Rate (TFR) Kota Dumai

Uraian	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
	2025	2030	2035	2040	2045	
TFR	2,22	2,21	2,21	2,21	2,20	-0,039

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, 2024 data diolah

2.6.1.4 Mortality (Kematian)

Asumsi mortality (kematian) menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. *Infant Mortality Rate* (IMR) merupakan banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kondisi kesehatan masyarakat juga turut membaik sejalan dengan menurunnya jumlah anak. Tahun 2025 diproyeksikan 13 kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup. Angka ini diharapkan menurun pada tahun 2045 menjadi 6,74 $\approx$ 7 kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.127
Infant Mortality Rate (IMR) Kota Dumai

Uraian	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2025	2030	2035	2040	2045	
IMR	13,3	10,86	9,47	7,99	6,74	-3,34

Sumber: Hasil Long Form SP 2020 – BPS Provinsi Riau

2.6.1.5 Bonus Demografi

Bonus demografi atau "dividen demografi" merujuk kepada situasi di mana suatu populasi memiliki proporsi besar penduduk usia produktif, yaitu orang-orang yang berada dalam rentang usia yang cenderung bekerja dan dapat memberikan kontribusi ekonomi. Oleh karena itu, bonus demografi merupakan jumlah orang usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang yang bergantung pada mereka terutama usia belum produktif 0-14 tahun usia 65 keatas. Bonus demografi akan memberikan keuntungan ekonomi jika pemerintah dan sektor swasta mampu menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi yang memadai bagi penduduk usia produktif. Dalam konteks bonus demografi, ada potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang pesat karena banyak anggota masyarakat dapat berkontribusi secara aktif pada kegiatan ekonomi.

Tabel 2.128
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Umur Belum Produktif, Umur Produktif dan Tidak Produktif serta Rasio Ketergantungan Kota Dumai Tahun 2025-2045

No	Kelompok Umur	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
A	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur						
1	0-14	93.856	90.117	81.833	78.952	73.393	-1,22
2	15-64	233.690	248.294	263.736	277.802	292.086	1,12
3	>65	17.300	24.331	31.602	38.010	44.683	4,86
B	Distribusi Kelompok Umur						
1	0-14	27,22	24,84	21,70	20,00	17,89	-2,08
2	15-64	67,77	68,45	69,92	70,37	71,21	0,25
3	>65	5,02	6,71	8,38	9,63	10,89	3,95
C	Rasio Ketergantungan	47,57	46,09	43,01	42,10	40,43	-0,81

Proyeksi jumlah penduduk kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2025 sebanyak 93.856 jiwa dan diproyeksi menurun menjadi sebanyak 73.393 jiwa tahun 2045. Proyeksi jumlah penduduk kelompok umur produktif berjumlah 233.690 jiwa pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 292.086 jiwa pada tahun 2045. Proyeksi jumlah penduduk kelompok umur 65 tahun ke atas pada tahun 2025 sebanyak 17.300 jiwa dan bertambah menjadi 44.683 jiwa tahun 2045.

Tabel diatas juga menunjukkan bahwa proyeksi distribusi jumlah penduduk kelompok umur belum produktif (0-14 tahun) mengalami penurunan sebesar -2,08%. Proyeksi distribusi jumlah penduduk kelompok usia produktif (15-64 tahun) cenderung mengalami peningkatan 0,25%. Demikian halnya proyeksi distribusi jumlah penduduk kelompok usia tidak produktif (65 ke atas) yang cenderung mengalami peningkatan sebesar 3,95%.

Kondisi ini menggambarkan bahwa terjadinya bonus demografi di Kota Dumai dari tahun 2025-2045. Oleh karena itu untuk memanfaatkan bonus demografi dengan baik, penting untuk memiliki kebijakan pendidikan, pelatihan kerja, dan infrastruktur ekonomi yang mendukung perkembangan tenaga kerja. Jika tidak, bonus demografi dapat berubah menjadi tantangan ekonomi jika tidak ada cukup peluang pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang tumbuh. Pemanfaatan bonus demografi dapat menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang.

Bonus demografi tersebut, jika dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi

peluang untuk mendukung ketersediaan jumlah tenaga kerja dan lebih lanjut dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Upaya untuk mewujudkan peluang tersebut harus ditunjang dengan penyediaan sarana prasarana pendidikan maupun pelatihan keterampilan kerja yang memadai, sehingga dapat membentuk sumberdaya manusia yang unggul untuk kemajuan daerah.

2.6.1.6 Penduduk Usia Tua (Aging Population)

Kualitas kesehatan yang semakin baik berdampak pada semakin meningkatnya angka harapan hidup dan tentunya jumlah lansia akan semakin bertambah. Berdasarkan data Tabel diatas menunjukkan bahwa proyeksi distribusi jumlah penduduk kelompok usia tidak produktif (65 ke atas) meningkat menjadi 3,95%. Kondisi ini menunjukkan pertambahan jumlah penduduk usia tua. Peningkatan jumlah penduduk usia tua dapat memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek masyarakat, termasuk sistem kesehatan, pensiun, dan pelayanan sosial. Beberapa dampak yang mungkin timbul termasuk peningkatan permintaan layanan kesehatan, perluasan sistem pensiun, dan perubahan dalam kebijakan sosial yang berfokus pada kebutuhan kelompok usia tersebut.

Faktor-faktor seperti peningkatan harapan hidup, penurunan angka kelahiran, dan perubahan pola migrasi dapat berkontribusi terhadap penuaan populasi. Penuaan populasi juga dapat menjadi tantangan bagi berbagai negara karena dapat memerlukan adaptasi kebijakan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat bagi kelompok usia tua yang semakin besar.

Tabel 2.129
Proporsi Jumlah Penduduk Usia Tua Terhadap Jumlah Penduduk

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan/Tahun (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	344.847	362.743	377.171	394.763	410.163	0,87
2	Penduduk Usia >65	17.300	24.331	31.602	38.010	44.683	4,86
3	Proporsi Jumlah Penduduk Usia Tua Terhadap Jumlah Penduduk	5,02	6,71	8,38	9,63	10,89	3,95

Data proyeksi tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2025 ke 2045 terjadinya Peningkatan proporsi penduduk berusia tua (aging population) dengan rata-rata pertumbuhan 3,95% per tahun. Hal ini seharusnya diimbangi dengan Pembangunan sarana prasarana Kesehatan dan sosial yang mendukung aktivitas para penduduk tua (>65 tahun).

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang harus disediakan di kota Dumai selama tahun 2025-2045 yaitu:

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah-Tempat Tinggal

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu, rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat Pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan, maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah merupakan kebutuhan dasar karena memenuhi beberapa fungsi pokok dalam kehidupan manusia, demikian halnya penduduk Kota Dumai selama tahun 2025-2045. Rumah sebagai kebutuhan dasar berfungsi sebagai berikut:

- 1) Tempat Berteduh dan Melindungi: Rumah menyediakan tempat berteduh dan melindungi dari cuaca eksternal seperti panas, hujan, angin, dan dingin. Ini penting untuk kesejahteraan fisik dan kesehatan manusia.
- 2) Keamanan dan Privasi: Rumah memberikan keamanan dan privasi. Ini adalah tempat di mana individu dan keluarga dapat merasa aman dari potensi ancaman atau gangguan eksternal.
- 3) Kenyamanan dan Kesejahteraan: Rumah memberikan tempat yang nyaman untuk tinggal. Fasilitas seperti kamar tidur, dapur, dan kamar mandi memastikan kesejahteraan sehari-hari.
- 4) Hubungan Sosial dan Keluarga: Rumah adalah tempat di mana hubungan sosial dan keluarga berkembang. Ini memberikan tempat bagi individu untuk terhubung dengan anggota keluarga, membangun ikatan, dan berbagi momen bersama.
- 5) Stabilitas dan Identitas: Rumah memberikan rasa stabilitas dan identitas. Ini adalah tempat yang melekat dengan identitas pribadi dan keluarga, menciptakan ikatan emosional dengan lokasi dan lingkungan sekitar.
- 6) Akses ke Layanan Publik: Rumah yang terletak di suatu tempat memberikan akses lebih baik ke layanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan fasilitas umum lainnya.
- 7) Pertumbuhan Anak-Anak: Rumah yang layak memberikan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan anak-anak. Mereka dapat memiliki tempat yang aman untuk belajar, bermain, dan berkembang.
- 8) Keamanan Finansial: Memiliki rumah dapat memberikan keamanan finansial dalam jangka panjang. Rumah sering dianggap sebagai investasi, dan kepemilikan rumah dapat memberikan stabilitas keuangan.

Dengan adanya berbagai aspek ini, rumah tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mendukung aspek-aspek psikologis, sosial, dan ekonomi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, di banyak budaya dan masyarakat, memiliki rumah dianggap sebagai hak dasar dan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup.

Proyeksi kebutuhan rumah kedepan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan populasi, perkembangan ekonomi, urbanisasi, dan tren perumahan. Meskipun saya tidak memiliki data terkini, berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi proyeksi kebutuhan rumah kedepan. Kebutuhan perumahan disebabkan oleh:

- 1) Pertumbuhan Populasi: Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan permintaan akan rumah. Kenaikan jumlah penduduk dapat mengakibatkan peningkatan permintaan rumah untuk keperluan tempat tinggal.
- 2) Urbanisasi: Peningkatan urbanisasi sering kali berdampak pada permintaan rumah. Orang-orang yang pindah ke kota membutuhkan tempat tinggal, yang dapat meningkatkan permintaan rumah di area perkotaan.
- 3) Tren Perumahan: Perubahan dalam tren perumahan, seperti preferensi terhadap tipe rumah tertentu atau konsep perumahan tertentu, dapat memengaruhi proyeksi kebutuhan rumah. Misalnya, meningkatnya minat terhadap rumah ramah lingkungan atau teknologi smart home.
- 4) Perkembangan Ekonomi: Pertumbuhan ekonomi dapat memicu kenaikan pendapatan masyarakat, yang kemungkinan dapat meningkatkan permintaan untuk rumah mewah atau rumah dengan fasilitas tambahan.
- 5) Kebijakan Pemerintah: Kebijakan pemerintah terkait perumahan, seperti insentif pembangunan, program pembiayaan rumah, atau peraturan zonasi, dapat memengaruhi pasar perumahan dan kebutuhan rumah di suatu daerah.
- 6) Perubahan Gaya Hidup: Perubahan dalam gaya hidup, seperti kebutuhan akan ruang kerja di rumah (terutama setelah pengalaman bekerja dari rumah selama pandemi COVID-19), dapat mempengaruhi desain dan ukuran rumah yang dibutuhkan.

Proyeksi kebutuhan perumahan di kota Dumai dari tahun 2025-2045 menunjukkan akan terjadinya peningkatan seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2023 jumlah kepemilikan rumah sebanyak 60.108 unit dari kebutuhan 79.151 unit, artinya masih terdapat kekurangan sekitar 19.043 unit.

Berdasarkan data tersebut jika pemenuhan kebutuhan rumah melalui kepemilikan rumah dari tahun 2025 hingga tahun 2045 maka dibutuhkan sekitar 817 unit rumah yang harus dibangun setiap tahun. Namun mengingat perkembangan kondisi ekonomi masyarakat maka untuk menenuhi kebutuhan rumah tersebut pembangunan perumahan harus dibangun secara beransur sesuai dengan kemampuan ekonomi Masyarakat. Sebagaimana disajikan pada Tabel berikut, maka pertumbuhan pembangunan perumahan untuk tahun 2025 terus meningkat hingga tahun 2045 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya 0,87%. Adapun proyeksi kebutuhan rumah pada tahun 2025 adalah sebesar 86.212 dan pada tahun 2045 menjadi 102.451. Perkembangan kebutuhan perumahan Kota Dumai dari tahun 2025-2045 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.130
Proyeksi Kebutuhan Rumah Kota Dumai Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah-Tempat Tinggal (Unit)					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2025	2030	2035	2040	2045	
1	Jumlah Penduduk	338.064	344.847	362.743	377.171	394.763	410.163	0,87
2	Proyeksi Kebutuhan Rumah	79.151	86.212	90.686	94.293	98.691	102.541	0,87
3	Proyeksi Kepemilikan Rumah	60.108	65.461	81.022	100.284	124.124	153.631	4,36

Selanjutnya jika dilihat proyeksi kebutuhan rumah per kecamatan di Kota Dumai terus mengalami peningkatan dari tahun 2025-2045. Distribusi kecamatan yang membutuhkan rumah terbanyak ada di Kecamatan Dumai Timur yaitu sebanyak 18.537 unit rumah tahun 2025 dan meningkat menjadi 21.873 unit rumah tahun 2045. Sedangkan kecamatan dengan proyeksi kebutuhan rumah terkecil ada di Medang Kampai, dimana pada tahun 2025 proyeksi sebanyak 5.249 unit rumah dan hanya meningkat menjadi 7.137 unit rumah pada tahun 2045. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131
Proyeksi Kebutuhan Rumah Per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2025-2045

No	Penduduk	Tahun					Pertumbuhan Per Tahun (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
1	Bukit Kapur	14.922	15.618	16.264	17.128	17.650	0,84
2	Medang Kampai	5.249	5.632	6.090	6.668	7.137	1,55
3	Sungai Sembilan	12.151	12.951	13.742	14.716	15.598	1,26
4	Dumai Barat	11.775	12.377	12.820	13.347	13.807	0,80
5	Dumai Selatan	13.642	14.214	14.527	14.908	15.316	0,58
6	Dumai Timur	18.537	19.520	20.234	21.092	21.873	0,83
7	Dumai Kota	9.936	10.373	10.616	10.832	11.160	0,58
Kebutuhan Kota Dumai		86.212	90.686	94.293	98.691	102.541	0,87

Proyeksi kebutuhan rumah yang mengalami peningkatan pertumbuhan paling tinggi di Kecamatan Medang Kampai yaitu sebesar 1,55% per tahun dan yang terendah di Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Dumai Kota dengan pertumbuhan sebesar 0,58% per tahun.

2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih-Air Minum

Proyeksi kebutuhan air bersih dan air minum merupakan hal yang krusial dalam perencanaan pembangunan Kota Dumai. Kebutuhan air bersih mencakup pasokan air untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Faktor pertimbangan dalam proyeksi kebutuhan air bersih dan air minum di kota Dumai diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Pertumbuhan Penduduk:** Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang memengaruhi kebutuhan air. Semakin banyak penduduk, semakin besar kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2) **Perkembangan Ekonomi:** Pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada pola konsumsi air. Masyarakat yang mengalami pertumbuhan ekonomi mungkin

- memiliki akses lebih besar ke fasilitas-fasilitas konsumsi air, seperti rumah tangga dengan pipa air bersih.
- 3) Perubahan Gaya Hidup: Perubahan dalam gaya hidup, seperti peningkatan kesadaran akan kebersihan dan kesehatan, dapat meningkatkan konsumsi air. Kesadaran akan pentingnya minum air bersih untuk kesehatan.
 - 4) Urbanisasi: Peningkatan urbanisasi memerlukan infrastruktur air bersih yang lebih baik. Wilayah perkotaan yang berkembang membutuhkan sistem distribusi air yang efisien.
 - 5) Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat memengaruhi ketersediaan air di suatu wilayah. Iklim yang lebih panas dan kurangnya presipitasi dapat meningkatkan kebutuhan air pemenuhan kebutuhan harian.
 - 6) Kebijakan Pengelolaan Air: Kebijakan pemerintah terkait pengelolaan air, melalui program konservasi air, dapat mempengaruhi konsumsi air di Kota Dumai.
 - 7) Peningkatan Kesadaran Lingkungan: Kesadaran lingkungan dapat mendorong penggunaan air secara lebih efisien dan pengembangan teknologi yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan.
 - 8) Teknologi dan Infrastruktur: Kemajuan dalam teknologi air dan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan air dan distribusi air bersih.

Pemenuhan kebutuhan air besrsih dan air minum dapat dilakukan melalui Pembangunan air minum perpipaan. Pemenuhan kebutuhan air minum perpipaan melibatkan sejumlah aspek, termasuk perencanaan yang baik, manajemen sumber daya air, konstruksi infrastruktur perpipaan yang efisien, serta pemeliharaan dan operasional yang berkelanjutan. Kebutuhan merencanakan dan memproyeksikan kebutuhan air bersih dan air minum di masa depan. Proyeksi pemenuhan kebutuahn air minum dengan memastikan ketersediaan dan aksesibilitas air bersih bagi penduduk Kota Dumai.Saat ini pemenuhan air minum perpipaan baru mencapai 4,78% atau 3.783 rumah tangga yang terlayani. Pemenuhan kebutuhan air minum perpipaan sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk sekitar 0,87% per tahun. Berikut gambaran proyeksi kebutuhan air minum perpipaan Kota Dumai dari tahun 2025-2045.

Tabel 2.132
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Dumai Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun					Pertumbuhan Per Tahun (%)
		2025	2030	2035	2040	2045	
Jumlah Penduduk	338.064	344.847	362.743	377.171	394.763	410.163	0,87
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Kubik/Or g/Th)	14.807.203	15.104.299	15.888.143	16.520.076	17.290.632	17.965.124	0,87
Jumlah RT	79.151	86.212	90.686	94.293	98.691	102.541	0,87
Proyeksi Sambungan Rumah	13.000	22.000	46.000	71.000	96.000	121.000	8,90
Ketersediaan Air Minum	3.783	4.121	4.335	4.507	4.717	4.901	0,87

Catatan; Kebutuhan air minum/air bersih perpipaan sekitar 0,12 kubik per individu perhari atau 43,8 kubik per individu pertahun

Proyeksi kebutuhan air minum per kecamatan di Kota Dumai terus mengalami peningkatan dari tahun 2025-2045 seiring dengan meningkatnya proyeksi jumlah penduduk. Distribusi kecamatan yang membutuhkan air minum tertinggi ada di Kecamatan Dumai Timur yaitu 3.247.717 jt kubik/orang/tahun 2025 dan meningkat menjadi 3.832.082 jt kubik/orang/tahun 2045. Sedangkan kecamatan dengan proyeksi kebutuhan air minum terendah ada di kecamatan Medang Kampai, dimana pada tahun 2025 proyeksi sebanyak 919.641 kubik/orang/tahu dan hanya meningkat menjadi 1.250.417 jt kubik/orang/tahun 2045. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.133

Proyeksi Kebutuhan Air Minum Per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2025-2045

Penduduk	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Kubik/Orang/Tahun)					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2025	2030	2035	2040	2045	
Bukit Kapur	2.614.373	2.736.256	2.849.384	3.000.821	3.092.203	0,84
Medang Kampai	919.641	986.647	1.066.935	1.168.172	1.250.417	1,55
Sungai Sembilan	2.128.798	2.268.978	2.407.519	2.578.319	2.732.835	1,26
Dumai Barat	2.062.956	2.168.514	2.246.135	2.338.397	2.418.955	0,80
Dumai Selatan	2.390.103	2.490.360	2.545.177	2.611.895	2.683.343	0,58
Dumai Timur	3.247.717	3.419.968	3.544.998	3.695.347	3.832.082	0,83
Dumai Kota	1.740.710	1.817.420	1.859.928	1.897.681	1.955.289	0,58
Kebutuhan Air Minum	15.104.299	15.888.143	16.520.076	17.290.632	17.965.124	0,87

Proyeksi kebutuhan air minum mengalami peningkatan pertumbuhan paling tinggi di Kecamatan Medang Kampai yaitu sebesar 1,55% per tahun dan yang terendah di Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Dumai Kota dengan pertumbuhan sebesar 0,58% per tahun.

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik

Kebutuhan energi listrik rumah tangga dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti ukuran rumah, peralatan yang digunakan, dan tingkat kesadaran energi dari penghuni. Beberapa komponen utama kebutuhan energi listrik rumah tangga meliputi: Penerangan, lampu penerangan di dalam rumah. lampu luar dan lampu taman; Pemanas dan Pendingin Ruangan sistem pemanas, seperti pemanas udara atau pemanas air, Sistem pendingin udara atau kipas angin; Peralatan Elektronik: Televisi, komputer, dan perangkat elektronik hiburan lainnya. Peralatan dapur seperti kulkas, oven, microwave, dan mesin cuci. Peralatan kantor dan pengisian daya untuk perangkat seluler dan laptop; Sistem Keamanan dan Pemantauan, Sistem keamanan rumah dan pemantauan CCTV, Sensor gerak atau sistem pencahayaan otomatis; Kelistrikan untuk Perangkat Portabel: Pengisian daya perangkat seluler, tablet, dan perangkat portabel lainnya, Pengisian daya untuk alat-alat bertenaga baterai, seperti penghisap debu atau bor Listrik; Peralatan Kelistrikan Tambahan spserti Alat-alat kecil seperti hair dryer, setrika, dan peralatan kecantikan. Alat-alat elektronik rumah tangga tambahan, seperti blender atau pemotong rumput Listrik; Pencahayaan Eksterior: Lampu taman atau lampu jalur luar rumah.

Pemenuhan kebutuhan energi listrik untuk penggunaan diatas memerlukan proyeksi untu memastikan pengelolaan sumber daya energi untuk pasokan listrik yang memadai dan berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri di Kota Dumai. Proyeksi pemenuhan kebutuhan energi Listrik di Kota Dumai dari tahun 2025-2045, dlakukan berdasarkan proyeksi pertumbuhan kebutuhan energi listrik di masa mendatang berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan penambahan jumlah penduduk di Kota Dumai. Selengkapnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.134
Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik Kota Dumai Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Energi Listrik (Kwh)					Pertumbuhan Per Tahun (%)
			2025	2030	2035	2040	2045	
1	Jumlah Penduduk	338.064	344.847	362.743	377.171	394.763	410.163	0,87
2	Proyeksi Kebutuhan Listrik	304.257.600	413.816.400	558.724.500	829.775.515	1.184.289.855	1.435.569.289	6,42
3	Jumlah Rumah Tangga	79.151	86.212	90.686	94.293	98.691	102.541	0,87
4	Kebutuhan Kwh	2.721,47	3.005,79	3.853,43	4.940,10	6.333,21	8.119,18	14,77

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan bertujuan untuk mencapai sejumlah maksud penting yang bersifat lingkungan, ekonomi, dan sosial. Tujuan utama dari pengelolaan persampahan:

- 1) Pencegahan Pencemaran Lingkungan: Mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan tidak terkendali sampah ke lingkungan. Mencegah pencemaran air, udara, dan tanah oleh zat-zat berbahaya dan limbah yang dihasilkan dari sampah.
- 2) Konservasi Sumber Daya: Meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbatas dengan mendaur ulang dan memanfaatkan kembali bahan dari sampah. Mengurangi tekanan pada sumber daya alam dengan mengurangi kebutuhan untuk produksi bahan baru.
- 3) Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca: Mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembuangan sampah organik dan proses pembuangan sampah yang tidak tepat. Memfasilitasi pembuatan energi dari sampah (pembangkitan listrik dari sampah) untuk menggantikan sumber energi yang lebih berpolusi.
- 4) Kesehatan Masyarakat: Mencegah penyebaran penyakit terkait sampah melalui pengelolaan yang benar dan sanitasi yang baik. Mengurangi risiko kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh limbah medis dan bahan berbahaya lainnya.
- 5) Peningkatan Manajemen Sampah: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen sampah dengan sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan yang baik. Menekan pertumbuhan volume sampah dan meminimalkan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA).
- 6) Pengurangan Pemborosan dan Peningkatan Efisiensi: Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah. Mengurangi pemborosan dan meningkatkan ekonomi sirkular.

- 7) Pemberdayaan Masyarakat: Mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam program pengelolaan sampah, termasuk pemilahan sampah di sumber. Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap dampak sampah terhadap lingkungan.
- 8) Pengembangan Ekonomi Lokal: Menciptakan lapangan kerja melalui industri daur ulang dan pengelolaan sampah. Menghasilkan pendapatan melalui penjualan bahan daur ulang dan energi yang dihasilkan dari sampah.
- 9) Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama yang terkait dengan lingkungan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya proyeksi jumlah sampah yang dihasilkan setiap penduduk dan Upaya yang harus dilakukan dalam rangka melakukan pengelolaan sampah tersebut. Proyeksi timbunan sampah tumbuh sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk selama tahun 2025-2045. Jumlah sampah yang akan dihasilkan dari rumah tangga pada tahun 2025 sebanyak 314.673 kubik dan diperkirakan meningkat menjadi 374.273 kubik pada tahun 2045. Berikut Tabel proyeksi jumlah timbunan sampah dari tahun 2025-2045.

Tabel 2.135
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Dumai Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan (Kubik)					Pertumbuhan Per Tahun (%)
			2025	2030	2035	2040	2045	
1	Jumlah Penduduk	338.064	344.847	362.743	377.171	394.763	410.163	0,87
2	Jumlah Rumah Tangga	79.151	86.212	90.686	94.293	98.691	102.541	0,87
3	Proyeksi Timbunan Sampah (Liter/hari)	308.483.400	314.672.888	331.002.988	344.168.253	360.221.498	374.273.422	0,87
4	Proyeksi Timbunan Sampah (Kubik/Tahun)	308.483	314.673	331.003	344.168	360.221	374.273	0,87

Berdasarkan proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan per kecamatan di Kota Dumai paling tinggi ada di Kecamatan Dumai Timur yaitu akan menghasilkan sampah sebesar 67.661 kubik sampah pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 79.835 kubik sampah tahun 2045. Sedangkan kecamatan dengan proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan terendah ada di kecamatan Medang Kampai, dimana pada tahun 2025 proyeksi sebanyak 19.159 kubik sampah dan meningkat menjadi 26.050 kubik sampah di tahun 2045. Dengan pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Medang Kampai sebesar 1,55% per tahun dan pertumbuhan terendah di Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Dumai Kota sebesar 0,58%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.136
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2025-2045

Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan (Kubik)					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2025	2030	2035	2040	2045	
Bukit Kapur	54.466	57.005	59.362	62.517	64.421	0,84
Medang Kampai	19.159	20.555	22.228	24.337	26.050	1,55
Sungai Sembilan	44.350	47.270	50.157	53.715	56.934	1,26
Dumai Barat	42.978	45.177	46.794	48.717	50.395	0,80
Dumai Selatan	49.794	51.883	53.025	54.414	55.903	0,58
Dumai Timur	67.661	71.249	73.854	76.986	79.835	0,83

Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Sarana Persampahan (Kubik)					Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2025	2030	2035	2040	2045	
Dumai Kota	36.265	37.863	38.749	39.535	40.735	0,58
Jumlah Penduduk	314.673	331.003	344.168	360.221	374.273	0,87

Pengelolaan persampahan dapat berkontribusi secara signifikan pada pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, serta membantu menciptakan sistem yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Pengelolaan persampahan merupakan suatu sistem yang kompleks yang mencakup sejumlah aspek untuk memastikan penanganan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

- 1) **Pemilahan Sampah:** Edukasi masyarakat tentang pemilahan sampah di sumber (rumah tangga, sekolah, tempat kerja) untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan material recyclable. Penyediaan infrastruktur dan fasilitas pengumpulan yang mendukung pemilahan sampah.
- 2) **Pengumpulan dan Transportasi:** Penyelenggaraan sistem pengumpulan sampah yang efisien dan terjadwal. Penggunaan kendaraan pengangkut yang sesuai dan ramah lingkungan. Pelayanan pengumpulan yang mencakup seluruh wilayah dan masyarakat.
- 3) **Pengolahan dan Pemanfaatan:** Pendirian fasilitas pengolahan sampah yang sesuai dengan karakteristik sampah setempat, seperti pengomposan untuk sampah organik atau pabrik daur ulang untuk sampah kertas, plastik, dan logam. Promosi penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk pengolahan sampah, seperti metode daur ulang yang lebih efisien atau teknologi konversi energi dari sampah.
- 4) **Pembuangan Akhir:** Penyelenggaraan tempat pembuangan akhir (TPA) yang sesuai dan aman, mengikuti standar keamanan dan regulasi lingkungan. Upaya untuk mengurangi penggunaan TPA dan memprioritaskan metode pengolahan lainnya.
- 5) **Edukasi dan Kampanye:** Program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Kampanye lingkungan yang mendorong perilaku berkelanjutan dan pengurangan sampah.
- 6) **Peraturan dan Kebijakan:** Implementasi peraturan dan kebijakan yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan terkait pengelolaan sampah.
- 7) **Partisipasi Masyarakat:** Involusi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, termasuk dalam kegiatan pemilahan sampah dan kegiatan lingkungan lainnya. Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah mereka sendiri dan berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah lokal.
- 8) **Inovasi Teknologi:** Pemanfaatan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah, seperti sensor pintar untuk pemantauan level sampah atau penggunaan aplikasi mobile untuk informasi dan edukasi.
- 9) **Pengukuran Kinerja:** Implementasi sistem pemantauan dan pengukuran kinerja untuk mengevaluasi efektivitas program pengelolaan sampah.

Pengelolaan persampahan yang efektif melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi lingkungan untuk mencapai tujuan

berkelanjutan dalam mengelola sampah. Keberhasilan sistem pengelolaan sampah seringkali melibatkan kombinasi pendekatan yang holistik dan terkoordinasi.

2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan melibatkan perkiraan jumlah dan jenis fasilitas kesehatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan memiliki tujuan untuk merencanakan, mengelola, dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di masa depan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan:

- 1) Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan: Menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan yang cukup dan terjangkau untuk memastikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- 2) Pemenuhan Pertumbuhan Populasi: Mencocokkan pertumbuhan populasi dengan kapasitas pelayanan kesehatan yang memadai, termasuk jumlah rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.
- 3) Peningkatan Kualitas Layanan: Menjamin fasilitas kesehatan memenuhi standar kualitas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 4) Penyediaan Fasilitas Khusus: Menyediakan fasilitas khusus untuk berbagai spesialisasi medis dan perawatan, sesuai dengan perkembangan teknologi medis dan kebutuhan kesehatan masyarakat.
- 5) Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan Masyarakat: Mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat, termasuk perawatan kesehatan primer, kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan mental.
- 6) Ketersediaan Fasilitas Pendarahan Darurat: Menyediakan fasilitas darurat yang memadai untuk menanggapi keadaan darurat medis, seperti bencana alam atau kejadian luar biasa lainnya.
- 7) Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional fasilitas kesehatan untuk mengatasi peningkatan permintaan pelayanan.
- 8) Perencanaan Berbasis Teknologi: Mengintegrasikan teknologi kesehatan yang canggih untuk meningkatkan diagnosis, perawatan, dan manajemen data pasien.
- 9) Kesesuaian dengan Standar Keamanan dan Lingkungan: Memastikan bahwa fasilitas kesehatan mematuhi standar keamanan dan lingkungan untuk melindungi pasien, staf medis, dan masyarakat sekitar.
- 10) Perencanaan Keberlanjutan: Menciptakan rencana jangka panjang untuk pemeliharaan dan pengembangan fasilitas kesehatan, termasuk pembaruan teknologi dan infrastruktur.

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan medis mereka.

Proyeksi ini penting untuk perencanaan sistem kesehatan yang efektif dan berkelanjutan. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan:

- 1) Analisis Kesehatan Masyarakat: Tinjau kondisi kesehatan masyarakat, termasuk penyakit umum, prevalensi penyakit menular dan tidak menular, serta karakteristik demografis dan epidemiologi. Evaluasi faktor-faktor risiko dan tren kesehatan masyarakat.
- 2) Perhitungan Kebutuhan Kapasitas: Tentukan jumlah penduduk yang memerlukan layanan kesehatan, dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan populasi dan perubahan demografis. Identifikasi kelompok usia atau kelompok risiko tertentu yang mungkin memerlukan perhatian khusus.
- 3) Penilaian Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Saat Ini: Evaluasi fasilitas kesehatan yang sudah ada, termasuk rumah sakit, puskesmas, klinik, dan pusat layanan kesehatan lainnya. Tinjau kapasitas dan pelayanan yang disediakan oleh fasilitas kesehatan saat ini.
- 4) Identifikasi Kesenjangan Pelayanan: Analisis apakah fasilitas kesehatan yang sudah ada sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Identifikasi area atau kelompok populasi yang mungkin mengalami kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan.
- 5) Proyeksi Tren Penyakit dan Kesehatan: Pertimbangkan proyeksi tren penyakit dan kondisi kesehatan untuk memperkirakan jenis layanan yang mungkin dibutuhkan di masa mendatang. Faktor-faktor seperti penuaan populasi dan perubahan gaya hidup dapat mempengaruhi kebutuhan kesehatan.
- 6) Perencanaan Fasilitas Kesehatan yang Sesuai: Tentukan jenis fasilitas kesehatan yang diperlukan, termasuk rumah sakit, klinik, puskesmas, dan pusat spesialisasi.
- 7) Sesuaikan desain dan kapasitas fasilitas dengan kebutuhan dan karakteristik populasi yang dilayani.
- 8) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Proyeksikan kebutuhan sumber daya manusia, seperti tenaga medis, perawat, dan staf dukungan lainnya, sesuai dengan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan.
- 9) Pertimbangkan Teknologi Kesehatan: Pertimbangkan penggunaan teknologi kesehatan yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Tinjau kemungkinan integrasi teknologi telemedicine atau sistem informasi kesehatan.
- 10) Pengembangan Sistem Rujukan dan Koordinasi: Rencanakan sistem rujukan dan koordinasi layanan antara fasilitas kesehatan untuk memastikan alur pasien yang baik dan efisien. Identifikasi fasilitas kesehatan yang berperan sebagai pusat rujukan atau pusat pelayanan tertentu.
- 11) Konsultasi dengan Pihak Terkait: Melibatkan pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan masyarakat dalam proses perencanaan dan

proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan perlu dilakukan secara periodik dan diperbarui berdasarkan data dan informasi terkini untuk memastikan respons yang tepat terhadap perubahan dalam kebutuhan kesehatan masyarakat.

Proyeksi kebutuhan fasilitas Kesehatan di Kota Dumai tahun 2025-2045 menunjukkan perlu adanya peningkatan sesuai dengan standart WHO, misalnya rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk tahun 2025 sebanyak 345 unit tempat tidur dan kemudian diproyeksi kebutuhan tersebut akan meningkat menjadi 410 unit tempat tidur tahun 2045. Demikian halnya dengan fasilitas rasio Puskesmas dan rasio dokter terhadap 1.000 penduduk. Lengkapnya lihat Tabel berikut.

Tabel 2.137
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kota Dumai Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan					Pertumbuhan / Tahun (%)
			2025	2030	2035	2040	2045	
1	Jumlah Penduduk	338.064	344.847	362.743	377.171	394.763	410.163	0,87
2	Rasio Tempat Tidur Penduduk (WHO) 1:1.000	338,06	344,85	362,74	377,17	394,76	410,16	0,87
3	Rasio Puskesmas	338,06	344,85	362,74	377,17	394,76	410,16	0,87
4	Dokter	338,06	344,85	362,74	377,17	394,76	410,16	0,87

Jika dilihat proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan per kecamatan di Kota Dumai paling tinggi ada di Kecamatan Dumai Timur yaitu sebanyak 74 fasilitas pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 87 fasilitas pada tahun 2045. Sedangkan kecamatan dengan proyeksi kebutuhan fasilitas terendah ada di kecamatan Medang Kampai, dimana pada tahun 2025 proyeksi sebanyak 21 fasilitas kesehatan dan meningkat menjadi 29 fasilitas di tahun 2045. Dengan pertumbuhan tertinggi di Kecamatan Medang Kampai sebesar 1,63% per tahun dan pertumbuhan terendah di Kecamatan Dumai Selatan sebesar 0,52%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.138
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2025-2045

Kecamatan	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan					Pertumbuhan/Tahun (%)
	2025	2030	2035	2040	2045	
Bukit Kapur	60	62	65	69	71	0,85
Medang Kampai	21	23	24	27	29	1,63
Sungai Sembilan	49	52	55	59	62	1,18
Dumai Barat	47	50	51	53	55	0,79
Dumai Selatan	55	57	58	60	61	0,52
Dumai Timur	74	78	81	84	87	0,81
Dumai Kota	40	41	42	43	45	0,59
Jumlah Penduduk	345	363	377	395	410	0,87

2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan melibatkan analisis dan perkiraan tentang berbagai aspek yang memengaruhi pemenuhan kebutuhan pendidikan di masa depan. Tujuan dari proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan adalah untuk merencanakan, mengelola, dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan

pendidikan masyarakat dan siswa di masa depan. Beberapa tujuan utama dari proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan melibatkan:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Siswa: Memastikan bahwa jumlah dan jenis fasilitas pendidikan mencukupi untuk menampung pertumbuhan populasi siswa yang diantisipasi.
- 2) Penyediaan Fasilitas yang Berkualitas: Memastikan bahwa fasilitas pendidikan yang disediakan memenuhi standar kualitas yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran efektif dan pengembangan siswa.
- 3) Peningkatan Kualitas Pengajaran: Meningkatkan kualitas pengajaran dengan menyediakan fasilitas yang mendukung metode pengajaran modern dan teknologi pendidikan terkini.
- 4) Fleksibilitas Ruang: Merancang fasilitas yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk perubahan dalam kurikulum, metode pengajaran, dan teknologi.
- 5) Ketersediaan Fasilitas Khusus: Menyediakan fasilitas khusus untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, seni, dan kebutuhan khusus lainnya, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang holistik.
- 6) Pemeliharaan Keberlanjutan: Menyusun rencana pemeliharaan dan pengembangan fasilitas untuk memastikan keberlanjutan dan keandalan infrastruktur pendidikan.
- 7) Keterjangkauan dan Aksesibilitas: Menjamin bahwa fasilitas pendidikan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, memperhatikan faktor keterjangkauan dan aksesibilitas.
- 8) Peningkatan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya, agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengalami kelebihan kapasitas atau pemborosan.
- 9) Kesesuaian dengan Perkembangan Teknologi: Merencanakan fasilitas yang mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dan beradaptasi dengan perubahan zaman.
- 10) Pemenuhan Standar Keamanan dan Lingkungan: Memastikan bahwa fasilitas memenuhi standar keamanan dan lingkungan yang ditetapkan untuk melindungi kesejahteraan siswa dan staf pendidikan.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan dapat memberikan dasar yang kuat untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pendidikan yang efektif dan responsif terhadap tuntutan masa depan. Dengan melakukan proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan secara komprehensif, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa fasilitas mereka dapat memenuhi tuntutan pendidikan di masa depan.

Proyeksi kebutuhan ruang kelas (RK) untuk jenjang Pendidikan SD/MI Kota Dumai tahun 2025 sebanyak 1.679 RK dan tahun 2045 diperkirakan mengalami

penurunan menjadi 1.595 RK. Penurunan kebutuhan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah penduduk usia sekolah dasar. Demikian halnya untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs Kota Dumai tahun 2025 sebanyak 725 RK dan tahun 2045 diperkirakan mengalami penurunan menjadi 688 RK. Penurunan kebutuhan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Berkurangkan jumlah kebutuhan RK SMP/MTs dibandingkan dengan SD/MI disebabkan oleh rasio jumlah siswa perkelas untuk SD/MI sebanyak 28 siswa per kelas sementara untuk jenjang Pendidikan SMP/MTs sebanyak 32 siswa perkelas. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses Pendidikan Dasar dan Menengah di Indonesia. Proyeksi kebutuhan RK SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.139
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Dumai Tahun 2025-2045

No	Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan					Pertumbuhan Per Tahun (%)
			2025	2030	2035	2040	2045	
1	Jumlah Penduduk	338.064	344.847	362.743	377.171	394.763	410.163	0,87
2	Kebutuhan Ruang Kelas SD/MI (per 1600 penduduk)	111	216	227	236	247	257	0,87
3	Kebutuhan Ruang Kelas SMP/MTs (per 4800 penduduk)	40	72	76	79	83	86	0,89

Tabel 2.140
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Per Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2025-2045

No	Kecamatan	Uraian	Tahun					Pertumbuhan Per Tahun (%)
			2025	2030	2035	2040	2045	
1	Bukit Kapur	Jumlah Penduduk	59.689	62.472	65.054	68.512	70.598	0,84
		Kebutuhan Ruang Kelas SD/MI	38	40	41	43	45	0,85
		Kebutuhan Ruang Kelas SMP/MTs	13	14	14	15	15	0,72
2	Medang Kampai	Jumlah Penduduk	20.996	22.526	24.359	26.671	28.548	1,55
		Kebutuhan Ruang Kelas SD/MI	14	15	16	17	18	1,26
		Kebutuhan Ruang Kelas SMP/MTs	5	5	6	6	6	0,92
3	Sungai Sembilan	Jumlah Penduduk	48.603	51.803	54.966	58.866	62.393	1,26
		Kebutuhan Ruang Kelas SD/MI	31	33	35	37	39	1,15
		Kebutuhan Ruang Kelas SMP/MTs	11	11	12	13	13	0,84
4	Dumai Barat	Jumlah Penduduk	47.099	49.509	51.282	53.388	55.227	0,80
		Kebutuhan Ruang Kelas SD/MI	30	31	33	34	35	0,77
		Kebutuhan Ruang Kelas SMP/MTs	10	11	11	12	12	0,92
5	Dumai Selatan	Jumlah Penduduk	54.569	56.858	58.109	59.632	61.264	0,58
		Kebutuhan Ruang Kelas SD/MI	35	36	37	38	39	0,54

No	Kecamatan	Uraian	Tahun					Pertumbuhan Per Tahun (%)
			2025	2030	2035	2040	2045	
		Kebutuhan Ruang Kelas SMP/MTs	12	12	13	13	13	0,40
6	Dumai Timur	Jumlah Penduduk	74.149	78.081	80.936	84.369	87.490	0,83
		Kebutuhan Ruang Kelas SD/MI	47	49	51	53	55	0,79
		Kebutuhan Ruang Kelas SMP/MTs	16	17	17	18	19	0,86
7	Dumai Kota	Jumlah Penduduk	39.742	41.494	42.464	43.326	44.641	0,58
		Kebutuhan Ruang Kelas SD/MI	25	26	27	28	28	0,57
		Kebutuhan Ruang Kelas SMP/MTs	9	9	9	10	10	0,53

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan karakteristik yang berbeda-beda yang dimiliki oleh setiap daerah termasuk Kota Dumai, maka segala potensi ekonomi harus dioptimalkan untuk mewujudkan cita-cita jangka Panjang daerah sebagai perwujudan dari visi Pembangunan pada tahun 2045. Oleh seba itu, Salah satu potensi daerah dimaksud yang dapat dijadikan stimulan untuk mewujudkan cita-cita adalah pengembangan pusat-pisat pertumbuhan wilayah.

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah merujuk pada daerah atau lokasi tertentu di suatu wilayah yang menjadi fokus utama untuk dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Pemilihan pusat-pusat pertumbuhan ini dapat didasarkan pada beberapa kriteria, termasuk potensi ekonomi, aksesibilitas, infrastruktur, sumber daya alam, dan kebijakan Pembangunan serta mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis daerah.

2.7.1 Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah

1. Pendidikan dan Keterampilan

Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan, pengembangan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Selain itu bidang Pendidikan yang perlu dikembangkan sebagai pendukung pengembangan ekonomi adalah Inovasi dan Teknologi: Mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru. Pusat-pusat pertumbuhan bisa menjadi pusat riset dan pengembangan. Peruntukan wilayah untuk pengembangan Pendidikan di Kota Dumai seluas 17,06 ha yang tersebar di Dumai Barat, Dumai Selatan dan Dumai Timur

2. Kesejahteraan Masyarakat

Pusat-pusat pertumbuhan harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat, Pemberdayaan komunitas

lokal melalui berbagai program Pembangunan termasuk bidang Kesehatan. Peruntukan lahan untuk pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bidang Kesehatan seluas 12,81 ha yang tersebar di kecamatan Dumai Selatan dan Dumai Timur. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah tersebut sangat memerlukan faktor pendukung pengembangan tersebut antara lain:

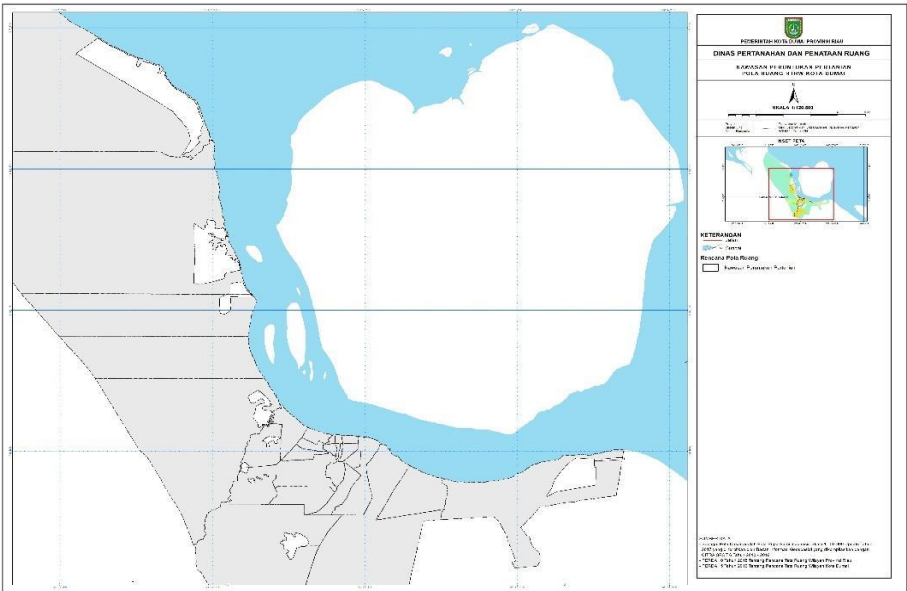
- 1) Kebijakan Pemerintah: Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seringkali didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung investasi dan pembangunan di wilayah tersebut. Insentif pajak atau kebijakan penarikan investasi dapat diterapkan.
- 2) Kolaborasi dan Kemitraan: Pusat-pusat pertumbuhan sering melibatkan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Membangun kemitraan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Pengembangan Infrastruktur: Pusat-pusat pertumbuhan seringkali mendapatkan investasi signifikan dalam pengembangan infrastruktur, seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan fasilitas transportasi lainnya.
- 4) Konservasi Lingkungan: Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Pemilihan dan pengelolaan pusat-pusat pertumbuhan memerlukan perencanaan dan implementasi kebijakan yang cermat agar mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan bagi wilayah tersebut.

3. Pengembangan Ekonomi

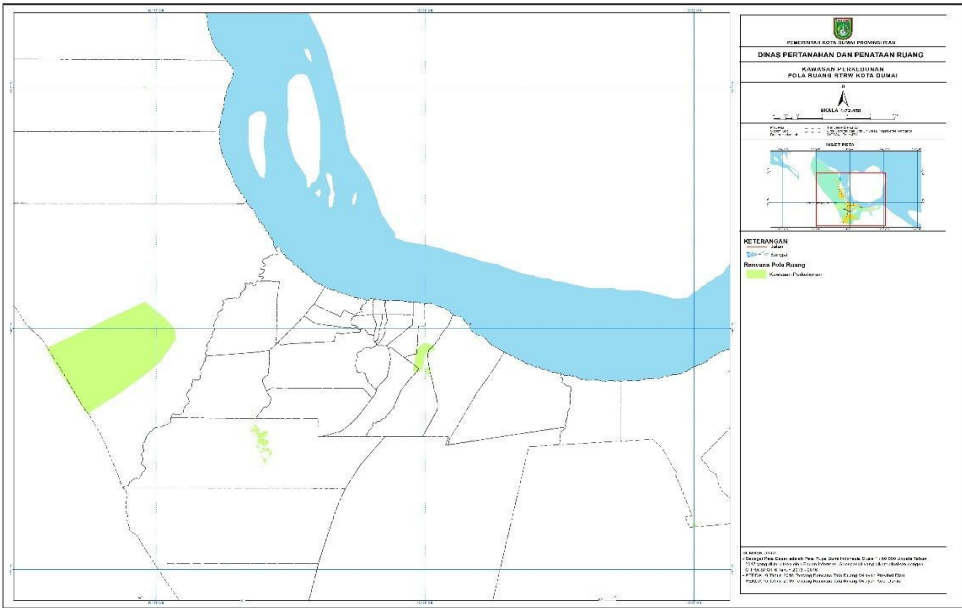
Fokus pada diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Mendorong investasi swasta dan pembukaan lapangan pekerjaan. Pusat pusat pertumbuhan wilayah yang diperuntukan lahan di bidang ekonomi di Kota Dumai terdiri dari peruntukan, Kawasan Perikanan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Pertanian Hortikultura, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perdagangan dan Jasa Jumlah Peruntukan luas lahan untuk pengembangan ekonomi yaitu seluas 23.807,25 hektar. Peruntukan luas lahan untuk pengembangan pusat pusat pertumbuhan bidang ekonomi antara lain:

- a) Kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan peruntukan luas lahan secara keseluruhan 10.523,75 hektar yang tersebar Kecamatan Bukit Kapur seluas 10,57 ha, Dumai Barat seluas 843,45 ha, Dumai Kota, Dumai Selatan 154,84 ha, Dumai Timur seluas 4.012,81 ha, Medang Kampai seluas 4.788,38 ha dan Sungai Sembilan seluas 13.997,26 ha. Sebagian peruntukan lahan tersebut sudah dimanfaatkan dan sebagian menjadi potensi pusat-pusat potensi pengembangan wilayah dari aspek potensi pengembangan ekonomi. Berikut adalah peta Kawasan pertanian di Kota Dumai.



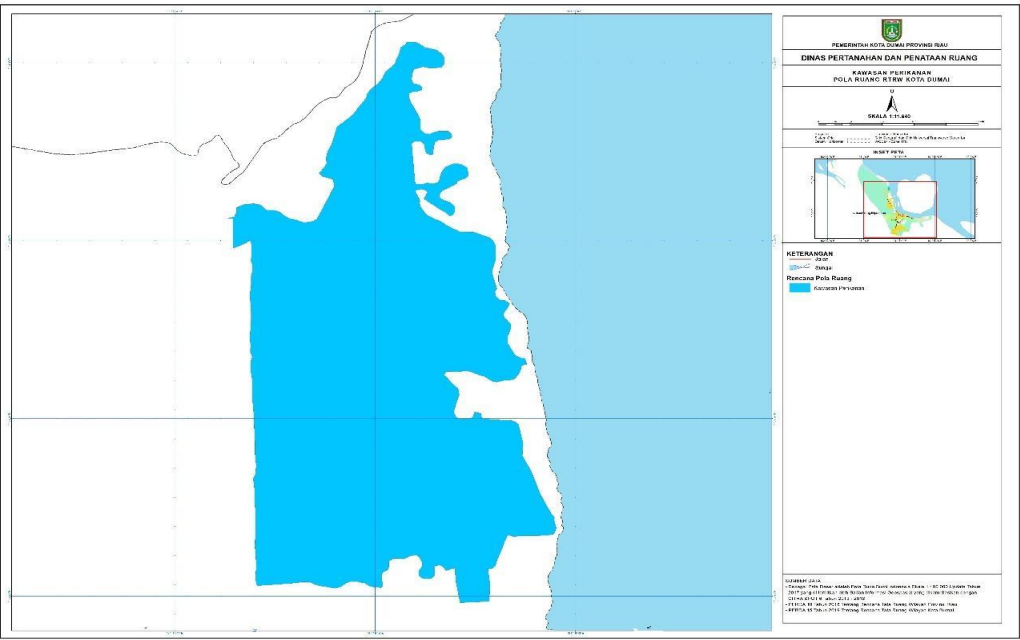
Gambar 2.32 Kawasan Pertanian Kota Dumai
Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, 2024

- b) Kawasan perkebunan dengan peruntukan lahan seluas 3.567,47 hektar yang tersebar di Kecamatan Bukit Kapur, Dumai Selatan, Dumai Timur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan. Berikut adalah peta Kawasan Perkebunan yang ada di Kota Dumai.



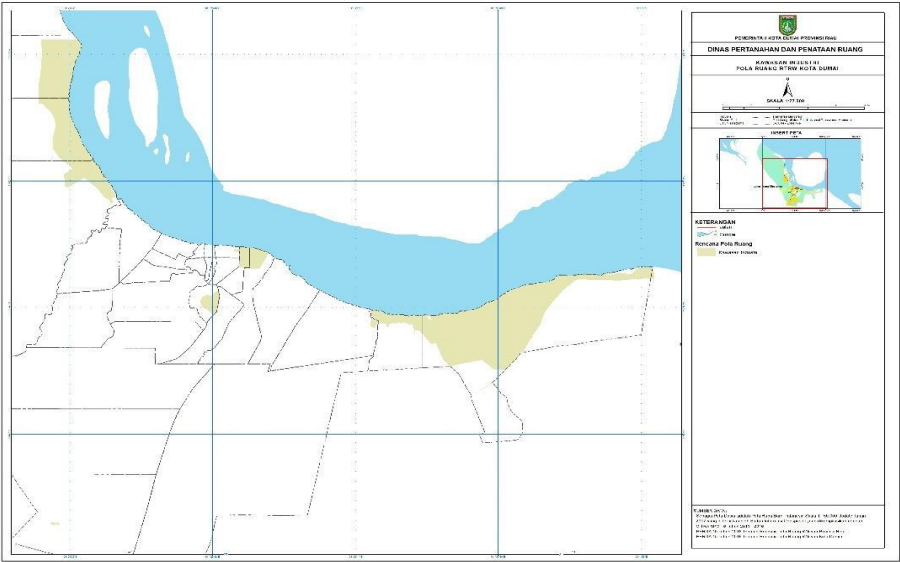
Gambar 2.33 Kawasan Perkebunan Kota Dumai
Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, 2024

- c) Kawasan perikanan dengan peruntukan luas lahan 1.051,06 hektar yang terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan terutama untuk peruntukan pengembangan perikanan udang vaname dan komoditas lainnya. Berikut adlah peta Kawasan perikanan yang ada di Kota Dumai.



Gambar 2.34 Kawasan Perikanan Kota Dumai
Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, 2024

- d) Kawasan Industri dengan peruntukan lahan seluas 7.602,63 hektar yang tersebar di wilayah Kecamatan Bukit Kapur seluas 10,51 hektar, Kecamatan Dumai Selatan seluas 54,84 hektar, Kecamatan Dumai Timur seluas 290,34 hektar, Kecamatan Medang Kampai seluas 4.569,49 hektar dan Kecamatan Sungai Sembilan seluas 2.577,45 hektar. Berikut adalah peta Kawasan industry yang ada di Kota Dumai.



Gambar 2.35 Kawasan Industri Kota Dumai
Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, 2024

Kawasan Industri Selinsing direncanakan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Riau bagian utara yang berbasis industri dan jasa. Kawasan ini strategis terutama untuk pengembangan kawasan industri hulu agro. Kawasan Industri Selinsing ditetapkan sebagai kawasan strategis karena memiliki kriteria:

- Wilayah dengan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan, dan memiliki potensi ekspor

Pengembangan industri hulu agro yang merupakan sektor prospektif hingga dua puluh tahun mendatang diharapkan dapat mendorong utara. Selain itu, bertumbuhnya kegiatan perdagangan dan jasa di Kawasan ini juga diharapkan dapat menjadi outlet Provinsi Riau bagian utara.

- Terdapat pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi.

Berkaitan dengan hal ini, Kota Dumai ditetapkan dalam RIPIN 2015-2035 sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI). Dalam RPIP Riau 2018-2038, pusat pertumbuhan industri di Kota Dumai berada pada Kawasan Industri Pelintung, Kawasan Industri Lubuk Gaung, dan Kawasan Industri Pelindo.

- Terdapat pusat pengembangan produk unggulan (khususnya pada kawasan industri Dumai).
- Wilayah didukung sarana dan prasarana pendorong kegiatan ekonomi. Wilayah ini dilalui Jalan Lintas Sumatera, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, serta Pelabuhan Dumai.

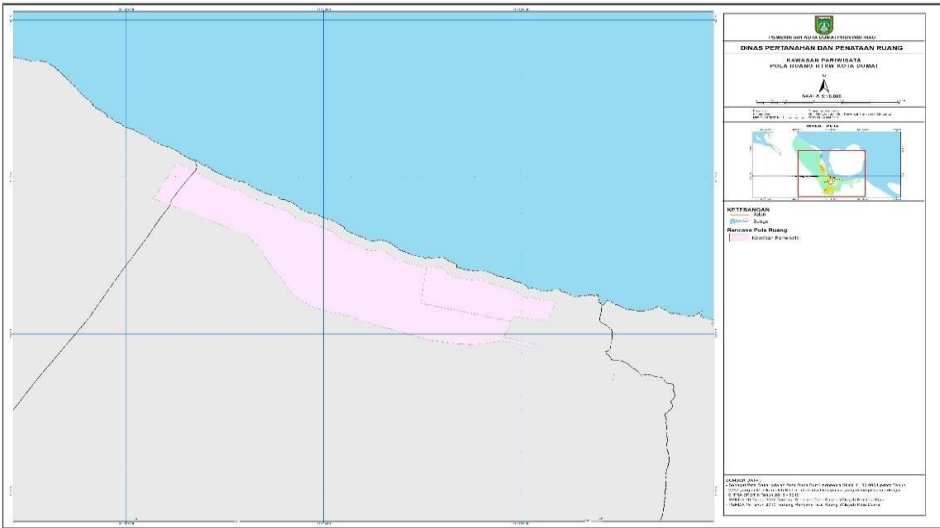
Secara rinci, arah kebijakan untuk Kawasan Industri Selinsing dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.141
Arahan Kebijakan Kawasan Industri Selinsing

Nilai strategis kawasan	Kawasan Industri Selinsing memiliki nilai strategis berupa: • Wilayah dengan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan (industri hulu sawit, pertanian, pertambangan, dan perdagangan), dan potensi ekspor. • Terdapat pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi (termasuk WPPI (RIPIN, 2015)). • Terdapat pusat pengembangan produk unggulan (Kawasan Industri Dumai) • Wilayah didukung sarana dan prasarana pendorong kegiatan ekonomi (jalan lintas sumatera, tol Pekanbaru-Dumai, pelabuhan)
Delineasi	Delineasi Kawasan Industri Selinsing terdiri dari kawasan di sepanjang kawasan industri Kota Dumai, yang secara rinci delineasi kawasan ini meliputi Kota Dumai.
Tujuan pengembangan	Tujuan penetapan Kawasan Duri-Dumai sebagai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Riau bagian utara yang berbasis industri dan jasa.
Arahan pengembangan	Arahan pengembangan Kawasan Duri-Dumai antara lain: • Pengembangan industri hijau pada skala kecil-besar • Pengembangan pusat kegiatan perdagangan dan jasa • Pengembangan dan pemberdayaan industri local

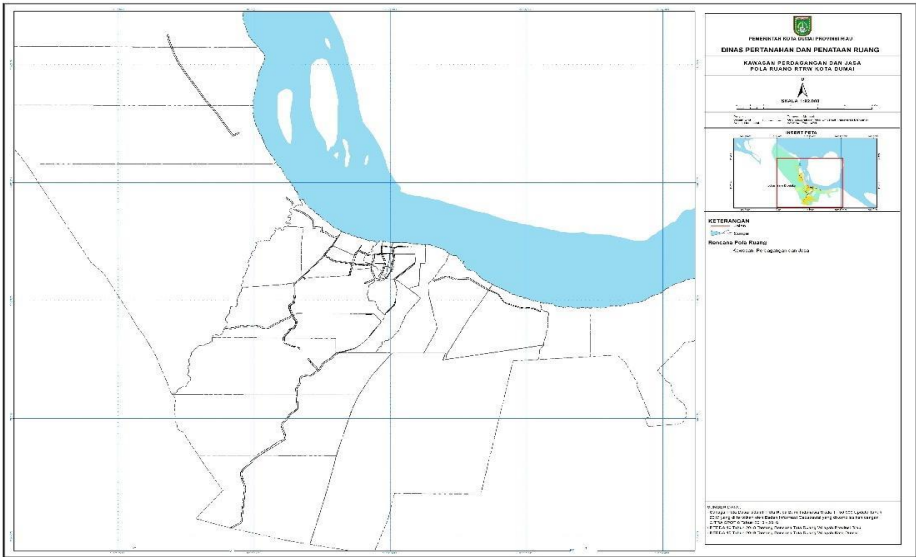
	• Peningkatan kapasitas kewirausahaan dan inovasi pada pelaku usaha lokal

- e) Kawasan Pariwisata dengan peruntukan lahan seluas 218,89 hektar yang terdapat di Kecamatan Medang Kampai. Berikut adalah peta Kawasan Pariwisata Kota Dumai.



Gambar 2.36 Kawasan Pariwisata Kota Dumai
 Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, 2024

- f) Kawasan perdagangan dan jasa dengan peruntukan luas lahan 843,45 hektar yang terdapat di Kecamatan Bukit Kapur, Dumai Barat, Dumai Kota, Dumai Selatan, Dumai Timur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan. Berikut adalah peta Kawasan perdagangan dan jasa di Kota Dumai.

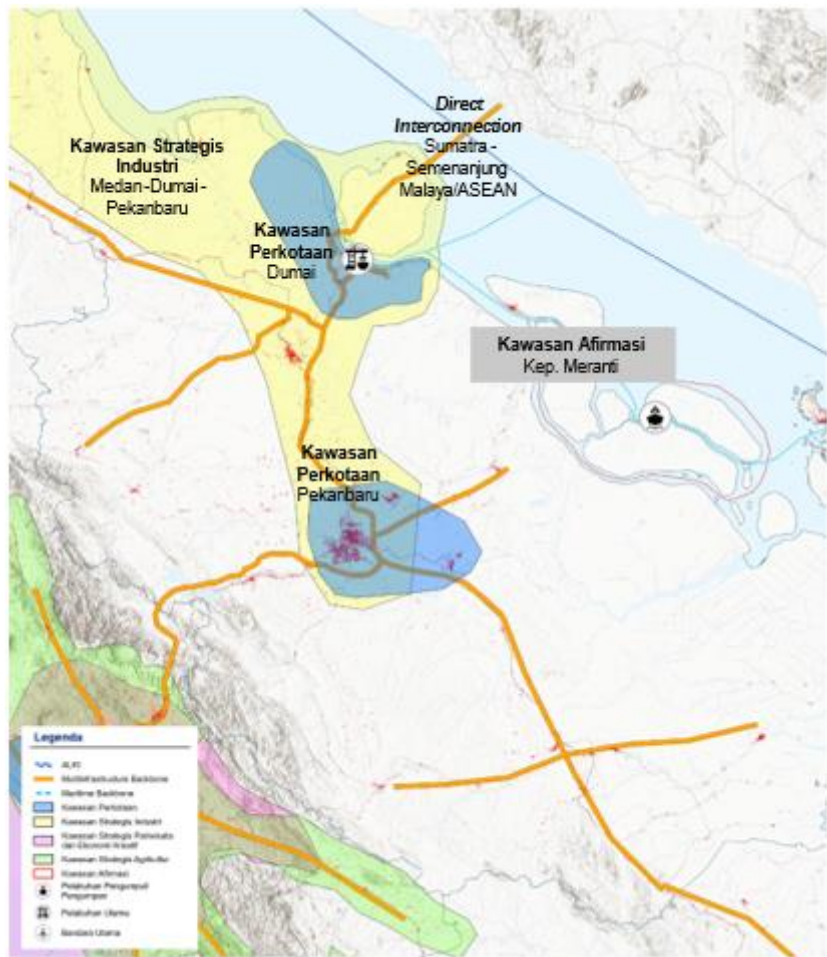


Gambar 2.37 Kawasan perdagangan dan jasa
 Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, 2024

2.7.2 Arah Kebijakan Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Kota Dumai, sebagai salah satu kota penting di Provinsi Riau, Indonesia, memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam sektor industri dan pelabuhan. Beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mempengaruhi

perkembangan daerah ini mencakup pengembangan industri antara lain kluster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, industri mesin, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi dan berbagai infrastruktur yaitu Pembangunan jaringan jalan, jaringan perkeretapian, Pelabuhan, transfortasi udara, dan transfortasi perkotaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 2.38 Proyek Strates Nasional yang Mempengaruhi Perkembangan Kota Dumai

Dalam rangka mendukung Kebijakan kunci (*key policies*) pengembangan kewilayahan Riau dalam jangka panjang di dalam RPJPN yang memuat peran Kota Dumai dalam Pengembangan Koridor strategis industri Dumai-Duri-Pekanbaru untuk kluster industri hilirisasi *bioproduct*, industri hilirisasi sumberdaya mineral, industry mesin, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi. Selain itu, Dumai juga termasuk ke dalam kebijakan Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai kutub pertumbuhan (*growth pole*) dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah bersama-sama dengan Kota Pekanbaru dan Rengat. Hal ini sejalan dengan RTRW Provinsi Riau dimana Kota Dumai sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya alam minyak/gas bumi dan kawasan industri terpadu meliputi Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis. Di dalam RTRW juga dinyatakan bahwa Kota Dumai sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) bersama-sama dengan Kota Pekanbaru.

Di dalam RPJPN direncanakan koridor multi-infrastruktur (*multi infrastructure corridor*) dan infrastruktur logistik kunci (*Key Logistics Infrastructure*) yang melibatkan

Dumai, seperti: Jalan Tol Kisaran-Dumai; Jalan arteri lingkar barat Kota Dumai; dan *Direct Interconnection* Dumai-Rupat- Malaka. Hal ini sejalan dengan ruas jalan tol yang direncanakan di dalam RTRW Provinsi Riau meliputi ruas jalan tol: Pekanbaru - Kandis - Dumai; Dumai - Sp.Sigambal - Rantau Prapat. Skema konektivitas jalan tol dan koneksi Dumai- Rupat - Malaka ini harus direncanakan dengan baik supayapembangunan jaringan jalan baru dan peningkatan/pengembangan jaringan lama yang akan terhubung ke jalan tol bisa efisien dan tepat sasaran khususnya untuk peningkatan layanan transportasi dan logistik.

Penyediaan infrastruktur relatif baik, namun penyediaan air bersih, dan jalan lintas provinsi yang ada di wilayah administratif Dumai ke arah Senaboi (Rohil) masih belum tuntas. Meskipun produksi sawitnya tidak begitu banyak jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Riau, Dumai adalah tempat bermuaranya banyak TBS (tandan buah segar sawit) dan CPO dari berbagai wilayah di Riau maupun dari Sumatera Utara.

Dumai merupakan ujung yang menyempit (*bottle neck*) dari semua produk CPO dari PKS di Riau, perbatasan Jambi, Sumbar dan Sumut. Juga muara dari TBS sawit, karena keberadaan PKS besar yang ada di Dumai. Sementara itu, jalan lingkar Kota Dumai yang menuju kawasan industri yaitu Lingkar timur menuju Pelintung dan Lingkar Barat (Parit Kitang) menuju Lubuk Gaung masih belum tersedia. Upaya untuk melancarkan aliran di *bottle neck* ini akan meningkatkan kinerja dan efisiensi kawasan industri dan Pelabuhan Dumai. Konektivitas jalan Provinsi di Dumai juga masih menyisakan ruas jalan Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi sepanjang 51 km yang masih berupa jalan tanah.

Di dalam RPJPN, jaringan perkeretaapian yang melingkupi Dumai adalah Jaringan kereta api Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru, sesuai dengan jaringan kereta api yang direncanakan di dalam RTRW Provinsi Riau yang meliputi jalur Rantau Prapat – Duri – Dumai. Di samping mengangkut penumpang dan barang, kereta api ini juga diharapkan bisa mengangkut hasil bumi seperti kelapa sawit dan lainnya.

Di dalam RPJPN Rencana Transportasi Udara di Dumai meliputi Peningkatan Bandara Pinang Kampai (Dumai) dan Pengembangan bandara regional Pekanbaru-Duri Dumai. Hal ini sejalan dengan rencana di dalam RTRW Provinsi Riau dimana bandar udara Pinang Kampai di Kota Dumai dijadikan bandar udara pengumpan (setingkat di bawah bandara udara pengumpul SSK II). Di dalam RPJPN direncanakan pengembangan kepelabuhanan yang meliputi Peningkatan Pelabuhan Dumai. Hal ini sejalan dengan rencana sistem jaringan transportasi laut di dalam RTRW Provinsi Riau dimana Pelabuhan Dumai sebagai Pelabuhan Utama dengan hirarki paling tinggi di Riau. Untuk mengantisipasi perkembangan angkutan laut yang semakin besar volumenya di Selat Malaka dan menarik sebanyak mungkin kapal untuk bersandar di pelabuhan, maka perlu direncanakan untuk mencari pelabuhan alternatif lain di sisi timur Dumai (wilayah Kabupaten Bengkalis), untuk dijadikan Pelabuhan dengan akses yang lebih baik dari Selat Malaka sesuai kemudahan alur pelayaran yang langsung.

Perkembangan Dumai sebagai kawasan perkotaan harus didukung oleh transportasi publik perkotaan yang handal (RPJPN) melalui optimalisasi, integrasi, dan peningkatan layanan sistem transportasi publik di Kawasan Perkotaan Dumai. Skema *Bus Rapid Transit (BRT)* yang menghubungkan barat timur dan utara selatan perlu dipersiapkan.

Kemudian dalam peningkatan Kesejahteraan di bidang kesehatan, pendidikan, IPM, dan Pembangunan gender, Kota Dumai masih relatif tinggi dari kabupaten yang ada Provinsi Riau, meskipun masih di bawah Pekanbaru. Demikian pula halnya dengan penyediaan infrastruktur relatif baik. Penyediaan air bersih di Kota Dumai, termasuk dalam skema SPAM Durolis yang meliputi wilayah Dumai, Rokan Hilir dan Bengkalis.



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025-2045

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah dalam RPJPD Kota Dumai tahun 2025-2045 merupakan pernyataan yang menggambarkan kesenjangan kondisi saat ini/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Sedangkan isu strategis dalam RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 adalah kondisi atau hal yang terakhir harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan dimasa datang.

Permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen RPJPD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 20 tahun mendatang. Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu isu strategis.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual yang dihadapi dalam pembangunan.

Dalam menghadapi tantangan Pembangunan jangka Panjang daerah, kualitas SDM adalah salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan daya saing dalam berkompetisi pada era keterbukaan hingga 20 tahun mendatang. Kualitas SDM ditentukan dari tingkat pendidikan, tingkat produktivitas, dan tingkat kreativitas dalam penguasaan IPTEK serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah.

Kemudian aspek lain yang menentukan kondisi jangka Panjang daerah adalah jumlah penduduk usia produktif Kota Dumai berjumlah dua kali lipat sejak tahun 2018 yang mengakibatkan Kota Dumai berada pada kondisi bonus demografi. Hal ini berpotensi pada meningkatnya permasalahan sosial dan ekonomi Masyarakat seperti peningkatan pengangguran, kemiskinan, jaminan pelayanan Kesehatan, ketersediaan fasilitas Pendidikan serta pemukiman kumuh.

Faktor lain yang mempengaruhi arah dan kebijakan Pembangunan jangka Panjang daerah adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain. Alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain merupakan masalah yang signifikan dan mempengaruhi ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Kota Dumai. Alih fungsi lahan ini dapat menyebabkan

berbagai dampak negatif, termasuk penurunan produksi pangan, kerusakan lingkungan, serta ketidakstabilan ekonomi lokal dan kondisi ini secara detail dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penurunan Produksi Pangan: Alih fungsi lahan pertanian pangan dapat mengurangi luas lahan yang digunakan untuk produksi pangan, yang dapat berdampak pada penurunan produksi dan ketersediaan pangan lokal;
- b) Degradasi Lingkungan dan Ekosistem: Konversi lahan pertanian pangan dapat menyebabkan degradasi tanah, hilangnya biodiversitas, serta kerusakan ekosistem yang berdampak negatif pada keberlanjutan lingkungan;
- c) Ketidakseimbangan Sosial Ekonomi: Alih fungsi lahan dapat mempengaruhi mata pencaharian petani, meningkatkan kemiskinan, serta menciptakan ketidaksetaraan sosial ekonomi di kalangan masyarakat;
- d) Pengaruh Terhadap Iklim dan Perubahan Iklim: Pengurangan lahan pertanian pangan dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, penyerapan karbon, serta kontribusi terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- e) Ketergantungan pada Sumber Daya Eksternal: Penurunan produksi pangan lokal dapat meningkatkan ketergantungan pada impor pangan, menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pasokan pangan.

Disamping hal tersebut, Kondisi perekonomian secara makro kota Dumai pada beberapa sektor-sektor yang memiliki kontribusi dominan pada cenderung mengalami penurunan, antara lain :

- 1. Cenderung turunnya pertumbuhan dan kontribusi konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto selama 5 tahun terakhir.
- 2. Cenderung turunnya pertumbuhan sektor industri pengolahan pada PDRB atas dasar harga konstan.
- 3. Sektor-sektor yang merupakan turunan sektor industri pengolahan seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, informasi komunikasi jasa keuangan dan asuransi tidak memiliki keunggulan kompetitif meskipun terspesialisasi di Kota Dumai.

Kondisi beberapa sektor ekonomi makro mengakibatkan pada rendahnya daya saing daerah sebagai tujuan investasi dan hal ini akan berdampak pada:

- a) Pertumbuhan Ekonomi Lambat: Rendahnya investasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi;
- b) Ketergantungan pada Sektor Tertentu: Daerah yang kurang kompetitif menjadi tergantung pada sektor ekonomi tertentu sehingga meningkatkan risiko ekonomi yang tidak seimbang;
- c) Ketidakmampuan untuk Menarik Modal Asing: Kurangnya investasi dapat mengurangi kemampuan daerah untuk menarik modal asing, yang dapat membantu mempercepat pembangunan ekonomi;

- d) Kurangnya Inovasi dan Pertumbuhan: Tanpa investasi yang cukup, daerah mungkin kesulitan untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan sektor-sektor baru;
- e) Kurangnya Penciptaan Lapangan Kerja: Investasi yang rendah dapat mempengaruhi penciptaan lapangan kerja baru dan meningkatkan tingkat pengangguran.
- f) Masih rendahnya efisiensi didalam sistem produksi pada aktivitas ekonomi.

Selanjutnya, sebagai daerah yang memiliki penduduk yang heterogen, kerentanan terhadap letupan konflik horisontal antar etnis yang beragam. Konflik horisontal antar etnis dapat mengakibatkan ketegangan sosial, kekerasan, pemisahan komunitas, serta merusak keharmonisan dan stabilitas sosial dalam masyarakat dan hal ini berdampak pada:

- a) Ketegangan Sosial: Konflik antar etnis dapat meningkatkan ketegangan sosial dan memperdalam perpecahan antar komunitas;
- b) Kerusakan Hubungan Antar Etnis: Konflik dapat merusak hubungan antar etnis, mengurangi kepercayaan dan solidaritas antar kelompok;
- c) Kekerasan dan Kerugian Jiwa: Konflik dapat mengakibatkan kekerasan fisik, kerusakan properti, serta korban jiwa dan cedera di kalangan masyarakat;
- d) Pemisahan dan Segregasi Komunitas: Konflik dapat memicu pemisahan dan segregasi antar komunitas, mengurangi integrasi dan keragaman sosial;
- e) Ketidakstabilan Politik dan Ekonomi: Konflik etnis dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, beberapa masalah yang berkenaan kinerja pemerintah daerah serta peran pemerintah daerah sebagai fasilitator pembanguan daerah menjadi beberapa poin yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Masih terbatasnya akses bagi masyarakat untuk mendapat dukungan dalam mendapat hak pelayanan publik dalam melakukan aktivitas sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini merupakan masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan dan inklusivitas sosial ekonomi dan hal ini akan berdampak pada:

- a) Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi: Terbatasnya akses dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok masyarakat;
- b) Kurangnya Peluang Ekonomi: Terbatasnya akses ke sumber daya dan kemudahan entitas bisnis dalam memulai usaha dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c) Keterbatasan Mobilitas: Masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan fasilitas publik lainnya;

- d) Peningkatan Risiko Kemiskinan: Akses yang terbatas dapat memperburuk kondisi ekonomi dan meningkatkan risiko kemiskinan di kalangan masyarakat;
- e) Pertumbuhan Populasi yang Tidak Seimbang: Keterbatasan akses dapat menyebabkan pertumbuhan populasi yang tidak seimbang dan mempengaruhi struktur demografis daerah

Hal lain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah kepatuhan dalam melaksanakan amanah dari peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan terjadinya Pelanggaran terhadap implementasi peraturan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut dapat mencakup korupsi, nepotisme, kolusi, serta pelanggaran lainnya yang mengancam integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan masyarakat dan hal ini berdampak pada:

- a) Ketidakstabilan Hukum: Pelanggaran dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi;
- b) Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Pelanggaran dapat memicu korupsi, nepotisme, dan kolusi yang merugikan keuangan negara serta merusak integritas pemerintahan;
- c) Ketidakadilan dan Diskriminasi: Pelanggaran dapat mengakibatkan ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan masyarakat;
- d) Ketidakpercayaan Masyarakat: Pelanggaran dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik, mempengaruhi kredibilitas dan legitimasi pemerintah;
- e) Kerugian Ekonomi: Pelanggaran dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat pemborosan, penyelewengan, serta pengurangan sumber daya yang seharusnya untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Sementara itu, Berkenaan implementasi peraturan Daerah nomor 15 tahun 2019 tentang Rencanan tata ruang wilayah kota Dumai Tahun 2019-2039 adalah permasalahan kawasan konsesi di Kota yang tidak di pelihara oleh pemilik konsesi. Kawasan konsesi di Kota Dumai yang tidak dipelihara oleh pemilik konsesi merupakan masalah serius yang dapat mengakibatkan degradasi lingkungan, kerusakan ekosistem, serta konflik sosial dan ekonomi. Hal ini dapat merugikan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta potensi ekonomi dan investasi di wilayah tersebut dan kondisi ini secara detail dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kerugian Ekonomi dan Investasi: Kerusakan kawasan konsesi dapat menghambat potensi investasi, perdagangan, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Dumai;
- b) Konflik Sosial dan Ekonomi: Ketidakjelasan status dan pengelolaan kawasan konsesi dapat memicu konflik antara pemilik konsesi, masyarakat lokal, dan pihak berkepentingan lainnya;

- c) Degradasi Lingkungan dan Ekosistem: Tidak adanya pemeliharaan kawasan konsesi dapat mengakibatkan degradasi hutan, erosi tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati dan habitat alami;
- d) Pengaruh Terhadap Iklim dan Perubahan Iklim: Degradasi hutan dan ekosistem di kawasan konsesi dapat berkontribusi pada perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana alam;
- e) Pengaruh Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat: Kerusakan lingkungan dan hilangnya sumber daya alam dapat mempengaruhi kualitas hidup, kesejahteraan, serta keberlanjutan mata pencaharian masyarakat lokal.

Disamping hal itu, jika dilihat dari RTRW Kota Dumai, lebih 70% luas Kota Dumai ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh Kementerian LHK. Penetapan ini memiliki dampak dan implikasi yang signifikan terhadap pengelolaan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kota Dumai dan hal ini berdampak pada:

- a) Pembatasan Aktivitas Manusia: Kawasan hutan yang ditetapkan membatasi aktivitas manusia, termasuk pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pemukiman, yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi lokal;
- b) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Penetapan kawasan hutan memungkinkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mendukung keanekaragaman hayati dan ekosistem yang seimbang;
- c) Konservasi Biodiversitas: Kawasan hutan berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik yang perlu dilindungi dan dikonservasi;
- d) Pengendalian Perubahan Iklim: Hutan memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca;
- e) Peningkatan Kualitas Hidup: Kehadiran kawasan hutan dapat meningkatkan kualitas udara, air, serta ekosistem yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Kemudian Dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan daerah, aspek penting yang mempengaruhi pencapaian tujuan Pembangunan adalah kualitas infrastruktur. Rendahnya kualitas infrastruktur pendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, dan hal ini akan berdampak pada:

- a) Keterbatasan Akses: Masyarakat mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi;
- b) Kurangnya Daya Saing: Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan industri dan bisnis, sehingga mengurangi daya saing suatu daerah di pasar global;

- c) Peningkatan Biaya Operasional: Bisnis dan industri mungkin menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi karena keterlambatan dan ketidakandalan infrastruktur;
- d) Ketidakstabilan Ekonomi: Infrastruktur yang tidak handal dapat menyebabkan gangguan dalam pasokan barang dan jasa, yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi;
- e) Dampak Lingkungan: Infrastruktur yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem.

Selain kualitas infrastruktur, belum terpadunya infrastruktur pada pusat-pusat aktivitas sosial dan ekonomi juga memberi andil pada proses pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketidakterpaduan ini akan berdampak pada:

- a) Kurangnya Akses ke Layanan Dasar: Masyarakat mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lainnya;
- b) Kemacetan Lalu Lintas: Kepadatan lalu lintas dan kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai dapat menyebabkan kemacetan yang mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas bisnis;
- c) Keterbatasan Kapasitas: Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan industri karena keterbatasan dalam kapasitas produksi, distribusi, dan logistik;
- d) Peningkatan Biaya Hidup: Biaya hidup mungkin meningkat akibat ketergantungan pada transportasi yang mahal dan kurangnya akses ke sumber daya yang terjangkau;
- e) Dampak Lingkungan: Kurangnya infrastruktur yang ramah lingkungan dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem.

Hal lain yang mempengaruhi pembangunan kota Dumai adalah pengelolaan persampahan. Masih lemahnya pengelolaan sampah terintegrasi di Kota Dumai dari hulu ke hilir berdampak pada:

- a) Pertumbuhan jumlah Sampah: Meningkatnya konsumsi dan pertumbuhan populasi, volume sampah yang dihasilkan juga meningkat, memperburuk masalah pengelolaan sampah;
- b) Pencemaran Lingkungan: Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air, yang berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem;
- c) Ancaman Kesehatan Masyarakat: Limbah beracun dan bahan kimia dalam sampah dapat mengancam kesehatan masyarakat, menyebabkan penyakit, dan menurunkan kualitas hidup;
- d) Dampak Sosial: Sampah yang berserakan dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan tidak nyaman, serta mengurangi kualitas hidup masyarakat;

- e) Kerugian Ekonomi: Lemahnya pengelolaan sampah dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat biaya pengobatan kesehatan, kerugian produktivitas, serta dampak negatif pada sektor pariwisata dan industri lainnya.

Aspek kebencanaan merupakan hal yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan jangka panjang daerah. Belum adanya sistem peringatan dini multiancaman bencana terpadu melalui penerapan teknologi yang andal dan terintegrasi. Sistem peringatan dini yang efektif dan terintegrasi sangat penting untuk memitigasi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan serta respons terhadap ancaman bencana dan hal ini berdampak pada:

- a) Kerugian Jiwa dan Cedera: Keterlambatan dalam peringatan dapat meningkatkan risiko korban jiwa dan cedera akibat bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan badai;
- b) Kerusakan Properti dan Infrastruktur: Tanpa peringatan dini yang tepat, kerusakan pada properti dan infrastruktur dapat meningkat, mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar;
- c) Dampak Psikologis dan Sosial: Ketidakpastian dan kecemasan yang disebabkan oleh ketidaktersediaan peringatan dini dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan sosial masyarakat;
- d) Keterlambatan dalam Respons dan Pemulihan: Tanpa informasi yang cepat dan akurat, proses respons dan pemulihan pasca-bencana dapat menjadi lebih lambat dan tidak efisien;
- e) Gangguan Aktivitas Ekonomi: Bencana yang tidak terduga dapat mengganggu aktivitas ekonomi, mengakibatkan penurunan produksi, hilangnya mata pencaharian, dan kerugian bisnis.

Masih lemahnya antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim, menjadi permasalahan pembangunan jangka panjang daerah karena akan berdampak pada:

- a) Kerusakan Lingkungan: Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan hutan, erosi tanah, dan degradasi ekosistem, yang berdampak negatif pada keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem;
- b) Kerugian Ekonomi: Bencana alam dan perubahan iklim dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar akibat kerusakan infrastruktur, kehilangan produktivitas pertanian, dan dampak negatif pada sektor-sektor ekonomi lainnya;
- c) Dampak Sosial dan Kemanusiaan: Bencana alam dapat menyebabkan kerugian jiwa, kehilangan tempat tinggal, serta meningkatnya risiko konflik sosial dan migrasi paksa;
- d) Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Berkelanjutan: Lemahnya antisipasi terhadap bencana dan perubahan iklim dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif;

- e) Peningkatan Kemiskinan dan Ketidaksetaraan: Bencana alam dan perubahan iklim dapat memperburuk kondisi ekonomi dan meningkatkan risiko kemiskinan serta ketidaksetaraan sosial ekonomi.

Kemudian permasalahan lainnya adalah masih rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dan hal ini berdampak pada:

- a) Pencemaran Lingkungan: Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan sampah dan emisi polutan dapat menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air;
- b) Ancaman Kesehatan Masyarakat: Pencemaran lingkungan dapat mengancam kesehatan masyarakat, meningkatkan risiko penyakit, dan menurunkan kualitas hidup;
- c) Pengurangan Keanekaragaman Hayati: Kerusakan habitat alami dan perburuan liar yang tidak berkelanjutan dapat mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem;
- d) Ketidakseimbangan Ekosistem: Praktik yang tidak berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi kapasitas alam untuk memenuhi kebutuhan manusia;
- e) Kerugian Ekonomi: Degradasi lingkungan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi akibat kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas pertanian dan perikanan, dan dampak negatif pada sektor pariwisata dan industri lainnya.

Ancaman ledakan pipa sepanjang 60 km membelah wilayah kota dan kemungkinan terjadi ledakan pada unit refinery pengolahan BBM dengan radius 25 km². Ancaman semacam ini dapat menyebabkan kerusakan yang luas, kerugian jiwa, serta dampak lingkungan dan ekonomi yang signifikan .

Ditinjau dari letak geografis, kerentanan Dumai sebagai pintu masuk Indonesia adalah masalah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan keamanan, ketahanan nasional, dan pengelolaan perbatasan. Sebagai salah satu pintu gerbang utama Indonesia, Dumai memiliki peran strategis dalam pengendalian arus barang dan orang yang masuk ke Indonesia. Kerentanan ini dapat berkaitan dengan berbagai isu seperti keamanan, imigrasi ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan, serta ancaman lain yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan keamanan regional dan kondisi ini secara detail dijelaskan sebagai berikut:

- a) Ancaman Keamanan: Kerentanan dapat meningkatkan risiko keamanan, termasuk masuknya kelompok ekstremis, penyelundupan senjata, dan aktivitas ilegal lainnya;
- b) Perdagangan Manusia dan Penyelundupan: Kerentanan dapat memfasilitasi perdagangan manusia, penyelundupan migran, serta perdagangan barang ilegal seperti narkoba dan senjata;
- c) Imigrasi Ilegal dan Overstay: Kerentanan dapat memperbesar masalah imigrasi ilegal dan overstaying yang dapat mengakibatkan ketegangan sosial, ekonomi, dan politik;

- d) Pengaruh Negatif Terhadap Ekonomi dan Investasi: Kerentanan dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat pertumbuhan ekonomi akibat kekhawatiran terhadap ketidakstabilan dan ketidakpastian;
- e) Ketidakseimbangan Sosial dan Budaya: Kerentanan dapat mempengaruhi dinamika sosial dan budaya, termasuk munculnya ketegangan antar kelompok etnis dan agama akibat perbedaan persepsi dan kepentingan.

Selain permasalahan di atas keterbatasan lahan pemukiman masyarakat dapat menjadi permasalahan pembangunan dimasa yang akan datang. Keterbatasan lahan pemukiman masyarakat dapat mempengaruhi kualitas hidup, kesejahteraan, serta pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Kota Dumai. Keterbatasan ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti ketidakstabilan sosial, peningkatan urbanisasi yang tidak terkendali, serta akses terbatas terhadap fasilitas dan layanan dasar dan kondisi ini secara detail dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kualitas Hidup yang Buruk: Keterbatasan lahan dapat mengakibatkan kondisi pemukiman yang tidak layak, termasuk akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi, serta infrastruktur dasar lainnya;
- b) Peningkatan Urbanisasi Tidak Terkendali: Keterbatasan lahan dapat mempercepat urbanisasi tidak terkendali, menyebabkan pembentukan permukiman liar dan kawasan padat penduduk;
- c) Pengaruh Terhadap Kesehatan Masyarakat: Kondisi pemukiman yang sempit dan tidak sehat dapat meningkatkan risiko penyakit, kekurangan gizi, serta masalah kesehatan lainnya di kalangan masyarakat;
- d) Keterbatasan Akses Terhadap Layanan Publik: Keterbatasan lahan dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, transportasi, serta fasilitas umum lainnya;
- e) Ketidakstabilan Sosial dan Konflik: Keterbatasan lahan pemukiman dapat memicu ketegangan sosial, konflik lahan, serta persaingan yang meningkat antar masyarakat.

Kemudian penggunaan air tanah yang tidak terkontrol oleh masyarakat dapat mengakibatkan penurunan ketersediaan air, penurunan kualitas air, serta kerusakan ekosistem akuifer di Kota Dumai. Penggunaan air tanah yang berlebihan dan tidak berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan sumber daya air, ketersediaan air untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian, serta berdampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dan kondisi ini secara detail dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penurunan Ketersediaan Air: Penggunaan air tanah yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah dan ketersediaan air yang dapat diambil;
- b) Kerusakan Ekosistem Akuifer: Eksploitasi berlebihan air tanah dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem akuifer, termasuk degradasi kualitas air dan hilangnya habitat alami;

- c) Intrusi Air Laut: Penurunan muka air tanah dapat menyebabkan intrusi air laut ke dalam akuifer, yang mengancam kualitas air tanah dan ketersediaan air tawar;
- d) Pengaruh Terhadap Kualitas Air: Penggunaan air tanah yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan penurunan kualitas air, termasuk peningkatan konsentrasi bahan kimia berbahaya dan polutan lainnya;
- e) Ketidakstabilan Sosial Ekonomi: Penurunan ketersediaan air tanah dapat mempengaruhi pertanian, industri, serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya air tersebut.

Permasalahan selanjutnya adalah penanganan lahan gambut yang belum tepat sehingga mengakibatkan degradasi ekosistem gambut, emisi gas rumah kaca, serta kerusakan lingkungan dan sosial ekonomi di Kota Dumai. Lahan gambut memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon, regulasi kualitas air, serta keberlanjutan sumber daya air. Oleh karena itu, penanganan yang tepat dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan serta memaksimalkan manfaat dari ekosistem gambut dan kondisi ini secara detail dijelaskan sebagai berikut:

- a) Degradasi Ekosistem Gambut: Penanganan yang tidak tepat dapat mengakibatkan degradasi dan dehidrasi lahan gambut, yang mengurangi kemampuannya untuk menyimpan karbon dan menahan air;
- b) Emisi Gas Rumah Kaca: Degradasi lahan gambut dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO₂) dan metana (CH₄), yang berkontribusi pada perubahan iklim global;
- c) Kerusakan Hidrologi dan Sumber Daya Air: Penurunan kualitas dan kuantitas air, serta perubahan pola aliran air yang disebabkan oleh degradasi lahan gambut, dapat mengancam keberlanjutan sumber daya air di wilayah sekitarnya;
- d) Kehilangan Biodiversitas: Degradasi ekosistem gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati yang unik, termasuk flora dan fauna endemik;
- e) Ketidakstabilan Sosial Ekonomi: Kerusakan lahan gambut dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada ekosistem gambut, seperti pertanian, perikanan, serta konservasi sumber daya alam.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas maka diperoleh rumusan permasalahan jangka panjang Kota Dumai sebagai berikut:

1) Permasalahan terkait Sumber Daya Manusia

Rendahnya daya saing SDM dalam berkompetisi dalam era keterbukaan hingga 20 tahun mendatang. Kualitas SDM adalah salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan daya saing. Kualitas SDM yang rendah karena tingkat pendidikan, tingkat produktivitas, dan tingkat kreativitas dalam penguasaan IPTEK serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah. Kondisi ini

dapat dilihat pada cenderung menurunnya angka melanjutkan sekolah dari tingkat Sekolah Dasar ke Sekolah Menengah Pertama.

2) Permasalahan terkait Demografi

Sejak tahun 2018 penduduk usia produktif Kota Dumai berjumlah dua kali lipat yang mengakibatkan Kota Dumai berada pada kondisi bonus demografi. Hal ini berpotensi pada meningkatnya permasalahan sosial dan ekonomi Masyarakat seperti peningkatan pengangguran, kemiskinan, jaminan pelayanan Kesehatan, ketersediaan fasilitas Pendidikan serta pemukiman kumuh. Hal ini dapat dilihat pada cenderung menurunnya angka ibu per 100.000 kelahiran bayi, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran, serta Angka Kematian Neo-Natal per 1.000 Kelahiran.

3) Permasalahan terkait Kesejahteraan Ekonomi

Terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain. Alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain merupakan masalah yang signifikan dan mempengaruhi ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di Kota Dumai. Alih fungsi lahan ini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk penurunan produksi pangan, kerusakan lingkungan, serta ketidakstabilan ekonomi lokal. Kondisi dapat terlihat pada cenderung meningkatnya Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan selama kurun waktu 2017 - 2023 dengan rata-rata pertumbuhan 3,03%. Selain itu tingkat pengangguran terbuka Kota Dumai relatif masih lebih tinggi dari Provinsi dan Nasional. Alih fungsi lahan ini juga mempengaruhi peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup Kota Dumai yang cenderung lambat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,51%. Kemudian belum optimalnya cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan dan pemberian kesempatan kerja, hal ini terlihat pada cakupan jaminan ketenagakerjaan yang masih rendah.

4) Permasalahan terkait Kemampuan Ekonomi

Peran sektor industri pengolahan pada PDRB Kota Dumai masih dominan namun pertumbuhan kontribusinya cenderung lambat hal ini terlihat dari tren pertumbuhan rata-rata kontribusi sektor tersebut yang hanya 1,16% selama kurun waktu 2010-2023. Selain itu sektor-sektor yang merupakan turunan sektor industri pengolahan seperti konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, informasi komunikasi jasa keuangan dan asuransi relatif tidak memiliki keunggulan kompetitif meskipun terspesialisasi di Kota Dumai. Sedangkan dari sisi pengeluaran pertumbuhan kontribusi PMTB mengalami penurunan sebesar 0,51%. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebagai dampak pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 12.908 jiwa sedangkan pada tahun 2023 hanya 6.031 jiwa.

5) Permasalahan terkait Iklim Investasi

Rendahnya investasi sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta ketergantungan pada satu sektor tertentu menyebabkan struktur ekonomi tidak seimbang. Kondisi ini dapat dilihat pada tren pertumbuhan kontribusi PMTB yang cenderung menurun 0,51% selama kurun waktu 2010-2023, tingkat pengangguran terbuka Kota Dumai yang memiliki tren cukup baik tetapi masih berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional serta Kontribusi Sektor Industri Pengolahan yang dominan. Adapun faktor penting yang mempengaruhi iklim investasi di Kota Dumai adalah faktor keamanan dan stabilitas kawasan mengingat Kota Dumai sebagai daerah perbatasan dan salah satu gerbang aktivitas ekspor impor Indonesia.

6) Permasalahan terkait Tata Kelola Pemerintahan

Belum optimalnya tata kelola untuk mendukung transformasi ekonomi, transformasi sosial dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kota Dumai hal ini dapat dilihat dari IKM Kota Dumai yang masih dibawah rata-rata Provinsi Riau.

7) Permasalahan terkait Kualitas Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur baik dari segi jumlah dan kualitas mempengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, rendahnya daya saing secara ekonomi, dan belum optimalnya pelayanan publik serta berkontribusi terhadap degradasi lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan kondisi jalan mantap di Kota Dumai yang cenderung menurun selama kurun waktu 2017-2019 namun secara perlahan kondisi ini terus membaik sampai pada tahun 2023 namun proporsi kondisi jalan mantap pada tahun 2023 belum sebesar kondisi jalan mantap pada tahun 2017.

8) Permasalahan terkait Spasial dan Kompleksitas Wilayah

Belum optimalnya penanganan isu-isu pemanfaatan ruang serta dampak dari kompleksitas wilayah yang luas menyebabkan timbulnya hambatan-hambatan dalam pelayanan kepada stakeholder seperti penanganan kemiskinan, konflik pemanfaatan ruang, serta ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan yang luas, kerugian jiwa, serta dampak sosial ekonomi yang signifikan.

9) Permasalahan terkait Lingkungan Hidup

Kerentanan Kota Dumai sebagai daerah tujuan industri terhadap potensi degradasi lingkungan hidup dan potensi ancaman bencana kebakaran lahan dan hutan hal ini dapat kita lihat indeks risiko bencana Kota Dumai yang masih dalam kategori kelas risiko sedang.

3.2 Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang dampaknya signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa depan. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap Pembangunan di kota Dumai.

3.2.1 Isu Strategis Global

1. Pertumbuhan ekonomi China melambat ke 5,2 persen (yoy) pada 2023 dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi pra pandemi. Sektor properti China yang lemah mengurangi permintaan impor China.
2. Perang Rusia – Ukraina serta konflik di Timur Tengah masih berlangsung, berpotensi memberikan tekanan pada harga komoditas yang berdampak pada potensi inflasi.
3. Inggris dan Jerman mengalami resesi. Kebijakan moneter Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris untuk mempertahankan suku bunga kebijakan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi meskipun inflasi mengalami perlambatan.
4. Krisis energi tahun 2022 memberikan tekanan untuk penggunaan energi fosil Kembali melalui reaktivasi PLTU batu bara, menjadikan negara-negara semakin jauh dari target Target Nol Emisi Karbon dan sasaran emisi tahun 2030.
5. Telah dilaunchingnya produk pengganti minyak kelapa sawit yaitu C16 Biosciences, Apabila produk pengganti tersebut sudah dapat meningkatkan efisiensi biaya, kepercayaan konsumen, keamanan pangan dan produksi dalam jangka waktu menengah maupun jangka panjang, produk pengganti minyak kelapa sawit menjadi salah satu tantangan besar bagi industri sawit.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

1. Ekonomi Indonesia tahun 2023 tetap solid berada di atas 5 persen.
Ekonomi Indonesia masuk ke jajaran 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dengan kondisi di Tengah ketidakpastian global yang terus terjadi, perekonomian nasional tetap terjaga, salah satunya karena permintaan domestik yang tetap kuat dan juga berlanjutnya pertumbuhan dan peningkatan investasi tumbuh sebesar 4,40 persen yang ditopang oleh Pembangunan infrastruktur dan meningkatnya aktivitas penanaman modal.
2. Sebagian besar subsektor industri pengolahan mampu tumbuh positif.
Subsektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Lima besar kontributor PDB adalah industri makanan dan minuman, industri kimia, farmasi dan obat tradisional, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optic dan peralatan listrik, industri alat angkutan, serta industri tekstil dan pakaian. Hal ini menunjukkan bahwa industri pengolahan punya peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Industri mampu bertahan di zona ekspansi.
Industri Pengolahan masih terus bertahan di Tengah tekanan ketidakpastian ekonomi global. Hal ini tampak pada Indeks Kepercayaan Industri terus mengalami peningkatan hingga Juni 2024. Adapun ekspansi yang tinggi pada industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki didorong oleh peningkatan pesanan baru yang cukup signifikan yaitu 3,21 poin dan penyerapan persediaan yang meningkat.

4. Investasi pemerintah dan swasta meningkat.

Upaya peningkatan pemerintah dan swasta di daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pengembangan potensi investasi daerah (*regional champions*) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi.
 - b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong *investor awareness and willingness*, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.
 - c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah terutama untuk UKM.
 - d. Pengembangan mekanisme konsultasi pemerintah dan pelaku bisnis (terutama UKM).
5. Kinerja Produk Domestik Bruto (PDB) didukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara mencerminkan pulihnya sektor pariwisata, sementara devisa pariwisata yang meningkat menandakan kontribusi ekonomi yang signifikan. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memberikan dampak positif, didukung oleh peningkatan tenaga kerja yang semakin kuat. Kinerja investasi pariwisata dan ekspor ekonomi kreatif menunjukkan kepercayaan dan potensi pertumbuhan yang berkelanjutan,

6. Penyaluran kredit tumbuh positif

Hasil survei menunjukkan responden tetap optimis terhadap pertumbuhan kredit ke depan. Responden memprakirakan *outstanding* kredit sampai dengan akhir tahun 2024 terus tumbuh. Optimisme tersebut antara lain didorong oleh prospek kondisi moneter dan ekonomi serta relative terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara umum isu – isu strategis di Kota Dumai adalah:

1) Isu Terkait Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan kesetaraan gender serta inklusi sosial dalam mewujudkan kompetensi persaingan global dimasa yang akan datang seperti produktivitas yang tinggi, penguasaan teknologi dan kemampuan digital, keahlian dan inovasi serta kemampuan adaptasi dengan perubahan yang cepat dimasa yang akan datang;

2) Isu Keamanan dan Stabilitas Daerah

Jaminan terhadap ketentraman, ketertiban, keamanan dan stabilitas Kota Dumai sebagai daerah kota industri dan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan;

3) Kerawanan Terhadap Bencana dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana alam, non alam dan teknologi serta perubahan lingkungan hidup. Peningkatan Pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan keberlanjutan, konservasi, dan pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam yang ada. Peningkatan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap bencana alam, non-alam, dan teknologi serta perubahan lingkungan hidup adalah hal yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan;

4) Isu Demografi

Pertambahan jumlah populasi kota Dumai, keterbatasan luas lahan yang bisa dimanfaatkan serta pergeseran trend perdagangan dan urbanisasi merupakan fenomena yang harus dipertimbangkan dalam pembangunan jangka Panjang yang berkelanjutan;

5) Isu Pemanfaatan Ruang

Konflik ruang dan penggunaan lahan dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Pencegahan konflik ruang dan penggunaan lahan dalam aktivitas sosial dan ekonomi merupakan hal yang penting untuk menciptakan harmoni, stabilitas, dan keberlanjutan dalam pembangunan masyarakat dan ekonomi. Konflik terkait penggunaan lahan dapat muncul karena adanya persaingan kepentingan antara sektor-sektor berbeda, seperti pertanian, industri, infrastruktur, dan konservasi lingkungan;

6) Isu Kemampuan dan Kesejahteraan Ekonomi

Peningkatan infrastruktur untuk pembangunan ekonomi, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat serta kemudahan akses pelayanan perizinan dan keuangan bagi stakeholder pembangunan dalam menghadapi tantangan persaingan global untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas;

7) Isu Tata Kelola

Optimalisasi implementasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang.



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman

BAB IV

VISI DAN MISI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025-2045

BAB IV

VISI DAN MISI

4.1 Visi Pembangunan

Visi merupakan rumusan umum yang menggambarkan kondisi daerah yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu dalam kerangka pembangunan jangka Panjang, maka visi RPJPD adalah kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang, yakni 20 tahun ke depan, tepatnya pada tahun 2045. Visi haruslah realistis dan didasari atas objektif daerah, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang serta mengelola ketidakpastian untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi harus didasarkan pada realita dan harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Visi Kota Dumai pada Tahun 2045 meliputi berbagai aspek pembangunan yang meliputi aspek pembangunan ekonomi, sosial, kewilayahan dan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan serta keberlanjutan.

4.1.1 Visi Kota Dumai

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD tersebut memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025-2045 dinyatakan sebagai berikut:

“KOTA IDAMAN, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Adapun berkenaan dengan arti dan maksud Visi Kota Dumai dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) **KOTA IDAMAN** merupakan akronim dari **KOTA** Industri, ber**Daya** saing dengan pemerintahan yang **AMAN**ah. Akronim ini menggambarkan harapan Kota Dumai yang memiliki peran *signifikan* dalam pembangunan ekonomi di pantai Timur Sumatera dengan dukungan Pemerintahan daerah yang dikelola dengan prinsip-prinsip *good governance*.
- 2) **MAJU** dalam arti Kota Dumai yang maju bermakna pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan Masyarakat dengan PDRB per kapita penduduk mencapai USD 23.000-30.300 tahun 2045
- 3) **BERKELANJUTAN** dalam arti sebagai kota yang berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan maka arah pembangunan akan menyeimbangkan

pembangunan sosial, ekonomi dan pembangunan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan melalui pembangunan Kota Dumai berkelanjutan yang bertujuan:

- a. Melindungi, memajukan dan mengakui hak-hak masyarakat adat, kebudayaan dan kearifan lokal secara berkelanjutan.
- b. Membangun sumber daya sosial dengan komitmen, kolaborasi, dan partisipasi aktif dari seluruh komunitas dengan memperkuat ikatan sosial, masyarakat dapat lebih baik menghadapi tantangan dan mencapai tujuan Pembangunan berkelanjutan.
- c. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal bagi kepentingan rakyat (masyarakat) dengan prinsip kelestarian melalui kegiatan konservasi, intensifikasi dan hilirisasi serta inovatif secara berkelanjutan

4.1.2 Sasaran Visi

Sasaran visi Kota Dumai menjadi landasan untuk pengembangan dan pembangunan Kota Dumai ke arah Kota Idaman, Maju dan dan berkelanjutan, dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Sasaran Visi Kota Dumai sebagai berikut.

Tabel 4.1
Indikator 5 Sasaran Visi

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	Baseline 2025	Target 2045
1	Peningkatan Pendapatan per kapita	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)	152,29 - 169,20	242,26 – 259,26
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,52	75,13
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	66,11 - 69,11	66,34 - 66,45
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	2,48- 2,7	1,15 - 1,45
		Rasio gini (Indeks)	0,32 - 0,340	0,28 – 0,30
		Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi Riau (%)	4,85	5
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,74 - 6,12	5,95 - 6,89
3	Meningkatnya Peran Kepemimpinan Daerah untuk mencapai Visi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,17	4,3 - 5,00
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0,55	0,70
		Indeks Pembangunan Manusia	75,93 - 76,16	83,60 - 85,85
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	56,95	97,98
		Indeks kualitas lingkungan hidup	68,82	89,01 - 94,00

1) Sasaran Visi: Peningkatan Pendapatan per kapita

- a) PDRB Perkapita yang tinggi senilai Rp. 242,26 – 259,26 juta per kapita yang didukung oleh peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan. Sektor

industri pengolahan dapat berperan penting dalam meningkatkan PDRB per kapita melalui:

1. Nilai Tambah Tinggi: Industri pengolahan yang menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Proses produksi yang melibatkan transformasi bahan mentah menjadi barang jadi atau produk akhir dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
 2. Peningkatan Produktivitas: Industri pengolahan menggunakan teknologi terkini dan proses produksi yang efisien. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghasilkan lebih banyak produk dengan biaya yang lebih rendah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan per kapita.
 3. Penciptaan Lapangan Kerja: Industri pengolahan memberikan peluang lapangan kerja yang banyak dan beragam, mulai dari pekerjaan teknis dan terampil hingga administratif. Industri pengolahan menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.
 4. Efek Dampak Multiplier: Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB melalui nilai tambah yang dihasilkan, dan efek dampak multiplier. Industri pengolahan menjadi pusat rantai pasokan yang kompleks, yang berdampak positif pada sektor-sektor terkait dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
 5. Ekspor dan Peningkatan Devisa: Produk industri pengolahan memiliki potensi pasar luar negeri. Meningkatnya ekspor dapat mendapatkan devisa tambahan yang dapat digunakan untuk investasi dan pengembangan ekonomi lebih lanjut.
 6. Industri pengolahan memerlukan dukungan kebijakan yang tepat, infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang terampil, dan lingkungan bisnis yang kondusif.
- b) Indek Ekonomi Biru dengan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator ekonomi biru dapat berkontribusi pada PDRB per kapita yang tinggi:
1. Pemanfaatan Sumber Daya Laut: Ekonomi biru mencakup berbagai sektor ekonomi seperti perikanan, kelautan, pariwisata, energi terbarukan (seperti energi gelombang dan angin laut), dan transportasi maritim. Memanfaatkan potensi sumber daya laut yang melimpah dapat meningkatkan produksi dan pendapatan per kapita.
 2. Pengembangan Industri Perikanan: Menerapkan praktik perikanan yang berkelanjutan dan mengelola sumber daya laut dengan bijaksana, dapat meningkatkan produksi ikan, menciptakan lapangan kerja di sektor perikanan, dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

3. Pariwisata Bahari: Pariwisata bahari mempromosikan destinasi pariwisata yang menarik, seperti Pantai yang dapat menarik kunjungan wisatawan yang dapat meningkatkan pendapatan dari industri pariwisata.
 4. Energi Terbarukan: Pengembangan energi terbarukan seperti tenaga gelombang, tenaga angin laut, dan energi panas bumi laut, dapat meningkatkan produksi energi dan diversifikasi sumber energi.
 5. Transportasi Maritim: Transportasi maritim dalam perdagangan internasional. Memperkuat infrastruktur pelabuhan dan meningkatkan efisiensi transportasi laut, dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan keterhubungan dengan pasar global.
 6. Pengembangan Teknologi Laut: Investasi dalam riset dan pengembangan teknologi laut dapat menghasilkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya laut, energi terbarukan, pertanian laut, dan lain-lain. Kondisi ini membuka peluang baru pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor terkait.
 7. Memanfaatkan potensi sumber daya laut secara berkelanjutan dan cerdas, dapat meningkatkan PDRB per kapita yang tinggi dan menjaga keseimbangan ekologis dan kesejahteraan sosial masyarakat yang berkelanjutan.
- c) Kontribusi PDB Industri Pengolahan sebesar 66,34 – 66,45% tahun 2045. Target kontribusi PDRB industri pengolahan sebesar 66,34 – 66,45% pada tahun 2045 dengan memperkuat dan menjadikan sektor industri pengolahan sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi 20 kedepan melalui:
1. Peningkatan Investasi dan Inovasi: Peningkatan investasi yang signifikan dalam infrastruktur, teknologi, dan penelitian untuk memperkuat sektor industri pengolahan. Inovasi dalam proses produksi, efisiensi energi, dan pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing sektor ini.
 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri pengolahan, dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan daya saing industri.
 3. Kebijakan Dukungan: Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri pengolahan, seperti insentif pajak, pembiayaan yang terjangkau, dan kebijakan perdagangan yang mendukung ekspor produk industri.
 4. Pengembangan Pasar: Peningkatan kontribusi industri pengolahan dengan pengembangan pasar yang kuat, baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor dengan strategi pemasaran yang efektif dan pemenuhan standar mutu produk yang tinggi.
 5. Konservasi Sumber Daya Alam: Meningkatkan kontribusi industri pengolahan dengan tetap menangani dampak lingkungan. Pengembangan

industri harus dilakukan dengan memperhatikan konservasi sumber daya alam dan mitigasi dampak negatif terhadap lingkungan.

6. Kemitraan Publik-Swasta: Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi untuk memfasilitasi pertumbuhan industri pengolahan. Kemitraan ini dapat meliputi investasi bersama dalam riset dan pengembangan, pengembangan kebijakan, dan program pelatihan tenaga kerja.
7. Komitmen yang kuat dari berbagai pihak dan implementasi kebijakan yang tepat, target kontribusi PDRB industri pengolahan sebesar 66,45% – 70,00% pada tahun 2045 dapat dicapai, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja.

2) Sasaran Visi: Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan

Sasaran visi untuk pengentasan kemiskinan dan ketimpangan menjadi sebesar 1,3 – 1,6 pada tahun 2045 menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah kemiskinan secara signifikan dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi dapat dicapai dengan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai sasaran tersebut yaitu:

1. Pemberdayaan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja yang layak dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat yang kurang mampu.
2. Akses Terhadap Pendidikan Berkualitas: Memastikan semua anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, serta pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja.
3. Perlindungan Sosial: Meningkatkan akses terhadap perlindungan sosial, seperti program bantuan sosial dan jaminan sosial, untuk melindungi kelompok rentan dari kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi.
4. Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, termasuk infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi yang memungkinkan akses yang lebih baik ke pasar dan layanan dasar.
5. Kebijakan Pro-Poor: Mengimplementasikan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program-program pemberian bantuan langsung, kredit mikro, dan pelatihan keterampilan.
6. Penanggulangan Diskriminasi dan Ketimpangan: Mengatasi ketimpangan gender, etnis, dan wilayah yang dapat memperburuk kemiskinan, melalui kebijakan inklusif dan upaya untuk meningkatkan akses dan kesetaraan dalam berbagai bidang.

7. Penguatan Kerjasama Antar-sektor: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mengkoordinasikan upaya-upaya dalam mengurangi kemiskinan.

Sasaran ini dapat dicapai dengan komitmen jangka panjang dan upaya bersama dari berbagai pihak dengan fokus yang tepat, kebijakan yang efektif, dan kerjasama yang erat antar semua pemangku kepentingan, penurunan signifikan dalam tingkat kemiskinan dapat dicapai pada tahun 2045.

Selanjutnya, sasaran visi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan indeks Gini sebesar 0,28 – 0,30 pada tahun 2045 menunjukkan tekad untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Untuk mencapai sasaran tersebut, dengan mengurangi disparitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendapatan, pendidikan, akses kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan:

1. Pemerataan Akses Terhadap Pendidikan: Memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas dari tingkat dasar hingga tingkat lanjutan. Ini termasuk program-program untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah kecamatan serta antara kelompok-kelompok sosial.
2. Pemberdayaan Ekonomi: Mendorong inklusi ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan dukungan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah, khususnya bagi kelompok yang rentan terhadap ketimpangan ekonomi.
3. Kebijakan Pemerintah yang Inklusif: Implementasi kebijakan fiskal dan kebijakan sosial yang berorientasi pada mengurangi ketimpangan, termasuk peningkatan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang kaya, serta alokasi anggaran yang lebih besar untuk layanan sosial dasar.
4. Pengembangan Infrastruktur yang Merata: Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, termasuk transportasi, energi, dan akses internet. Hal ini akan membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar.
5. Kolaborasi Antar-sektor: Membangun kemitraan yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk mengkoordinasikan upaya-upaya dalam mengurangi ketimpangan.

Sasaran ini akan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dan investasi jangka panjang dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif. Dengan pendekatan yang tepat dan kerjasama yang erat, penurunan signifikan dalam tingkat ketimpangan bisa dicapai pada tahun 2045.

Sasaran visi, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dengan indikator peningkatan kontribusi PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Dumai terhadap Provinsi Riau. Peningkatan kontribusi PDRB Kota Dumai bisa menjadi indikator kemajuan ekonomi lokal yang berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan di wilayah tersebut. Kondisi tersebut dicapai melalui:

1. Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan: Identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan di Kota Dumai, seperti industri pengolahan; konstruksi; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib dalam sektor-sektor ini dapat meningkatkan kontribusi PDRB.
2. Pemberdayaan UMKM: Mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang dengan memberikan akses ke pasar yang lebih luas, pelatihan keterampilan, dan akses ke modal usaha. UMKM yang kuat dapat menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi lokal.
3. Pengembangan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan bandara dapat meningkatkan konektivitas dan daya saing Kota Dumai dalam perdagangan dan investasi.
4. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, sehingga mampu bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompleks.
5. Promosi Investasi dan Pariwisata: Mempromosikan Kota Dumai sebagai tujuan investasi dan pariwisata yang menarik, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menarik investasi dan pendapatan dari sektor pariwisata.
6. Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pihak Swasta: Kerjasama yang erat dengan pemerintah provinsi Riau dan pihak swasta untuk menyusun kebijakan dan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Dumai.

Peningkatan kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi Riau dapat menjadi katalisator untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan di wilayah kota Dumai. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi yang tepat dan dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, tujuan ini bisa dicapai dalam jangka waktu yang diinginkan.

Indikator yang sangat penting yang menggambarkan keberhasilan transformasi pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara/Kawasan/daerah secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Adapun pertumbuhan ekonomi Kota Dumai pada Tahun 2045 di proyeksikan sebesar 5,95 - 6,89

3) Sasaran Visi: Meningkatnya Peran Kepemimpinan Daerah untuk mencapai Visi Daerah

Sasaran visi meningkatnya peran kepemimpinan daerah dalam mencapai visi daerah, dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah sebesar 4,3 - 5,00

menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menggerakkan pembangunan ekonomi dan sosial di tingkat lokal. Indeks Daya Saing Daerah merupakan alat untuk mengukur seberapa efektif dan kompetitif suatu daerah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan pada tahun 2045 melalui:

1. Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah daerah dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi yang handal.
2. Investasi dalam Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta layanan kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan produktivitas.
3. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi komparatif dan kompetitif, serta memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal dan industri kreatif.
4. Kebijakan yang Mendukung Usaha dan Investasi: Menyusun kebijakan yang kondusif bagi pertumbuhan usaha dan investasi, termasuk penyederhanaan regulasi, perizinan yang mudah, serta insentif fiskal bagi pelaku usaha.
5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan: Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah akan meningkatkan efektivitas dan kredibilitas pemerintah dalam menjalankan visi dan misi pembangunan.
6. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan: Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan akan memastikan bahwa potensi ekonomi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.
7. Kolaborasi dengan Pihak Swasta dan Masyarakat Sipil: Kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan program-program pembangunan akan memperkuat daya saing daerah.

Dengan memastikan komitmen yang kuat dari pemimpin daerah, peningkatan peran kepemimpinan daerah untuk mencapai visi daerah dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah dapat tercapai.

4) Sasaran Visi: Peningkatan daya saing sumber daya manusia

Sasaran visi peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan indikator Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,70 pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. IMM merupakan indikator yang menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor

indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relative terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Indeks Modal Manusia adalah pendekatan yang dilakukan oleh World Bank (*Human Capital Index*).

Indeks modal manusia diukur melalui beberapa komponen utama:

- 1) **Probabilitas bertahan hidup (*survival*) hingga usia 5 tahun:** Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita.
- 2) **Pendidikan:** Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui *harmonized test scores*. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran *Learning-Adjusted Years of Schooling* menggunakan metrik konversi.
- 3) **Kesehatan:** Mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. 2 proksi yang digunakan adalah (1) *adult survival rate* yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan (2) prevalensi *stunting*.

Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor Indeks Modal Manusia, yang berkisar dari 0 hingga 1. Skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap.

Adapun Sasaran tersebut dapat dicapai melalui:

1. Pendidikan Berkualitas dan Merata: Memastikan akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan formal dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, serta pendidikan non-formal untuk pendidikan sepanjang hayat.
2. Perbaikan Kesehatan Masyarakat: Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, serta memperkuat sistem kesehatan masyarakat.
3. Penanggulangan Kemiskinan: Implementasi program-program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat.
4. Pemberdayaan Ekonomi: Mendorong inklusi ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan dukungan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah.
5. Pemberantasan Diskriminasi: Memastikan kesetaraan gender dan mengatasi diskriminasi rasial serta etnis dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
6. Penguatan Institusi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik, serta

memperkuat kapasitas institusi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung peningkatan IPM.

7. Kolaborasi Antar-sektor: Membangun kemitraan yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, peningkatan IMM menjadi sasaran yang dapat dicapai, menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

Selain Indeks Modal Manusia (IMM), Sasaran visi yang menggambarkan peningkatan daya saing sumber daya manusia adalah indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dimana pada tahun 2045 di proyeksikan mencapai 83,60-85,85. Indeks ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. IPM merupakan indikator yang mencerminkan kondisi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup suatu populasi, sehingga peningkatannya mencerminkan kemajuan sosial dan ekonomi yang signifikan, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui:

1. Pendidikan Berkualitas dan Merata: Memastikan akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan formal dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, serta pendidikan non-formal untuk pendidikan sepanjang hayat.
2. Perbaikan Kesehatan Masyarakat: Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi, serta memperkuat sistem kesehatan masyarakat.
3. Penanggulangan Kemiskinan: Implementasi program-program pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat.
4. Pemberdayaan Ekonomi: Mendorong inklusi ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap pekerjaan yang layak, dan dukungan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah.
5. Pemberantasan Diskriminasi: Memastikan kesetaraan gender dan mengatasi diskriminasi rasial serta etnis dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
6. Penguatan Institusi: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik, serta memperkuat kapasitas institusi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung peningkatan IPM.
7. Kolaborasi Antar-sektor: Membangun kemitraan yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, peningkatan IPM menjadi sasaran yang dapat dicapai, menciptakan masyarakat yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan pada tahun 2045.

5) Sasaran Visi: Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*

Sasaran visi penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*, dengan indikator penurunan emisi GRK tahun 2045, menandakan komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Net Zero Emission berarti mencapai keseimbangan antara emisi GRK yang dihasilkan dan yang diserap dari atmosfer, sehingga tidak ada netto emisi yang tersisa. Hal tersebut dapat dicapai melalui:

1. Transisi ke Energi Bersih: Mempercepat transisi dari energi fosil menuju sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air. Ini melibatkan investasi besar dalam infrastruktur energi terbarukan dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
2. Efisiensi Energi: Meningkatkan efisiensi energi di semua sektor, termasuk industri, transportasi, dan bangunan. Ini melibatkan penggunaan teknologi yang lebih efisien dan praktik-praktik yang hemat energi.
3. Penanaman Kembali Hutan: Mendorong penanaman kembali hutan dan rehabilitasi lahan yang terdegradasi untuk meningkatkan penyerapan karbon alami dan mengurangi deforestasi.
4. Pengelolaan Limbah: Mengurangi pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir dan meningkatkan pengelolaan limbah organik melalui daur ulang dan kompos.
5. Pengembangan Transportasi Berkelanjutan: Meningkatkan akses dan penggunaan transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, sepeda, dan jalan kaki, serta mempromosikan kendaraan listrik dan transportasi berbahan bakar hidrogen.
6. Penyuluhan dan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan emisi GRK, serta mendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendukung gaya hidup yang lebih berkelanjutan.
7. Kolaborasi Internasional: Berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam perjanjian internasional untuk mengurangi emisi GRK secara global, serta berbagi pengetahuan dan teknologi untuk mencapai tujuan Net Zero Emission.

Dengan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan, penurunan emisi GRK menuju Net Zero Emission pada tahun 2045 menjadi sasaran yang realistis dan dapat dicapai.

Pencapaian sasaran visi ini juga digambarkan dengan indikator indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2019),

IKLH merupakan indeks yang menggambarkan kondisi dari hasil pengelolaan lingkungan hidup. IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Adapun target IKLH yang di proyeksikan sampai tahun 2045 adalah sebesar 89,01 - 94,00.

4.2 Misi Pembangunan

Untuk mencapai Visi Kota Dumai 2045, ditetapkan 4 misi pembangunan yang menjadi agenda jangka panjang Kota Dumai dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Ke 4 misi ini merupakan perwujudan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan daerah. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan, yang didukung oleh implementasi peraturan perundang-undangan dan pembiayaan pembangunan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.

4.2.1 Misi Kota Dumai

Adapun ke 4 misi untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Dumai pada tahun 2045 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Masyarakat Dumai yang Sehat, Berkualitas dan Sejahtera Melalui Transformasi Sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
 - a. Sehat berarti, manusia yang sehat secara holistik yang produktif, berkontribusi positif terhadap masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan sosial agar dapat mencapai kesejahteraan secara keseluruhan.
 - b. Cerdas berarti, manusia yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi dengan keseimbangan emosional, sosial, dan praktikal. Mampu menavigasi kompleksitas kehidupan dengan bijaksana, berkontribusi pada masyarakat dengan positif, dan mencapai keberhasilan secara holistik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
 - c. Kreatif berarti, kemampuan individu dalam berkolaborasi dengan orang lain, dan menciptakan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dengan dukungan lingkungan yang dinamis serta membangun.
 - d. Sejahtera berarti, masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak, pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka, serta memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan ekonomi jangka panjang.

- e. Unggul berarti, manusia unggul yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, dan mampu menghadapi tantangan dengan sikap yang positif.
 - f. Berdaya saing berarti, manusia yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap sehingga mampu bersaing secara efektif di pasar kerja, mampu menghadapi tantangan dan bersaing secara efektif dalam lingkungan yang kompetitif serta memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan menghasilkan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks.
- 2) Mewujudkan Perekonomian Kota Dumai yang Maju Melalui Transformasi Ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas dengan peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif seperti industri manufaktur, pertanian, pariwisata, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Transformasi Tata Kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- 4) Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan daerah, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai karakteristik wilayah dengan Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta adanya kesinambungan pembangunan untuk mewujudkan pencapaian visi Kota Dumai melalui kaidah pelaksanaan Pembangunan yang efektif, efisien dan berkelanjutan.



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025-2045

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka kerja dalam mendukung perwujudan visi pembangunan daerah dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Arah kebijakan pembangunan daerah kedepan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dan isu strategis dalam pembangunan daerah. Pelaksanaan arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 dibagi dalam 4 (empat) tahapan, dimana tiap tahapan memiliki tema pembangunan dalam kerangka pencapaian sasaran pokok untuk terwujudnya visi dan misi daerah.

Dalam penetapan sasaran pokok pembangunan daerah dengan memperhatikan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Riau. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 maka pemerintah Kota Dumai telah menetapkan sasaran pokok jangka panjang daerah. Rumusan sasaran pokok dilengkapi dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai sesuai dengan pentahapan arah kebijakan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan nasional menjadi acuan dalam penyusunan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah (Provinsi dan Kabupaten Kota) yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Provinsi Riau dan Kota Dumai Tahun 2025-2045 dijelaskan sebagai berikut.

5.1 Arah Kebijakan Transformasi Daerah

Arah kebijakan disusun berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai Tahun 2025-2045 dan beberapa hasil kajian lainnya yang terkait capaian pembangunan jangka panjang Kota Dumai dan potensi pembangunan daerah 20 tahun kedepan. Secara umum, arah kebijakan yang merupakan prioritas pembangunan jangka panjang Kota Dumai. Arah kebijakan RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045 atau 20 tahun kedepan. Secara umum, tahapan dan prioritas utama pembangunan jangka panjang Kota Dumai dapat dilihat pada gambar berikut ini.

5.1.1 Transformasi Sosial

Arah kebijakan transformasi sosial mencakup bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial adaptif.

5.1.1.1 Arah Kebijakan Kesehatan

Bidang kesehatan mengacu pada perubahan signifikan dalam sistem kesehatan, perilaku kesehatan masyarakat, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Arah kebijakan transformasi sosial dalam bidang kesehatan yaitu:

- 1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan;
- 2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;
- 3) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
- 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya;
- 5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 6) Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan;
- 7) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting;
- 8) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat serta pengendalian terhadap produksi konsumsi dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat;
- 9) Percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis terabaikan.

5.1.1.2 Arah Kebijakan Pendidikan

Transformasi sosial dalam bidang pendidikan melibatkan perubahan dalam sistem pendidikan, metode pengajaran, aksesibilitas pendidikan, dan tenaga kependidikan, persepsi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Arah kebijakan transformasi sosial dalam bidang pendidikan yaitu:

- 1) Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar);
- 2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah;
- 3) Penguatan upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan dan pemerataan akses serta perluasan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik;
- 4) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang adaptif berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK;
- 5) Penguatan upaya peningkatan kecakapan literasi numerasi dan manajemen talenta serta prestasi peserta didik;

- 6) Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta pemberian insentif khusus bagi guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan.

5.1.1.3 Arah Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif

Transformasi sosial dalam perlindungan sosial adaptif mengacu pada perubahan dalam cara masyarakat dan pemerintah mengelola risiko sosial dan ekonomi serta meresponsnya dengan cara yang lebih fleksibel, inklusif, dan berkelanjutan dengan arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas secara inklusif;
- 2) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & highvalue economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*;
- 4) Peningkatan *government induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi;
- 5) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;
- 6) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.

5.1.2 Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi merupakan proses perubahan yang signifikan dalam struktur, perilaku, dan kinerja suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Transformasi ini melibatkan berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, struktur industri, distribusi pendapatan, teknologi, serta integrasi dalam pasar global. Arah Kebijakan transformasi ekonomi meliputi:

- 1) Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, sarana prasarana dan lainnya);
- 2) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah;
- 3) Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing;
- 4) Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal;

- 5) Pengembangan Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;
- 6) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;
- 7) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya;
- 8) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
- 9) Peningkatan produktivitas BUMD;
- 10) Dukungan Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi);
- 11) Dukungan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon;
- 12) Dukungan Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi);
- 13) Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja;
- 14) Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai;
- 15) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran;
- 16) Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan

utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital;

- 17) Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage di kawasan perkotaan;
- 18) Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada kawasan perkotaan Dumai;
- 19) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb);
- 20) Dukungan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga.

5.1.3 Arah Kebijakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi tata kelola pemerintahan merupakan proses signifikan dalam perubahan struktur, fungsi, dan praktik pemerintahan suatu negara. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi Masyarakat. Arah Kebijakan transformasi tatakelola pemerintahan yaitu:

- 1) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah;
- 2) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
- 3) Digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat dan penguatan aspek pemerintahan digital;
- 4) Penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Dumai yang profesional dan bebas korupsi;

- 5) Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;
- 6) Dukungan penguatan integritas partai politik;
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional;
- 8) Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.

5.1.4 Arah Kebijakan Landasan Transformasi

Dalam rangka menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Daerah dalam kondisi ideal maka arah kebijakan yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Dukungan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.
- 2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
- 3) Pengendalian inflasi daerah
- 4) City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
- 5) Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
- 6) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 7) Dukungan pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka).
- 8) Dukungan peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan Bandar Udara Pinang Kampai.
- 9) Dukungan Penguatan infrastuktur untuk mendukung kawasan strategis industri Medan-Dumai (yang menjadi bagian klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi kareh dan perkebunan hasil lainnya) yang diarahkan sebagai koridor ekonomi industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat indonesia.

- 10) Dukungan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi mencakup kemampuan masyarakat untuk bertahan dan beradaptasi terhadap tantangan sosial dan budaya yang dihadapi dengan melibatkan perlindungan dan pemeliharaan warisan budaya, hubungan sosial yang kuat dan berkelanjutan. Arah kebijakan Ketahanan sosial dan budaya yaitu:

- 1) Penguatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat
- 2) Peningkatan kehidupan kerukunan beragama
- 3) Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Melayu Sebagai Payung Negeri
- 4) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
- 5) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
- 6) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
- 7) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
- 8) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
- 9) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
- 10) Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
- 11) Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
- 12) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion
- 13) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
- 14) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk

- jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
- 15) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
 - 16) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
 - 17) Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *early warning system* berbasis IT dan pendekatan *hybrid (green & grey infrastructure)* pada kawasan perkotaan.
 - 18) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi serta proteksi kebakaran pada kawasan perumahan dan permukiman.

5.1.5 Implementasi Transformasi

Implementasi transformasi sosial, ekonomi, dan tatakelola dalam mewujudkan perubahan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Arah kebijakan yang ditempuh yaitu:

- 1) Dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Dumai dan lingkaran Pekanbaru.
- 2) Dukungan Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru.
- 3) Dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port, terutama di Pelabuhan Dumai.
- 4) Dukungan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai
- 5) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
- 6) Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dan sebagainya yang adaptif

- 7) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
- 8) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
- 9) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
- 10) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Dumai.
- 11) Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
- 12) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
- 13) Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek- proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
- 14) Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
- 15) Dukungan Percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Berdasarkan kepada arah kebijakan pembangunan Kota Dumai tersebut selanjutnya diuraikan pentahapan pelaksanaan RPJPD melalui 4 tahapan. Penjabaran Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan disusun berdasarkan Visi dan Misi RPJPD Kota Dumai tahun 2025-2045 sebagai berikut:

5.1.6 Tahapan Arah Kebijakan

1) Arah Kebijakan Periode Tahun 2025-2029

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Dumai diarahkan pada Penguatan fondasi transformasi antara lain penguatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; Penguatan hilirisasi sektor industri pengolahan dan usaha menengah kecil dan mikro dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penguatan riset dan inovasi daerah; Penguatan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil; Penguatan Regulasi dan Ketahanan Sosial Ekologi serta Pembangunan Kewilayahan yang Terintegrasi.

2) Arah Kebijakan Periode Tahun 2030-2034

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Dumai diarahkan pada kebijakan percepatan transformasi antara lain mewujudkan Akselerasi transformasi pembangunan SDM berkualitas dan inklusif; Percepatan peningkatan produktivitas usaha menengah kecil menengah, serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi; Percepatan kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, dan masyarakat sipil partisipatif; Memantapkan implementasi regulasi dan ketahanan sosial ekologi untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi Transformasi dan Pembangunan daerah.

3) Arah Kebijakan Periode Tahun 2035-2039

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Dumai diarahkan pada kebijakan Optimalisasi Transformasi. Tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah Kota Dumai diarahkan pada kebijakan Optimalisasi transformasi daerah untuk penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan; Optimalisasi kerjasama dengan daerah lain dengan saling memanfaatkan keunggulan dan produktivitas masing-masing untuk memperluas akses pasar bagi UMKM; dan mendorong perluasan investasi; Penguatan Kelembagaan adaptif, SDM ASN Kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri; optimalisasi ketangguhan daerah, masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan.

4) Arah Kebijakan Periode Tahun 2040-2045

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Dumai diarahkan pada kebijakan Perwujudan Kota Dumai maju dan berkelanjutan. Tahap keempat ini Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Dumai diarahkan pada kebijakan Terwujudnya SDM Kota Dumai yang unggul; Terwujudnya Dumai dengan pendapatan perkapita yang tinggi; Terwujudnya tata kelola pemerintahan Dumai yang berintegritas, tangkas, adaptif dan kolaboratif; Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan melalui transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.

Tabel berikut menyajikan sandingan visi, misi tahapan kebijakan dan arah kebijakan transformasi RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai Tahun 2025-2045

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terwujudnya Dumai Kota Idaman, Maju dan Berkelanjutan	Mewujudkan Masyarakat Dumai yang Sehat, Berkualitas dan Sejahtera Melalui Transformasi Sosial	Penguatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;	Akselerasi transformasi pembangunan SDM berkualitas dan inklusif;	Optimalisasi transformasi daerah untuk penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan;	Terwujudnya SDM Kota Dumai yang unggul;
		Penguatan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Percepatan upaya perluasan promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	Perwujudan Penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Perluasan Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Perwujudan akses layanan kesehatan universal.
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Percepatan peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Optimalisasi peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Perwujudan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas yang unggul.
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Peningkatan upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Perwujudan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan budaya dalam pencegahan dan pengendalian penyakit melalui imunisasi dasar lengkap
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Peningkatan upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Perwujudan pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan dan adaptif.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehata yang ditugaskan di kecamatan perbatasan	Percepatan pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehata yang ditugaskan di kecamatan perbatasan	Optimalisasi upaya pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehata yang ditugaskan di kecamatan perbatasan	Perwujudan tenaga kesehatan yang berkompetensi, sejahtera, adaptif, berakhlak mulia dan berbudaya maju
		Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Penguatan percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Optimalisasi upaya penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Penerapan pencegahan dan penuntasan stunting.
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat serta pengendalian terhadap produksi konsumsi dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat	Penguatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Optimalisasi upaya penguatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Perwujudan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
		Percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis terabaikan.	Penguatan upaya percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis terabaikan.	Optimalisasi upaya percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis terabaikan.	Perwujudan pengendalian persebaran penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis terabaikan
		Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar).	Penguatan upaya percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar).	Optimalisasi Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar).	Penuntasan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar).
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Percepatan upaya pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Optimalisasi pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Perwujudan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
		Penguatan upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan dan pemerataan akses serta perluasan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik	Percepatan upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan dan pemerataan akses serta perluasan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik	Optimalisasi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan dan pemerataan akses serta perluasan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik	Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang adaptif berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK	Percepatan pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang adaptif berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK	Optimalisasi pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang adaptif berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK	Perwujudan kurikulum pendidikan dasar yang adaptif berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK
		Penguatan upaya peningkatan kecakapan literasi numerasi dan manajemen talenta serta prestasi peserta didik	Percepatan upaya peningkatan kecakapan literasi numerasi dan manajemen talenta serta prestasi peserta didik	Optimalisasi kecakapan literasi numerasi dan manajemen talenta serta prestasi peserta didik	Perwujudan peserta didik yang bertalenta dan berprestasi
		Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta pemberian insentif khusus bagi guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan	Percepatan pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta pemberian insentif khusus bagi guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan	Optimalisasi pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta pemberian insentif khusus bagi guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan	Perwujudan guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi, sejahtera, adaptif, berakhlak mulia dan berbudaya maju
		Penguatan pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas secara inklusif	Percepatan pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas secara inklusif	Optimalisasi pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas secara inklusif	Perwujudan pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas secara inklusif
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & highvalue economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi	Percepatan Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & highvalue economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi	Optimalisasi Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & highvalue economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi	Perwujudan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & highvalue economy) serta meningkatnya investasi
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.	Percepatan Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.	Optimalisasi Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.	Perwujudan sumber daya manusia berkualitas pada usia produktif

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan <i>government induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi	Percepatan peningkatan <i>government induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi	Optimalisasi <i>government induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi	Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	Percepatan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	Perluasan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	Perwujudan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Percepatan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Optimalisasi pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	Perwujudan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
	Mewujudkan Perekonomian Kota Dumai yang Maju Melalui Transformasi Ekonomi	Penguatan hilirisasi sektor industri pengolahan dan usaha menengah kecil dan mikro; dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta penguatan riset dan inovasi daerah	Percepatan peningkatan produktivitas usaha menengah kecil menengah, serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Optimalisasi kerjasama dengan daerah lain dengan saling memanfaatkan keunggulan dan produktivitas masing-masing untuk memperluas akses pasar bagi UMKM; dan mendorong perluasan investasi.	Terwujudnya Dumai dengan pendapatan perkapita yang tinggi;
		Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, sarana prasarana dan lainnya).	Percepatan peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, sarana prasarana dan lainnya).	Optimalisasi produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, sarana prasarana dan lainnya).	Perwujudan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Percepatan pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Optimalisasi pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Penerapan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing	Percepatan Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing	Optimalisasi ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing	Penerapan riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing
		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Percepatan penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Optimalisasi penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Penerapan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
		Penguatan Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Percepatan penguatan Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Optimalisasi Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Perwujudan Industrialisasi koperasi
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Percepatan upaya Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Optimalisasi keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Perwujudan peran UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Percepatan Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Optimalisasi Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Implementasi kerja sama regional dan internasional dalam peningkatan rantai nilai global
		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Percepatan Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Optimalisasi penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Perwujudan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis dalam penguatan proses bisnis UMKM
		Peningkatan produktivitas BUMD.	Percepatan Peningkatan produktivitas BUMD.	Optimalisasi produktivitas BUMD.	Implementasi peran BUMD.dalam perekonomian daerah

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dukungan Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi)	Dukungan Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi)	Dukungan Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi)	Perwujudan kawasan strategis industri Medan-Dumai sebagai klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi
		Dukungan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.	Dukungan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.	Dukungan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.	Perwujudan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau
		Dukungan Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	Dukungan Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	Dukungan Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)	Perwujudan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Perwujudan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal,
		Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai;	Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai;	Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai;	Pemanfaatan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai;
		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran	Percepatan Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran	Optimaliasi tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran	Perwujudan layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran yang berkualitas

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	Percepatan Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	Optimalisasi Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.	Implementasi ekosistem digital dalam transformasi digital
		Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage di kawasan perkotaan	Percepatan Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage di kawasan perkotaan	Optimalisasi Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage di kawasan perkotaan	Penyediaan akses internet yang cepat keseluruhnya kawasan perkotaan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada kawasan perkotaan Dumai.	Percepatan Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada kawasan perkotaan Dumai.	Optimalisasi infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada kawasan perkotaan Dumai.	Perwujudan infrastruktur kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada kawasan perkotaan Dumai.
		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	Percepatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	Optimalisasi koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).	Implementasi regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah
		Persiapan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga	Percepatan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga	Optimalisasi upaya percepatan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga	Pemanfaatan sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga
	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik	Penguatan Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.	Percepatan kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, dan masyarakat sipil partisipatif	Penguatan Kelembagaan adaptif, SDM ASN Kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Dumai yang berintegritas, tangkas, adaptif dan kolaboratif;

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	yang Berkualitas Melalui Transformasi Tata Kelola				
		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Percepatan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Optimalisasi penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Perwujudan kualitas regulasi daerah.
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
		Penguatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat dan penguatan aspek pemerintahan digital	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat dan penguatan aspek pemerintahan digital	Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat dan penguatan aspek pemerintahan digital	Implementasi pemerintahan digital
		Penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Dumai yang profesional dan bebas korupsi.	Percepatan penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Dumai yang profesional dan bebas korupsi.	Optimalisasi penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Dumai yang profesional dan bebas korupsi.	Perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Dumai yang profesional dan bebas korupsi.
		Penguatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Percepatan pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan	Optimalisasi pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan	Implementasi meritokrasi dalam pengembangan karir ASN

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	
		Dukungan Penguatan integritas partai politik	Dukungan Penguatan integritas partai politik	Dukungan Penguatan integritas partai politik	Dukungan Penguatan integritas partai politik
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
		Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata Dan Berkeadilan	Penguatan Regulasi dan Ketahanan Sosial Ekologi serta Pembangunan Kewilayahan yang Terintegrasi	Memantapkan implementasi regulasi dan ketahanan sosial ekologi untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi Transformasi dan Pembangunan daerah	optimalisasi ketangguhan daerah, masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan melalui transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola.
		Dukungan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	Dukungan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	Dukungan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.	Dukungan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Percepatan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Optimalisasi peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan	Perwujudan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	
		Pengendalian inflasi daerah	Pengendalian inflasi daerah	Pengendalian inflasi daerah	Pengendalian inflasi daerah
		City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	Percepatan penerapan City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	Optimalisasi penerapan City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	Perwujudan citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Percepatan peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Optimalisasi peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Pemanfaatan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
		Dukungan pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas	Dukungan pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas	Dukungan pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas	Pemanfaatan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, untuk interkoneksi antar kawasan strategis, dan pemanfaatan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pemanfaatan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		langsung Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka).	langsung Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka).	langsung Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka).	konektivitas langsung Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka).
		Dukungan peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan Bandar Udara Pinang Kampai.	Dukungan peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan Bandar Udara Pinang Kampai.	Dukungan peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan Bandar Udara Pinang Kampai.	Pemanfaatan pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan Bandar Udara Pinang Kampai.
		Dukungan Penguatan infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis industri Medan-Dumai (yang menjadi bagian klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi karen dan perkebunan hasil lainnya) yang diarahkan sebagai koridor ekonomi industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat indonesia.	Dukungan Penguatan infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis industri Medan-Dumai (yang menjadi bagian klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi karen dan perkebunan hasil lainnya) yang diarahkan sebagai koridor ekonomi industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat indonesia.	Dukungan Penguatan infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis industri Medan-Dumai (yang menjadi bagian klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi karen dan perkebunan hasil lainnya) yang diarahkan sebagai koridor ekonomi industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat indonesia.	Dukungan Penguatan infrastruktur untuk mendukung kawasan strategis industri Medan-Dumai (yang menjadi bagian klaster industri pengolahan sawit, kelapa, kopi karen dan perkebunan hasil lainnya) yang diarahkan sebagai koridor ekonomi industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat indonesia.
		Dukungan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Dukungan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Dukungan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Dukungan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
		Penguatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	Penguatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	Penguatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	Penguatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat
		Peningkatan kehidupan kerukunan beragama	Peningkatan kehidupan kerukunan beragama	Peningkatan kehidupan kerukunan beragama	Peningkatan kehidupan kerukunan beragama

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Melayu Sebagai Payung Negeri	Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Melayu Sebagai Payung Negeri	Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Melayu Sebagai Payung Negeri	Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Melayu Sebagai Payung Negeri
		Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
		Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	Percepatan Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	Optimalisasi Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	Implementasi zero solid waste city dan circular economy pada kawasan perkotaan.
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion	Percepatan Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion	Optimalisasi Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion	Perwujudan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Percepatan peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Optimalisasi pemanfaatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Perwujudan rumah tangga dengan akses hunian layak yang terjangkau dan berkelanjutan
		Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	upaya dekarbonisasi pasokan tenaga	upaya dekarbonisasi pasokan tenaga	mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga
			listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Optimalisasi Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Pemanfaatan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan early warning system berbasis IT dan pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	Percepatan peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan early warning system berbasis IT dan pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	Optimalisasi peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan early warning system berbasis IT dan pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.	Implementasi <i>early warning system</i> berbasis IT dan pendekatan hybrid (<i>green & grey infrastructure</i>) pada kawasan perkotaan.
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi serta proteksi kebakaran pada kawasan perumahan dan permukiman.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi serta proteksi kebakaran pada kawasan perumahan dan permukiman.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi serta proteksi kebakaran pada kawasan perumahan dan permukiman.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi serta proteksi kebakaran pada kawasan perumahan dan permukiman.
		Dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Dumai dan lingkaran Pekanbaru.	Dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Dumai dan lingkaran Pekanbaru.	Dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Dumai dan lingkaran Pekanbaru.	Pemanfaatan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Dumai dan lingkaran Pekanbaru.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Dukungan Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru.	Dukungan Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru.	Dukungan Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru.	Pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru.
		Dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port, terutama di Pelabuhan Dumai.	Dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port, terutama di Pelabuhan Dumai.	Dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port, terutama di Pelabuhan Dumai.	Pemanfaatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port, terutama di Pelabuhan Dumai.
		Dukungan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai	Dukungan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai	Dukungan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai	Dukungan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
		Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb) yang adaptif	Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb) yang adaptif	Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb) yang adaptif	Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb) yang adaptif
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Dumai.	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Dumai.	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Dumai.	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Dumai.
		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
		Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
		Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek- proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek- proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek- proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek- proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029 (Perkuatan Fondasi)	2030-2034 (Percepatan)	2035-2039 (Optimalisasi)	2040-2045 (Perwujudan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
		Dukungan Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	Dukungan Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	Dukungan Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	Dukungan Percepatan pelaksanaan reforma agraria.

5.2 Upaya Transformatif Super Prioritas (GAME CHANGERS)

Dalam mewujudkan tercapainya Visi jangka panjang Kota Idaman, Maju dan Berkelanjutan, Pemerintah Kota Dumai telah merumuskan Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*) yang menjadi pilar utama dalam transformasi menuju kesejahteraan dan kemajuan berkelanjutan. Dengan didukung penyelarasan RPJPN, RPJPD Provinsi Riau dan RPJPD Kota Dumai langkah strategis berupa penguatan fondasi transformasi telah direncanakan untuk mengatasi permasalahan mendasar pembangunan yaitu melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola yang dirinci sebagai berikut :

1. Transformasi Sosial :

- 1) Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar).
- 2) Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan
- 3) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal yang berkualitas dan berkeadilan.
- 4) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; Percepatan eliminasi penyakit menular dan tidak menular serta penyakit tropis terabaikan. Dan Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
- 5) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien

2. Transformasi Ekonomi :

- 6) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang perekonomian Daerah.
- 7) hilirisasi industri berbasis SDA bagi industri kecil menengah dan usaha menengah kecil dan mikro serta peningkatan produktivitas tenaga kerja
- 8) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan *incubator* bisnis.
- 9) Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi)

3. Transformasi Tata Kelola:

- 10) Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kota Dumai, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Dumai yang profesional dan bebas korupsi.

4. Landasan Transformasi :

- 11) Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBD serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal
- 12) Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Melayu Sebagai Payung Negeri
- 13) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
- 14) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau
- 15) Peningkatan ketahanan air

5.3 Sasaran Pokok Pembangunan Kota Dumai

Sasaran pokok RPJPD untuk masing-masing misi yang disesuaikan dengan tahapan pembangunan jangka panjang Kota Dumai. Perumusan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Dumai untuk mencapai visi pembangunan dijabarkan dalam penegasan sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pokok visi pembangunan, yaitu sebagai Kota Dumai yang Agamis, Berbudaya, Maju dan dan Berkelanjutan. Pada Tabel 5.2 berikut ini ditampilkan uraian Misi, Arah Kebijakan, Sasaran pokok dan Indikator, Baseline 2025 dan Sasaran Tahun 2045. Penjabaran Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok serta Indikator Sasaran Pokok RPJPD menjadi Kinerja Wajib Pembangunan Jangka Panjang Daerah dalam rangka untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 4(empat) misi dengan 12 (dua belas) Arah Pembangunan, 6 (enam) Sasaran Pokok dan 34 (tiga puluh empat) Indikator, secara lengkap disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.2
Sasaran Pokok dan Indikator RPJPD Kota Dumai Tahun 2025-2045

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
1	Mewujudkan Masyarakat Dumai yang Sehat, Berkualitas dan Sejahtera Melalui Transformasi Sosial	Kesehatan untuk Semua	1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan; 2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal; 3) Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya; 5) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan; 6) Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan serta pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan; 7) Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting; 8) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat serta pengendalian terhadap produksi konsumsi dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat; 9) Percepatan eliminasi penyakit menular, tidak menular dan penyakit tropis terabaikan.	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,9 - 72,2	76,2 - 78,0	Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk yang sejalan dengan penambahan penduduk dan arus urbanisasi	
2				Kesehatan Ibu dan Anak: Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	91,00 - 95,00	20,00 - 42,00		
				a. Jumlah Kelahiran Hidup	8.844 - 8.907	10.131 - 10.204		
				b. Jumlah Kematian Ibu Absolut	7,00 - 8,00	2,00 - 4,00		
3				Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10	5		
4				Penanganan Tuberkulosis:				
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	60,44	68,2 - 71,1		
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	95,2	100		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
5				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	100		
6		Pendidikan Berkualitas yang Merata	1) Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar); 2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah; 3) Penguatan upaya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan melalui peningkatan dan pemerataan akses serta perluasan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik; 4) Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan dasar yang adaptif berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah serta Pengembangan layanan pendidikan berbasis digital dan TIK; 5) Penguatan upaya peningkatan kecakapan literasi numerasi dan manajemen talenta serta prestasi peserta didik; 6) Pemenuhan jumlah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan serta pemberian insentif khusus bagi guru dan tenaga kependidikan yang ditugaskan di kecamatan perbatasan.	Hasil Pembelajaran				
				a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional:				
				- Literasi Membaca	56,96 - 57,99	75,82 - 82,91		
				- Numerasi	32,74 - 33,33	43,55 - 47,62		
				b. Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (tahun)	10,27 - 11,07	11,12 - 13,99		
				c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,42 - 13,45	14,37 - 14,69		
				Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	18,00 - 19,00	42,00 - 44,00		
7								

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
8		Perlindungan Sosial yang Adaptif	1) Penguatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan; 2) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & highvalue economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling; 4) Peningkatan government induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi; 5) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien; 6) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,48- 2,7	1,15 - 1,45		
9				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai (%)	45,47 - 55,00	90,00 - 100,00		
10				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	1,00	28,00 - 30,00		
11	Mewujudkan Perekonomian Kota Dumai yang Maju Melalui Transformasi Ekonomi	Produktivitas Ekonomi	1) Peningkatan produktivitas pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, sarana prasarana dan lainnya); 2) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah; 3) Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing; 4) Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal; 5) Pengembangan Industrialisasi koperasi melalui	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	66,11 - 69,11	66,34 - 66,45	Terwujudnya Perekonomian Kota Dumai yang Maju dan Berdaya Saing	
12				Pengembangan Pariwisata:				

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
			hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi;	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,79 - 0,80	2,24 - 2,91		
			6) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha;					
			7) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya;	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	6,32 - 6,62	16,13 - 16,90		
			8) Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;					
13			9) Peningkatan produktivitas BUMD;	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	2,9 - 3,0	2,50 - 3,00		
			10) Dukungan Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Medan-Dumai (klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya mineral, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi);					
14			11) Dukungan Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon;	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:				
			12) Dukungan Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi);					
			13) Percepatan penyediaan infrastruktur	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Kota Dumai (%)	94,20 - 94,27	95,54 - 95,61		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
			penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja; 14) Dukungan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Riau untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas Kisaran-Aek Kanopan-Rantauprapat-Kotapinang-Duri-Dumai; 15) Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan dan daerah pinggiran; 16) Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan	b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Kota Dumai (%)	99,00	99,00		
				c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,70 - 4,77	3,43 - 3,49		
				d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,55	2,30 - 3,71		
15				Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik				
				- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,70 – 5,10	2,10 – 2,57		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
			literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital; 17) Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- area weak coverage di kawasan perkotaan; 18) Peningkatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada kawasan perkotaan Dumai; 19) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb); 20) Dukungan pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten tetangga.	- Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	94,90 - 95,30	97,43 - 97,90		
16				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	45,7 - 47,16	73,81 - 84,73		
17				Indeks Kapabilitas Inovasi	2,29	4,89		
18				Indeks Inovasi Daerah	45,8	99,41		
19				Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:				

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
				a. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	9,33	16,68		
20		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	11,39	5,13		
21				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,06 - 41,82	44,40 - 45,54		
22				Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	26,58	45,24 - 54,00		
23		Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi dari Pusat Kota hingga ke Kelurahan		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	80,00 - 90,00	96,00 - 100,00		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
24	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Transformasi Tata Kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	1) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah; 2) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;	Indeks Reformasi Hukum	80,00 - 85,00	100	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	
25			3) Digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat dan penguatan aspek pemerintahan digital; 4) Penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Dumai yang profesional dan bebas korupsi; 5) Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja;	Indeks SPBE	3,45	5,00		
26			6) Dukungan penguatan integritas partai politik; 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional; 8) Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Indeks Integritas	75	99,01 - 100,00		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
27	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata Dan Berkeadilan	Stabilitas Ekonomi Makro	1) Dukungan peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut. 2) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. 3) Pengendalian inflasi daerah 4) City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan. 5) Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,01 - 1,12	1,37 - 1,42	Terwujudnya Stabilitas Daerah	
28			6) Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. 7) Dukungan pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra, serta pengembangan konektivitas langsung Dumai-Rupat-Malaka (di Selat Malaka). 8) Dukungan peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan Bandar Udara Pinang Kampai. 9) Dukungan Penguatan infrastuktur untuk mendukung kawasan strategis industri Medan-Dumai (yang menjadi bagian klaster industri pengolahan	Tingkat Inflasi (%)	2,9 – 3,0	2,50 - 3,00		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
29			sawit, kelapa, kopi kare dan perkebunan hasil lainnya) yang diarahkan sebagai koridor ekonomi industri berbasis SDA dan hub ekonomi biru barat indonesia. 10) Dukungan penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Indeks Daya Saing Daerah	3,17	4,3 - 5,00		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
30		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	1) Penguatan implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat 2) Peningkatan kehidupan kerukunan beragama 3) Peningkatan Pemajuan Kebudayaan Melayu Sebagai Payung Negeri 4) Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. 5) Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. 6) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 7) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 8) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 9) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,39	0,29 - 0,31	Terwujudnya masyarakat yang tangguh	

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
31		Lingkungan Hidup yang Berkualitas	10) Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. 11) Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. 12) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion 13) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah 14) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk	Kualitas Lingkungan Hidup			Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	
			(i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	68,82	89,01 - 94,00		
				b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	6,59	48,60 - 62,60		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
			15) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. 16) Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. 17) Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan early warning system berbasis IT dan pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. 18) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	c. Pengelolaan Sampah:				
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	76,17	82,09 - 83,47		
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	76,17	82,09 - 83,47		

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
32		Berketahanan air, energi dan kemandirian pangan		Ketahanan Energi, Air, dan Pangan				
				- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	3.006 - 3.200	7.726 - 8.119		
33				Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	11,42	1,42		
				c. Ketahanan Air				
				- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,84	1,10		
				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Layak Perpipaan (%)	15,18	76,97 - 100,00		
34		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Risiko Bencana (IRB)	72,49	46,5		
				Penurunan Intensitas Emisi GRK	56,95	97,98		
				Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	2	95		
			1) Dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkar Dumai dan lingkar Pekanbaru.					

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
			2) Dukungan Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru.					
			3) Dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama bertaraf global port, terutama di Pelabuhan Dumai.					
			4) Dukungan Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Medan-Dumai					
			5) Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.					
			6) Penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb) yang adaptif					

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
			7) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.					
			8) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.					
			9) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.					
			10) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kota Dumai.					
			11) Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.					

NO	MISI	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI DAERAH	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		SASARAN POKOK	KET
					BASELINE 2025	TARGET 2045		
			12) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.					
			13) Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek- proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas					
			14) Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.					
			15) Dukungan Percepatan pelaksanaan reforma agraria.					

Berdasarkan hasil rumusan sasaran pokok pada tabel 5.3, tabel berikut menyajikan sandingan antara sasaran pokok, arah pembangunan berikut dengan indikator utama pembangunan beserta dengan targetnya

Tabel 5.3
Sasaran Pokok

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
1	Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk yang sejalan dengan penambahan penduduk dan arus urbanisasi	Kesehatan untuk Semua	Umur Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,9 - 72,2	76,2 - 78,0	
2			Kesehatan Ibu dan Anak: Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	91,00 - 95,00	20,00 - 42,00	
			a. Jumlah Kelahiran Hidup	8.844 - 8.907	10.131 - 10.204	
			b. Jumlah Kematian Ibu Absolut	7,00 - 8,00	2,00 - 4,00	
3			Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	10	5	
4			Penanganan Tuberkulosis:			
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	60,44	68,2 - 71,1	
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	95,2	100	
5			Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	100	100	
6		Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil Pembelajaran			
			a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional:			
			- Literasi Membaca	56,96 - 57,99	75,82 - 82,91	
			- Numerasi	32,74 - 33,33	43,55 - 47,62	
			b. Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (tahun)	10,27 - 11,07	11,12 - 13,99	
			c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,42 - 13,45	14,37 - 14,69	
7			Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	18,00 - 19,00	42,00 - 44,00	
8		Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	2,48- 2,7	1,15 - 1,45	

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
9			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai (%)	45,47 - 55,00	90,00 - 100,00	
10			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	1,00	28,00 - 30,00	
11	Terwujudnya Perekonomian Kota Dumai yang Maju dan Berdaya Saing	Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	66,11 - 69,11	66,34 -66,45	
12			Pengembangan Pariwisata:			
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	0,79 - 0,80	2,24 - 2,91	
			b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)*	6,32 - 6,62	16,13 - 16,90	
13			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	2,9 – 3,0	2,50 - 3,00	
14			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			
			a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Kota Dumai (%)	94,20 - 94,27	95,54 - 95,61	
			b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Kota Dumai (%)	99,00	99,00	
			c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,70 - 4,77	3,43 - 3,49	
			d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,55	2,30 - 3,71	
15			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			
			- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,70 – 5,10	2,10 – 2,57	
			- Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal	94,90 - 95,30	97,43 - 97,90	
16			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	45,7 - 47,16	73,81 - 84,73	
17			Indeks Kapabilitas Inovasi	2,29	4,89	
18			Indeks Inovasi Daerah	45,8	99,41	
19			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:			
			a. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	9,33	16,68	

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
20		Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah	11,39	5,13	
21			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,06 - 41,82	44,40 - 45,54	
22			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	26,58	45,24 - 54,00	
23		Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi dari Pusat Kota hingga ke Kelurahan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	80,00 - 90,00	96,00 - 100,00	
24	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	80,00 - 85,00	100	
25			Indeks SPBE	3,45	5,00	
26			Indeks Integritas	75	99,01 - 100,00	
27	Terwujudnya Stabilitas Daerah	Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,01 - 1,12	1,37 - 1,42	
28			Tingkat Inflasi (%)	2,9 – 3,0	2,50 - 3,00	
29			Indeks Daya Saing Daerah	3,17	4,3 - 5,00	
30	Terwujudnya masyarakat yang tangguh	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,39	0,29 - 0,31	
31	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Kualitas Lingkungan Hidup			
			a. Indeks kualitas lingkungan hidup	68,82	89,01 - 94,00	
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	6,59	48,60 - 62,60	
			c. Pengelolaan Sampah:			
			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	76,17	82,09 - 83,47	
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	76,17	82,09 - 83,47	
32		Berketahanan air, energi dan kemandirian pangan	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	3.006 - 3.200	7.726 - 8.119	

NO	SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET		KET
				BASELINE 2025	TARGET 2045	
33			Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	11,42	1,42	
			c. Ketahanan Air			
			- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,84	1,10	
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Layak Perpipaan (%)	15,18	76,97 - 100,00	
34		Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	72,49	46,5	
			Penurunan Intensitas Emisi GRK	56,95	97,98	
			Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	2	95	



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman

BAB VI

PENUTUP

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025-2045

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2025-2045 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan lainnya oleh pemerintah kota Dumai. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan.
- 2) Pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kota Dumai 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;
- 3) Walikota berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya serta menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintahan Kota Dumai, dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu, RPJPD ini harus disosialisasikan secara luas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi dan segenap pemangku kepentingan (stake holder), untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing;
- 4) DPRD Kota Dumai berkewajiban menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang dalam penjabarannya pada RPJMD maupun dokumen perencanaan lainnya. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan selanjutnya, terutama kaitannya dengan Tata Ruang Wilayah Kota Dumai;
- 5) Tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, lembaga budaya, komunitas adat, organisasi sosial, kalangan dunia usaha, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, diharapkan ikut bertanggungjawab dalam menjadikan acuan penyusunan program dan kegiatannya serta mengawasi pelaksanaannya;
- 6) Pimpinan perguruan tinggi di daerah ini, ikut bertanggungjawab dalam pengawasan pada penjabaran lebih lanjut dalam dokumen perencanaan daerah maupun pelaksanaannya oleh pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan (stakeholder);

- 7) Dalam melaksanakan RPJPD Kota Dumai tahun 2025-2045, Pemerintah Kota Dumai wajib menerapkan 3 pilar dari Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Dumai tahun 2025 – 2045 ini, Transparansi : berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable). Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau. Akuntabilitas: atau accountability adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implelementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. Partisipasi: pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.2 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka menjaga Kestinambungan pembangunan menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar maka diperlukan upaya perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan. Oleh sebab itu sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah, disamping menggunakan APBD Kota Dumai, APBD Provinsi Riau, dan APBN, maka diperlukan peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi. Pembiayaan pembangunan dari sektor publik, non publik, dan manajemen investasi ini dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

6.3 MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah maka pemerintah kota Dumai melakukan manajemen resiko pembangunan daerah sebagai bagian upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah dimaksud. Manajemen resiko pembangunan daerah mengolaborasikan manajemen risiko organisasi yang telah ada di tingkat perangkat daerah ke dalam

sebuah sistem Manajemen Risiko Lintas Sektor. Penerapan Manajemen Resiko Pembangunan Daerah (MRPD) diharapkan dapat meningkatkan capaian pembangunan, kualitas tata kelola penyelenggaraan negara, serta efektivitas sistem pengendalian internal dan berkembangnya inovasi pelayanan publik. Manajemen resiko pembangunan daerah dilakukan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah menerapkan *good governance* dalam pengelolaan kebijakan pembangunan.

Adapun yang menjadi fokus manajemen resiko pembangunan daerah adalah sasaran visi daerah yang meliputi Peningkatan pendapatan per kapita, Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, Peningkatan daya saing Sumber daya manusia dan Penurunan emisi GRK menuju net zero emission.

Wali Kota Dumai,

H. Paisal, SKM., MARS



Dumai
كوت دوماي | Kota Idaman

LAMPIRAN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025-2045

METADATA SASARAN VISI RPJPD

Peningkatan Pendapatan per Kapita

1. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$PDRB\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{POPULASI}$ Keterangan: PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan
Contoh	$PDRB\ per\ kapita\ 2023 = \frac{PDRB_{ADHB\ 2023}}{POPULASI\ 2023}$ $= \frac{49.034.285,87\ juta}{338.064}$ $= 145,044\ juta/kapita$

2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)

Nama Indikator	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)
Definisi	Indeks Ekonomi Biru Indonesia menghitung kontribusi sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap kemajuan ekonomi biru. Skor indeks akhir berkisar dari nol hingga seratus dan mengukur kondisi terkini ekonomi biru secara holistik. IBEI disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan sektor Ekonomi Biru. IBEI juga dapat digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi biru di masa depan, sesuai dengan asumsi-asumsi yang ditentukan.
Rumus Perhitungan	Indeks ekonomi biru diukur melalui beberapa komponen utama: 1. Pilar Ekonomi: Terdiri dari tiga subsektor yaitu: (1) Perikanan tangkap dan budidaya, (2) Manufaktur berbasis kelautan, (3) Pariwisata berbasis kelautan. 2. Pilar Sosial: Dibangun dari tiga subsektor yaitu: (1) Ketenagakerjaan, (2) Kesehatan, (3) R&D dan Pendidikan 3. Pilar Lingkungan: Mencakup dua subsektor yaitu: (1) Kualitas sumber daya dan konservasi laut dan (2) Energi terbarukan Komponen-komponen ini diolah menggunakan multi- stages PCA untuk menghasilkan skor Indeks Ekonomi Biru Indonesia, yang berkisar dari 0 hingga 100. Perhitungan IBEI dilakukan di dua tingkat wilayah, yaitu ditingkat nasional dan di tingkat provinsi. Hasil perhitungan PCA terbagi menjadi dua bagian penting, sebagai berikut: 1. Bobot – Menentukan peran dari masing-masing pilar dalam pembentukan indeks. Semakin tinggi bobot, semakin besar pula peran pilar tersebut dalam nilai index. 2. Skor – Merupakan hasil perkalian antara bobot dengan kinerja masing-masing indikator. Skor pada tingkat provinsi menentukan posisi masing-masing provinsi dalam kuadran IBEI.
Interpretasi	Secara umum, IBEI yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam mengelola sumber daya lautnya dengan baik sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi dan pemberdayaan manusia tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan hidup.
Sumber Data	Kementerian PPN/Bappenas; Provinsi Riau
Frekuensi	Tahunan

3.Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Metode Perhitungan	<i>Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan</i> $= \frac{\text{Nilai sektor Industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kota Dumai}} \times 100$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan
Contoh	<i>Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan 2023</i> $= \frac{\text{Nilai sektor Industri pengolahan}_{2023}}{\text{Nilai PDRB Kota Dumai}_{2023}} \times 100$ $= \frac{30.032.693}{49.034.286} \times 100$ $= 61,25\%$

Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

1. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

2. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Penghitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1})(Y_i + Y_{i-1})$ dimana: p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Tahunan
Tahun 2025	Rilis data dari BPS Kota Dumai

3. Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi(%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi (%)
Definisi	Kontribusi PDRB Provinsi adalah share PDRB Provinsi terhadap PDB Nasional.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB} = \frac{\text{Nilai PDRB ADHB Kota Dumai}}{\text{Nilai PDRB ADHB Provinsi Riau}} \times 100$
Interpretasi	Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antar wilayah yang saat ini masih didominasi KBI. Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Riau
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan
Perhitungan	Kontribusi <i>PDRB</i> Kota Dumai terhadap provinsi Riau tahun 2023 $= \frac{\text{Nilai PDRB ADHB Kota Dumai}_{2023}}{\text{Nilai PDRB ADHB Provinsi Riau}_{2023}} \times 100\%$ $= \frac{49.034.286}{1.026.468.040} \times 100\%$

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap Provinsi (%)
	= 4,78%

Meningkatnya Peran Kepemimpinan Daerah untuk mencapai Visi Daerah

1. Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Definisi	Instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.
Rumus Perhitungan	$Skori_{i,d}=(Ni_{i,d}-NRiNTi-NRi)\times 5,$ Dimana: Skor id adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; Nid adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d Nri adalah nilai terendah untuk indikator ke-i;dan Nti adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i Hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95).
Interpretasi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan dan kondisi suatu daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. IDSD dapat diartikan sebagai refleksi tingkat kemajuan, kemandirian, produktivitas, dan persaingan suatu daerah. IDSD dapat digunakan sebagai alat ukur atau potret keberhasilan pembangunan daerah secara luas. Tujuannya adalah untuk mendorong kemandirian dan penguatan daya saing daerah dalam mencapai target pembangunan. Aspek-aspek daya saing daerah yang diukur melalui IDSD, antara lain: Kemampuan ekonomi daerah, Fasilitas wilayah atau infrastruktur, Iklim berinvestasi, Sumber daya manusia.
Sumber Data	BRIN
Frekuensi	Tahunan

Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Indeks Modal Manusia

Nama Indikator	Indeks Modal Manusia
Definisi	Indeks Modal Manusia menghitung kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Skor indeks akhir berkisar dari 0 hingga 1 dan mengukur produktivitas sebagai pekerja masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Indeks Modal Manusia adalah pendekatan yang dilakukan oleh World Bank (<i>Human Capital Index</i>).
Rumus Perhitungan	Indeks modal manusia diukur melalui beberapa komponen utama: Probabilitas bertahan hidup (<i>survival</i>) hingga usia 5 tahun: Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita. Pendidikan: Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui <i>harmonized test scores</i>. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran <i>Learning-Adjusted Years of Schooling</i> menggunakan metrik konversi. Kesehatan: Mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat karena malnutrisi kronis. 2 proksi yang digunakan adalah (1) <i>adult survival rate</i> yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan (2) prevalensi <i>stunting</i>. Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor Indeks Modal Manusia, yang berkisar dari 0 hingga 1. Skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Komponen-komponen tersebut dapat dihitung dengan pendekatan

Nama Indikator	Indeks Modal Manusia
	sebagai berikut: 1. <i>Survival</i> dihitung dari angka kematian balita (SUPAS dan LF SP) 2. Pendidikan: Akses pendidikan tetap diukur melalui harapan lama sekolah, namun untuk kualitas pendidikan, <i>harmonized test scores</i> diukur melalui proksi hasil asesmen pendidikan yang dilaksanakan di tingkat nasional dan daerah. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran <i>Learning-Adjusted Years of Schooling</i> menggunakan metrik konversi. 3. Kesehatan dihitung dari data <i>adult survival rate</i> (SUPAS dan LF SP) yang diagregasi pada usia 15-60 dan prevalensi <i>stunting</i> (SSGI dan SKI) 4. Konversi ketiga komponen menjadi Indeks Modal Manusia dilakukan menggunakan pendekatan yang dilakukan World Bank. 5. Catatan: Perlu peninjauan dengan Worldbank, Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan pakar statistik membahas metode perhitungan Indeks Modal Manusia di tingkat nasional dan daerah.
Interpretasi	Secara umum, IMM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu wilayah telah berhasil dalam memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang baik kepada penduduknya, yang pada gilirannya akan mendukung produktivitas tenaga kerja di masa depan.
Sumber Data	SUPAS, SP, SSGI, SKI, BPS, AN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	SSGI: tahunan SKI: 5 tahunan SUPAS dan SP: 10 tahunan Badan Pusat Statistik: tahunan AN Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: tahunan
Contoh	IMM 2023: Indeks Kesehatan = 0,82 Kesehatan Dewasa dan Status Gizi = 95,53 Kualitas Pendidikan = 0,691496 $HCI_{2023} = \text{Indeks Kesehatan} \times \text{Kualitas Pendidikan} \times \text{Kesehatan Dewasa dan Status Gizi}$ $= 0,82 \times 95,53 \times 0,691496$ $= 0,54$

2. Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya atau denga kata lain mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah dalam tiga dimensi pembangunan yaitu lamanya hidup, pengetahuan/tingkat Pendidikan dan standard hidup layak
Rumus Perhitungan	$\sqrt[3]{I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pengeluaran}} \times 100$ $I_{\text{pendidikan}} = \frac{I \text{ HLS} + I \text{ RLS}}{2}$ <i>HLS</i> : harapan lama sekolah , <i>RLS</i> : rata-rata lama sekolah $I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS \text{ min}}{HLS \text{ maks} - HLS \text{ min}}$ $I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS \text{ min}}{RLS \text{ maks} - RLS \text{ min}}$ $I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH \text{ min}}{AHH \text{ maks} - AHH \text{ min}}$ <i>AHH</i> : Angka Harapan Hidup $I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$ Pengeluaran : Pengeluaran perkapita yang disesuaikan

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Interpretasi	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik
Sumber Data	BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission

1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)

Nama Indikator	Penurunan intensitas emisi GRK (%)
Definisi	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.
Rumus Perhitungan	Intensitas emisi GRK (ton CO₂e/2010 IDR) IE_t = TE_t / PDRB_t IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO₂e/2010 IDR miliar) TE_t = Total tingkat emisi GRK pada tahun t (ton CO₂e) PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto tahun t (2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan Penurunan intensitas emisi GRK (%) %IE_t = (IE_t - IE_{Bt}) / IE_{Bt} %IE_t = Persentase intensitas emisi GRK pada tahun t IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO₂e/2010 IDR miliar) IE_{Bt} = Intensitas emisi GRK baseline tahun t (ton CO₂e/2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan
Interpretasi	Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) berarti penurunan besaran emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu
Sumber Data	1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Produk Domestik Regional Bruto (Harga Konstan 2010): BPS. 3. Provinsi Riau
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu
Rumus Perhitungan	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL) IKLH terdiri dari tiga indikator utama, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup																		
	Perhitungan IKLH di tingkat kabupaten/kota berbeda dengan di tingkat provinsi atau nasional. Pada tingkat kabupaten/kota, kontribusi indeks kualitas air laut tidak dimasukkan ke dalam IKLH																		
Interpretasi	IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. IKLH digunakan untuk memberikan gambaran umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup																		
	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup																		
	<table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr><tr><td>1</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></table>	Nomor	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2	Baik	$70 \leq x < 90$	3	Sedang	$50 \leq x < 70$	4	Kurang	$25 \leq x < 50$	5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
	Nomor	Kategori	Angka Rentang																
	1	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																
	2	Baik	$70 \leq x < 90$																
	3	Sedang	$50 \leq x < 70$																
	4	Kurang	$25 \leq x < 50$																
5	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																	
Sumber Data	Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
Frekuensi	Tahunan																		

METADATA INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN

Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Dumai yang Sehat, Berkualitas dan Sejahtera Melalui Transformasi Sosial

Arah Pembangunan : Kesehatan untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i>
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan; BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

2. Kesehatan ibu dan anak
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = (JKI/JLH) \times 100.000$ Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

2a. Jumlah Kelahiran Hidup

Nama Indikator	Jumlah Kelahiran Hidup
Definisi	Jumlah bayi yang lahir dan menunjukkan tanda-tanda kehidupan
Rumus Perhitungan	Jumlah Kelahiran Hidup = L/P x 1.000 L = jumlah kelahiran bayi yang lahir pada tahun tertentu, P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun, K = konstanta (1.000)
Interpretasi	Jumlah kelahiran hidup dapat diinterpretasikan melalui angka kelahiran kasar (CBR) yang menunjukkan jumlah kelahiran hidup per 1.000 orang dalam satu tahun. Angka kelahiran yang tinggi pada suatu wilayah dapat diartikan jika angka kelahirannya lebih dari 30 per tahun
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

2b. Jumlah Kematian Ibu Absolut

Nama Indikator	Jumlah Kematian Ibu Absolut
Definisi	Banyaknya peristiwa kematian demografi yang terjadi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu = Σ kematian ibu pada saat nifas pada tahun tertentu
Interpretasi	Kematian ibu menurut WHO adalah kematian yang terjadi selama kehamilan atau dalam 42 hari setelah persalinan. Kematian ini disebabkan oleh semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cidera

Nama Indikator	Jumlah Kematian Ibu Absolut
Sumber Data	Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Nama Indikator	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (<i>Z-score</i>) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: <i>Zscore</i> < -3,0 b. Pendek: <i>Zscore</i> ≥ -3,0 s/d <i>Zscore</i> < -2,0
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P_{stunting} = \frac{JAB(5)P_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) P : Prevalensi anak balita yang <i>stunting</i> JAB(5) <i>P stunting</i> : Jumlah anak balita pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP_{stunting} = \frac{JAB(5)SP_{stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan PAB(5) : Prevalensi anak balita yang menderit sangat pendek (<i>stunting</i>) JAB(5) <i>SP stunting</i> : Jumlah anak balita sangat pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi <i>stunting</i> = PAB(5) P + PAB(5) SP
Interpretasi	Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: Kekurangan Gizi: <i>Stunting</i> adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kemiskinan: <i>Stunting</i> sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan <i>stunting</i>. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi <i>stunting</i>. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi <i>stunting</i>.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

4. Penanganan Tuberkulosis:
4a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

4b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

5. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $\text{Persentase Cakupan Kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah Peserta JKN}}{\text{Jumlah Penduduk Kota Dumai}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: - Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. - Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. - Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
	kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS Dinas Kesehatan Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

Arah Pembangunan: Pendidikan Berkualitas yang Merata

6. Hasil Pembelajaran

6a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional:

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca ii) Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Interpretasi	Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

6b. Rata-Rata lama sekolah penduduk Umur di atas 15 tahun (tahun)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 tahun;

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
	b. SD = 6 tahun; c. SMP = 9 tahun; d. SMA = 12 tahun; e. D1/D2 = 14 tahun; f. D3 = 15 tahun; g. D4 = 16 tahun; h. S1 = 17 tahun; i. S2 = 19 tahun; j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX.
Sumber Data	BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

6c. Harapan Lama Sekolah (tahun)

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

7. Proporsi Penduduk BerUmur 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
Definisi	- Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. - Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). - Jenjang pendidikan tinggi mencakup: - Diploma I-IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3
Rumus Perhitungan	<i>Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi:</i> $\frac{\text{Jumlah penduduk 15 thn ke atas yang lulus atau berijazah pendidikan t}}{\text{Jumlah Penduduk 15 thn ke atas di Kota Dumai}}$

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
Interpretasi	Positif Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan
Contoh Tahun 2023	Penduduk Berijazah Diploma I/II/III/Akademi = 7.829 Penduduk Berijazah Universitas = 18.013 Total Penduduk berijazah pendidikan tinggi 2023 = 25.842 Jumlah penduduk 15tahun ke atas = 156.790 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi 2023: = $\frac{\text{Jumlah penduduk 15 thn ke atas yang lulus atau berijazah pendidikan tinggi Kota Dumai}}{\text{Jumlah Penduduk 15 thn ke atas di Kota Dumai}_{2023}}$ $= \frac{25.842}{156.790} \times 100\%$ = 16%

Arah Pembangunan: Perlindungan Sosial yang Adaptif

8. Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ $\alpha = 0$ z = garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Dumai (%)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Rumus Penghitungan	<i>Cakupan Jamsos Naker</i> $\frac{\text{Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{Jumlah Semesta Penduduk Bekerja}} \times 100$ Dimana: <i>Peserta</i>= Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah <i>Semesta penduduk bekerja</i> = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.

10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\%PD\ formal = \frac{\Sigma PD\ formal}{\Sigma AKPD} \times 100\%$ Keterangan: PD formal : Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal AKPD : Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/ karyawan/ pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai; Dinas Sosial Kota Dumai; Provinsi Riau

Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Kota Dumai yang Maju Melalui Transformasi Ekonomi

Arah Pembangunan: Produktifitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Metode Perhitungan	<i>Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan</i> $= \frac{\text{Nilai sektor Industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kota Dumai}} \times 100$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan
Contoh	<i>Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan 2023</i> $= \frac{\text{Nilai sektor Industri pengolahan}_{2023}}{\text{Nilai PDRB Kota Dumai}_{2023}} \times 100$ $= \frac{30.032.693}{49.034.286} \times 100$ $= 61,25\%$

2. Pengembangan Pariwisata

2a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Metode Perhitungan	Rasio PDRB Penyediaan Akmamin $\frac{\text{Nilai tambah penyediaan akmamin}}{\text{Nilai PDRB Kota Dumai}} \times 100$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, <i>ceteris paribus</i> . Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan
Contoh	Rasio PDRB Penyediaan Akmamin: $= \frac{\text{Nilai tambah penyediaan akmamin}_{2023}}{\text{Nilai PDRB Kota Dumai}_{2023}} \times 100$ $= \frac{360,64}{49.034,29}$ $= 0,73\%$

2b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)*

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah tertentu.

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)
Metode Perhitungan	<i>Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara</i>
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional.
Sumber Data	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

3.Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Metode Perhitungan	$\frac{\sum PDRB\ 17\ Subsektor\ Ekonomi\ Kreatif\ Regional}{PDRB} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik daerah
Frekuensi	Tahunan
Contoh	PDRB AKMAMIN 2023 = 360,64 (Rp Milyar) PDRB INFOKOM 2023 = 529,34 (Rp Milyar) PDRB ADHB KOTA DUMAI 2023 = 49.034,29 (Rp Milyar) $= \frac{PDRB\ Akmamin\ 2023 + PDRB\ Infokom\ 2023}{PDRB\ ADHB\ Kota\ Dumai\ 2023} \times 100\%$ $= \frac{360,64+529,34}{529,34} \times 100\%$ $= 1,82\%$

4. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:

4a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Kota Dumai (%)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$Proporsi\ UKM = \frac{Jumlah\ Unit\ Usaha\ Kecil\ dan\ Menengah\ Non\ Pertanian}{Total\ Jumlah\ Unit\ Usaha} \times 100\%$

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

4 b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi Kota Dumai (%)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Proporsi IKM : Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}} \times 100\%$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

4 c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Rumus Rasio Kewirausahaan Daerah Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total Angkatan Kerja Daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

4d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah ¹ . Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
	tahun.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB}}{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	- Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Dumai - Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

5.Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik

5a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan: <i>TPT</i> = Tingkat pengangguran terbuka (%) <i>PP</i> = Jumlah pengangguran (orang) <i>PAK</i> =Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

5b. Proporsi Penciptaan lapangan kerja Formal

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Definisi	Penciptaan Lapangan Kerja Formal diukur melalui persentase tenaga kerja formal terhadap total tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai pekerja formal jika memenuhi salah satu kriteria berikut: Pekerja dengan Status Berusaha Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap, atau Berusaha Dibantu Buruh Tetap yang Dibayar (status1/2/3): - Memiliki pembukuan lengkap (laba/rugi; neraca keuangan) Pekerja dengan Status Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja Bebas di Sektor Pertanian, atau Pekerja Bebas Nonpertanian (status 4/5/6): - Menerima jaminan sosial dari pemberi kerja, atau - Memperoleh cuti tahunan tanpa pemotongan gaji pokok dan cuti sakit tanpa pemotongan gaji pokok, atau - Memiliki perjanjian/kontrak kerja PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
Rumus Perhitungan	$PPLKF = \left(\frac{\Sigma Tenaga Kerja Formal}{\Sigma Tenaga Kerja} \right) \times 100\%$ Keterangan: $PPLKF$ = Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) $\Sigma Tenaga Kerja Formal$ = Jumlah Tenaga Kerja yang memenuhi kriteria tenaga kerja formal $\Sigma Tenaga Kerja$ = Total Tenaga Kerja
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja. Pekerjaan formal memberikan pekerja jaminan terhadap pendapatan dan kestabilan kerja serta manfaat lain seperti jaminan kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, cuti, dan pensiun. Semakin tinggi nilai persentasenya, semakin mencerminkan perkembangan positif dalam pasar kerja karena dapat mendukung kemajuan sosial dan ekonomi di suatu negara.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Satu kali per tahun (Agustus)

6.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P_{(15+,p)}} \times 100\%$ Keterangan: $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P_{(15+,p)}$ =Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial. TPAK perempuan : - Dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas individu dan rumah tangga, serta pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. - dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pengeluaran per kapita sebulan, tenaga kerja perempuan asal kota, dan PDRB. - dapat dipengaruhi oleh permasalahan jam kerja yang panjang dan tugas pengasuhan yang ekstensif. - dapat dipengaruhi oleh kurangnya layanan pengasuhan anak yang terjangkau dan dapat diandalkan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

7.Indeks Kapabilitas Inovasi

Nama Indikator	Indeks Kapabilitas Inovasi
Definisi	Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Kapabilitas inovasi merupakan Akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru.
Rumus Perhitungan	Kapabilitas Inovasi melibatkan banyak aspek manajemen seperti, Keanekaragaman tenaga kerja; Pengembangan kluster; Publikasi ilmiah; Aplikasi kekayaan intelektual (KI); Belanja riset; Indeks keunggulan lembaga riset; Aplikasi merk dagang
Interpretasi	menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru.
Sumber Data	BPS; Kementerian Perindustrian; Dinas Perdagangan; Kemenkum HAM; Kementerian Pertanian; Kementerian Dalam Negeri; Kemendikbudristek; BRIN
Frekuensi	Tahunan

8.Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah. IID merupakan bagian dari program Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Rumus Perhitungan	$IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$ Skor Total Maksimum diperoleh dari penjumlahan Skor Maksimal Indikator Satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Maksimal Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). Skor Total Maksimum adalah 250. Skala IID adalah 0 s.d. 100. Dengan proporsi aspek sebagai berikut: - Aspek Satuan Pemerintahan Daerah (25,20%), terdiri dari: 1) 3 Variabel; 2) 15 Indikator; dan 3) Jumlah Skor Maksimal SPD senilai 63 (25,20%). - Aspek Satuan Inovasi Daerah (74,80%), terdiri dari: 1) 5 Variabel; 2) 21 Indikator (20 indikator SID senilai 111 atau 44,40% dan 1 indikator Jumlah Inovasi apabila maks. senilai 76 atau 30,40%); dan 3) Jumlah Skor Maksimal SID senilai 187 (74,80%).
Interpretasi	himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruaran didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatanya
Sumber Data	Kemendagri
Frekuensi	Tahunan

9.Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau:

9a. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)

Nama Indikator	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)
Definisi	- Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru (PP No 79 tahun 2014). - Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) provinsi adalah persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (\%)} = \frac{\text{Jumlah Konsumsi EBT Kota Dumai}}{\text{Total Energi Primer Kota Dumai}}$
Interpretasi	Besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total primer
Sumber Data	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Provinsi Riau

Nama Indikator	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)
Frekuensi	Tahunan

Arah Pembangunan: Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
10. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah

Nama Indikator	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi
Definisi	Disparitas Harga pada Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di antara Kabupaten/Kota di dalam Satu Provinsi
Rumus Perhitungan	$KVH\ (bapokting1) = \frac{(simpangan\ baku)}{(rata-rata)}$ $antarkab/kota\ pada\ bapokting1$ $KVH\ antarwilayah = rata-rata\ KVH\ seluruh\ bapokting$ Formulasi Akhir : $KVH\ antarwilayah = \frac{(KVH(barang\ 1) + KVH\ (barang2) + KVH\ (barang_n))}{jumlah\ bapokting}$
Interpretasi	Korelasi terhadap Biaya Logistik Nasional (%) Semakin rendah KVH antarwilayah di Tingkat Provinsi menunjukkan bahwa tingkat harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di antara Kabupaten/Kota pada satu Provinsi semakin konvergen. Hal ini menjadi salah satu dampak langsung dari perbaikan kinerja logistik di masing-masing provinsi.
Sumber Data	Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota Kementerian Perdagangan, melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP)
Frekuensi	Tahunan

11. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi
Rumus Perhitungan	$Pembentukan\ PMTB\ (\%PDRB) = \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ Keterangan: Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) $PDRB\ ADHK$ = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (financial leasing), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (financial leasing). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

12. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun. Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan <i>share</i> ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi.
Rumus Perhitungan	<i>Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) :</i> $\frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100\%$ Keterangan: Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah) PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Arah Pembangunan : Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi dari Pusat Kota hingga ke Kelurahan

13. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
Definisi	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
	pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2$ m² 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT \times 100}$ • PHLTB: Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRTHLTB: jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRT: Jumlah rumah tangga 2. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB \text{ (proksi)} = \frac{JRTHLTB(\text{proksi})}{JRT \times 100}$ • PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; • JRT: Jumlah rumah tangga • Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran.
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/ Kota)
Frekuensi	Tahunan

Miai 3 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Transformasi Tata Kelola

Arah Pembangunan : Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum																												
Rumus Perhitungan	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%. c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reuiu, dengan bobot 35%. d. Penataan <i>database</i> PUU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:																												
	<table><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table>	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	1	AA	>90 - 100	Istimewa	2	A	>80 - 90	Sangat Baik	3	BB	>70 - 80	Baik	4	B	>60 - 70	Cukup Baik	6	C	>30 - 50	Buruk	7	D	0 - 30	Sangat Buruk
	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat																									
	1	AA	>90 - 100	Istimewa																									
	2	A	>80 - 90	Sangat Baik																									
	3	BB	>70 - 80	Baik																									
	4	B	>60 - 70	Cukup Baik																									
	6	C	>30 - 50	Buruk																									
7	D	0 - 30	Sangat Buruk																										
Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.																													
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM																												
Frekuensi	Tahunan																												

2. Indeks SPBE

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut: $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Integritas

Nama Indikator	Indeks Integritas (Persentase)
Definisi	Indeks Integritas adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD).

Nama Indikator	Indeks Integritas (Persentase)
Rumus Perhitungan	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) – Faktor Koreksi (0,2)
Interpretasi	Hasil dari Indeks Integritas dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris.
Sumber Data	Inspektorat
Frekuensi	Tahunan

Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata Dan Berkeadilan

Arah Pembangunan : Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	- Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. - PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. - Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$RPDRB_t = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Daerah_t}{PDRB_t} \times 100$ Keterangan: RPDRBt: Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD); Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

2. Tingkat Inflasi (%)

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (%)
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan <i>the Classification of Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (%)
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat menjadi tiga: 1. Inflasi <i>m-t-m</i> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). 2. Inflasi <i>y-t-d</i> membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 3. Inflasi <i>y-o-y</i> membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi <i>year-on-year</i> September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (catatan: Hingga saat ini BPS tidak me-release data inflasi tingkat Provinsi, melainkan inflasi tingkat Kabupaten/Kota IHK. Sehingga perlu mendorong BPS untuk dapat mempublikasi tingkat inflasi di tingkat Provinsi)
Frekuensi	Tahunan

3. Indeks Daya Saing Daerah (gak ada di metadatanya, gak ada ide untuk mengarangnya karna indikator baru)

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Definisi	IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah
Rumus Perhitungan	$Skor_{i,d} = (N_{i,d} - NR_i / NT_i - NR_i) \times 5$, dimana: <i>Skor_{i,d}</i> adalah skor kemajuan dari daerah ke-d untuk indikator ke-i; <i>N_{i,d}</i> adalah nilai data indikator ke-I untuk daerah ke-d <i>NR_i</i> adalah nilai terendah untuk indikator ke-i; <i>NT_i</i> adalah nilai terbaik untuk indikator ke-i, hal ini tergantung pada indikatornya (berdasarkan peraturan, kebijakan, atau persentil ke-90 atau 95)
Interpretasi	IDSD 2023 diharapkan menjadi data dasar dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan terkait daya saing daerah di Indonesia yang digambarkan melalui empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing terdiri dari 48 indikator untuk kabupaten/kota
Sumber Data	BRIN
Frekuensi	Tahunan

Arah Pembangunan : Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif

4. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	$HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L} \right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesenjangan Gender $Indeks\ Kesenjangan\ Gender = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Keterangan: G_p = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan MHPK20 = Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_p = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_p = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_p$ = Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM(G_p, G_L)$ = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik IKR = Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP = Indeks dimensi pemberdayaan IPK = Indeks dimensi pasar tenaga kerja $G_{p,L}$ = Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik IKG = Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

Arah Pembangunan : Lingkungan Hidup yang Berkualitas

5. Kualitas Lingkungan Hidup
5a. Indeks kualitas lingkungan hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Rumus Perhitungan	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL) IKLH terdiri dari tiga indikator utama, yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perhitungan IKLH di tingkat kabupaten/kota berbeda dengan di tingkat provinsi atau nasional. Pada tingkat kabupaten/kota, kontribusi indeks kualitas air laut tidak dimasukkan ke dalam IKLH		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
	Nomor	Kategori	Angka Rentang
	1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
	2	Baik	70 ≤ x < 90
	3	Sedang	50 ≤ x < 70
	4	Kurang	25 ≤ x < 50
	5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun; KLHS		

5b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$PSA = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah aangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari Masyarakat
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR 3. Dinas PU Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

5c. Pengelolaan Sampah:

- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	
Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	Timbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; - Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, <i>vermi composting</i>, <i>biodigester</i>, dsb. - Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari <i>waste recovery</i> sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (<i>recovery</i>) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah. Diasumsikan bahwa semua sampah yang telah dikumpulkan akan langsung diolah.
Rumus Perhitungan	Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah: Cara (1) $SO = ST - MFPA + RDP$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) ST : Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Cara (2) $SO = MFPD + DPA - RPD$ Keterangan: SO : Sampah terolah (ton/hari) MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan- daur ulang sampah (ton/hari) DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
	$TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (kg/hari) TP : Total populasi (orang) TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut. $TS = 70\% \text{ dari rumah tangga} + 30\% \text{ dari non - rumah tangga}$ $TS = \frac{TSRT}{70\%}$ Keterangan: TS : Timbulan sampah (ton/hari) TS : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) RT Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah $\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Provinsi.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan 3. SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan

- **Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) RT**

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
	Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda. Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan: Persentase Rumah tangga Cara Perhitungan: $PRTL P = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ Keterangan: PRTL A : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber: - Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 - Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional, 2023

Arah Pembangunan: Berketahanan air, energi dan kemandirian pangan

6. Ketahanan Energi, Air dan Pangan

6a. Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Rumus Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln + KLnnonpln}{P}$ Keterangan: KLpk: Konsumsi listrik per kapita KLPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN KLNONPLN: Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN P: Jumlah penduduk Catatan:

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
	- Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; - Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi	Tahunan

7. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Definisi	- Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. - Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) \, dx$ Keterangan: PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal. MDER : Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (Minimum Dietary Energy Requirement). f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik; Provinsi Riau
Frekuensi	Tahunan

8. Ketahanan Air

8a. Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya
Interpretasi	-

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m³/detik)
Sumber Data	1. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 2. Dinas PU Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

8b. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Layak Perpipaan(%)

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di dalam rumah (<i>on premises</i>); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \times 100\%$ • PASMPP: Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRTASMPP: Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. • JRT: Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	1. Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
Frekuensi	Tahunan

Arah Pembangunan : Resliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

9. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana

Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 - 144 adalah Sedang • Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB; BPBP Kota Dumai
Frekuensi	Tahunan

10.Penurunan Intensitas Emisi GRK

Nama Indikator	Penurunan intensitas emisi GRK (%)
Definisi	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.
Rumus Perhitungan	Intensitas emisi GRK (ton CO2e/2010 IDR) IEt = TEt / PDRBt IEt = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) TEt = Total tingkat emisi GRK pada tahun t (ton CO2e) PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto tahun t (2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan Penurunan intensitas emisi GRK (%) %IEt = (IEt - IEBt) / IEBt %IEt = Persentase intensitas emisi GRK pada tahun t IEt = Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) IEBt = Intensitas emisi GRK baseline tahun t (ton CO2e/2010 IDR miliar) t = titik tahun perhitungan
Interpretasi	Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) berarti penurunan besaran emisi GRK yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu
Sumber Data	1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Produk Domestik Regional Bruto (Harga Konstan 2010): BPS. 3. Provinsi Riau
Frekuensi	Tahunan

11.Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)

Nama Indikator	Penurunan emisi GRK Tahunan (%)
Definisi	Penurunan Emisi gas rumah kaca (GRK) adalah adalah usaha pemerintah menurunkan gas-gas yang dapat meningkatkan efek rumah kaca di atmosfer bumi dan berkontribusi pada perubahan iklim global. Efek rumah kaca adalah proses di mana gas-gas ini menahan panas di atmosfer, sehingga mempengaruhi suhu permukaan bumi.
Rumus Perhitungan	Emisi GRK = Data aktfitas x Faktor Emisi CO2 = Activity unit x (CO2/Activity Unit) • <i>Activity unit</i> (atau Data Aktivitas) adalah besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu. Misalnya: penanaman pohon 1 juta ha/ tahun

Nama Indikator	Penurunan emisi GRK Tahunan (%)
	Faktor Emisi adalah rata-rata emisi GRK suatu sumber emisi relatif terhadap unit kegiatan pada sumber emisi yang sama. Misalnya: faktor emisi hutan lahan kering primer adalah 132,99 ton C/ha
Interpretasi	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim bagi kehidupan
Sumber Data	- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas; - Produk Domestik Regional Bruto (Harga Konstan 2010): BPS. - Provinsi Riau
Frekuensi	Tahunan